

kk
kb.2

10.04/10

loc

f

DISERTASI

FRAGMENTASI DAN KELEMAHAN GERAKAN BURUH DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



AF. SIGIT ROCHADI

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

**FRAGMENTASI DAN KELEMAHAN GERAKAN
BURUH DI INDONESIA PASCA ORDE BARU**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2009
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**AF. SIGIT ROCHADI
NIM. 090114531 D**

Telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)
Tanggal: 17 April 2009

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. L. Dyson, MA
Anggota : 1. Prof. Dr. M. Mohtar Mas' oed, MA
2. Prof. Dr. Hotman M. Siahaan
3. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
4. Prof. Dr. Mustain Mas'ud, M.Si
5. Dr. Daniel Theodore Sparringa, MA
6. Dr. Subagyo Adam

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor: 725/H3/KR/2009
Tanggal: 28 April 2009

Lembar Pengesahan

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal

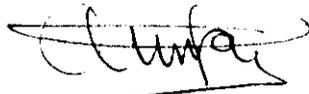
Oleh

Promotor,



Prof. Mohammad Mohtar Mas'ood, Ph.D
NIP 130530764

Ko Promotor



Prof. Dr. Hotman M. Siahaan
NIP 130701134

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan atas karuniaNya dan petolonganNya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Menulis disertasi merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan dan keseriusan dalam berpikir dan penelitian. Dalam bentuknya yang sangat kasar, disertasi ini telah selesai ditulis tahun 2005. Tetapi belum mempunyai fokus dan temuan yang memadai untuk diangkat sebagai disertasi. Mengingat suatu disertasi menuntut adanya kompetisi teori-teori dan temuan teoritik, maka diperlukan waktu yang lebih banyak untuk memperdalam penelitian dan perenungan hingga syarat demikian dapat dipenuhi. Membagi waktu di tengah padatnya pekerjaan administrasi dan penelitian lain, ternyata sangat sulit. Persoalan inilah yang menyebabkan penyelesaian disertasi ini memakan waktu lebih dari yang ditargetkan.

Meneliti gerakan buruh ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sebagai akademisi yang cukup banyak meneliti masyarakat akar rumput termasuk buruh itu sendiri, peneliti berangkat dari rasa percaya diri untuk bisa segera beradaptasi dan memahami kehidupan buruh dan gerakan buruh. Apalagi banyak pimpinan gerakan buruh dan aktivis buruh yang telah dikenal baik oleh peneliti sejak awal tahun 1990-an. Ternyata hal tersebut bukan jaminan untuk memahami gerakan buruh. Diperlukan kerja keras mondar mandir antara pabrik, lokasi aksi, kantor-kantor serikat buruh dan perkumpulan-perkumpulan bawah tanah para aktivis. Masuknya para aktivis muda dalam gerakan buruh memberi bantuan tidak kecil dalam menjelaskan sejarah dan kiprah gerakan yang digelutinya. Bergaul dengan mereka merupakan pengalaman langka dan sangat bermanfaat. Mobilitas mereka dari satu tempat (markas), pabrik, jalanan tempat demonstrasi dan kantor-kantor pemerintah serta keuletan mereka dalam negosiasi, telah memberi pengalaman berharga kepada peneliti. Demikian pula pergaulan yang tanpa jarak mulai dari makan apa adanya di jalanan sampai tidur di tempat-tempat sempit bersama-sama, telah turut memperkuat mental dan menambah pengetahuan berharga kepada peneliti.

Oleh sebab itu, jika karya ini bisa diselesaikan, maka orang yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih pertama-tama adalah para aktivis buruh dan para buruh itu sendiri yang telah membagi pengetahuannya kepada peneliti. Orang yang sangat berjasa dan layak mendapat penghormatan dalam penelitian ini adalah Prof. Dr. M. Mohtar Mas'oe'd yang telah berkenan menjadi Promotor. Dengan caranya yang khas di tengah kesibukannya sebagai Dekan FISIPOL UGM, beliau terus memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan studi. Kesabaran dan kepercayaannya yang selalu diberikan kepada para bimbingannya, telah membantu penyelesaian disertasi ini. Prof. Dr. Hotman M. Siahaan yang dikenal sebagai ahli gerakan sosial telah berkenan menjadi Ko-Promotor. Di tengah kepadatan kerja sebagai Dekan FISIP UNAIR dan Ketua Program Studi Ilmu Sosial S3 UNAIR, beliau masih membagi waktu untuk memeriksa pekerjaan penulis. Oleh beberapa mahasiswanya, Pak Hotman dicitrakan sebagai keras dan tanpa kompromi. Namun beliau memiliki kelembutan dan kepedulian yang tinggi kepada para mahasiswa bimbingannya. Pak Hotman memang bukan orang yang mudah puas dengan kerja bimbingannya. Kepada beliau berdua, penulis berhutang budi besar dan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus. Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Prof. Dr. L. Dyson, MA yang tidak henti-hentinya mendorong saya untuk segera menyelesaikan studi. Kemudahannya berkomunikasi dengan para mahasiswanya, banyak membantu para mahasiswanya dalam menyelesaikan studi.

Kepada para dosen yang telah membentuk dan mewarnai pemikiran penulis, tidak cukup hanya disampaikan ucapan terima kasih. Penulis berhutang budi kepada Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Prof. Sutandyo Wignyosubroto, MPA, Prof. Dr. L. Dyson, Prof. Dr. Nasikun, Prof. Dr. Glinka, Daniel Sparringa, Ph.D dan Dr. Dede Oetomo, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan arahan terhadap fokus penelitian melalui diskusi-diskusi yang sangat berharga. Terima kasih saya sampaikan kepada para dosen MKPD: Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Prof (Ris) Dr. Hermawan Sulistyio (Mas Kiki) dan Prof. Dr. Susetiawan atas diskusi-diskusi yang sangat berharga dan bermanfaat dalam pengembangan intelektual penulis. Oleh para

ilmuwan ini pengetahuan penulis mengenai ekonomi politik, gerakan sosial dan hubungan industrial bertambah luas dan dalam.

Kesempatan dan biaya merupakan kekuatan utama dalam studi. Penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan program doktoral tanpa dukungan dari pimpinan Universitas Nasional tempat di mana penulis mengabdikan diri. Untuk itu penulis memberi tempat khusus kepada Prof. Drs. Umar Basalim, DES Rektor Universitas Nasional atas ijin dan bantuan biaya yang diberikan dalam studi ini. Juga kepada para Wakil Rektor Prof. Dr. Ngadino Surip, Drs. El Amry Bermawi Putera, MA, Drs. Eko Sugiyanto, M.Si dan Drs. Umar Said, M.Si atas semua bantuan yang diberikan selama penulis studi S3. Rekan-rekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAS, utamanya Drs. Hasto Atmojo (Dekan FISIP UNAS), Suhanto, M.Si, Sigit Pranawa, M.Si, Drs. Husien Oh, Jusuf Suwaji, MA, Khairul Fuad, MA, Prof. Dr. LP Sinambela, Adi Prakosa, M.Si, Drs. Dodi Triwidodo, Budi Kusuma, M.Si, Reuspatyono, M.Si, Dedi Irawan, M.Si, Rusman Gazali, M.Si, Syarief Nur Bienardi, MM, Yayu Sriwartini, M.Si, Dwi Kartikawati, M.Si, Nursatyo, Zulkarnain, M.Si, Yumetri Abidin, M.Si, Dr. Firdaus Syam, Dr. Muhammad Noer, Hari Zamharir, M.Si, Asran Jalal, M.Si, Dr. TB Massa, Syaipudin, M.Si, Syahrudin SIP MA, Aos Y. Firdaus, M.Si dan rekan-rekan di Sekretariat FISIP UNAS, terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan atas semua bantuannya selama penulis studi di Universitas Airlangga. Toleransi kawan-kawan ini sangat tinggi dan memberi andil yang tidak kecil dalam studi saya. Kepada Ratnasari yang dengan susah payah membaca tulisan saya dan membantu pengetikan, saya ucapkan terima kasih yang tulus atas kerja kerasnya. Tidak mungkin saya bisa melupakan pertanyaan-pertanyaan memotivasi dari Ketua YMIK Prof. Ibrahim Abdullah, MA, “sudah sampai bab berapa?”, “tidak biasanya *you* lambat seperti ini, ada apa?” dalam proses penulisan disertasi ini. Oleh sebab itu saya sampaikan hormat dan terima kasih yang tulus atas motivasinya. Demikian pula, terima kasih saya sampaikan kepada Drs. Ramlan Siregar, M.Si (Sekretaris YMIK).

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas berbagai fasilitas yang disediakan selama penulis studi S3. Tanpa disiplin kerja Prof. Dr. Edy Rahardja yang

menjabat Wakil Direktur bidang Akademik, banyak mahasiswa akan tetap santai dan tidak segera menyelesaikan studi ini. Jasa Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Prof. Dr. Hotman M. Siahaan dan Prof. Dr. L. Dyson dalam mengembangkan program studi ilmu sosial di Universitas Airlangga perlu diapresiasi secara khusus. Beliau pernah memimpin Prodi Ilmu Sosial untuk program doktor (S3). Kesediaan Prof. Soetandyo memberikan waktu, membalas sms dan menerima telepon dari penulis, telah menghilangkan beban tersendiri dalam penyelesaian disertasi ini. Demikian pula Dr. Daniel Sparringa, dosen yang enak diajak diskusi baik langsung, via sms maupun melalui telepon. Pemahamannya yang luas mengenai disiplin ilmu sosiologi politik, sangat membantu penelitian ini. Pak Daniel lebih dari seorang dosen, ia juga sahabat yang tidak segan-segan menegur, memotivasi dan memberi banyak jalan ke luar ketika penulis menemukan hambatan. Terima kasih dan penghargaan secara khusus penulis sampaikan kepada beliau.

Penulis juga berhutang budi kepada rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga, khususnya Hery Suharyanto, Rina Martiara, Sebastianus Fernandes, T. Slamet Suparno, Veronika Suprapti, Ratih Retnowati dan Yakub Cikusin. Dukungan dan kerjasama dari mereka sangat berarti bagi penulis baik semasa perkuliahan maupun dalam penulisan disertasi ini. Pertemanan saya dengan Pak Hery telah banyak membantu baik urusan administrasi di Pasca Unair maupun urusan non administrasi. Ibu Rina adalah sahabat yang baik, di tengah masalah yang dihadapinya tidak kecil (lingkungannya luluh lantak oleh gempa Jogja dsk), ia terus mengingatkan kawan-kawannya untuk terus menapai finis. Untuk itu terima kasih yang tulus penulis sampaikan. Kepada nara sumber penelitian ini: Agus Sudono, Suwoso, Suhardiman, Tjasman, Ali Djunaedi, Manganar Pasaribu, Muchtar Pakpahan, Rekson Silaban, Dita Indah Sari, Sunarti, Jumhur Hidayat, Razak Yahya, Eggi Sudjana, Sjukur Sarto, Suwarno Sahari, Hikayat Atika Karwa, Said Iqbal, Danu Rudiono, Rina Sihombing, Munir, Ali Ermas, Dominggus Oktavianus, dan para buruh di Ciracas, Cibinong dan Pulo Gadung Jakarta Timur, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas waktu, ide-ide, suasana yang menyenangkan dan semua informasinya. Para peneliti perburuhan seperti Indrasari Tjandraningsih (AKATIGA) dan rekan-rekan di LPIS Bogor telah memberikan banyak bahan yang sangat

berharga dalam penulisan ini. Di antara para staf sekretariat Pasca Sarjana Unair, Ibu Siswanti, Pak Rokhani, Danny, "Alex" Pariyun, Pak Patno adalah orang-orang yang tidak mungkin saya lupakan jasanya. Urusan administrasi menjadi sangat mudah dan lancar karena kesediaan rekan-rekan ini dalam berkomunikasi jarak jauh. Kepada Dr. Pheni Chalid kepada siapa penulis banyak belajar dan berhutang budi dan Isniati Kuswini, S.Sos, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Untuk sahabat Drs. Ignatius Ismanto, M.Si, MA (staf CSIS/Dosen Universitas Pelita Harapan) yang berjasa besar dalam membantu mencarikan buku dan rekan diskusi yang produktif, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan.

Peranan Ibu Satini yang mendidik dan membesarkan penulis, terima kasih yang tulus. Ibu dipanggil Tuhan tepat tiga hari sebelum ujian Disertasi ini. Antara bimbang untuk mundur dan maju menyelimuti perasaan dan pikiran saya. Semoga Ibu beristirahat dengan tenang. Kepada isteri Elly Dwi Sarwanti yang telah berkorban banyak hal dalam membantu studi ini dan kepada anak-anakku: Elvantri Gitasari, Vito Adhityahadi dan Nabila Elvanya Larasati, terima kasih yang tak terhingga atas semua bantuan dan pengorbannya. Semoga jasa besar mereka semua mendapat balasan dari Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang sempurna, disertasi ini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang secara akademik menjadi tanggung jawab penulis.

Penulis,

AF. Sigit Rochadi

RINGKASAN

Ringkasan

Fragmentasi dan Kelemahan Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Orde Baru

Disertasi ini mengkaji fragmentasi gerakan buruh dan kelemahan-kelemahannya di Indonesia dengan memperhatikan konteks sosial ekonomi dan politik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan memulai kajian dari konsep gerakan sosial yang dikemukakan oleh Sidney Tarrow (1996), disimpulkan bahwa fragmentasi gerakan buruh tidak mengikuti jenis-jenis industri yang berkembang pesat pada masa Orde Baru dan pasca Orba, sebaliknya mengambil bentuk sosial politik, seperti ideologis-politis dan agama. Kuatnya gerakan politik ini tidak dapat dipisahkan dari warisan sejarah, kepentingan para pimpinan gerakan, ideologi atau identitas kolektif yang diusungnya, perkembangan kapitalisme, peranan negara menurut konstitusi, dibidani oleh LSM, kepemimpinan yang didominasi non buruh dan prestasi gerakan buruh dalam menekan pemerintah. Dengan demikian gerakan buruh di Indonesia lebih tepat disebut gerakan buruh dualitas. Dengan peran seperti ini, gerakan buruh memelihara pertentangannya dengan kekuasaan dan pemilik modal. Meskipun demikian, gerakan buruh ini masih lemah dan belum mampu melindungi anggotanya secara optimal. Kondisi internal gerakan dan lingkungan ekonomi politik mempengaruhi kelemahan tersebut, seperti lemahnya sumberdaya gerakan, kepemimpinan yang didominasi non buruh, stigma komunis, kekerasan oleh militer dan paramiliter, lemahnya aliansi dengan kelas menengah, globalisasi ekonomi yang disertai dengan mobilitas modal, industrialisasi tanpa pendalaman, terjadinya *oversupply* tenaga kerja, kekuasaan yang tidak memerlukan partisipasi buruh dan kebijakan ketenagakerjaan khususnya *outsourcing*, kerja kontrak dan PHK.

Dengan argumen tersebut maka disertasi ini menunjukkan beberapa temuan penting, Pertama, gerakan buruh memperlihatkan tantangan-tantangan kolektif dengan kekuasaan dan pemodal secara terus menerus. Kedua, kepemimpinan memegang peranan penting dalam membangkitkan individu-individu yang anonim, menyatukan ke dalam identitas yang sama serta meyakinkan bahwa perjuangan kolektif akan memberi dampak positif bagi masa depan. Ketiga, gerakan buruh bukan sebatas reaksi atas ketidakpuasan, protes dan pemogokan, tetapi juga usaha secara sadar untuk memulai suatu perubahan. Keempat, organisasi gerakan memiliki peranan memelihara pertentangan berkelanjutan dengan kekuasaan dan pemilik modal. Organisasi gerakan juga bukan terbatas pada organisasi formal, tetapi jaringan antar organisasi di mana gerakan buruh terbentuk dari berbagai jaringan gerakan. Kelima, fragmentasi di satu sisi memperlemah gerakan buruh secara menyeluruh. Tetapi juga menyediakan insentif selektif, seperti kenaikan posisi tawar para aktivisnya berhadapan dengan pemerintah, partai-partai politik dan para politisi yang akan memperebutkan jabatan publik. Dengan fragmentasi, penerima manfaat lebih banyak para pimpinan gerakan dan para aktivisnya.

Implikasi teoritik yang muncul dari kesimpulan dan temuan-temuan di atas adalah penyusunan konsep gerakan sosial yang relevan untuk studi di Indonesia, yaitu tantangan-tantangan kolektif (*collective challenges*) oleh orang-orang dengan tujuan bersama dan solidaritas yang digerakkan oleh pimpinan baik dilakukan karena ketidakpuasan kolektif maupun dukungan terhadap ideologi yang berinteraksi secara terus menerus dengan kaum elit, lawan dan penguasa. Konsep ini menambahkan

tiga unsur penting dari konsep yang dikemukakan oleh Sidney Tarrow (1996:4), yaitu kepemimpinan dan ketidakpuasan kolektif atau dukungan terhadap ideologi. Tanpa kepemimpinan, massa yang potensial (*quasi group*) tidak akan berubah menjadi gerakan sosial. Berlangsungnya fragmentasi gerakan buruh di Indonesia tidak seperti yang dijelaskan oleh Dahrendorf (1986) dan Hyun-Seong Yu (1993) yang mengikuti jenis-jenis industri tetapi aliran pemikiran (ideologi) dan agama. Meskipun demikian, kesejahteraan buruh tetap menjadi tujuan setiap gerakan buruh. Sebab itu gerakan buruh di Indonesia lebih tepat disebut gerakan dualitas (*duality*), bukan dualisme (*dualism*) seperti yang dikemukakan oleh Salomon B. Levine (1963) maupun dualistik (*dualistic*) seperti penjelasan H.W. Singer (1970).

Dalam hal efektivitas gerakan atau kuatnya suatu gerakan, studi ini menunjukkan bahwa teori Sunguk Yoon (2001) yang menunjukkan peranan ideologi gerakan dan kepemimpinan nasional yang pro buruh dan teori Kim Scipes (2003) yang memperlihatkan pentingnya genuinitas, militansi dan nasionalisme, kurang relevan untuk kasus Indonesia. Sebagai implikasi dari warisan sejarah negeri ini, stigmatisasi komunis terhadap buruh oleh negara maupun kekuatan-kekuatan sosial dominan menjadi hambatan terbesar bagi gerakan buruh. Lingkungan ekonomi politik seperti globalisasi dan mobilitas modal, industrialisasi yang meluas dan kurangnya pendalaman, penolakan kelas menengah untuk membangun aliansi dengan gerakan buruh, juga merupakan faktor penting yang menyebabkan lemahnya gerakan buruh.

Kata Kunci: Fragmentasi gerakan buruh, kelemahan gerakan, gerakan buruh politik, gerakan buruh dualitas.

Summary

The Weakness and Fragmentation of Indonesia's Labor Movement Post New Order

This dissertation examines the weaknesses and fragmentation of labor movement in Indonesia's changing politics and economy. By applying a qualitative approach and theoretical framework of social movement advanced by Sidney Tarrow (1996), this study concludes that fragmentation of labor movement in Indonesia has not been in line with the patterns of industrialization which have made a dramatic progress both in New Order and post New Order era. Nevertheless, the labor movement has moved into politics. The strong engagement of labor movement in politics can be traced from historical background, the interests of labor elites, ideology or collective identity, the stage of capitalism development, role of the state, civil-society relation, the emerging role of NGOs, strong leadership led by non-labor actor, impressive pressure of labor movement upon the government. In other words, labor movement in Indonesia is duality in nature. Labor movement play a critical role to capital and state power. Meanwhile, the labor movement is still weak and unable to pursue of the interests of its members. Internal and external factors are responsible for the weaknesses of labor movement. They include limited capability of labor movement, the leadership dominated by non labor actor, stigmatizing labor with communisme, military pressure upon the labor movement, weak alliances with middle class, economic globalization along with capital mobilization, diminishing industrialization, and oversupply of labor, and outsourcing policy.

Based on those arguments above, this dissertation raises a number of findings. The first is that labor movement always be confronted with strong alliances between state power and capital. The second is that leadership plays a critical role in nurturing anonymous individual, disseminating collective identity, and ensuring that collective action would be a significant aspect for labor movement in the future. The third is that labor movement is not only a reactive action in response to worsening economic welfare, labor protest and strikes, but also an empowerment process to initiate changes. The fourth is that organizational movement plays a substantial contribution in preserving conflict with state power and capital. Organizational movement is also not limited to a formal organization, but also covered to an organizational network in which labor movement has been shaped by a numerous organizational movements. The fifth that fragmentation has contributed to the weakness of labor movement. But, on the other side, such a fragmentation also provides a number of incentives, such as rising bargaining power among labor activists vis a vis government, political parties, and parties's elites who seek for the appointment at the public offices. In this case, fragmentation is especially beneficial to the labor activists.

Theoretical implication derived from such findings above is to formulate the concept of labor movement which is relevant to examine, especially on collective challenges from individuals with common interests, and solidarity endorsed by labor elites both in response to rising collective resentment and in supporting an ideology confronting among labor elites, state power and capital. This finding has made a new contribution, in spite of three elements advanced by Sidney Tarrow (1996: 4), includes leadership and collective resentment or ideological endorsement. Without leadership, potential quasi group will not transform into social movement. The

sustaining labor fragmentation in Indonesia, explained by Dahrendorf (1986) and Hyun-Seong Yu (1993), is not related to the patterns of industrialization but associated with idiokogy and religion. Meanwhile, every movement always pursues to achive economic walfare. In that way, labor movement in Indonesia can be regarded as duality, neither dualism promored by Salomon B. Levine (1963) or dualistic advanced by H.W Singer (1970).

In terms of the effectiveness or strength of labor movement, this study indicates that theory of Sunguk Yoon (2001) focusing the role of ideological movement and national leadership supporting to labor, and theory of Kim Scipes (2003) stressing on genuity, militancy and nationalisme, are not relevant in explaining to Indonesia's case. The implication of Indonesia's historical background, stigma of communist upon the labor and dominant social forces becomes the main obstacle for the labor movement. Economic and political enviroments, such as globalization, capital mobility, deteriorating industrialization, and opposition of middla class to join a building coalition with labor movement are factors that also contribute to weakening labor movement in Indonesia.

Key word: fragmented labor movement; labor weakness; political labor movement; labor movement with "duality"-nature.

ABSTRACT

Abstract

The Weakness and Fragmentation of Indonesia's Labor Movement Post New Order

This Dissertation deal with the problems facing the labor movement in post New Order Indonesia, especially those of organizational weakness and fragmentation. The nature of fragmentation of Indonesian labor movement is different from that of the industrial nations. As described by Dahrendorf (1986), for "old" industrial nations, and Yu (1993), for "newly-industrializing" countries, the labor movement in those countries are organized or fragmented along the line of industrial sector (it is called "industrial union"). In Indonesia, labor movement are fragmented along the political, ideological as well religious line. Consequently, Indonesia labor leaders tend not to develop skill in specific industrial issues. They tend to focus on political issues facing the laborers. While the end goal is the improvement of labor's wellbeing, the instrument they used mostly are political in nature. The strongly-political character of Indonesian labor movement can also be explained by several factors, namely: the post-Soeharto political system, the labor movement inherited from the previous regime and performance of the labor movement during and post-Soeharto. What comes up in Indonesia is labor movements that strive for economic (laborer' welfare) by employing political action to achieve the goal. This dissertation propose to call such phenomenon as labor movements with "duality"-nature. It is argued that this kind of labor movement still weak and unable to protect their member effectively. This can be explained by their internal organizational condition (such as, resources and leadership which is dominated by non-laborer) as well as political- economic external environment (such as, "communist stigma, "harassment and repression by the military, weak alliance with the middle-class, globalization that breeds "footloose industries," industrialization without deepening, oversupplied labor market, state power that does not encourage labor participation and the impacts of labor policies, especially "outsourcing", contract work and lay off. By employing qualitative method, this study purpose to contribute a concept of social movement relevant to Indonesian situation, i.e., collective challenges by posed by people with common goals and the solidarity generated by a leadership due to collective discontent as well as support to an ideology in continuous interactions with the elite, the opponent and the ruler.

Key word: fragmented labor movement; labor weakness; political labor movement; labor movement with "duality"-nature.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| Halaman Judul | i |
| Prasyarat Gelar | ii |
| Lembar Pengesahan | iii |
| Ucapan Terima Kasih | v |
| Ringkasan | x |
| Summary | xii |
| Abstract | xiv |
| Daftar Isi | xv |
| Daftar Tabel | xviii |
| Daftar Bagan | xix |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Gerakan Sosial | 16 |
| B. Gerakan Sosial Terorganisasi | 26 |
| C. Fragmentasi Gerakan Sosial | 32 |
| D. Kelemahan Gerakan Sosial | 38 |
| BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIS | 46 |
| A. Gerakan Sosial Buruh | 46 |
| B. Fragmentasi Gerakan Sosial Buruh | 49 |
| C. Kelemahan Gerakan Sosial Buruh | 55 |
| BAB IV. METODE PENELITIAN | 58 |
| A. Pendekatan | 58 |
| B. Pengumpulan Data | 59 |
| C. Lokasi dan Subyek Penelitian | 61 |

| | |
|--|------------|
| D. Analisis Data | 63 |
| BAB V. GERAKAN BURUH SEBELUM ORDE BARU | 65 |
| A. Gerakan Buruh Pra Kemerdekaan | 65 |
| B. Perdebatan Ideologi | 75 |
| C. Gerakan Buruh di Awal Kemerdekaan | 85 |
| D. Gerakan Buruh sebagai <i>Onderbouw</i> Partai Politik | 90 |
| 1. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) | 90 |
| 2. Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) | 99 |
| 3. Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dan Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) | 110 |
| 4. Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) | 117 |
| 5. Serikat Buruh di Bawah Partai-Partai Kecil | 125 |
| 6. Badan Kerjasama Buruh Militer (BKS Bumil) dan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) | 127 |
| BAB VI. PENGHANCURAN DAN PENATAAN GERAKAN BURUH OLEH PEMERINTAH ORDE BARU | 135 |
| A. Penghancuran Gerakan Buruh oleh Koalisi Borjuasi dan Militer | 135 |
| B. Penyesuaian Gerakan Buruh dengan Politik Militer | 148 |
| C. Penataan Gerakan Buruh oleh Pemerintah Orde Baru | 156 |
| BAB VII. INDUSTRIALISASI: DARI PENGENDALIAN KE PERLAWANAN BURUH | 173 |
| A. Pengendalian Gerakan Buruh dalam Rangka Industrialisasi | 173 |
| B. Beberapa Bentuk Perlawanan Buruh | 193 |
| C. Struktur Industri dan Partisipasi Buruh | 207 |
| BAB VIII. KELANJUTAN FRAGMENTASI DAN KELEMAHAN GERAKAN BURUH PASCA SOEHARTO | 222 |
| A. Romantisme Politik | 222 |
| B. Pengorganisasian | 238 |
| 1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) | 239 |

| | | |
|--|-------|-----|
| 2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) | | 250 |
| 3. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) | | 266 |
| 4. Serikat Buruh Berasas Islam | | 275 |
| C. Kepemimpinan Gerakan | | 298 |
| 1. Kepemimpinan Karismatik | | 301 |
| 2. Kepemimpinan Militan | | 306 |
| 3. Kepemimpinan Akomodatif | | 309 |
| 4. Kepemimpinan Profesional | | 316 |
| D. Gerakan Buruh Dualitas | | 322 |
| E. Kelemahan Gerakan Buruh | | 349 |
| | | |
| BAB IX. IMPLIKASI TEORITIK | | 363 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | 376 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Struktur Industri Menurut ISIC | 37 |
| Tabel 2. Subyek Penelitian dan Ciri-Ciri Utamanya | 62 |
| Tabel 3. Jumlah Cabang dan Jumlah Anggota SOBSI 1949 – 1962 | 91 |
| Tabel 4. Serikat Buruh dan Jumlah Anggota 1957 – 1962 | 122 |
| Tabel 5. Persetujuan Investasi 1967 – 2002 | 193 |
| Tabel 6. Pemogokan Buruh 1980 – 2003 | 203 |
| Tabel 7. Struktur Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja (1986) | 210 |
| Tabel 8. Perubahan Struktural Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja ... | 211 |
| Tabel 9. Pekerja Menurut Status Pekerjaan 1998 dan 2002 | 212 |
| Tabel 10. Pekerja Menurut Sektor Industri 2004 – 2007 | 212 |
| Tabel 11. Pekerja Menurut Klasifikasi Industri | 213 |
| Tabel 12. Perkembangan Jumlah Anggota, PUK, COS, PKB, Upah Buruh FSPMI | 296 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|-----|
| 1. Fragmentasi Serikat Buruh Pasca Kemerdekaan | 89 |
| 2. Struktur Organisasi KSPSI | 248 |
| 3. Fragmentasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) | 249 |
| 4. Struktur Organisasi KSBSI | 257 |
| 5. Fragmentasi SBSI | 266 |
| 6. Struktur Organisasi FNPBI | 272 |
| 7. Fragmentasi FNPBI | 274 |
| 8. Fragmentasi Serikat Buruh Berasas Islam | 286 |
| 9. Pertumbuhan Gerakan dan Kepemimpinan Buruh | 321 |

M I L I T
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri bulan Mei 1998, tumbuh berbagai gerakan sosial di semua lapangan/sektor pekerjaan. Organisasi-organisasi tunggal bentukan pemerintah kehilangan kepercayaan dan tidak sedikit yang menjadi sasaran kritik pedas masyarakat. Paralel dengan tuntutan pembubaran Golkar, tuntutan pembubaran organisasi penyangganya pun tidak kalah deras. Hal demikian disebabkan organisasi-organisasi korporatis itu merupakan bagian penting dari pemerintahan otoriter Orde Baru. Korporatisme negara (*state corporatism*) dirancang untuk mengendalikan masyarakat, di mana sebagai imbalan dari kepatuhannya, negara memberikan jabatan, bantuan keuangan dan penindasan terhadap organisasi yang akan muncul sebagai tandingan (Mas'ood, 1989; Hikam, 2000).

Pada era Orde Baru tidak ada peluang politik (*political opportunity*) untuk membangun serikat buruh yang kuat karena intervensi negara. Militer sebagai alat negara mengontrol para buruh sampai ke perusahaan-perusahaan. Buruh (dan petani) menjadi target utama kontrol militer karena memiliki potensi melakukan gerakan massa radikal (Moertopo, 1975), sesuatu yang ditentang oleh kaum borjuis dan militer yang memegang kekuasaan selama Orde Baru. Begitu waspadanya para pemimpin Orde Baru ketika itu, sektor perburuhan dan petani merupakan prioritas penggarapan (penataan). Restrukturisasi sosial politik yang dilakukan oleh militer menunjukkan dengan jelas usaha untuk melenyapkan semua bentuk gerakan sosial. Dasar dari penataan tersebut adalah *floating mass* (massa mengambang) yang tujuannya untuk mengakhiri secara permanen segala bentuk politik mobilisasi atau

gerakan massa. Ali Moertopo (1981:185) pemikir dan salah satu peletak dasar strategi pembangunan Orde Baru menyatakan:

“Oleh karena itu mengingat bahwa bahkan hingga kini orientasi pada ideologi sempit itu pun belum seluruhnya ditinggalkan oleh partai-partai politik, sudah seleyaknya bila rakyat yang sebagian besar terdiri dari rakyat di pedesaan, dialihkan perhatiannya dari masalah-masalah politik dan ideologi sempit dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional, antara lain melalui pembangunan masyarakat desanya masing-masing. Untuk itu wajarlah bila kegiatan partai politik dibatasi sampai Daerah Tingkat II. Di sinilah letak makna dan tujuan dari proses depolitisasi deparpolisasi bagi desa-desa”.

Akibat campur tangan negara yang sangat besar dalam bidang perburuhan, argumen atas kelemahan serikat buruh selalu dialamatkan kepada negara. Demikian pula perpecahan demi perpecahan dan konflik-konflik yang berlangsung di tubuh partai politik maupun organisasi pergerakan, selalu dituduhkan sebagai produk dari kebijakan negara. Campur tangan oleh kekuatan militer mengakibatkan ketidakmandirian serikat buruh, sehingga tidak muncul gerakan buruh yang *genuine* yang benar-benar dimotori oleh para buruh dan memperjuangkan kepentingan buruh. Teori-teori mengenai relasi negara dan buruh dari Frederic Deyo (1988), Vedi Hadiz (1997; 2004; 2005) dan teori tentang aliansi *triple* dari Peter Evans (1979) berada di posisi ini.

Selain argumen pentingnya rakyat “memusatkan perhatian kepada pembangunan desanya masing-masing”, intervensi pemerintah juga didasarkan kepada susunan dan struktur dasar masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat plural yang menghuni ribuan pulau dengan sistem adat dan religi yang khas, besaran (*magnitude*) sebagai bangsa relatif baru dan belum mengakar. Gejolak sosial sedikit saja dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama. Sebab itu diperlukan pemerintahan yang kuat yang mampu memelihara keamanan dan ketertiban. Ujung

dari argumen tersebut adalah peranan yang luas dari militer yang dikenal sebagai Dwi Fungsi ABRI. Konsep negara kesatuan kemudian diperluas ke dalam satu kesatuan sosial, politik, budaya, hukum dan pertahanan-keamanan, di mana keseragaman lebih ditonjolkan dibanding kebhinekaan. Pemerintah khawatir, jika kebhinekaan yang mengemuka, maka konflik antar etnik, agama dan sistem sosial masyarakat lokal akan menghancurkan dasar-dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi secara perlahan-lahan, kendali pemerintah dan militer terhadap berbagai nilai-nilai sosial masyarakat ini berubah menjadi kendali negara atas *civil society*. Di bawah Undang-Undang No 5/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, semua organisasi masyarakat memerlukan ijin pemerintah.

Tetapi setelah campur tangan negara melemah dan kebebasan berserikat terbuka lebar, partai-partai politik dan gerakan-gerakan sosial tidak dengan sendirinya menguat. Seakan menjadi ciri khas gerakan sosial di Indonesia, berbagai gerakan sosial yang dahulu mendapat dukungan kuat masyarakat sipil seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan beberapa gerakan sosial lainnya, terus mengalami perpecahan. Hal yang sama juga berlangsung dalam gerakan buruh. Fenomena tersebut di satu sisi seakan menggambarkan lemahnya *civil society* berhadapan dengan negara, ambivalensi dan oportunistiknya para aktivis gerakan, di sisi lain seakan menunjukkan bahwa negara yang kuat tetap diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa.

Jika mengkaji sejarah gerakan sosial di Indonesia, fragmentasi gerakan sosial seakan merupakan fenomena yang selalu muncul dalam sistem politik yang demokratis. Pada masa pasca kemerdekaan, hampir semua gerakan sosial mengubah diri menjadi partai politik dan guna mendapatkan dukungan massa sebanyak-

banyaknya, partai-partai politik kemudian membangun hubungan *orderbouw* dengan gerakan-gerakan sosial. Sementara pada masa pemerintahan Orde Baru yang otoriter, semua gerakan sosial dicegah bangkit dan dikendalikan dalam bentuk organisasi-organisasi korporatis. Pasca Orde Baru, gerakan-gerakan sosial tumbuh kembali, namun segera mengalami perpecahan serius, sehingga gagasan untuk membangun masa depan bangsa yang pernah disuarakan oleh gerakan-gerakan tersebut, kandas di tengah jalan. Hanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang berumur panjang karena ditopang oleh sekolah-sekolah, pesantren dan lembaga-lembaga kesehatan yang dibentuknya. Selebihnya mengalami fragmentasi, bahkan menghancurkan sumberdaya yang telah diraihinya seperti halnya gerakan petani dan buruh.

Sebagai gerakan yang paling tua di negeri ini, gerakan buruh selalu gagal memperkuat diri dan mencapai posisi strategis meskipun setiap tahun berlangsung penambahan jumlah buruh. Dilihat dari sejarah dan populasi, petani dan buruh yang paling potensial mencapai posisi strategis yang memiliki kesempatan merealisasikan cita-cita gerakan. Selain tantangan dari gerakan keagamaan sangat kuat, gerakan ini pun selalu gagal membangun aliansi dengan kekuatan strategis lainnya. Sejarah menunjukkan bahwa kegagalan melakukan aliansi dengan birokrasi dan militer seakan menutup peluang politik untuk mewujudkan cita-cita gerakan. Seperti ditunjukkan oleh Karl D. Jackson (1978), Sutherland (1984), Sundhaussen (1986), Emmerson (1988) dan Evers dan Schiel (1989), birokrasi dan militer memegang posisi kunci dalam transformasi sosial di Indonesia, sehingga tanpa mampu menggandeng dua kekuatan ini, sebuah gerakan sosial tidak akan mampu bertahan lama apalagi mencapai posisi strategis.

Dalam kasus gerakan buruh, musuh ideologisnya terlalu kuat di negeri ini. Meskipun dalam banyak hal Islam juga menolak kapitalisme, namun untuk bersatu dengan buruh dalam melawan kapitalisme, kekuatan Islam juga menolaknya. Belum lagi memperhatikan kurang luasnya para tokoh gerakan buruh menawarkan ideologi gerakan yang bisa diterima oleh Islam, militer, birokrasi dan borjuasi. Hal ini disebabkan gerakan buruh didominasi oleh konsep kelas dan sosialisme yang bagi para penentangannya merupakan sesuatu yang menakutkan. Pembantaian massal tahun 1965-1968 merupakan bukti nyata dendam ideologis kaum borjuis-Islam terhadap komunisme dan sosialisme. Usaha untuk membangun gerakan buruh yang kuat kemudian mengingatkan kepada SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), sebuah gerakan yang didominasi pikiian komunisme-sosialisme dan dalam ingatan kolektif merupakan sesuatu yang traumatik. Kondisi ini membingungkan para tokoh gerakan buruh. Kebingungan dari para aktivis gerakan buruh ini dapat disimak dari berbagai istilah yang digunakan untuk menggantikan buruh, seperti “pekerja”, “pegawai” dan “karyawan”, selain terus lahirnya gerakan buruh yang mengusung agama, kedaerahan dan sektor industri.

Fenomena tersebut seakan-akan juga mencerminkan kelemahan *civil society* dalam berhadapan dengan negara khususnya militer dan birokrasi. Selain itu juga menggambarkan tidak *genuine*, tidak militannya sebuah gerakan dan lemahnya sumberdaya yang dimiliki, sehingga setelah sekian lama mampu melakukan tantangan terhadap kekuasaan, para aktivis akan segera “menyerah” kepada negara. Para pendukung teori mobilisasi sumberdaya mengajukan argumen pentingnya secara terus menerus melakukan penambahan sumberdaya gerakan untuk mencegah terjadinya kooptasi dan koersi dalam mempertahankan independensi gerakan. Namun

dalam kasus gerakan buruh, persoalan tersebut sulit dilakukan mengingat sumberdaya buruh sangat terbatas. Hampir semua gerakan buruh tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Ketergantungan gerakan buruh terhadap bantuan dari luar masih sangat tinggi, termasuk tergantung kepada pemerintah.

Di negara-negara industri, gerakan buruh merupakan motor perubahan sosial. Gerakan buruh di Inggris dan Jerman merupakan gerakan sosial yang paling tua dan berhasil membentuk partai politik serta berkali-kali memenangkan pemilihan umum (Duverger, 1983; Campbell, 2004). Agenda perburuhan pun berhasil menjadi kebijakan yang lebih menguntungkan buruh. Demikian pula pengalaman Amerika Serikat dan Italia. Salah satu faktor penting yang memungkinkan menguatnya gerakan buruh adalah industrialisasi yang dilakukan secara bertahap dari industri padat karya ke industri padat modal di mana berlangsung pendalaman teknologi. Proses demikian menuntut penambahan buruh dengan *skill* yang terus meningkat disertai pendapatan dan jaminan sosial yang juga terus meningkat. Terdapat perkembangan yang paralel antara pendalaman industri, permintaan tenaga kerja terdidik dan terlatih serta gerakan buruh. Jika dibandingkan dengan pengalaman negara berkembang, nampak bertolak belakang. Kondisi demikian tentu berpengaruh terhadap gerakan buruh.

Uraian di atas minimal memperlihatkan lima ciri penting gerakan (buruh) di Indonesia. Pertama, gerakan buruh di Indonesia mudah mengalami fragmentasi. Kekuatan eksternal tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas fragmentasi ini, sebab setelah kendali negara berkurang, kemandirian SB tidak tumbuh. Sebaliknya motivasi akan kekuasaan dan finansial, lebih menonjol dibanding motivasi untuk membangun gerakan buruh yang kuat. Selain itu lingkungan sosial ekonomi dan

politik, menyediakan lahan bagi berlangsungnya fragmentasi. Kedua, kecenderungan untuk menyatukan diri dengan partai politik maupun ingin menjadi partai politik. Berbeda dengan gerakan buruh di Eropa Barat yang membangun aliansi strategis dengan partai politik dalam rangka mencapai tujuan gerakan, gerakan buruh di Indonesia terjebak kepada kepentingan sempit pengurusnya untuk meraih kekuasaan sesaat. Untuk kepentingan ini ideologi telah dikorbankan diganti dengan pragmatisme.

Ketiga, tetap kuatnya mengusung gerakan buruh yang menggunakan agama (islam) sebagai basis. Buruh merupakan profesi yang digeluti oleh seluruh manusia yang menganut berbagai agama. Memperjuangkan kepentingan buruh idealnya tidak perlu didasarkan pada agama. Menyimak perkembangan sejarah, agama hanya digunakan sebagai alat mobilisasi untuk mendukung kepentingan kekuasaan.

Keempat, lemahnya gerakan buruh yang berbasis lapangan usaha/lapangan pekerjaan. Isu-isu pertambangan berbeda dengan pertanian dan industri manufaktur. Ketrampilan para buruh untuk masuk ke lapangan pekerjaan tersebut juga berbeda. Oleh sebab itu upah dan jaminan sosial juga berbeda-beda antara lapangan pekerjaan yang satu dengan yang lain.

Kelima, gerakan buruh di Indonesia senantiasa menghadapi kekerasan oleh kekuatan dominan, kecuali masa Pemerintahan Soekarno. Di era kolonialisme gerakan buruh berhadapan dengan kapitalisme negara, sehingga juga berhadapan langsung dengan alat-alat kekuasaan seperti polisi dan tentara. Di awal Orde Baru para tokoh buruh habis dibantai oleh militer dengan tuduhan mendukung Gerakan 30 September. Sedangkan selama Pemerintahan Orde Baru, represi dilakukan oleh militer secara sistematis untuk mencegah bangkitnya kekuatan buruh dan

mempertahankan politik massa mengambang. Pasca Soeharto kekerasan dilakukan oleh para preman dan organisasi paramiliter baik lokal maupun nasional.

Fragmentasi gerakan sosial buruh di Indonesia itu sendiri menurut penelitian yang penulis lakukan selama ini (disertasi ini ditulis pertengahan tahun 2005), belum pernah diteliti secara seksama. Kajian buruh, khususnya gerakan buruh dilakukan oleh para sosiolog, antropolog, sejarawan dan ilmuwan politik. Penelitian mengenai gerakan buruh kali pertama dilakukan oleh Tjoa Sek len (1949) yang mengkaji serikat buruh perkebunan dan kehutanan. Kajian Tjoa menekankan pada deskripsi naratif terbentuknya serikat buruh. Agama mempunyai peranan dalam membangun identitas gerakan, jadi bukan murni didasarkan pada isu-isu pekerjaan dan peningkatan kinerja. Tedjasukmana (1958) seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja di era Sukarno membahas gerakan buruh dengan menggunakan pendekatan politik. Gerakan buruh di era Sukarno lebih berorientasi politik dan menjadi *onderbouw* partai politik. Gerakan buruh mengabaikan aspirasi buruh dan lebih merupakan instrumen untuk memobilisasi buruh bagi kepentingan partai. Sandra (1961) membahas gerakan buruh secara deskriptif naratif dengan menggambarkan serikat-serikat buruh di tahun 1950-an. Kajian demikian kurang menekankan pada analisis. Penelitian mengenai gerakan buruh di era kolonial hingga Sukarno lebih banyak dilakukan pada buruh tani, perkebunan, buruh kereta api dan pelabuhan. Dalam hal ini perlu dicatat hasil-hasil penelitian Ingleson (2004) mengenai kondisi kerja buruh pelabuhan di Jawa, pemogokan buruh kereta api, pertumbuhan kesadaran buruh dan serikat di masa kolonial. Kajian mengenai buruh industri manufaktur, jasa keuangan, pertambangan belum mendapat perhatian secara serius sebelum Orde Baru.

Kajian mengenai buruh di era Orde Baru rata-rata mengabaikan aspek gerakan sosial, lebih-lebih fragmentasi gerakan. Matsuda (1980) melakukan studi lapangan mengkaji proses menjadi buruh dari kaum migran pedesaan ke pusat-pusat kota. Salah satu temuan utamanya adalah bahwa kelebihan angkatan kerja di bidang pertanian menguntungkan industri di kota. Selain menjadi petani bukan lagi kehendak kaum muda, lingkungan sosial budaya kota dan kerja *off farm* di perkotaan merupakan pilihan kaum migran. Upah di kota yang lebih tinggi dari kerja pertanian cukup membantu mobilitas horisontal dan vertikal secara bersama. Wolf (1986) meneliti buruh perempuan di industri manual padat karya. Temuan utamanya adalah upah yang diterima secara langsung ternyata merupakan motif utama para buruh. Begitu menerima upah para buruh langsung dapat mengirimkan uangnya kepada keluarganya di desa untuk menutupi berbagai kebutuhan termasuk upacara adat. Sebagian buruh juga masih memperoleh bantuan keuangan dari orangtuanya di desa guna mempertahankan kehidupannya di kota dengan mendapat kiriman uang dan makanan. Apa yang ditemukan oleh Wolf mempertanyakan teori transisi masyarakat tradisional ke modern yang berargumen bahwa sektor modern (industri) dengan pertumbuhannya yang tinggi dapat membantu sektor tradisional. Temuan Wolf menunjukkan bantuan sektor tradisional ke modern.

Perubahan kebijakan industrialisasi dari substitusi impor ke industri orientasi ekspor, meningkatkan jumlah buruh secara tajam. Jika pada tahun 1980 jumlah buruh industri manufaktur hanya 1,2 juta, maka pada tahun 1990 jumlah itu menjadi 3,9 juta. Pertumbuhan jumlah buruh yang tinggi, perubahan kebijakan industrialisasi, pembentukan zona-zona industri, represi negara terhadap buruh, hubungan kolusif pengusaha dan aparat negara dan gelombang pemogokan buruh yang menuntut upah,

telah memberi inspirasi berbagai kajian perburuhan. Berbagai riset dilakukan untuk menjelaskan gejala dimaksud dari berbagai sudut pandang, mulai dari artikel sampai kajian serius seperti tesis dan disertasi. Studi serius dilakukan oleh Saptari (1995), Hadiz (1997), Chalid (1997), Kammen (1998), Athreya (1998), Kusyuniyati (1998), Manning (1998), Susetiawan (2000), LaBotz (2001), Caraway (2002), Batubara (2002), Ford (2003) dan Hari Nugroho (2003). Studi-studi tersebut tidak satupun yang mengkaji fragmentasi gerakan sosial buruh dan menjelaskan kelemahan. Studi-studi tersebut lebih fokus pada masalah perburuhan dan bukan gerakan sosial buruh.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, studi ini bermaksud membahas terjadinya fragmentasi gerakan sosial buruh di Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian mengenai hal ini dipandang sangat penting dilihat dari dua hal. Pertama, dalam studi perburuhan (gerakan buruh) di Indonesia, belum ada kajian gerakan sosial. Studi mengenai gerakan yang telah dilakukan oleh Chalid (1997), Kusyuniyati (1998), Kammen (1998) dan Hugroho (2003) mendefinisikan gerakan dalam arti luas yaitu respon buruh terhadap (kebijakan) negara, seperti pemogokan dan protes. Tentu saja dimensi historis mereka abaikan, sebab respon hanya memiliki ruang waktu yang terbatas atau bahkan seketika. Studi tentang respon itu sendiri tidak menggambarkan gerakan sosial buruh yang dapat menampilkan organisasi gerakan dengan segala sumberdaya yang dimilikinya. Pada hal dalam mempelajari gerakan sosial tidak bisa mengabaikan sejarah terbentuknya gerakan tersebut (Touraine, 1978:2; Kurasawa, 1993; Maheu, 1995:10; Shiraishi, 1997; Wertheim, 2000:34; Burke, 2001:132; Kuntowidjojo, 2002: 452; Ford, 2002).

Kedua, studi gerakan sosial (buruh) merupakan kajian yang sangat penting di era industrialisasi dan demokratisasi yang tengah berproses di Indonesia. Letak

pentingnya adalah bahwa buruh akan terus meningkat jumlahnya dan akan memainkan peranan besar dalam transformasi sosial. Industrialisasi dan demokratisasi menyediakan lahan subur bagi gerakan buruh, seperti yang ditunjukkan oleh Michael Mann (1995). Hingga tahun 2005, tidak ada gerakan sosial yang kuat dan gigih seperti gerakan buruh.

Studi terhadap struktur perburuhan telah lama ditinggalkan oleh peneliti. Studi demikian kurang menggambarkan proses yang berlangsung pada buruh itu sendiri, sehingga sering muncul sikap pejoratif para peneliti bahwa studi mengenai gerakan buruh tidak menjelaskan apa-apa tentang buruh. Selain itu studi mengenai struktur juga cenderung mempertegas dualisme, seperti tegangan antara subyektivitas dan obyektivitas dan voluntarisme dan determinisme (Giddens, 1993:4). Para pengkaji perburuhan sejak tahun 1970-an beralih fokus pada proses proletarianisasi, lingkungan tempat kerja buruh, kampung buruh, aspirasi buruh akar rumput dan budaya kaum buruh. Studi ini memiliki makna penting dari pendekatan yang menggabungkan struktur dengan tindakan.

B. Permasalahan

Studi ini hendak memahami fragmentasi dan kelemahan gerakan buruh pasca Orde Baru. Sebagaimana telah disinggung di atas, fragmentasi gerakan sosial (buruh) terus berlangsung seakan merupakan ciri dari gerakan sosial buruh di era demokrasi. Hanya pada masa Orde Baru yang dikenal otoriter, menindas dan mencegah gerakan buruh, tidak berlangsung fragmentasi. Sebaliknya jika terdapat peluang politik (*political opportunity*) berlangsung perpecahan yang berkelanjutan. Gejala seperti ini menunjukkan kontradiksi, di mana populasi buruh terus meningkat disertai latar

belakang pendidikan yang juga terus meningkat, tetapi gerakan yang dibangunnya tetap lemah. Gerakan buruh tidak mampu meningkatkan posisi tawarnya terhadap kekuasaan, pengusaha dan gerakan sosial lain. Berbeda dengan gerakan agama (NU dan Muhammadiyah), gerakan mahasiswa, gerakan HAM dan gerakan lingkungan hidup, di mana para aktivisnya mampu mencapai posisi strategis, gerakan buruh selalu kandas dan tidak berhasil menghantarkan tokoh-tokohnya masuk dalam pemerintahan. Isu-isu yang muncul dari tahun ke tahun hanyalah upah minimum propinsi dan implementasinya. Para aktivis buruh pun seakan kurang serius memperjuangkan kepentingan buruh dan lebih berpihak kepada egonya. Jika kalah bersaing memperebutkan jabatan ketua umum misalnya, tidak bisa menerima kemenangan lawannya dan kemudian mendirikan gerakan tandingan.

Fenomena yang tidak kalah menarik adalah kecenderungan gerakan buruh untuk mengubah diri menjadi partai politik atau menyatakan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Jika gagal membangun partai yang lolos verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum, para aktivis gerakan buruh berusaha bergabung dengan partai politik baik secara perorangan maupun membuat kesepakatan bersama dengan partai politik untuk saling mendukung. Termasuk dalam koridor ini adalah langkah para aktivis mendukung para politisi dalam memperebutkan jabatan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Seakan gerakan buruh harus mengejar dua tujuan sekaligus yaitu tujuan ekonomi dan politik.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai fragmentasi gerakan sosial buruh ini dimaksudkan untuk memahami (*understanding*).

1. Hubungan fragmentasi gerakan buruh pasca Orde Baru dengan periode sebelumnya.
2. Hubungan fragmentasi gerakan buruh dengan industrialisasi di Indonesia.
3. Kelemahan-kelemahan gerakan sosial buruh di Indonesia pasca Orde Baru dan membandingkannya dengan periode-periode sebelumnya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memahami terjadinya fragmentasi yang terus-menerus dalam gerakan sosial buruh dan kelemahan-kelemahannya, studi ini memiliki manfaat:

1. Memperluas wawasan intelektual peneliti mengenai gerakan sosial khususnya gerakan buruh di Indonesia pasca Orde Baru.
2. Memberikan sumbangan teoritik bagi perkembangan studi gerakan sosial, gerakan buruh dan hubungan industrial di Indonesia.
3. Studi ini juga mengidentifikasi kelemahan-kelemahan gerakan sosial buruh, sehingga dalam usaha meningkatkan kesejahteraan buruh dan gerakan sosial buruh yang kuat, studi ini juga bermanfaat bagi pemerhati masalah perburuhan guna menyempurnakan aturan-aturan perburuhan, khususnya undang-undang mengenai serikat pekerja/serikat buruh.
4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, para pengusaha dan serikat buruh dalam hubungan industrial di tanah air.

E. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dalam Sembilan bab. Bab I mengemukakan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sedangkan bab II membahas Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini dikemukakan teori-teori gerakan sosial, baik munculnya gerakan sosial, gerakan sosial terorganisasi, teori tentang fragmentasi khususnya posisi studi ini dan kelemahan-kelemahan gerakan sosial khususnya gerakan buruh.

Bab III membahas instrumen konseptual dan hipotesis penelitian. Sebagai instrument, bagian ini lebih merupakan kerangka konseptual. Kerangka tersebut mencakup elaborasi tentang konsep-konsep gerakan sosial dan kelemahan-kelemahan gerakan buruh di Indonesia. Bab IV membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang menuntut pemahaman peneliti mengenai fenomena yang dikaji. Bab V membahas gerakan buruh sebelum Orde Baru. Pembahasan dimulai dari kelahiran gerakan buruh dan konteks sosialnya diakhiri dengan gerakan buruh yang merupakan *onderbouw* partai politik. Bab VI membahas penghancuran gerakan buruh dan penataan yang dilakukan pemerintah Soeharto. Gerakan sosial dianggap mengganggu stabilitas nasional, sebab itu dihancurkan dan dikontrol oleh militer dengan pembentukan organisasi korporatis.

Bab VII menelaah kebijakan industrialisasi Pemerintah Orde Baru dan perlawanan buruh. Industrialisasi substitusi impor tidak memberi peluang kerja yang besar. Sejak tahun 1980-an dilakukan perubahan kebijakan ke industrialisasi

berorientasi ekspor yang banyak menyerap tenaga kerja murah. Pembentukan buruh sebagai angkatan kerja murah berlangsung mulai pertengahan tahun 1980-an ini. Aparatus Negara bertugas menjaga keamanan di tengah pelanggaran hak-hak buruh. Demonstrasi berlangsung massif dan mulai tumbuh perlawanan terhadap SPSI. Bab VIII membahas kelanjutan fragmentasi dan kelemahan gerakan buruh pasca Orde Baru. Perpecahan gerakan sosial menjadi salah satu ciri khas gerakan buruh yang disebabkan oleh tarik menarik yang serius antara gerakan sosial, gerakan politik, *onderbouw* partai dan ambisi para pimpinannya untuk memobilisasi buruh demi kepentingan politik. Tidak berlangsungnya pendalaman industri turut menyebabkan tidak meningkatnya ketrampilan buruh, sehingga isu-isu gerakan buruh yang dominan adalah isu politik. Bab IX merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi teoritik dari riset ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gerakan Sosial

Studi tentang gerakan sosial menurut Peter Burke (2003:135) dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu apakah gerakan itu untuk memulai suatu proses perubahan atau gerakan itu merupakan reaksi atas perubahan yang sedang terjadi. Studi-studi yang dilakukan oleh para sosiolog klasik seperti Herbert Blumer (1946), Rudolf Heberle (1951), Tom Bottomore (1960) dan Ted Robert Gurr (1971) dapat dikelompokkan pada tipe kedua, sedangkan studi yang dilakukan oleh John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (1977), Alain Touraine (1977), Alberto Melucci (1995), Sydney Tarrow (1996), John Markoff (2002), John Lofland (2003) dan Bert Klandermans (2005) dapat dikelompokkan pada tipe pertama dari Burke. Heberle (1946:4) merumuskan gerakan sosial sebagai suatu gerakan bersama, suatu kekacauan di antara manusia, suatu kegelisahan, suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan yang divisualisasikan, khususnya suatu perubahan dalam lembaga sosial tertentu. Pengertian ini sangat sempit sebab hanya merujuk pada perilaku kolektif yang menunjukkan kegelisahan atau disertai kekacauan, seperti riot, huru hara dan protes yang menentang perubahan atau kebijakan tertentu.

Demikian pula konsep yang dikemukakan oleh Tom Bottomore (1960, 1983:28-29) yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu usaha bersama untuk meningkatkan atau menentang suatu perubahan dalam masyarakat di mana usaha tersebut memainkan peranan. Selanjutnya ia memberikan tiga ciri gerakan sosial, yaitu sifat yang kurang terorganisasi dari suatu gerakan, di mana dalam gerakan tersebut mungkin tidak ada keanggotaan tetap atau keanggotaan yang mudah dikenal

dan tidak memiliki jalur staf pusat. Kedua, suatu gerakan lebih merupakan satu kelompok yang bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin tertentu yang menampakkan dirinya dalam perdebatan politik sehari-hari dan yang karenanya siap berperan serta dalam kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi atau *riotous assemblies*". Ketiga, suatu fakta bahwa gerakan-gerakan berskala besar cenderung menghasilkan di dalam dirinya sendiri suatu variasi kelompok-kelompok politik yang saling berbeda, yang sedikit banyak menyerupai gerakan buruh pada abad 19; dan pelaksanaan aksi politik selanjutnya pun harus dipahami dari segi hubungan antara gerakan yang luas dan kelompok-kelompok yang terorganisasi (Bottomore, 1983:30). Dengan demikian, tindakan kurang terorganisasi, ideologi yang diperjuangkan dan bergabungnya kelompok-kelompok politik yang memiliki pandangan yang hampir sama, menurut Bottomore merupakan ciri dasar sebuah gerakan sosial. Perumusan demikian mengabaikan beberapa hal, seperti sifat atau bentuk aksi kolektif dan kontinuitas gerakan. Di sini terdapat pertentangan antara tuntutan gerakan dan bentuk gerakan. Dengan perumusan seperti itu, sebuah gerakan hanya dimaknai sebagai protes-protes episodik. Pada hal perjuangan ideologis baik dilakukan oleh partai maupun bukan, lazimnya dilakukan secara terorganisasi dan memiliki masa perjuangan yang panjang.

Sidney Tarrow (1996:4) merumuskan gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan kolektif (*collective challenges*) oleh orang-orang dengan tujuan bersama dan solidaritas yang berinteraksi secara terus menerus dengan kaum elit, lawan dan penguasa. Sebuah aksi kolektif bukan merupakan gerakan sosial jika tidak terdapat unsur tantangan kolektif. Dengan istilah "tantangan" (*challenge*), sebuah aksi kolektif diarahkan kepada kelompok elit, lawan atau penguasa. Sedangkan sebuah

gerakan sosial menurut Alain Touraine (1985:760) adalah sebuah skema I-O-T. Tipologi ini melibatkan definisi identitas kolektif (I), khususnya para aktor; definisi para lawan atau oposan (O) dan pertarungan totalitas kebudayaan (T) yang mendefinisikan medan konflik. Konsep ini tidak terlalu berbeda dengan Tarrow. Keduanya menekankan konflik, yaitu pendefinisian yang jelas tentang lawan atau oposan. Baik gerakan sosial untuk menolak suatu perubahan atau untuk memelopori jenis perubahan yang lain, keduanya mempertandingkan transformasi sosial dalam masyarakat, sebuah analisis yang berakar pada karya Marx. Dengan demikian, lawan didefinisikan cukup jelas, yaitu pemegang kekuasaan, pemilik alat-alat produksi, kebudayaan dominan atau kekuatan hegemonik.

Gerakan buruh merupakan gerakan sosial karena memiliki makna aksi kolektif seperti yang dikemukakan oleh Tarrow dan Touraine. Para buruh yang berhimpun dalam serikat buruh secara nyata menantang para pengusaha, pemerintah maupun elit politik. Seraya meyakinkan para buruh lainnya untuk bergabung dan membantu gerakan, para pemimpin dan aktivis buruh membangun dan menetapkan tujuan bersama dan solidaritas atau identitas gerakan. Tiga hal inilah yang menentukan suatu gerakan dapat bertahan atau menghilang (Tarrow, 1996: 6). Berbeda dengan teoritis dari kubu rasionalis seperti Mancur Olson (1969) yang menekankan pilihan dan tindakan individual, gerakan sosial dalam teori Tarrow benar-benar mengandung makna *sosial*, seperti mengkoordinasi populasi yang tidak terorganisasi dan melakukan aksi yang berkelanjutan. Teori rasional kurang memperhatikan individu-individu yang bersedia mengorbankan diri untuk memulai suatu gerakan dan hanya menjelaskan partisipasi individu dalam gerakan. Ini berarti bagi Olsonian proses tumbuhnya gerakan tidak dapat mereka jelaskan.

Kedua jenis gerakan di atas dicakup dalam studi ini. Gerakan buruh yang muncul pasca Soeharto bukan hanya reaksi atas bangkitnya gerakan-gerakan sosial lainnya. Atau reaksi atas kebijakan-kebijakan negara, menguatnya kapitalis dan globalisasi ekonomi, tetapi juga merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh sekelompok buruh untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya. Bahkan lebih jauh lagi yaitu membangun masyarakat dengan menempatkan buruh sebagai pelopor perubahan. Memosisikan suatu gerakan sosial sebagai reaksi, tidak menempatkan kemampuan manusia sebagai makhluk yang mampu melihat masa depannya. Manusia dipandang pasif dan hanya melakukan reaksi jika keamanan, kehidupan atau keadilannya terusik.

Teori Blumer (1969:8) mengenai ketidakpuasan atau kekecewaan, Robert Gurr (1970: 13) tentang deprivasi relatif dan Smelser (1976:12) mengenai *structural conduciveness* sebagai faktor determinan munculnya gerakan atau kondisi-kondisi yang memfasilitasi munculnya gerakan, jelas hanya memandang gerakan sosial sebagai reaksi. Teori demikian mengingkari hakekat manusia sebagai makhluk yang aktif. Lahirnya berbagai gerakan reformasi dan revolusi dalam sejarah dunia, menunjukkan keaktifan dan usaha-usaha secara sadar dari sekelompok orang untuk melakukan perubahan sosial. Hans-Dieter Evers (1995) menunjukkan keaktifan kelompok-kelompok di Asia Tenggara untuk mencapai posisi strategis. Negara diperebutkan oleh berbagai kelompok dengan cara melakukan penambahan sumberdaya dari waktu ke waktu, hingga suatu saat suatu kelompok mencapai posisi strategis. Para petani, guru, buruh, pegawai pemerintah dan kelompok-kelompok agama membangun gerakan bukan semata-mata melawan penindasan. Mereka secara sadar ingin melakukan perubahan sosial. Hal demikian dapat disimak dari

sejarah kebangkitan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah maupun organisasi-organisasi pergerakan di awal Abad XX.

Adanya perasaan ketidakpuasan, ketidakadilan atau gagasan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, belum cukup untuk menelorkan gerakan sosial. Diperlukan semacam variabel antara yang dapat menjembatani kondisi-kondisi struktural tersebut untuk menjadi gerakan sosial. Teori-teori sosiologi klasik telah menawarkan konsep “in group” – “out group” (Kingsley Davis), “*gemeinschaft*” – “*gessellschaft*” (Ferdinand Tonnies) dan solidaritas mekanis – solidaritas organis (Emile Durkheim). Konsep-konsep tersebut telah membantu menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan dan bagaimana orang memandang perbedaan dihubungkan dengan dirinya. Dengan menggunakan kriteria yang sangat longgar, seseorang dapat menjadi bagian suatu kelompok atau di luar kelompok. Posisi demikian akan terlihat jelas ketika berlangsung konflik. Konflik sosial mempunyai fungsi untuk mempertegas batas-batas sosial, sedangkan ke dalam berfungsi memperkuat integrasi (Cosser, 1956). Namun demikian konsep tersebut belum mampu menjembatani kondisi struktural dengan kelahiran gerakan sosial. William Gamson (1992) menawarkan konsep keyakinan kolektif, McAdam (1982) menyebut liberasi kognitif, Mogdigliani (1989) mengajukan konsep dukungan terhadap paket-paket ideologi, Melluci (1995) menyebut pembentukan identitas kolektif, Fantasia (1988) menyumbangkan konsep kultur solidaritas dan Klandermans (2005) menyebut pembentukan dan mobilisasi konsensus.

Berbagai konsep tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun identitas kolektif guna memobilisasi sejumlah orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Keyakinan kolektif adalah keyakinan yang dimiliki bersama oleh

sekelompok orang. Keyakinan ini melibatkan sejumlah orang terhadap suatu nilai dan mempunyai makna dalam pembentukan kerangka aksi kolektif. Atau kerangka aksi kolektif adalah seperangkat keyakinan kolektif yang memungkinkan suatu pemikiran tercipta bahwa partisipasi dalam aksi kolektif tampak berarti (Gamson, 1992: 18). Guna membangun kerangka aksi kolektif ini diperlukan identitas dan agensi. Bertindak secara kolektif memerlukan identitas atau kesadaran kolektif. Seperti dikatakan oleh Melucci (1995:3) penciptaan identitas kolektif adalah salah satu tantangan fundamental yang akan dihadapi oleh para partisipan gerakan.

Mengikuti konstruksi teori Gamson tersebut, fungsi identitas kolektif selain mempersatukan individu-individu ke dalam aksi-aksi kolektif yang mereka lakukan, juga merupakan identitas untuk membangun tantangan kolektif dengan kelompok atau kekuatan lain. Seringkali identitas kolektif dipandang sebagai ideologi oleh para pemiliknya. Pandangan demikian tidaklah salah, sebab identitas kolektif dapat memberi perlindungan bagi kepentingan dan ambisi politik pribadi atau kelompok. Tumbuhnya berbagai gerakan sosial (buruh) juga menggambarkan peta kenyataan sosial, menjelaskan bagaimana masa lampau membentuk masa sekarang dan bagaimana masa sekarang membentuk masa depan. Anggota-anggota yang aktif dalam suatu gerakan sosial mendapat legitimasi atas tindakan-tindakannya tersebut dan menjelaskan kepada kelompok lain, mengapa mereka melakukan tindakan demikian.

Gerakan sosial dapat dibedakan antara gerakan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Di negara dengan rejim otoriter, tidak terdapat apa yang oleh Dahrendorf (1986: 229) disebut persyaratan politis organisasi. Adanya keyakinan kolektif dan identitas kolektif, belum menghantarkan sebuah kelompok semu

menjadi kelompok kepentingan (*interest group*). Keyakinan kolektif termasuk di dalamnya ideologi, baru merupakan persyaratan teknis organisasi. Ideologi tidak mampu menciptakan kelompok-kelompok yang bertentangan (*contencious group*). Meski ideologi sangat penting dalam membangun suatu gerakan sosial, tanpa persyaratan politis organisasi, ideologi atau keyakinan kolektif hanya menempatkan orang-orang tetap sebagai kuasi group. Diiijkannya suatu organisasi melakukan kegiatan politik oleh penguasa merupakan suatu syarat penting dalam mengantarkan *kuasi group* menjadi *interest group*. Teori Dahrendorf tersebut sejalan dengan Tarrow (1996:85) dalam teorinya mengenai struktur peluang politik (*political opportunity structure*) yang menunjuk lingkungan politik yang menyediakan insentif bagi orang-orang untuk melakukan tindakan kolektif sebagai kondisi kemunculan gerakan sosial. Dengan adanya kesempatan politik yang diberikan oleh penguasa, maka gerakan bawah tanah memiliki peluang untuk menjadi gerakan sosial yang nyata.

Teori struktur peluang politik dari Tarrow memberi sumbangan besar dalam studi gerakan sosial. Teori ini dapat memecahkan kebuntuan studi gerakan sosial utamanya bentuk gerakan yang sporadis, perlawanan sehari-hari, huru-hara, riots, dan gerakan sosial yang tidak terorganisasi lainnya. Konsep struktur peluang politik juga membantu menjelaskan bagaimana gerakan sosial menyebar, bagaimana aksi kolektif dikomunikasikan dan bagaimana jaringan sosial dibentuk. Perubahan yang paling penting dalam struktur peluang politik adalah terbukanya akses ke kekuasaan. Gejala demikian umumnya ditandai dengan konflik di antara kaum elit, sehingga sebagian dari elit memerlukan dukungan kelas bawah untuk menopang eksistensinya. Dapat juga berlangsung perubahan blok-blok kekuasaan. Usaha Soeharto untuk menggeser

dukungan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke umat Islam melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pertengahan tahun 1990-an, dipandang sebagai celah kelas menengah-bawah Islam untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan. Tumbuhlah gerakan-gerakan sosial baru yang berbasis cendekiawan dengan mengusung ikatan primordial. Di kalangan kelas bawah khususnya buruh, perpecahan elit tersebut telah dimanfaatkan untuk melakukan pemogokan. Sepanjang tahun 1990-an berlangsung pemogokan buruh yang frekuensi maupun partisipannya paling besar dalam sejarah Indonesia.

Meskipun demikian, tetap menjadi perdebatan apakah identitas kolektif dan peluang politik relevan secara politik? Dalam berbagai kasus, dua faktor tersebut tidak berhasil mentransformasikan kelompok semu ke dalam sebuah gerakan sosial yang nyata. Dengan demikian transisi dari terbentuknya identitas kolektif dan adanya struktur peluang politik ke gerakan sosial memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam teori kemunculan kelompok kepentingan dari Dahrendorf (1986:227-230) suatu kelompok semu akan berubah menjadi kelompok kepentingan nyata jika dipenuhi kondisi teknis organisasi, kondisi politik dan kondisi sosial. Dahrendorf mengabaikan kepemimpinan sebagai kekuatan yang mengintegrasikan individu-individu yang anonim ke dalam sebuah identitas kolektif atau kesadaran kolektif yang nyata. Di antara para peneliti gerakan sosial, William Gamson (1992) memberi perhatian besar atas peran nyata para pemimpin yang disebutnya agensi. Dari berbagai komponen aksi kolektif, Klandermans (2005: 55) menunjukkan peran agensi bahkan lebih penting. Agensi mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi atau kebijakan melalui aksi kolektif. Individu-individu yang anonim perlu dibangkitkan, disatukan ke dalam identitas yang sama serta diyakinkan

bahwa perjuangan kolektif akan memberi dampak positif bagi masa depan mereka. Tanpa adanya individu yang rela berkorban baik waktu, tenaga, biaya bahkan nyawa, tidak akan pernah lahir gerakan sosial. Identitas kolektif hanya akan merupakan penanda kelompok-kelompok. Di sinilah peranan signifikan dari kepemimpinan gerakan. Mereka telah mengubah energi potensial menjadi energi gerak yang nyata dengan cara menghimpun orang-orang yang memiliki pemikiran dan cita-cita yang sama dan selanjutnya mengkampanyekannya. Selain fungsi-fungsi tersebut, guna mempertahankan elan vital gerakan, pemimpin mempunyai fungsi memberikan kepada anggotanya apa yang oleh Tarrow (1996: 14) disebut sebagai insentif selektif. Hanya dengan insentif selektif kepada para pekerja seperti rencana pensiun, kesempatan rekreasi, ketenangan bekerja (tidak takut terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sewaktu-waktu), para buruh dapat dimobilisasi dalam gerakan.

Masih terdapat sebuah persoalan penting bagi transformasi tersebut, yaitu apakah identitas kolektif, peluang politis dan kepemimpinan dapat langsung melahirkan gerakan. Mengacu pada konsep gerakan sosial yang dikemukakan oleh Tarrow dan Touranie di atas, maka perpaduan unsur-unsur tersebut belum memiliki makna politik. Gerakan sosial menantang kepentingan dari kelompok dominan, kebijakan pemerintah, para pejabat pemerintah dan seringkali juga organisasi kekuasaan. Jadi perlu ditambahkan unsur yang membangkitkan tantangan dan penantang. Merujuk pada Allain Touraine (1985: 760) yang menyatakan “gerakan sosial senantiasa didefinisikan oleh konflik” yaitu “konflik di seputar kontrol sosial oleh pola kebudayaan utama”, maka unsur-unsur tersebut perlu ditambahkan pendefinisian yang jelas tentang lawan. Para pemerhati gerakan sosial seperti Gamson (1992) dan Klandermans (2005) menyebut ketidakpuasan kolektif. Sementara Mogdigliani

(1989) yang mengkaji gerakan sosial dan politik menyebutnya paket ideologi sebagai lawan dari gerakan sosial. Dengan menggabungkan keduanya, maka ketidakpuasan kolektif dan ideologi lah yang merupakan basis gerakan sosial. Adanya insentif selektif seperti keamanan kerja, perlindungan organisasi dari ancaman PHK, adanya jaminan mendapat pesangon jika terkena PHK, keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih baik, telah mendorong para buruh ikut dalam serikat buruh. Serikat-Serikat Buruh di Indonesia memiliki dasar pengorganisasian atau ideologi yang berbeda-beda. Hal ini telah membuka persaingan antar serikat buruh, sehingga bukan hanya pengusaha, pemerintah dan organisasi keamanan, baik yang dibentuk pemerintah maupun bukan yang didefinisikan sebagai lawan. Persaingan antar serikat buruh yang dipicu oleh peran intelektual yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) perburuhan dan kinerja serikat buruh lama, juga turut menempatkan SB sebagai lawan SB lainnya. Ketidakpuasan para buruh terhadap kondisi kerja, upah, jaminan sosial dan masa depannya sebagai buruh di satu sisi dan penilaian para buruh terhadap keuntungan yang diraih oleh perusahaan serta kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha, telah mengkonkritkan ketidakpuasan kolektif dan menempatkan pengusaha dan pemerintah sebagai lawan utama.

Melalui penelusuran kepustakaan di atas dapat disimpulkan bahwa terbentuknya gerakan sosial jika terdapat unsur-unsur identitas kolektif, struktur peluang politik, kepemimpinan dan basisnya adalah ketidakpuasan kolektif dan dukungan terhadap paket-paket ideologi. Tantangan kolektif atau pendefinisian yang jelas akan lawan-lawan dalam gerakan, akan menentukan sukses atau gagalnya sebuah gerakan.

Selain itu, lawan yang berposisi sebagai elit baik ekonomi maupun politik akan mendorong sebuah gerakan sosial signifikan secara politik.

B. Gerakan Sosial Terorganisasi

Ada beberapa bentuk gerakan sosial, tetapi disertasi ini lebih memfokuskan pada gerakan buruh terorganisasi, meskipun tindakan buruh seperti protes, pemogokan dan perlawanan sehari-hari akan disinggung. Dengan memfokuskan diri pada gerakan sosial yang terorganisasi, studi ini tidak menaruh perhatian pada perilaku individu seperti partisipasi buruh dalam organisasi gerakan buruh. Sebaliknya kajian mengenai organisasi gerakan buruh ini menyetujui tesis Zald dan Ash (1984: 32) bahwa organisasi merupakan ciri khas penentu gerakan sosial. Dengan organisasi, suatu gerakan sosial menunjukkan interaksi yang penuh pertentangan yang berkelanjutan. Teori-teori tentang protes dan perilaku kolektif yang tidak terorganisasi, memandang organisasi sebagai penghalang. Misalnya teori perlawanan sehari-hari dari James C. Scott (2000: 40). Menurut Scott bentuk perlawanan terorganisasi merupakan cara khas kelas menengah dan cendekiawan, mencari cara politik kelas bawah seperti petani dan buruh dalam hal ini akan sia-sia (Scott, 2000: xxiii). Perlawanan cara biasa seperti memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura patuh dan sabotase, jauh lebih efektif dan berjangka panjang. Perlawanan terbuka apalagi dalam bentuk organisasi merupakan langkah yang tidak rasional, mengancam keamanan diri dan keluarganya (Scott, 2000: 46).

Pendapat bahwa organisasi merugikan bagi gerakan sosial menurut Tarrow (1994:135) dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu membedakan tiga aspek organisasi: organisasi formal, organisasi aksi kolektif dan struktur-struktur

mobilisasi. Ilmuwan seperti Scott hanya melihat organisasi formal, padahal dua aspek lain jauh lebih penting sebagai infrastruktur gerakan sosial. Gejala seperti ini dapat disimak pada berbagai organisasi gerakan sosial, termasuk gerakan buruh di mana gerakan merupakan jaringan antar organisasi. Organisasi gerakan formal adalah organisasi yang umum dikenal dalam studi gerakan sosial. Organisasi ini memiliki struktur kepengurusan yang jelas, mengidentifikasi tujuan, menetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan, melakukan pembagian kerja dan memobilisasi anggota untuk mencapai tujuan. Dimensi kedua adalah *organization of collective action* (organisasi aksi kolektif) yang merupakan bentuk yang dengannya konfrontasi dengan antagonis dapat dilaksanakan (Tarrow, 1996: 135). Organisasi ini membentang dari formasi penentang kontemporer sampai sel-sel sosial, cabang-cabang dan milisi. Jaringan sosial yang sering berubah menjadi solidaritas merupakan kekuatan paling efektif dari organisasi aksi kolektif ini. Dimensi ketiga adalah *mobilizing structure* (struktur pemobilisasi), yaitu hubungan antara pemimpin-pemimpin di pusat dengan aktivitas di tingkat akar rumput (*grassroot*) yang memungkinkan berlangsungnya gerakan dan kelangsungan hidup gerakan. Struktur pemobilisasi bisa dibentuk atau terbentuk sebelum adanya organisasi formal (Tarrow, 1996: 137)

Dalam teori gerakan sosial, organisasi gerakan dijelaskan minimal melalui 3 perspektif. *Pertama*, organisasi sebagai institusi. Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial terjadi sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan tertentu yang timbul di masyarakat. Dalam masyarakat tradisional sering terjadi perpecahan dengan sentimen yang beraneka ragam. Gerakan sosial merupakan institusi modern sebagai tanggapan kolektif terhadap masyarakat yang berantakan (McAdam, 1988:7). Para

pengkaji gerakan sosial klasik seperti Gustav Le Bon (1960), Eric Hoffer (1951, 1988), Blumer (1969), Smelser (1971) dan Robert Gurr (1970, 2002), berada pada kubu yang sama yaitu gerakan sosial sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial dan kerusakan tatanan sosial. Perubahan sosial telah memberi dampak buruk bagi beberapa individu, seperti ketegangan, stress, alienasi, kekecewaan dan ketidakpuasan. Masyarakat menjadi terpecah kolektivitasnya, pertalian sosialnya, sehingga memerlukan suatu tatanan baru. Agregasi individu-individu yang merespon perubahan sosial dan perpecahan kolektivitas tersebut melakukan gerakan sosial. Persoalan transformasi dari ketidakpuasan menjadi aksi kolektif mereka jelaskan dengan merujuk pada kepemimpinan. Melalui perspektif seperti ini, gerakan merupakan institusi di mana individu-individu yang teralienasi mengidentifikasi dirinya.

Kedua, organisasi sebagai sumberdaya. Persoalan sumberdaya dalam gerakan sosial kali pertama dikemukakan oleh Karl Marx. Gerakan sosial dalam sejarah perbudakan, feodalisme dan kapitalisme muda, selalu gagal sebab para buruh masih memiliki kesadaran palsu. Konflik kelas borjuasi dengan kaum proletar akan memiliki arti penting bagi gerakan buruh setelah kaum buruh dapat melakukan transisi dari *class in itself* ke *class for itself*. Di sini para buruh memiliki kesadaran kelas yang merupakan sumberdaya paling kuat bagi gerakan sosial buruh untuk melakukan transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Tetapi, seperti ditunjukkan oleh Dahrendorf (1986) dan Peter L. Berger (1990), ketika kapitalisme telah berkembang demikian maju, ia memproduksi perpecahan di kalangan buruh dan mekanisme-mekanisme kelembagaan yang mengintegrasikan mereka dengan kaum kapitalis. Melalui nasionalisme dan proteksionisme, para buruh bersekutu dengan

kaum kapitalis di negerinya untuk menindas para buruh di Negara Berkembang. Tesis Marx tentang kesadaran kelas sebagai sumberdaya gerakan ternyata tidak cukup untuk membawa kepemimpinan buruh dalam perubahan sosial.

Tesis Lenin (Magnis Suseno, 2003) mengedepankan serikat buruh sebagai sumberdaya gerakan menggantikan proletariat Marx. Di sini untuk kali pertama organisasi gerakan dipandang sebagai kekuatan sentral. Kalau serikat buruh sukses dalam memperoleh kekuasaan, seperti terjadi di Rusia pada 1917, ia akan memimpin perubahan sosial. Bagi Lenin organisasi merupakan solusi bagi masalah aksi kolektif. Hal demikian penting diikuti oleh kelas buruh di negara lain, sebab kelas buruh tidak mampu memproduksi revolusinya sendiri. Tetapi revolusi Rusia gagal menyebar ke negara lain. Di Italia, Antonio Gramsci justru merasakan bahwa organisasi buruh tidak kuat untuk melakukan revolusi. Sebab itu penting untuk mengembangkan kesadaran buruh. Untuk itu diperlukan sumberdaya berupa “intelektual organik” dalam partai buruh. Perhatian terhadap serikat buruh dan intelektual sebagai sumberdaya, mengemuka kembali ketika Solidarismoc, serikat buruh Polandia mampu menantang Pemerintah Komunis dan bahkan menjatuhkannya.

Teori gerakan sosial modern didasarkan pada ketiga elemen ini. Hal demikian terlihat jelas dalam teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization theory*). Asumsi dasar teori ini adalah bahwa gerakan sosial mensyaratkan sebetulnya komunikasi dan organisasi yang canggih, gerakan sosial merupakan sistem mobilisasi yang terorganisasi secara rasional (Rajendra Sing, 2001: 163, 2002: 26). Akar perspektif ini terletak pada Mancur Olson (1969) yang menekankan faktor-faktor obyektif tertentu, sebagai kepentingan, organisasi, sumberdaya, strategi dan kesempatan dalam setiap aksi kolektif. Para aktor dan partisipannya merupakan

individu yang rasional yang mampu mengkalkulasi keberhasilan atau kegagalan gerakan. Argumen demikian jelas bermuatan utilitarian atau menerapkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi kepada ilmu sosial khususnya untuk studi gerakan sosial. Ini berarti orang-orang yang terlibat dalam suatu gerakan telah mengkalkulasi untung-rugi, biaya dan manfaat dari tindakannya.

Organisasi sebagai kekuatan dan sumberdaya gerakan berangkat dari pandangan, bahwa tindakan kolektif diperlukan untuk mencapai tujuan kolektif. Sumberdaya individual terlalu lemah dan mudah dikalahkan oleh lawan. Sedangkan organisasi akan lebih mampu melakukan tekanan sehingga tujuan bersama lebih mungkin dicapai. Seperti dikemukakan oleh McAdam (1982:29) bahwa organisasi gerakan merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan, ketiadaan organisasi yang berkelanjutan, gerakan tidak akan bertahan hidup. Atau seperti ditunjukkan oleh Tarrow (1996:21) bahwa bertahannya suatu gerakan sosial dalam jangka panjang jika gerakan tersebut mampu memelihara interaksi petentangannya dengan negara atau kekuatan dominan. Gerakan sosial itu akan sukses jika diorganisasi dengan baik. Dalam suatu gerakan, organisasi juga berfungsi mengakumulasi sumberdaya dan mengalokasikannya. Begitu sentralnya peran organisasi dalam gerakan sosial Zald dan McCarthy (1987:20) menyebutnya sebagai kekuatan sentral gerakan sosial. Mereka menyebutnya *social movement organizations (SMOs)* yaitu “organisasi yang kompleks atau organisasi formal yang mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan preferensi gerakan sosial atau *countermovement* dan upaya-upaya untuk mengimplementasikan tujuan itu”.

Ketiga, organisasi sebagai tujuan. Berbeda dengan pandangan di atas, pandangan ini menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial bukan sebagai sarana untuk

merealisasikan tujuan, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Organisasi tidak bisa dipandang sebagai kekuatan yang mengakumulasi kapital, mendistribusikannya dan alat perjuangan. Sebab hal seperti itu merupakan bawaan organisasi apapun (Melucci, 1985). Dalam studi gerakan sosial, organisasi seharusnya menjadi fokus kajian. Dengan demikian, kemunculan dan perkembangan gerakan dapat dijelaskan (Cohen, 1985). Merujuk pada argumen tersebut, maka gerakan sosial diarahkan untuk membangun identitas kolektif. Jadi teori ini menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh teori mobilisasi sumberdaya. Oleh sebab itu penekanannya pada proses-proses yang dilalui aksi kolektif dalam membangun identitas dan solidaritas yang mereka pertahankan. Dengan kata lain, seperti dikemukakan oleh Melucci, organisasi gerakan sosial bukan instrumen, tetapi jaringan kelompok-kelompok dan individu-individu yang berbagi dan berpegang pada kultur konfliktual dan pada sebuah identitas kelompok yang menjadi bagian identitas sosial secara umum yang intepretasinya mereka pertentangkan (Klandermans, 2005: 216).

Dengan argumen demikian, berarti identitas sosial bukanlah bawaan dari lahir yang kekal. Meskipun berlangsung akulturasi dan sosialisasi, kelompok-kelompok dan individu cenderung mencari identitasnya masing-masing. Cavallaro (2004:132) menentang doktrin humanisme dan realisme mengenai identitas sosial. Sebaliknya ia menyatakan bahwa identitas sosial sebenarnya merupakan efek sementara dari praktek-praktek kultural yang bermacam ragam. Karenanya ia memeluk gagasan bahwa identitas personal maupun kolektif adalah sebuah konstruksi-konstruksi. Mengacu pada argumen Cavallaro tersebut, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial dalam bentuk organisasi-organisasi dimaksudkan untuk membangun atau

mengkonstruksi identitas. Oleh sebab itu organisasi atau identitas itu sendiri merupakan tujuan gerakan sosial.

Dalam studi gerakan sosial buruh ini, ketiga pandangan di atas bukan untuk dikompetisikan, melainkan diperlakukan saling melengkapi. Hal demikian bertitik tolak dari fakta bahwa lahirnya berbagai gerakan buruh pasca Soeharto tidak terlepas dari usaha untuk membangun tatanan sosial yang mereka anggap paling sesuai dengan gagasan mereka. Pecahnya gerakan buruh lama seperti Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) dan serikat buruh yang lain membuktikan pernyataan tersebut. Sementara itu, kenyataan bahwa tenaga kerja di Indonesia *oversupply* terlebih-lebih di masa krisis ekonomi, organisasi gerakan jelas berfungsi sebagai penghimpun kekuatan dan pendistribusian sumberdaya, selain perlindungan terhadap anggota-anggotanya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri tumbuhnya serikat buruh berlabel keagamaan yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap gerakan buruh yang telah ada. Gerakan buruh jenis terakhir ini meskipun mengusung identitas kultural lama, tetapi menolak jenis gerakan lama yang semata-mata bermuatan ekonomi. Organisasi seperti Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) bercita-cita membangun hubungan industrial yang islami.

C. Fragmentasi Gerakan Sosial

Teori tentang fragmentasi sosial dapat dilacak sejak Herbert Spencer (Ritzer, 2003) mengemukakan konsep diferensiasi sosial. Seperti perkembangbiakan sel dalam tubuh manusia, masyarakat pun mengalami pertumbuhan atau penggandaan. Kemajuan masyarakat menyebabkan terjadinya pembagian kerja dan pelapisan sosial. Semakin kompleks kemajuan masyarakat, strukturnya terus bertambah, baik

hasil perkembangbiakan struktur lama maupun pertumbuhan kelas-kelas sosial. Dengan perspektif evolusionis, Spencer menjelaskan kemajuan masyarakat yang ditandai dengan deferensiasi struktur. Teori ini dapat menjelaskan penambahan struktur, yang diibaratkan perkembangbiakan sel, tetapi tidak mampu menjelaskan gerakan sosial untuk meningkatkan perolehan dan penguasaan sumberdaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok primordial.

Mengingat studi ini juga mencakup gerakan buruh yang berbasis primordial, maka diperlukan teori yang mampu menjelaskan kelompok-kelompok seperti itu. Untuk itu dikemukakan teori David Apter (1988) tentang pluralisme (kemajemukan). Pada mulanya konsep ini merujuk pada masalah masyarakat plural, yaitu masyarakat yang penduduknya tidak homogen, tetapi terbagi dalam kelompok-kelompok suku, rasial dan agama, di mana beberapa gabungan faktor-faktor ini meningkatkan kecenderungan ke arah konflik. Melalui pembangunan ekonomi, perbedaan-perbedaan dapat dikikis dan mendorong terjadinya saling ketergantungan. Tetapi pembangunan ekonomi juga memunculkan kelompok-kelompok baru, seperti pengusaha, buruh dan kelompok-kelompok profesional, sehingga kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat semakin kompleks. Ada tiga jenis pluralisme yang dikemukakan oleh Apter, yaitu pluralisme primordial, pluralisme liberal dan pluralisme konsosiasional. Pluralisme primordial merupakan kemajemukan ikatan-ikatan primordial, seperti agama, etnik, ras dan kedaerahan. Sentimen seperti itu digunakan untuk mengorganisasi partai politik maupun kelompok kepentingan. Sedangkan pluralisme liberal ditandai dengan lenyapnya kelompok-kelompok primordial dan terpecah-pecahnya kelas, sehingga tidak ada individu yang sepenuhnya dapat diidentifikasi ke dalam afiliasi tunggal kelas, etnis, pekerjaan,

agama dan sebagainya. Jika pemisahan-pemisahan primordial yang kuat tersebut telah berhasil diubah menjadi sarana demokrasi yang efektif, maka disebutnya pluralisme konsosiasional.

Dua teori di atas telah membantu menjelaskan proses fragmentasi dalam masyarakat. Berhubungan dengan studi ini, selain fragmentasi primordial dan fragmentasi politik yang mengikuti garis partai politik, juga ditunjukkan adanya fragmentasi ketrampilan (*skill*) yang oleh Ralf Dahrendorf (1986) disebut dekomposisi buruh (*decomposition of labor*). Untuk menjelaskan teori Dahrendorf dan posisi studi ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu teori Karl Marx yang menjadi sasaran kritik Dahrendorf.

Menurut Marx (Magnis Suseno, 2000) yang menentukan perkembangan masyarakat bukan kesadaran, melainkan keadaan masyarakat yang nyata. Sedangkan keadaan masyarakat yang nyata adalah produksinya dan pekerjaannya. Dilihat dari pekerjaannya ini, masyarakat terdiri dari tiga kelas, yaitu kaum buruh yang hidup dari upah, kaum pemilik laba yang hidup dari laba dan para tuan tanah yang hidup dari rente tanah. Dalam perkembangan kapitalisme, tuan tanah akan menjadi sama dengan para pemilik modal, maka pembahasan Marx selanjutnya hanya dua kelas yang pertama. Dalam hubungan produksi, dua kelas ini saling berhadapan yang ditandai dengan hubungan eksploitatif, di mana kelas pemilik alat produksi hidup dari penghisapan tenaga kerja kelas buruh. Ujung dari hubungan kekuasaan dan eksploitatif itu adalah perbedaan kepentingan antar keduanya, di mana kelas pemilik alat produksi berkepentingan untuk mengusahakan laba sebanyak-banyaknya dengan cara menekan biaya tenaga kerja. Sebaliknya, kelas buruh berkepentingan untuk mendapat upah sebanyak-banyaknya, untuk mengurangi jam kerja dan untuk

menguasai sendiri kondisi-kondisi pekerjaan mereka dan untuk mengambil alih pabrik tempat mereka bekerja dari tangan kelas pemilik. Kelas buruh lah yang berkepentingan dengan perubahan. Untuk itu diperlukan persyaratan dasar yaitu kesadaran kelas dan proletarianisasi.

Dalam teorinya tentang perubahan sosial itu, Marx menumpukan kekuatannya pada buruh. Buruh dipandang sebagai kekuatan utuh, bersatu dan diikat oleh kesadaran kelas yang semakin memuncak seiring dengan meningkatnya penghisapan oleh kelas pemilik alat produksi. Teori Marx tersebut dikritik oleh Dahrendorf (1986) yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat industri abad XX, terjadi dekomposisi modal dan dekomposisi buruh. Dengan demikian buruh bukan kelompok homogen yang tunggal, terdapat buruh trampil, semi trampil dan tidak trampil. Orientasi dan institusi kelompok-kelompok buruh ini berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan buruh tidak bersatu. Juga terjadi dekomposisi modal, kedua dekomposisi ini melahirkan kelas menengah yang tidak diduga oleh Marx. Jika Marx meramalkan terjadinya revolusi oleh kaum buruh, Dahrendorf menunjukkan bahwa pertentangan antara kedua kekuatan dalam produksi diselesaikan secara institusional. Untuk itu peranan serikat buruh sangat besar dalam membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pengusaha. Munculnya serikat buruh juga menyediakan tangga sosial bagi buruh untuk menaiki posisi-posisi yang lebih tinggi dengan imbalan yang lebih baik. Dengan demikian serikat buruh telah memperlancar mobilitas sosial serta mengatur konflik dengan majikan.

Berhubungan dengan dua teori besar tersebut, posisi studi ini adalah menunjukkan tidak utuh dan bersatunya buruh, bukan dengan mengikuti teori Dahrendorf tentang terjadinya dekomposisi buruh, melainkan menunjukkan adanya

fragmentasi gerakan-gerakan sosial buruh yang merintanginya terbentuknya serikat buruh yang kuat. Fragmentasi terjadi sebagai konsekuensi dari tidak terjadinya pendalaman industri, sementara secara kuantitatif jumlah buruh terus meningkat. Industrialisasi yang telah berlangsung sejak Pelita I (1969) setelah hampir 40 tahun tetap didominasi industri ringan yang tidak memerlukan ketrampilan buruh yang tinggi. Pendalaman industri di Indonesia sangat lambat yang kebanyakan industri manufaktur ringan, seperti tekstil dan produk tekstil, sepatu dan makanan ringan. Jenis-jenis industri di Indonesia tidak berkembang, strukturnya sangat sempit dan dangkal. Tingkat teknologi yang digunakan masih berupa pengolahan sederhana akan sumber kekayaan alam dan pabrikasi serta perakitan bahan baku dan komponen impor.

Tidak terjadinya pendalaman industri di negeri ini mempunyai dampak pada lambatnya perkembangan ketrampilan tenaga kerja yang pada gilirannya upah antara buruh operator dan administrasi tidak berbeda jauh. Upah mereka sama-sama mengacu kepada Upah Minimum Provinsi, sehingga segregasi antar mereka tidak didasarkan pada tingkat-tingkat ketrampilan pekerjaan. Perkembangan industri di suatu negara dipetakan dengan menggunakan standar ISIC (*International Standard Industrial Classification*) yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut standar ini terdapat 8 tingkat industrialisasi seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Keluaran masing-masing kelompok industri, idealnya paralel dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga menggambarkan hubungan jenis industri, penyerapan tenaga kerja dan upah yang dinilai dari produktivitasnya. Demikian pula proporsi keluaran idealnya semakin meningkat ke industri berat dan industri rekayasa berat yang didominasi kemampuan teknologi dan intelektual. Penyebaran tenaga kerja pada

berbagai jenis industri yang menggambarkan tingkatan kemampuan tenaga kerja, akan berdampak pada pola-pola pengorganisasian buruh. Di Indonesia struktur industrinya seperti ditunjukkan oleh Hal Hill (1991) dan Thee Kian Wie (1995), didominasi oleh jenis industri ringan yang menyerap tenaga kerja sekitar 77 persen.

Tabel 1. Struktur Industri Menurut ISIC

| Kode | Jenis Industri |
|-------------|--|
| 31 | Produk pangan, minuman, tembakau |
| 32 | Tekstil, produk tekstil, produk kulit, alas kaki |
| 33 | Produk kayu dan mebelair |
| 34 | Produk kertas, percetakan dan penerbitan |
| 35 | Kimia dasar, produk karet dan plastik |
| 36 | Porselin, produk gelas, semen, produk bangunan, bahan tambang |
| 37 | Logam Dasar |
| 38 | Produk Logam, mesin, peralatan listrik, peralatan transpor dan peralatan profesional |

Sumber: Publikasi PBB No. E.90/XVII.11 tahun 2005

Sebagai konsekuensinya, tidak berlangsung diferensiasi pekerjaan dan juga diferensiasi buruh. Isu-isu pekerjaan tidak dominan karena tidak diperlukan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari dan lebih mudah ditarik kepada isu-isu di luar pekerjaan, seperti mendukung calon kepala daerah atau calon presiden. Kecenderungan pengorganisasian serikat buruh kemudian lebih banyak dipengaruhi

oleh pertimbangan politik, selain era demokratisasi menyediakan lahan subur, juga warisan sejarah gerakan buruh di negeri ini tidak bisa memisahkan diri dari politik.

D. Kelemahan Gerakan Buruh

Gerakan buruh yang kuat adalah gerakan buruh yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal perburuhan dan mampu melindungi anggotanya dari perlakuan sewenang-wenang pengusaha terutama dalam pengupahan dan jaminan sosial. Gerakan buruh yang demikian ini belum pernah muncul di Indonesia. Baik di masa Soekarno, Soeharto maupun pasca Soeharto, serikat-serikat buruh gagal mempengaruhi pemerintah dalam penentuan upah minimum regional (propinsi atau kabupaten dan kota) bahkan juga gagal melindungi anggotanya dari pemutusan hubungan kerja. Mengapa serikat buruh gagal meningkatkan kesejahteraan anggotanya?

Menurut Hyun-Seong Yu (1993) kuat lemahnya gerakan buruh terkait dengan struktur industri. Yang dimaksud dengan struktur industri adalah konsentrasi kapital dan komposisi sektor industri. Ketika industri Korea Selatan diletakkan pada industri substitusi impor (ISI), yaitu produksi lokal barang-barang konsumen tidak tahan lama seperti tekstil dan makanan, pemerintah membatasi kebebasan serikat buruh dengan hanya mengizinkan satu organisasi buruh yaitu Federasi Serikat Pekerja Korea (FKTU). Organisasi korporatis ini mampu menekan keresahan buruh, sebab pasca perang Korea yang diperlukan adalah pemulihan ekonomi. Program industrialisasi demikian memperoleh dukungan Amerika Serikat yang terus memberikan bantuan dana. Tetapi pasar dalam negeri yang kecil, memaksa perubahan kebijakan industrialisasi. Mulai tahun 1962 dilakukan industrialisasi

berorientasi ekspor (EOI). Ini pilihan yang tepat mengingat sumberdaya alam Korea kurang menguntungkan selain pasar dalam negeri yang sempit. Industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan makanan merupakan industri dominan. Pembagian kerja internasional baru (NIDL) dapat mengikutkan negara-negara industri baru seperti Korea Selatan ini untuk ikut dalam persaingan global. Salah satu kekuatan negara pinggiran seperti ini adalah upah buruh murah.

Pada periode EOI barang-barang padat karya dan berteknologi rendah ini memiliki implikasi penting bagi gerakan buruh. Para aktivis buruh yang tidak bisa menerima kebijakan korporatisme ditangkapi dan dipenjarakan. Di sini negara secara aktif menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin produksi barang-barang ekspor. Selain itu jenis teknologi yang dibutuhkan oleh industri demikian tergolong rendah, sehingga tidak berlangsung mobilitas vertikal di kalangan buruh. Hal demikian menghadang lahirnya gerakan buruh yang kuat. Ketika kebijakan industri mulai mengarah ke industri berat dan kimia pada tahun 1980-an, berlangsung perubahan dalam konsentrasi modal, pertumbuhan kawasan industri yang pesat dan perubahan komposisi kelas buruh. Tiga gejala ini memainkan peranan penting dalam gerakan buruh di Korea Selatan.

Industri berat dan kimia memerlukan modal yang besar dan hanya para pemodal besar yang dapat ikut serta. Kredit bank yang disalurkan untuk industri demikian ini meningkat pesat selama kurun waktu 1985-1990. Gejala ini diikuti dengan pertumbuhan pabrik-pabrik dan kenaikan upah pekerja. Sampai awal tahun 1990 industri berat telah menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding industri ringan dengan upah dua kali lebih besar buruh di sektor industri ringan. Pertumbuhan komunitas buruh berlangsung dengan cepat dan membantu pertumbuhan kesadaran

kelas. Karakteristik buruh industri berat dan kimia ini berbeda dengan periode sebelumnya. Ciri buruh yang terakhir ini dari pendidikan dan ketrampilan lebih tinggi dan memiliki jaringan dengan kaum intelektual kota terutama mahasiswa. Para buruh juga diorganisasi mengikuti jenis industri, sehingga persoalan perburuhan pada suatu gerakan tidak sama dengan gerakan lainnya. Negara tidak bisa lagi mempraktekkan cara-cara lama untuk menundukkan para aktivis buruh. Menghancurkan gerakan buruh dengan cara lama berarti menghancurkan produksi yang sangat penting artinya bagi ekonomi Korea Selatan yang mengandalkan pada ekspor barang-barang berteknologi menengah. Dengan demikian, perkembangan struktur industri Korea Selatan telah membantu pertumbuhan gerakan buruh yang kuat.

Penelitian Sunguk Yoon (2001) untuk kasus Brasil dan Korsel memperlihatkan pentingnya ideologi dan kepemimpinan nasional yang pro buruh dalam membangun gerakan buruh yang kuat. Berbeda dengan Korsel yang tidak pernah memunculkan ideologi dan kepemimpinan nasional pro buruh, Brasil semasa kepemimpinan Vargas lebih populis. Sejak awal kepemimpinannya tahun 1942, Vargas membuat beberapa kebijakan pro buruh seperti undang-undang kesejahteraan sosial, tunjangan pensiun dan pelayanan medis. Doktrin ini dikenal sebagai *trabalhismo* atau buruhisme. Dengan menekankan koalisi antara buruh dan negara, Vargas menggunakan *trabalhismo* untuk memobilisasi dukungan buruh. Partai Komunis Brasil (PCB) yang sempat dibekukan, dilegalisasi kembali bersamaan dengan pembentukan Partai Buruh Brasil (PTB) oleh Vargas. Serentak dengan itu dilakukan pengetatan terhadap Partai Sosial Demokratik (PSD). Kekuatan buruh yang tumbuh dengan pesat di era industrialisasi tahun 1950-an, ternyata lebih banyak

yang bergabung dalam PTB dan PSD. Perkembangan ini menghambat Partai Komunis Brasil. Pertumbuhan gerakan buruh baik lokal maupun nasional yang demikian pesat, telah menyulitkan usaha PCB untuk menguasai kelas buruh. Strategi Vargas yang dikenal sebagai aliansi populis ini menggantikan aliansi akomodasionis yang telah lama mapan di Brasil (Collier and Collier, 1991: 105). Jika jenis aliansi pertama ditandai dengan kebijakan populis dan mobilisasi buruh serta petani dalam skala yang lebih terbatas, aliansi kedua muncul dari dalam elit-elit konservatif, pembaharu terbatas yang umumnya para pengusaha dan militer. Di bawah aliansi akomodasionis, ideologi dan kepemimpinan yang pro elit kurang menguntungkan para buruh. Gerakan buruh menghadapi dilema, di satu sisi sangat kuat secara politis, di sisi lain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Gerakan buruh di Amerika Latin lebih merupakan gerakan politik dibanding gerakan sosial. Peraturan perburuhan yang ada tidak memberi peluang peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja (Chris Manning, 2004). Biaya tenaga kerja sangat tinggi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan juga demikian, sehingga kemiskinan di negara Amerika Latin termasuk yang tertinggi di dunia.

Studi Kim Scipes (2003) terhadap Kilusang Mayo Uno (Gerakan Satu Mei) yaitu serikat buruh yang cukup besar dan berkembang di Filipina, memperlihatkan pentingnya tiga prinsip gerakan yaitu *genuine*, *militant* dan *nasionalis* dalam membangun gerakan buruh yang kuat. Dengan prinsip “sejati atau tulen” yang dimaksud adalah bahwa KMU dibentuk oleh para buruh dan dijalankan oleh para buruh. Para anggota diberi semua informasi dan memutuskan kebijakan yang dijalankan oleh organisasi. “Militant” maksudnya KMU tidak akan pernah mengkhianati kepentingan kelas pekerja bahkan jika mengancam hidup mereka

sendiri. Dengan “nasionalis”, KMU percaya bahwa kekayaan Filipina menjadi milik rakyat Filipina termasuk para buruh dan kedaulatan nasional tidak dapat dikompromikan. Dengan tiga prinsip ini, KMU berhasil hidup menghadapi penindasan, penyiksaan dan perlakuan keras seorang diktator (Scipes, 1987: 12). Selain itu prinsip *Genuine Trade Unionism (GTU)* atau perserikatan pekerja sejati memperluas ruang lingkup serikat buruh melampaui tempat kerja, yaitu memasukkan konsep perjuangan ekonomi bangsa dan hubungan-hubungan sosial. Konsep ini telah mengarahkan perjuangan KMU menemukan lawan tanding yang konkrit, yaitu kaum imperialis Amerika Serikat dengan pangkalan Angkatan Laut di Subic dan Clark, Bank Dunia, IMF dan AFL-CIO.

Kekuatan KMU diperoleh melalui perjalanan panjang serikat ini. Sejak berdirinya 1 Mei 1980, KMU melakukan pendidikan kaderisasi yang sangat luas dan terarah kepada para anggotanya. Sejalan dengan itu dilakukan pembentukan jaringan dengan gerakan sosial lain, khususnya petani, nelayan, penduduk miskin kota, gereja dan mahasiswa. Program pendidikan KMU tersusun dalam tiga jenjang yaitu PAMA, GTU dan KPD. PAMA adalah kursus singkat tentang hak dan kewajiban pekerja, dampak buruk imperialisme dan pentingnya para buruh ikut serta menjaga kedaulatan nasional. GTU merupakan kelanjutan PAMA dan isinya lebih luas tentang perburuhan. Kajian tentang serikat-serikat buruh di Filipina dilakukan termasuk tentang kegagalannya. Serikat buruh “kuning” yaitu SB yang tidak sejati atau kolaborasionis dan perlunya membangun serikat pekerja sejati melalui solidaritas dan perjuangan pembebasan kelas pekerja dari penindasan. KPD merupakan jenjang kursus paling tinggi yang isinya mengarah pada perjuangan atas demokrasi nasional. Kelas buruh perlu menjadi kekuatan untuk turut serta

menentukan masa depan Filipina. Mengingat pluralitas sosial, kaum buruh juga menyadari bahwa usaha membangun demokrasi nasional tidak mungkin mereka lakukan. Diperlukan aliansi dengan petani, nelayan, perempuan, penduduk miskin kota, gereja dan mahasiswa.

Pembentukan jaringan dengan kekuatan sektoral lain dimaksudkan untuk memperluas perjuangan bahwa KMU bukan hanya untuk kepentingan buruh. Untuk itu telah berhasil dikomunikasikan *welga ng bayan*, yaitu pemogokan umum atau pemogokan rakyat yang dimotori oleh buruh. Setelah berhasil melakukan *welga ng bayan* sebanyak 3 kali, pada Mei 1985 KMU mengorganisasi aliansi nasional yang disebut BAYAN yang berarti Aliansi Patriotik Baru. Aliansi ini terstruktur dari pusat ke daerah dan berhasil melakukan pemogokan umum pada tahun 1985, 1987 dan 1989. Melalui *welga ng bayan* dan BAYAN, KMU berhasil menarik buruh untuk terlibat dalam isu-isu nasional yang mempengaruhi kehidupan buruh, seperti kenaikan harga minyak, penentuan upah nasional, penutupan pangkalan militer AS dan impor komoditi primer.

Keberhasilan KMU sebagai serikat buruh yang kuat juga dipengaruhi oleh keberhasilan menjaga independensinya dengan partai politik khususnya Partai Komunis Filipina (CPP). Program CPP dan KMU serta cara-cara mencapai tujuan berbeda. KMU lebih menempuh cara-cara perdamaian, karakter perjuangannya parlementer dan tidak bermaksud mengubah konstitusi. KMU berhasil menarik isu-isu pabrik ke tingkat nasional, sehingga perjuangan ekonomi dan politik berjalan bersamaan. Sedangkan CPP seperti yang dilakukan di Filipina bagian selatan, melakukan perjuangan secara militer dan berusaha untuk mengganti konstitusi Filipina. Apa yang ditunjukkan oleh KMU dalam hubungannya dengan CPP

memperkuat argumen Miriam Golden (1988:245) bahwa di mana partai komunis diperlakukan legal di suatu negara dan memiliki dukungan massa, sulit bagi partai komunis untuk mengontrol buruh terorganisasi apalagi jika serikat buruh terfragmentasi secara ideologis dalam orientasi kebijakan mereka bahkan secara efektif bergerak melawan partai komunis.

Berdasarkan kajian tiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel tunggal yang dapat menjelaskan kuat lemahnya gerakan buruh. Baik ideologi rejim, strategi industrialisasi dan struktur industri maupun keaslian dan militansi gerakan, secara bersama-sama menyokong gerakan buruh yang kuat. Industrialisasi menyediakan pekerja industri yang terus bertambah dan hal demikian merupakan modal bagi gerakan buruh yang kuat. Korea Selatan merupakan kasus khusus dalam transisi ke industrialisasi sebab peranan besar Amerika Serikat baik dalam permodalan maupun bantuan kepada negara tersebut dalam memasuki pasar global. Keberhasilan Korea Selatan tidak mungkin diikuti oleh negara-negara yang lebih belakangan melakukan industrialisasi. Pada umumnya lebih belakangan industrialisasi dilakukan, lebih berat perjuangan buruh dan organisasi-organisasinya.

Sejarah industrialisasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sifat negara pasca kolonial. Hal ini membawa implikasi serius pada gerakan buruh, yaitu bahwa lemahnya gerakan buruh di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari sifat negara pasca kolonial tersebut. Masuknya kapital dalam bentuk *Culturstelsel* (tanam paksa) difasilitasi negara dengan menekan para petani. Negara selanjutnya membantu pemodal untuk mengakumulasi kapital. Ketika kapitalisme beralih dari perkebunan ke industri manufaktur dan perbankan, negara secara aktif membantu kapitalis dalam membangun kelancaran bisnis yang oleh Fred Block (1977) disebut

business confidence. Pola demikian terus berlangsung sampai sekarang. Pemerintah Orde Baru dalam usahanya menciptakan iklim bisnis yang pro kapital memberangus gerakan sosial bukan hanya gerakan buruh meskipun gerakan buruh merupakan target utama (Moertopo, 1975:13). Dominannya militer dalam pemerintahan Orde Baru, telah menghadapkan semua gerakan sosial buruh dengan militer. Hal demikian juga berakar pada sejarah kebangkitan Orde Baru yaitu pembunuhan atau pembantaian massal para aktivis kiri tahun 1965/1966. Dengan konsep massa mengambang (*floating mass*), pemerintah mencegah bangkitnya politik mobilisasi dan gerakan sosial.

Teori Kim dan Yoon di atas merujuk pada negara-negara yang tidak kelebihan tenaga kerja. Di Indonesia, pengangguran merupakan masalah sosial yang serius. Besarnya angka pencari kerja turut mempengaruhi tidak efektifnya gerakan buruh. Tidak mengherankan jika para buruh memasuki organisasi lebih didorong keinginan mempertahankan pekerjaannya. Gejala demikian masih ditambah dengan sifat kapital yang semakin cair. Seperti dikemukakan oleh Winters (2003), di Indonesia peranan modal asing dalam industri manufaktur demikian besar. Para investor asing ini merupakan pelaku-pelaku yang memiliki mobilitas tinggi dan dengan demikian mengubah para pekerja Indonesia semakin rapuh karena pasar kerja semakin sempit. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, transportasi dan perbankan, perpindahan modal antar negara berlangsung dalam waktu yang sangat cepat.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

DAN TEORITIS

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIS

Pada bagian ini diuraikan kerangka konseptual untuk kajian gerakan sosial buruh khususnya kajian mengenai fragmentasi gerakan. Kerangka ini mencakup elaborasi konsep gerakan sosial, teori utama tentang gerakan sosial buruh dan fragmentasi gerakan buruh. Untuk membimbing penelitian, pada bagian akhir dikemukakan hipotesis penelitian ini.

A. Gerakan Sosial Buruh

Ada tiga pendekatan berbeda terhadap konsep gerakan sosial. Gerakan sosial dapat dikaji dari respon kelompok atau bagian dari masyarakat terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung. Menjelaskan gerakan sosial sebagai produk dari akumulasi frustrasi, *collective mind*, deprivasi relatif, kesenjangan antara harapan dan kenyataan dan bentuk perlawanan sehari-hari, semata-mata menonjolkan reaksi sekelompok orang. Pendekatan demikian mengabaikan usaha-usaha secara sadar yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memulai suatu perubahan. Terdapat pula penjelasan yang mengedepankan kalkulasi untung-rugi dan manfaat. Pendekatan ini hanya melihat gerakan sosial sebagai sesuatu yang *given*, mengabaikan sejarah kegigihan sekelompok orang untuk memulai suatu perubahan atau menentang perubahan. Pendekatan ketiga yang lebih menonjolkan dimensi historis yang holistik, yaitu menjelaskan gerakan sosial sebagai usaha serius sekelompok orang untuk memulai suatu perubahan. Dimulai dari menawarkan ide, meyakinkan orang-orang pentingnya sejarah masa depan dan jalan baru yang mereka tawarkan (Bandingkan dengan Peter Burke, 2000: 135-136).

Definisi gerakan sosial minimalis cenderung membatasi gerakan sosial sebagai respon sekelompok orang (buruh) seperti protes, pemogokan, pencurian, pelambatan kerja (*slow down*) dan sejenisnya. Argumen dari pendukung konsep minimalis ini adalah jika gagasan, sejarah dan organisasi gerakan dimasukkan, konsep gerakan sosial menjadi sangat luas yang sukar dibedakan dengan partai politik (Bottomore, 1983). Selanjutnya dikemukakan bahwa organisasi, ide-ide dan sejarah pergerakan tetap harus disisihkan dari konsep tentang gerakan sosial guna memungkinkan analisis tentang bentuk-bentuk perlawanan yang lebih prosaik antara kekuatan buruh (petani) dengan pihak yang mencoba mengambil alih sumberdaya buruh (petani). Studi tentang perlawanan petani tidak akan mengambil bentuk terorganisasi yang berdurasi panjang dan memerlukan banyak energi. Cara-cara demikian hanya ditemukan di kalangan kelas menengah (James C. Scott, 2000).

Para peneliti lain lebih menyukai konsep gerakan sosial yang luas. Mereka berpendapat bahwa konsep yang minimalis akan menyingkirkan hakekat sebuah gerakan yaitu ide-ide pergerakan, struktur peluang politik, organisasi, perlawanan kolektif dan interaksinya secara kontinyu dengan kekuasaan (McCarthy dan Zald, 1976; John Markoff, 2002). Munculnya gerakan-gerakan dengan berbagai motivasi para aktivisnya perlu dikaji secara seksama, sebab terdapat ide mengenai relasi sosial yang mereka tawarkan dan ingin dikembangkan. Guna memahami aspek-aspek tersebut, diperlukan konsep gerakan sosial yang luas. Kata gerakan (*move*) berarti aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang asalnya dari bawah ditujukan ke atas. Tindakan tersebut bukan sekedar tindakan, tetapi tindakan yang mengandung makna yang berbeda dengan kekuatan dominan. Oleh sebab itu “gerakan sosial” harus memiliki gagasan tentang sistem relasi yang berbeda dengan

kekuatan dominan. Arah gerakan yang ditujukan kepada kekuasaan lazim dijumpai pada semua gerakan sosial yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan kekuatan dominan, sebab cita-cita suatu gerakan sosial adalah untuk membangun kekuatan strategis atau kelompok strategis (Evers dan Schiel, 1990).

Banyak teori gerakan sosial yang hanya menggunakan salah satu pendekatan di atas, sehingga tidak memberi penjelasan yang memadai dan utuh mengenai suatu gerakan sosial. Pendekatan yang historis dan holistik perlu dilakukan bukan hanya gagasan-gagasan untuk membangun suatu masyarakat yang dicita-citakan, tetapi juga pertarungan dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan pertarungan internal dalam gerakan, sehingga gerakan tersebut berhasil atau gagal mempertahankan gagasan dalam rangka meraih dan menguasai sumberdaya yang lebih besar di masyarakat. Konsep yang memenuhi syarat-syarat seperti itu dikemukakan oleh Sidney Tarrow (1996:4) yang merumuskan gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan kolektif (*collective challenges*) oleh orang-orang dengan tujuan bersama dan solidaritas yang berinteraksi secara terus menerus dengan kaum elit, lawan dan penguasa.

Menggunakan pendekatan dan konsep tersebut untuk mengkaji gerakan sosial, mempunyai beberapa kelebihan:

1. Konsep tersebut sejalan dengan makna harfiah gerakan (*move*), yakni tindakan sekelompok orang yang arahnya dari bawah ke atas.
2. Konsep ini bisa diterapkan untuk berbagai jenis gerakan sosial, baik gerakan petani, gerakan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan pecinta lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian cakupan studi

gerakan sosial sangat luas, mulai dari ide, usaha-usaha penyebaran ide, perlawanan dari kekuatan dominan maupun kekuatan horisontal, lingkungan di mana gerakan sosial itu bangkit dan organisasi serta perkembangan (termasuk perpecahan) organisasi. Konsep ini juga bisa menampung gerakan sosial buruh yang mengusung agama, etnik atau satuan wilayah. Hal inilah yang menjadi pembeda paling utama di antara studi-studi gerakan sosial.

3. Konsep tersebut menegaskan bahwa gerakan sosial melekat pada semua kelompok dengan motivasi utama meningkatkan penguasaan dan perolehan sumberdaya guna mencapai posisi strategis. Untuk itu, maka interaksi secara kontinyu dengan lawan, elit dan kekuasaan, terus dipelihara.
4. Konsep tersebut menempatkan negara dan masyarakat sebagai arena pertarungan antar kelompok atau antar kekuatan pergerakan. Negara dan masyarakat bukan entitas yang statis, tetapi dinamis yang merupakan medan persaingan antar kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. Meskipun demikian, negara juga bukan entitas yang pasif, sebab para pejabatnya memiliki kepentingan yang bisa sejalan atau berlawanan dengan gerakan sosial buruh.

B. Fragmentasi Gerakan Sosial Buruh

Setelah mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan kolektif (*collective challenges*) oleh orang-orang dengan tujuan bersama dan solidaritas yang

berinteraksi secara terus menerus dengan kaum elit, lawan dan penguasa, fragmentasi gerakan sosial buruh harus didefinisikan mengikuti konsteks sosial. Hal ini penting sebab semua konsep dan teori muncul dari konteks sosial, ekonomi dan politik yang berbeda-beda. Fragmentasi gerakan sosial adalah perpecahan gerakan sosial baik atas dasar aliran politik, tujuan ekonomi maupun kepentingan para aktivis gerakan. Fragmentasi gerakan sosial juga merujuk pada pola-pola pengorganisasian massa (buruh) dan basis sosial, seperti *labor union*, *trade union*, *enterprice union*, *general union* dan *regional union* selain gerakan sosial yang berbasis agama. Definisi ini tidak terbatas pada wilayah sosial, tetapi meliputi wilayah ekonomi dan politik. Sebuah konsep yang luas terutama bermanfaat untuk menjelaskan dan menganalisa fragmentasi gerakan sosial di Negara Berkembang, terutama negara-negara yang terlambat melakukan industrialisasi. Negara-negara seperti ini antara lain dicirikan oleh konflik yang serius antara kebijakan industrialisasi substitusi impor dengan industrialisasi berorientasi ekspor, peranan negara yang besar, otoriterisme dalam proses industrialisasi, tidak berlangsungnya pendalaman industri dan bagi negara yang kelebihan tenaga kerja ditambah dengan mobilitas tenaga kerja desa-kota yang sangat tinggi, rendahnya ketrampilan tenaga kerja, kesejahteraan buruh yang rendah dan kecenderungan kuat partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan buruh.

Dengan memperhatikan lingkungan sosial ekonomi dan politik tersebut, studi ini mengedepankan gagasan bahwa fragmentasi gerakan sosial tidak bisa dipahami sebagai hasil dari proses deferensiasi sosial model spencerian. Teori Spencer berhasil menjelaskan pertumbuhan masyarakat dan proses sosial menuju masyarakat yang kompleks. Model tersebut memandang proses deferensiasi sebagai produk alami, *by nature*; yang akan berlangsung pada masyarakat apapun yang sedang melangsungkan

pembangunan. Deferensiasi akan berlangsung dengan sendirinya, dan bukan usaha-usaha secara sadar dari sekelompok orang untuk melakukan perubahan.

Dalam penelitian tentang fragmentasi gerakan, terdapat kecenderungan untuk memfokuskan pada tahapan industrialisasi. Fragmentasi gerakan buruh berlangsung dalam masyarakat industri maju yang ditandai dengan terus meningkatnya kebutuhan penggunaan teknologi modern dan menuntut penguasaan teknologi maju dari para buruh (Dahrendorf, 1986). Fragmentasi gerakan buruh yang berlangsung mengikuti keahlian para buruh ini terjadi di masyarakat yang industrialisasinya berhasil. Kemajuan industri ditandai dengan berlangsungnya pendalaman (*deepening*), sehingga juga berlangsung diversifikasi jenis-jenis pekerjaan, ketrampilan, mobilitas kerja secara vertikal dan hal ini membawa implikasi serius bagi pola-pola gerakan buruh.

Sementara itu beberapa peneliti memahami fragmentasi sosial sebagai konsekuensi dari kemajemukan (pluralitas) sosial. Para peneliti seperti Clifford Geertz (1992), Harold Crouch (1983) dan David Apter (1989), memahami fragmentasi sosial sebagai masyarakat plural, yaitu masyarakat yang penduduknya tidak homogen, tetapi terbagi dalam kelompok-kelompok suku, rasial dan agama, di mana beberapa gabungan faktor-faktor ini meningkatkan kecenderungan ke arah konflik. Ilmuwan politik Harold Crouch (1983) dan sosiolog J.W. Schoorl (1983) menjelaskan masyarakat plural di negara-negara bekas jajahan sebagai masyarakat yang terfragmentasi. Penjelasan seperti ini merujuk pada terpecah-pecahnya masyarakat berdasarkan ikatan primordial seperti suku, agama dan daerah asal. Tetapi kemajemukan seperti itu dapat diintegrasikan dengan membangun identitas nasional, seperti bahasa nasional dan ideologi nasional yang mampu mengatasi ikatan-ikatan

primordial. Bahasa nasional (bahasa Indonesia) dan ideologi Pancasila mampu mengintegrasikan ratusan etnik dan puluhan sistem kepercayaan di Indonesia. Nasikun (1986) menyebut kekuatan integratif dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia adalah berlangsungnya *cross cutting affiliations*.

Konsep tentang fragmentasi gerakan sosial buruh yang dihubungkan dengan kemajuan industri, tidak dapat diterapkan untuk Indonesia sebagaimana akan ditunjukkan oleh studi ini. Demikian pula konsep masyarakat plural yang sepenuhnya diambil untuk menjelaskan fragmentasi, menyamakan fragmentasi dengan kemajemukan. Argumen ini dikemukakan dengan memperhatikan fakta:

1. Meskipun industrialisasi di Indonesia telah berlangsung lebih dari tiga dasa warsa, tetapi belum berlangsung pendalaman industri yang ditunjukkan oleh rendahnya teknologi yang digunakan, besarnya peranan industri ringan dalam penyerapan tenaga kerja dan besarnya investasi untuk industri padat karya.
2. Gerakan-gerakan sosial buruh yang muncul dan berkembang di Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga era pasca Soeharto, tidak selalu berdasarkan jenis industri atau tingkat perkembangan industri. Sebaliknya gerakan buruh tersebut menggunakan basis sosial yang beraneka ragam, seperti jenis industri, agama, aliran pemikiran (sosialisme, demokrasi, nasionalisme), *onderbouw* partai politik dan satuan wilayah (kabupaten, kota, provinsi atau regional).
3. Kemajemukan lebih merupakan pembelahan secara vertikal. Pembelahan ini didasarkan pada ikatan-ikatan primordial, yaitu identitas seseorang yang diperoleh sejak kanak-kanak, disosialisasi,

ditanamkan melalui praktek sosial sehari-hari, sehingga menguat perasaannya terhadap identitas tersebut.

Untuk itu diperlukan konsep yang dapat menjelaskan fragmentasi gerakan sosial buruh. Cara sederhana dilakukan di sini yaitu dengan mengintegrasikan kedua konsep di atas. Dengan demikian dalam studi ini yang dimaksud dengan fragmentasi gerakan sosial buruh adalah pembentukan, perpecahan gerakan sosial buruh yang diorganisasi berdasarkan jenis industri, agama, aliran politik, *onderbouw* partai politik dan satuan wilayah. Penggunaan konsep ini memiliki beberapa kelebihan:

1. Konsep tersebut menegaskan pengertian fragmentasi. *Fragmented*, berarti terpecah-pecah tanpa memiliki pola yang teratur. Ketidakteraturan ini ditunjukkan oleh aneka basis sosial yang digunakan dan berbagai motivasi yang melatarbelakangi perpecahan.
2. Konsep tersebut mampu mendeskripsikan perjalanan panjang gerakan sosial buruh di Indonesia dan secara faktual menunjukkan bahwa gerakan-gerakan buruh sejak pra kemerdekaan hingga setelah Soeharto. Gerakan-gerakan buruh pada masa pra kemerdekaan lebih cenderung diorganisasi berdasarkan lapangan pekerjaan, seperti VSTP (kereta api), IJB (wartawan), PGHB (guru), PBT (percetakan), PFB (industri/pabrik) dan sebagainya. Pada era Orde Lama, pola pengorganisasian seperti ini merosot tajam digantikan oleh pola *onderbouw* partai politik, seperti Sarbumusi (Partai NU), SBII (Masyumi), KBKI (PNI), SOBSI (PKI), untuk menyebut beberapa contoh. Sedangkan di era pasca

Soeharto, semua pola pengorganisasian buruh tersebut muncul kembali ditambah dengan penggunaan satuan wilayah, seperti SBT (Serikat Buruh Tangerang), SBJ (Serikat Buruh Jabotabek).

3. Pendekatan yang lebih menonjolkan organisasi sebagai unit analisis dibandingkan partisipasi individu (buruh), lebih mampu mengungkapkan gagasan para aktor, pengorbanan para aktor dalam memulai dan mempertahankan sebuah gerakan. Tanpa jiwa perjuangan para aktor tidak akan pernah lahir gerakan sosial. Sedangkan para aktor rela berjuang, berkorban seperti disiksa, dan dipenjara, karena memperjuangkan gagasan, sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang mereka yakini benar dan baik.

Meskipun demikian, konsep tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu tidak menjelaskan perilaku buruh itu sendiri sebagai fokus kajian. Oleh para peneliti perburuhan seperti EP Thompson (1963), Michele Ford (2002, 2003), dinyatakan bahwa studi demikian “keluar dari kajian perburuhan” dan tidak menjelaskan kehidupan buruh. Tetapi tujuan dari studi ini memang bukan untuk menjelaskan kehidupan buruh, kultur buruh dan partisipasi buruh. Peneliti melihat gerakan sebagai suatu struktur yang diperjuangkan dan dipelihara eksistensinya guna memobilisasi buruh untuk menekan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan para buruh. Tanpa gerakan buruh, berbagai agenda pengusaha seperti diberlakukannya pasar tenaga kerja yang lebih bebas, penerapan *outsourcing* di semua lini, penghapusan upah lembur dan jam kerja 8,5 jam sehari, akan mudah dilaksanakan. Keberhasilan serikat buruh era Soekarno dan pasca Soeharto dalam memperjuangkan kepentingannya, merupakan suatu fakta yang sangat penting dikaji.

C. Kelemahan Gerakan Buruh

Terdapat dua pendekatan dalam menjelaskan kuatnya gerakan buruh, yaitu pendekatan yang menekankan pada lingkungan gerakan buruh dan pendekatan yang menekankan faktor-faktor internal gerakan. Para peneliti yang lebih menekankan peranan lingkungan, mengkaji struktur industri, komposisi tenaga kerja, peranan buruh dalam perekonomian nasional dan kepemimpinan nasional yang pro buruh. Sedangkan kajian yang lebih melihat ke dalam gerakan, mengkaji *genuine* (keaslian gerakan), militansi dan nasionalisme gerakan. Studi Hyun-Seong Yu (1993) menjelaskan kuatnya gerakan buruh di Korea Selatan adalah berkat struktur industri, komposisi tenaga kerja dan peranan buruh dalam perekonomian nasional. Ketika industri masih *infant*, buruh bersedia didisiplinkan dengan kekerasan dan tidak ditemukan perlawanan berarti. Sejalan dengan itu, dilakukan pengembangan sumberdaya di Korea Selatan, sehingga kualitas angkatan kerjanya terus meningkat. Ketika industri beralih ke orientasi ekspor, maka buruh mempunyai peranan besar dalam perekonomian nasional. Menghancurkan gerakan buruh dengan cara lama, berarti menghancurkan perekonomian nasional Korea Selatan.

Kepemimpinan nasional yang pro buruh menurut Sungsook Yoon (2001) lebih menentukan gerakan buruh yang kuat. Dalam membangun gerakan buruh yang kuat, selain ideologi perburuhan (ideologi yang berpihak pada buruh), juga ditentukan oleh kepemimpinan nasional. Penjelasan seperti ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain lebih menekankan faktor-faktor di luar gerakan, mengabaikan sumberdaya dan strategi gerakan serta kepemimpinan gerakan. Ideologi atau keyakinan kolektif sangat penting dalam gerakan sosial. Gerakan sosial yang kuat tidak bisa mengabaikan kondisi intern gerakan. Meskipun terdapat struktur peluang politik dan lingkungan

yang kondusif, tanpa kepemimpinan, keyakinan kolektif dan mobilisasi sumberdaya intern, tidak akan lahir gerakan sosial buruh yang kuat. Sebab itu kajian mengenai gerakan sosial buruh tidak bisa mengabaikan peranan kepemimpinan dan sumberdaya.

Teori yang dikembangkan oleh Kim Scipes (2003) mencermati faktor-faktor internal seperti *genuine* (keaslian gerakan buruh), militansi dan ideologi nasionalisme. Penjelasan ini juga memiliki kelemahan karena terlalu menekankan pada aspek internal gerakan. Posisi studi ini menempatkan faktor internal dan eksternal sama kuatnya. Di era Soeharto potensi internal seperti militansi, ideologi (keyakinan kolektif) dan keaslian gerakan, terus berusaha untuk menjadi alternatif selain FBSI atau SPSI. Tetapi tidak adanya struktur peluang politik, tidak lahir gerakan sosial apalagi gerakan sosial buruh yang kuat. Kajian yang berusaha membahas kelemahan gerakan buruh seperti disertasi ini, tentu harus memperhatikan faktor-faktor yang bertolak belakang dari temuan para peneliti tersebut. Tetapi mengambil alih teori-teori di atas untuk menjelaskan lemahnya gerakan buruh di Indonesia tentu tidak mudah, sebab terdapat perbedaan penting dengan negara-negara tersebut dalam hal fragmentasi gerakan buruh, sejarah kelahiran dan perkembangan gerakan buruh, perilaku rejim terhadap buruh, struktur industri, pasar tenaga kerja yang *oversupply* dan sifat kapitalisme internasional di mana pergerakan modal antar negara semakin mudah. Sejarah dan lingkungan khusus seperti itu harus menjadi perhatian serius untuk menjelaskan kelemahan gerakan buruh di Indonesia. Dalam menjelaskan fragmentasi dan kelemahan gerakan buruh di Indonesia pasca Orde Baru, fokus studi ini adalah:

1. fragmentasi gerakan buruh, khususnya era pasca Orde Baru
2. sejarah kelahiran dan perkembangan gerakan buruh,

3. argumen para tokoh dan aktivis buruh mengenai alasan memisahkan diri dari gerakan buruh yang telah ada
4. kebijakan industrialisasi dan industrialisasi baik pada masa Pemerintahan Orde Baru maupun pasca Orde Baru
5. lingkungan bisnis, khususnya semakin cairnya pergerakan modal antar negara.

Dengan mengedepankan aspek-aspek tersebut, studi ini menggabungkan teori-teori di atas dalam menjelaskan gerakan buruh pasca Orde Baru. Secara khusus yang dimaksud dengan gerakan buruh yang kuat adalah gerakan buruh yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah di mana kebijakan-kebijakan dimaksud tidak merugikan buruh dan kesejahteraan buruh meningkat. Untuk mencapai gerakan yang demikian diperlukan beberapa syarat, yaitu gerakan benar-benar *genuine*, militan, memiliki pemimpin yang kuat, jumlah anggota gerakan yang terus meningkat, keyakinan kolektif, adanya kebebasan berserikat dan terus dimilikinya tantangan kolektif dengan elite dan kekuasaan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Studi tentang gerakan sosial lebih tepat dilakukan dengan pendekatan kualitatif, karena sifat dari masalah yang ingin dipahami dan diungkapkan tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Studi gerakan sosial berusaha untuk memahami dan mengungkapkan ide-ide gerakan, proses pembentukan gerakan, aliansi-aliansi yang dibangun dengan menempatkannya dalam konteks sosial, ekonomi dan politik tertentu. Pembacaan peneliti terhadap situasi atau definisi situasi menurut William I. Thomas¹ sangat penting dalam memahami gagasan dan perkembangan gerakan. Untuk dapat menjangkau hal-hal tersebut, diperlukan pemahaman dan bacaan narasi besar dari para teoritis dan hal itu hanya mungkin dijangkau oleh metode kualitatif. Selain alasan tersebut, pemilihan pendekatan kualitatif juga dilakukan dengan mempertimbangkan, pertama, sifat masalah yang dinamis. Suatu gerakan sosial tidak berhenti, tetapi mengikuti perkembangan sosial, ekonomi dan politik tertentu. Munculnya pemikiran demi pemikiran dari individu-individu disertai dengan tindakan dalam konteks tertentu, perlu dipahami dan diberi makna. Kedua, teori-teori yang diacu dalam studi ini merupakan teori yang lahir dari beberapa paradigma. Dari sini, penelitian ini telah menunjukkan cirinya yang kualitatif.

Alasan lain mengapa pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini adalah karena sifat realitas yang dikaji (Moleong, 1991:5). Studi gerakan sosial mengkaji

¹ Menurut William I. Thomas, individu dan masyarakat tidak dapat dilihat dalam isolasi karena keduanya merupakan satu kesatuan organis di mana sikap individu dan nilai sosial berhubungan secara timbal balik. Sebab itu dalam interaksi dengan orang lain, kelompok dan lingkungan selalu ada tahap pengujian dan pertimbangan yang disebut definisi situasi (Doyle Paul Johnson, 1986:35).

realitas yang baur (ganda), tidak tunggal, dinamis dan merupakan hasil konstruksi dari peneliti. Realitas demikian hanya dapat dipahami dengan pengamatan terlibat atau pengamatan berperan serta. Realitas ganda dan dinamis seperti ide-ide, pengorganisasian massa, mobilisasi massa dan pembentukan aksi kolektif, hanya mungkin diperoleh dengan wawancara dan pengamatan terlibat. Melalui pengamatan terlibat pula dapat dideskripsikan dinamika orang-orang dalam pergerakan sosial, konflik dan konsensus beserta kelompok-kelompok yang menyertainya.

B. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui dua cara, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam. Susan Stainback (1988:43) membedakan empat macam pengamatan partisipatif, yaitu pengamatan pasif, pengamatan moderat, pengamatan aktif dan pengamatan yang lengkap. Dalam studi ini dilakukan pengamatan moderat, yaitu peneliti dalam mengumpulkan data ikut aktif dalam beberapa aktivitas gerakan, tetapi tidak bisa mengikuti seluruh aktivitas gerakan seperti halnya aktivis atau pengurus gerakan tersebut. Sementara untuk menjalin hubungan yang baik dengan para nara sumber, peneliti menyatakan identitas dan tujuan aktivitas peneliti dalam gerakan buruh. Di sini peneliti berterus terang tentang siapa diri peneliti dan apa tujuan ikut dalam beberapa aktivitas yang diselenggarakan oleh serikat-serikat buruh.

Peneliti aktif dalam diskusi-diskusi mengenai perburuhan, ikut dalam demonstrasi, protes dan pemogokan buruh dan negosiasi dengan pengusaha. Rapat-rapat dan Kongres atau Musyawarah Nasional serikat buruh juga dihadiri oleh peneliti. Selain itu beberapa kali menghadiri acara “Dengar Pendapat” aktivis buruh dengan DPR. Cara demikian dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai gerakan

sosial buruh, baik pemikiran, aktivitas, jaringan dan usahanya dalam memobilisasi buruh.

Menurut Susan Stainback (1988:61) data yang tidak diperoleh melalui pengamatan, perlu ditelusuri melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan para aktivis gerakan buruh. Identitas sumber disebut secara jelas. Sebagian besar wawancara direkam dan dilakukan dalam bentuk diskusi, tidak sedikit wawancara yang melibatkan para buruh.. Maksud dilakukannya wawancara seperti dikemukakan oleh Moleong (1991:135) adalah untuk mengkonstruksi gagasan-gagasan, mendeskripsikan tahapan gerakan sosial, mendeskripsikan konflik-konflik dalam gerakan dan menggambarkan suasana atau dinamika gerakan sosial.

Cara ketiga untuk pengumpulan data adalah analisis atas bahan tertulis, seperti buku, artikel, pamflet, surat terbuka, majalah, koran, risalah rapat, dokumen-dokumen serikat buruh dan publikasi badan statistik. Beberapa serikat buruh menerbitkan buletin, tabloid dan beberapa lainnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan, pamflet dan membuat situs di internet. Sejak masa kolonial, aktivis buruh juga aktif menulis artikel, pembelaan di pengadilan, wawancara dengan surat khabar yang umumnya didokumentasikan baik secara pribadi maupun oleh serikat buruh. Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Badan Pusat Statistik digunakan sebagai data utama khususnya mengenai perkembangan industri, struktur industri di Indonesia, penyerapan tenaga kerja dan penyebaran tenaga kerja menurut jenis industri. Data seperti itu tidak mungkin peneliti peroleh secara langsung dari suatu perusahaan, mengingat waktu dan biaya penelitian yang terbatas. Selain itu, fokus penelitian ini adalah gerakan sosial buruh, sehingga data utama tentang gerakan sosial saja yang diperoleh secara langsung.

C. Lokasi dan Subyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Spradley (1980:56) dinamakan situasi sosial yang mencakup *place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas).

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan terhadap organisasi-organisasi gerakan buruh yang merupakan struktur pusat dari kepengurusannya. Para pengurus pusat dan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Nasional atau nama lainnya, semuanya berada di wilayah Jakarta.

2. Aktor/ Subyek Penelitian

Aktor adalah semua orang yang terlibat dalam situasi sosial. Lebih konkrit lagi aktor di sini adalah para pendiri, para pengurus dan para aktivis gerakan buruh. Mereka yang mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk pergerakan buruh tentu sangat memahami dasar-dasar, cita-cita dan perkembangan gerakan. Sebab itu mereka juga nara sumber utama dalam penelitian ini. Dalam kepustakaan riset, aktor gerakan menjadi subyek penelitian. Riset mengenai gerakan sosial penentuan subyek penelitian dilakukan secara purposif (Creswell, 1994:148). Dengan cara ini informan atau subyek penelitian dipilih orang-orang yang benar-benar memahami gerakan sosial buruh. Subyek penelitian dalam gerakan sosial buruh ini dipilih orang-orang yang berperan sebagai inisiator, konseptor, organisator, mobilisator, motivator dan negosiator. Dengan pertimbangan seperti itu, maka subyek penelitian ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2. Subyek Penelitian dan Ciri-Ciri Utamanya

| No | SB | Aktor/Subyek | Ciri-Ciri Utama |
|-----|---------------------------|----------------------|--|
| 1. | SBSI | Muchtar Pakpahan | Pemimpin formal dan non formal, penggagas, doktor ilmu hukum, tokoh utama gerakan |
| 2. | SBSI | Rekson Silaban | Pemimpin formal dan non formal, S1, perintis gerakan dan ketua umum SBSI |
| 3 | KSPSI | Syukur Sarto | Pemimpin formal dan non formal, S2, tokoh SPSI pasca reformasi |
| 4 | KSPSI | Warno Sahari | Pemimpin Formal, D3 tokoh SPSI, Sekjen kubu Jacob Nuwa Wea |
| 5. | SARBUMUSI | Junaedi Ali | Pendiri di tingkat cabang, pengurus NU, Ketua umum |
| 6. | KSPI/ FSPMI | Said Iqbal | Pemimpin formal, Presiden FSPMI, S2, tokoh buruh pasca reformasi. |
| 7. | PPMI | Eggy Sudjana, | Pendiri, Ketua Umum dan Sek. Umum, S3, Staf CIDES. |
| 8. | FSPSI Reformasi | H.M. Rodja | Pendiri, anggota DPRD, S1, pengacara |
| 9 | KBM | Manganar Pasaribu | Buruh, pengurus KBM basis, cabang dan deklarator 1998. |
| 10. | FNPBI | Dita Indah Sari | Pendiri, tahanan Orba, aktivis mahasiswa, ketua PRD/PAPERNAS |
| 11. | FNPBI | Dominggus Oktavianus | Ketua FNPBI, S1, aktivis mahasiswa, |
| 12. | SERPI | Alie Ermas | Mantan pengurus GASBIINDO, mantan PNS, mantan pengurus KORPRI, S1 |
| 13. | KOSBI | Munir | Mantan pengurus SBII, mantan pengurus GASBIINDO, mantan pengurus SERPI |
| 14. | Gasbiindo (lama dan baru) | Agus Sudono | Ketua SBII, Gasbiindo, Ketua pertama FBSI, Ketua 2 ICFTU, anggota DPA, ketua Gasbiindo |
| 15. | Gaspermindo | Jumhur Hidayat | Tokoh gerakan mhs ITB, S1, pendiri Gaspermindo, staf CIDES, Kepala BNP2TKI |
| 16. | SP Cibinong | Naning | Buruh pabrik Sanyo di Cibinong |
| 17. | UK SPSI | Sri Widiyati | Buruh pabrik kosmetik di Ciracas Jaktim |

3. Aktivitas

Aktivitas di sini merujuk pada semua tindakan yang dilakukan oleh para aktivis gerakan dalam situasi sosial (Spradley, 1980:58). Oleh karena riset ini memulai dari kajian tentang gagasan, maka aktivitas juga mencakup apa yang dipikirkan dan apa tujuan gerakan sosial buruh. Kajian tentang aktivitas ini mencakup ide-ide gerakan sosial, rapat-rapat, protes, demonstrasi, diskusi-seminar, negosiasi, musyawarah kerja dan kongres. Semua aktivitas ini merupakan medan konflik antar aktor yang seringkali berujung pada terpecah-pecahnya gerakan buruh.

D. Analisis Data

Penelitian kualitatif berusaha memahami fakta fenomenologis yang dilakukan melalui proses *verstehen*. Untuk maksud tersebut, peneliti memerankan diri selaku instrumen utama. Dalam hal ini peneliti secara aktif melibatkan diri dalam pergerakan buruh, bergaul dengan para aktivis buruh dan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh para aktivis. Data dianalisis dengan logika induktif abstraktif. Konseptualisasi dan deskripsi dilakukan ketika peneliti berada di lapangan. Sebab itu, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tidak mungkin dipisahkan.

Analisis data juga dilakukan dengan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman (1992:19-20). Tiga hal utama dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.

1. Reduksi Data. Data yang diperoleh melalui wawancara sangat luas, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis melalui reduksi dengan cara memilih pernyataan-pernyataan atau informasi yang utama, memfokuskan pada informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian dan menemukan tema.
2. Penyajian Data (data display). Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif, diorganisasi dan disusun membangun pola hubungan, sehingga dipahami hubungan interaktif antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Untuk membantu mempermudah hubungan disajikan bagan atau kurva.
3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Penarikan kesimpulan yang berbasis pada data dilakukan dengan panduan tujuan penelitian dan hipotesis. Hipotesis bukan merupakan pernyataan final, sebaliknya terbuka untuk perubahan yang disesuaikan dengan temuan lapangan. Dengan demikian, verifikasi juga sudah dilakukan sejak reduksi data dan penyajian data.

Dalam model siklus ini, peneliti bergerak di antara tiga sumbu tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Dengan mengikuti model ini, maka analisis data merupakan proses yang terus berlanjut dan berulang. Data primer yang diperoleh di lapangan dibandingkan, didiskusikan, diberi makna dan diinterpretasi dengan data yang diperoleh melalui kajian pustaka. Melalui model interaktif ini, peneliti akan dapat memposisikan hasil penelitiannya di antara kajian mengenai gerakan sosial buruh dan gerakan sosial pada umumnya. Peneliti akan menghentikan analisis ini jika pertanyaan-pertanyaan penelitian telah terjawab dan tujuan penelitian dapat dicapai.

BAB V

GERAKAN BURUH

SEBELUM ORDE BARU

BAB V

GERAKAN BURUH SEBELUM ORDE BARU

A. Gerakan Buruh Pra Kemerdekaan

Sektor transportasi, pelabuhan, perkebunan tebu, tembakau dan pabrik gula merupakan embrio industri dan tempat kelahiran gerakan buruh. Gerakan sosial buruh pertama di negeri ini dibentuk pada tahun 1908 di perusahaan kereta api, *Vereening voor Spoor en Tramweg Personeel (VSTP)*. Gerakan ini markas pusatnya di Semarang. Pada awalnya VSTP di bawah kendali Eropa dan hanya merekrut sejumlah kecil buruh pribumi. Para pendiri dan aktivis VSTP hampir seluruhnya kaum sosialis Belanda yang menjadi anggota Partai Demokrasi Sosial Belanda (ISDV). Dua tokoh yang sangat berperan adalah Henk Sneevliet dan Bersma. Menjelang tahun 1918, keanggotaannya mencakup hampir seluruh pekerja Indonesia. Para pekerja Eropa kemudian menarik diri dan mendirikan serikat buruh sendiri, *Spoorbond*. Roda VSTP kemudian dikemudikan oleh Semaun, seorang sosialis didikan Henk Sneevliet. Berkat sosialisasi dan propaganda para aktivis ISDV ini, VSTP berkembang sangat pesat. Sampai dengan pemberontakan PKI 1926, VSTP merupakan serikat buruh paling aktif, radikal dan mempunyai anggota paling besar. Meskipun pemahaman dan motivasi para buruh yang tergabung dalam VSTP kebanyakan berbeda dengan para penggagasnya, serikat buruh ini merupakan gerakan sosial yang secara jelas menentang eksploitasi kaum kapitalis dan diskriminasi ras, etnik dan jenis kelamin. Inilah gerakan sosial buruh pertama yang berhasil membangun identitas kolektif dan melakukan tantangan kolektif.

Pekembangan VSTP tidak dapat dilepaskan dari jasa besar Henk Sneevliet, seorang tokoh sosialis Belanda yang melarikan diri ke Indonesia karena masuk daftar

hitam. Kualitas Sneevliet sesungguhnya tidak terletak pada pribadinya, melainkan pemahamannya mengenai Marxisme dan cara mengorganisasi kaum buruh. Pengalamannya dalam gerakan buruh di Belanda penting sekali dalam melakukan hal yang sama di Indonesia. Kontribusi Sneevliet yang utama terletak pada orientasi kelas yang konsisten dalam gerakan buruh. Meskipun nantinya ia beserta para pengikutnya gagal membangun kesadaran kelas sehingga juga gagal dalam memahami gerakan buruh dan tani, tetapi konsistensinya terhadap konsep kelas telah membawa gerakan buruh lebih revolusioner. Pada tahun 1913 jumlah anggota VSTP hanya 1.242 orang dan akhir tahun 1923 jumlah anggotanya sekitar 13.000 orang (Ingleson, 2004:40). Di mata para buruh Belanda dan Indo, VSTP terlalu radikal dan dapat membahayakan posisi sosial mereka sebagai buruh kulit putih yang digaji lebih besar dari pada buruh pribumi. Meskipun, mereka secara ideologi teguh dalam pembentukan serikat buruh, tetapi rapuh dalam membangun kesadaran kelas. Persoalan inilah yang kemudian dibangun oleh Sneevliet dengan mendirikan ISDV, sebuah partai komunis yang menyatakan dirinya mewakili kepentingan murni kaum buruh.

Konflik dalam tubuh VSTP telah berlangsung sejak berdirinya 14 Nopember 1908. Konflik terutama mengenai keanggotaan, kepemimpinan dan sikap politik terhadap pemerintah. Dalam hal keanggotaan, kubu *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NIS)*, perusahaan Kereta Api Swasta terbesar pada waktu itu menolak masuknya orang pribumi dalam VSTP. Der Hollander, kepala eksekutif pusat VSTP menyatakan dalam rapat kerja organisasi itu bahwa VSTP hanya untuk orang-orang Eropa dan keturunannya. Orang pribumi yang telah mendirikan Sarekat Islam harus membentuk serikat buruh untuk pribumi dan meninggalkan VSTP

(Ingleson, 2004:39). Di tengah perdebatan itu, beberapa anggota mengusulkan agar buruh pribumi diterima sebagai anggota dengan catatan tidak memegang kepemimpinan. Sampai 10 tahun usianya, VSTP dipimpin oleh orang-orang Eropa. Menyadari lemahnya posisi buruh pribumi dan potensi besar untuk membangkitkan gerakan massa yang berbasis buruh, para juru tulis dan administrasi yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial mulai membentuk serikat. VSTP tidak lama kemudian cair dan menerima buruh pribumi sebagai anggotanya. Setelah perdebatan yang memakan waktu tujuh tahun, VSTP secara tegas menyatakan bahwa “peran mereka untuk membela kepentingan para buruh terhadap kaum kapitalis dan pemerintah yang dikontrol kaum kapitalis”(McVey, 1965:12). Dari sini sikap politik VSTP sangat jelas, yaitu nonkooperatif dan menggunakan perjuangan kelas sebagai garis perjuangannya.

Di luar VSTP terdapat beberapa serikat buruh, seperti *Inlandsche Journalistenbond* (IJB) yang dibentuk oleh Marco pada 1914. Marco kurang mendapat dukungan luas di kalangan pergerakan sebab terlalu tergilagila pada simbol-simbol Barat. Meskipun ia dibesarkan oleh *Medan Priyayi* dan *Sarotomo*, dua surat khabar besar pada waktu itu, langkahnya untuk mendirikan IJB tidak mendapat sambutan luas. Tetapi ketika para bekas pemimpin Indische Partij (IP) dan para pedagang pribumi bergabung, IJB dengan *Doenia Bergerak* mendapat dukungan luas (Shiraishi, 1997:111). Posisi Marco pun semakin penting dalam gerakan sosial, terutama gagasannya untuk mengangkat harkat dan martabat kaum pribumi dan menyudahi penindasan. Meskipun ia tetap bergaya Barat, tetapi bersama IJB pemikiran dan sikapnya tegas memperjuangkan kebebasan berpendapat (Shiraishi menyebutnya “perang suara”), dan nasib kaum Bumi Putra pada umumnya, tidak

terbatas pada para *jurnalisten*. Munculnya Marco yang berlatar belakang jurnalis ini segera menarik para jurnalis lain dalam pergerakan, sehingga jurnalis merupakan salah satu sumber kepemimpinan dalam gerakan sosial. Tidak terkecuali Sarekat Islam yang segera mengalami transformasi kepemimpinan ke tangan jurnalis.

Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) didirikan oleh Sneevliet pada Mei 1914. Meskipun organisasi ini kecil dan hanya merupakan perkumpulan debat kaum sosialis Belanda yang terbagi-bagi menurut garis partai dan tanpa pengaruh langsung terhadap pergerakan, tetapi berhasil mengembangkan ide-ide sosialis (Shiraishi, 1997:133). Menilai bahwa sosialisme perlu juga mencakup kaum tani yang merupakan mayoritas, ISDV memperluas propaganda dengan mendirikan Porojitno pada tahun 1917. Serikat ini menghimpun kekuatan buruh tani dan buruh pabrik, buruh lepas di perusahaan-perusahaan kecil. Di bawah pimpinan Soekirno, Porojitno melancarkan aksi di area perkebunan swasta untuk menuntut sewa tanah lebih tinggi. Organisasi ini pada tahun 1918 berubah menjadi Perkumpulan Kaum Buruh dan Tani (PKBT). Aksi penting PKBT terutama di tingkat lokal untuk mengambil alih kepemimpinan Sarekat Islam. Di Demak, PKBT menyerang pajak kepala, sekolah desa, wajib ronda dan sebagainya yang akhirnya berhasil mengambil alih kepemimpinan SI cabang Demak. Di Kudus, PKBT membentuk oposisi terhadap SI yang pro Tjokroaminoto. Jika PPKB berhasil mengorganisasi buruh pabrik, pegadaian, pelabuhan dan transportasi untuk menggembosi SI, maka PKBT melakukannya di sektor buruh cetak, buruh opiumregie, buruh batik dan pegawai pemerintah. Oleh karena kekuatan SI terletak pada buruh dan tani, maka ketika SI menegaskan islam sebagai identitasnya, gerakan ini segera pecah dan merosot peranannya.

Pasca Perang Dunia Pertama, perekonomian negeri jajahan sangat sulit. Para buruh bumiputra resah karena inflasi yang meningkat. Meskipun produksi tanaman ekspor meningkat, upah buruh rendah. Dari wilayah pinggiran berkembang suatu gerakan ke pusat kota yang terkonsentrasi di pabrik gula (Wertheim, 1999:77). Di beberapa industri berlangsung sengketa industrial. Sikap pemerintah dalam sengketa industrial pada dasarnya “netral dan baik” (Shiraishi, 1997:147). Serikat-serikat buruh lain bermunculan seperti Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB), Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijke Openbare Werken (VIPBOW), Personeel Fabriek Bond (PFB), Havensarbeidersbond (HAB), Typografenbond yang juga disebut Perserikatan Boeroeh Tjital (PBT), Sarekat Pegawai Pelikan Hindia (SPPH), Sarekat Postel, Perserikatan Pegawai Dinas Hutan (PPDH) dan lainnya. Sampai dengan Agustus 1920 telah berdiri 22 serikat buruh dengan 72.000 anggota. Banyak serikat buruh di bawah kontrol VSTP, seperti PPDH, Typografenbond, SPPH dan HAB. Serikat lainnya di bawah kontrol Sarekat Islam, misalnya PPPB dan sarekat Postel. Pertumbuhan serikat-serikat buruh di tengah kesulitan ekonomi, menunjukkan keinginan berlindung para buruh dari perilaku majikan dalam hal upah dan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, memasuki serikat seperti ditunjukkan oleh Shiraishi (1997: 251) dan van Niel (1988:121), merupakan wahana mobilitas vertikal para buruh dan tani.

PFB, salah satu serikat buruh yang kuat tahun 1920-an tumbuh dari *Arbeidsleger* (tentara buruh) yang didirikan pada Nopember 1918 oleh Soerjopranoto di Jogjakarta¹. Pada awal berdirinya, buruh yang menjadi sasaran rekrutmen adalah

¹ Shiraishi (1997:144) menyebut akar *Arbeidsleger* adalah Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM) yang dibentuk oleh SI Cabang Solo dan Surabaya. Semangat kedua pergerakan itu sama demikian pula orientasinya. Tetapi militansi dan kaum putihan yang menandai *Arbeidsleger*, pudar

tukang, juru ukur, teknisi, juru tulis dan pemegang buku yang menjadi pekerja tetap. Pada tahun-tahun pertama pembentukannya, pertumbuhan anggotanya sangat lambat. Satu tahun usia serikat ini hanya didukung oleh 750 orang (Shiraishi, 1997:151). Tetapi sejak awal tahun 1920-an dukungannya meningkat terutama dari buruh pabrik gula. Kebutuhan organisasi sebagai pelindung dan pemersatu buruh untuk menuntut majikan merupakan faktor pendorongnya. Pada awal tahun 1920-an pemogokan buruh marak untuk menuntut kenaikan upah, persamaan hak antara buruh Belanda dan bumiputra, perbaikan kondisi kerja dan jam kerja menjadi 8 jam sehari, libur satu hari seminggu dengan bayaran dan upah lembur (Shiraishi, 1997:151; Ingleson, 2004:66). Pemogokan tersebut berakhir dengan kesuksesan, sehingga PFB tumbuh dengan cepat. Nama Soerjopranoto, PFB dan SI Cabang Yogyakarta dibicarakan di berbagai media. PFB sendiri kemudian menerbitkan *Boeroeh Bergerak* dengan Soerjopranoto sebagai ketua redaksinya. Kesuksesan PFB segera menggeser kepemimpinan SI Cabang Yogyakarta ke tangan Soerjopranoto dari tangan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Arah pergerakan SI Jogja kemudian mengikuti SI Semarang yaitu menjadikan serikat buruh sebagai pelopornya. Jika SI Semarang memiliki VSTP, maka SI Jogja memiliki PFB. Menonjolnya dua cabang SI ini membuat Tjokroaminoto sebagai Ketua Central Sarekat Islam (CSI) terancam. Meskipun kedua cabang tersebut tidak menyatakan menentang Tjokro, tetapi popularitas Tjokro merosot. Sebab itu anak buah Tjokroaminoto, Sosrokardono dan Alimin berusaha mengontrol serikat buruh dalam CSI, yaitu Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetra (PPPB) bahkan untuk meneguhkan cengkeraman tersebut

ketika berubah menjadi PFB. Di sini terjadi konflik pencarian identitas : antara militansi dan kaum putihan atau gerakan massa yang berbasis buruh. Konflik seperti ini turut mendorong perpecahan Central Serikat Islam tahun 1921.

dalam Kongres PPPB di Bandung 1920, kubu Tjokro mendirikan PPKB (Persatoean Perserikatan Kaoem Boeroeh). PPKB dirancang sebagai badan kerjasama para serikat buruh yang mencakup VSTP, PFB dan PPPB (dipimpin Alimin). Namun masing-masing ketua dan pengurus lainnya tidak antusias membangun kerjasama tersebut. Ego para tokoh buruh dengan basis sosial masing-masing seperti ini menjadi penghambat utama tumbuhnya kesadaran sosial buruh dan mengancam kekuatan buruh. Dari sini sesungguhnya akar fragmentasi gerakan buruh berasal.

Pemogokan buruh yang sukses bukan hanya di bawah kendali FPB, tetapi juga VSTP. Mengingat basis gerakan ini di perusahaan kereta api dan pabrik gula, maka di dua perusahaan tersebut pemogokan berlangsung. Semarang, Solo dan Surabaya merupakan basis VSTP yang sangat kuat. Di kota-kota itulah transportasi kereta api, trem dan produksi gula selama 8 hari berhenti total (Ingleson, 2004:75). Berbeda dengan pemogokan PFB yang lebih dipicu oleh krisis ekonomi, pemogokan buruh kereta api dan pabrik gula, didorong oleh upah yang menurun, jam kerja yang panjang dan penangkapan Semaun. Tokoh ini ditangkap oleh pemerintah kolonial dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak (Ingleson, 2004:70). Semaun memang menyerukan para buruh untuk melakukan revolusi dan jika revolusi belum siap dapat dilakukan pemberontakan. Namun dalam melakukan hal itu, para buruh dilarang membunuh orang kulit putih. "Dengan jalan ini, kita memastikan tidak akan ada pengrusakan dan pembunuhan, melainkan pemenjaraan dengan usaha untuk mengirimkan mereka pulang. Dengan jalan ini tidak akan ada pertumpahan darah dan kita bisa bebas" (Ingleson, 2004:71).

Peristiwa itu memicu perdebatan internal dalam Sarekat Islam yang kepemimpinannya tumpang tindih dengan serikat buruh. Meskipun tuntutan buruh

sukses, tidak direspon oleh SI. Tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim tidak bisa menerima gerakan buruh yang secara nyata menggunakan konsep kelas. Dengan dukungan Muhammadiyah yang mulai melebarkan sayapnya ke luar Yogyakarta, CSI menyatakan bahwa komunis harus dikeluarkan. Konflik terbuka dalam SI tidak dapat dihindarkan, Semaun dan Bergsma akhirnya mendirikan *Revolutionare Vakcentrale* (Pusat Serikat Buruh Revolusioner) dan guna memperluas pergerakan, sayap kiri pecahan SI menjadi Sarekat Rakyat. Artikulasi komunisme dan Islam menjadi rumit. Para tokoh seperti Haji Misbach menyatakan adanya kesesuaian antara Islam dan komunisme, sebaliknya Tjokro dan Agus Salim menolak. Mengingat keanekaragaman gerakan dan kepemimpinan, hasil dari konflik itu menyebabkan SI mengubah diri menjadi Partai Sarekat Islam mengikuti jejak ISDV yang melebur menjadi Partai Komunis Indonesia.

Gelombang pemogokan yang sukses seakan memaklumkan bahwa buruh adalah pioner dalam gerakan sosial. Sementara gerakan-gerakan petani dalam sejarah selalu kandas, gerakan buruh berhasil menekan pengusaha dan pemerintah kolonial dalam hal gaji, jam kerja dan upah lembur. Perubahan yang terjadi di daerah agraris sebagai dampak dari gelombang pemogokan itu adalah berkembangnya gerakan petani yang radikal. Di Madura radikalisasi petani bukan hanya ditujukan kepada kaum feodal sebagai pemilik tanah, tetapi juga kepada pejabat pemerintah kolonial (Kuntowijoyo, 2002:181). Sementara itu di Banten yang tidak menikmati transformasi agrikultural seperti di Jawa Tengah dan Timur dengan ekspansi komoditas pertaniannya, radikalisasi berlangsung dalam bentuk boikot dan pemutusan sepihak buruh kontrak perkebunan. Sebelumnya, Banten mensuplai buruh perkebunan di Sumatra dan buruh pelabuhan di Tanjung Priok. Keresahan yang meluas di Banten ini meledak pada

tahun 1926-1927. Perlawanan ini bukan lagi pemogokan atau protes, tetapi suatu pemberontakan yang tujuannya menggulingkan pemerintah dan menggantinya dengan kekuasaan baru yang berasal dari bumiputra. Dalam pemberontakan ini yang menonjol bukanlah pemberontakan gaya buruh pabrik, tetapi gaya petani (Williams, 2003:67).

Mendekati pecahnya PD II, ekonomi belum membaik dan media massa secara intensif menyebarkan semangat nasionalisme. Situasi ini juga berpengaruh kepada gerakan buruh. Serikat-serikat buruh yang sebelumnya mati suri akibat Pemberontakan PKI 1926, bangkit kembali. Di kalangan buruh swasta dibentuk Persatuan Serikat Sekerja Indonesia (PSSI). Serikat ini masih mewarisi ideologi komunis yang kuat, sehingga hanya dalam waktu satu tahun mengubah namanya menjadi Centrale Perhimpunan Buruh Indonesia (CPBI). Para aktivis yang sebelumnya tiarap, kembali menyerang kolonialisme dan kapitalisme. Didorong oleh semangat nasionalisme, tumbuh pula keinginan dari CPBI untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Bangkitnya ide seperti itu, segera dibungkam oleh Pemerintah dengan melarang aktivitas CPBI. Di kalangan pegawai negeri telah lebih dulu berdiri Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN). Serikat buruh ini menentang perbedaan gaji antara orang-orang Belanda, keturunan Belanda dan pribumi. Krisis ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan, mendorong PVPN untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan sosial. Kedudukan orang-orang Belanda dan indo juga dipersoalkan. Kedua golongan ini membentuk serikat buruh tersendiri *Vereniging van Overheids personeel (VVO)*. Langkah serikat buruh rasialis ini berlawanan dengan PVPN, meskipun keduanya sama-sama menaungi pegawai negeri. VVO mencegah naiknya orang-orang pribumi pada jabatan

administrasi yang lebih tinggi dan cenderung menginduk pada serikat buruh di Belanda.

Guna memperoleh dukungan dari kaum nasionalis dalam rangka menguasai perusahaan-perusahaan Belanda, serikat-serikat buruh menggabungkan diri dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI dibentuk sebagai usaha merealisasikan ide-ide kaum bumiputra dalam Volksraad yang menuntut Indonesia berparlemen. Partisipasi kaum buruh dalam GAPI dipelopori oleh PVPN (Sandra, 1961:56;). Menyadari ide-ide pergerakan nasional dengan melibatkan lebih banyak kaum buruh kurang memperoleh dukungan para politisi, antara lain kurang gigihnya PVPN, buruh-buruh swasta lokal mendirikan Gabungan Serikat-Serikat Sekerja Partikelir Indonesia (GASPI). Tidak berbeda jauh dengan serikat buruh sebelumnya, GASPI segera menyerukan perlakuan sama antara buruh pribumi dan non pribumi serta “pemegang modal dan pemegang buruh adalah sama harga, karena sama arti” (Sandra, 1961:59). Seruan ini dimotivasi oleh nasionalisme dan berbeda dengan temuan Jill Rubery (1987:353) di Amerika Serikat. Munculnya upah rendah dan segregasi upah secara seksual didorong oleh pasar kerja yang terstruktur dan non kompetitif. Dalam pasar kerja kompetitif tidak terdapat persamaan tingkat upah. Upah dibayarkan berdasarkan produktivitas kerja. Pekerjaan dibagi dalam beberapa anak tangga, sehingga berlangsung segmentasi pasar kerja. Segmentasi ini berfungsi mencegah terjadinya kesadaran kelas dan militansi serikat buruh. Gejala ini juga dikaji Dahrendorf (1986) yang menyebut berlangsungnya *decomposition of labour*.

B. Perdebatan Ideologi

Periode 1920-1945 mencatat jatuh bangunnya serikat buruh. Pada *Zaman Pergerakan*, tumbuh berbagai serikat buruh dengan ideologi dan strategi perjuangan yang berbeda-beda. Perdebatan mengenai hal ini berlangsung dalam arena negara kolonial yang represif. Pertanyaan fundamental seperti apakah peranan serikat buruh dalam negara kolonial di mana majikan dan pemerintah jauh lebih kuat dan lebih terorganisasi? Haruskah mereka memfokuskan urusan pada masalah industrial semata-mata ataukah diperlukan gerakan politik guna melakukan tekanan kepada pemerintah dan majikan? Pertanyaan seperti ini dihadapi oleh para pemimpin serikat buruh, sehingga melahirkan pemikiran dan tindakan yang berbeda-beda. Aneka pemikiran dan tindakan yang lazim dikenal sebagai ideologi ini dianut oleh para pendiri dan aktivis serikat buruh.

Pandangan yang paling utama adalah bahwa serikat-serikat buruh seharusnya tidak hanya peduli dengan masalah perbaikan upah dan kondisi kerja para buruh, tetapi juga dengan kesejahteraan para anggotanya secara keseluruhan (Ingleson, 2004:153). Upah buruh harus mampu memberi jaminan kehidupan keluarga, bukan hanya buruh lajang. Selain itu para pengusaha perlu mengusahakan jaminan sosial bagi buruh untuk menghadapi sakit dan kematian. Di perusahaan atau pabrik perlu diusahakan suatu koperasi bagi para buruh. Koperasi ini menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang harganya harus lebih rendah dari harga toko atau pasar. Serikat buruh di setiap pabrik atau perusahaan juga harus terlibat dalam mengelola koperasi. Untuk itu iuran kepada serikat buruh diganti dengan iuran buat koperasi. Dengan cara ini, maka fungsi serikat buruh sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dapat dicapai.

Di luar padangan umum, terdapat pandangan-pandangan khusus dari aktivis gerakan sosial buruh maupun aktivis politik yang juga menjadi praktek gerakan buruh. Salah satu pemikiran dan praktek gerakan sosial berasal dari Semaoen. Dalam bukunya *Penuntun Kaum Buruh*, Semaoen benar-benar hanyut oleh pikiran Marx. Buruh, apapun kualifikasi dan lapangan kerjanya harus membangun serikat. Serikat ini bukan hanya berfungsi membangkitkan dan meningkatkan kesadaran anggotanya, tetapi juga menjadi alat perjuangan anggotanya. Dengan berserikat, buruh akan memiliki kekuatan dan mampu menghadapi majikan. Jika majikan kekuatannya pada kapital, maka buruh dapat menghadapinya dengan tenaga kerja. Kekuatan terakhir ini sebenarnya lebih besar dari pada kapital. Namun kaum buruh belum mampu menggunakannya, karena belum memiliki kesadaran dan persatuan.

Sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan sosialis-komunis di bawah VSTP dan ISDV serta belajar tentang sosialisme dengan tokoh-tokoh serupa di negeri Belanda, Semaoen mengagungkan revolusi Rusia dan secara jelas menganut sosialisme dan komunisme. Semua buruh disebutnya kelas buruh tanpa mengkajinya secara cermat, apakah mereka betul-betul merupakan suatu kelas. Konsep kelas yang kabur ini sering digunakan juga untuk pengusaha, seperti kelas majikan, kelas kapitalis, kaum kapitalis dan kelas borjuis. Sedangkan untuk kelas buruh sering disebut kaum buruh dan kelas proletar. Mengikuti cara berpikir Marx, Semaoen membagi masyarakat menjadi dua kekuatan yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh dan mereka yang berusaha (berdagang) sebagai majikan yang memberi pekerjaan atau upah kepada buruh (Semaoen, 2000:31).

Serikat buruh dibangun dengan tujuan untuk membangun kekuatan dan kekuasaan dalam menghadapi kaum kapitalis. Kaum buruh harus rukun satu sama

lain demikian pula dengan serikat yang berasas sosialis. Kerukunan ini diwujudkan antara lain dalam membangun koperasi, dana kematian dan dana perlawanan. Koperasi yang didirikan para buruh akan mencukupi kebutuhan para buruh sesuai dengan kemampuan para buruh. Demikian pula dengan kesusahan akibat kematian, buruh mendapat “dana kematian” dari serikat. Sedangkan mereka yang aktif dalam melakukan pergerakan, seperti pemogokan bahkan dipecat, mendapatkan “dana perlawanan”. Pemogokan tidak boleh dilakukan secara total, sebab hal itu akan menghancurkan pergerakan. Pemogokan total oleh Semaoen disebut sebagai pemogokan tanpa aturan. Hanya pemogokan yang diputuskan oleh *algameene vergadering* yang disertai tunjangan pemogokan (Semaoen, 2000:63).

Lebih jauh lagi, tujuan akhir dari gerakan buruh adalah mengalahkan kaum kapitalis dan mendirikan negara sosialis. “Jika kaum buruh yang tergabung dalam vakbond dapat mengalahkan kaum kapitalis, maka kaum buruh dapat hidup selamat” (h. 38). Berbeda dengan Marx yang menekankan sepenuhnya peranan serikat buruh dalam membangun kesadaran kelas, Semaoen lebih menekankan pentingnya media, misalnya surat kabar. Media merupakan “tempat bicara” dan “juru bicara”, agar dengan bicara di situ organisasi akan lebih kuat, lebih pandai dan berpandangan luas, lebih cerdas dalam berhadapan dengan kaum majikan. Dalam mencapai tujuan, organisasi-organisasi lain yang memiliki pandangan yang sama atau cita-cita yang sama dengan kaum buruh, sangat bermanfaat. Organisasi *vakcentrale* akan menyatukan berbagai *vakbond* ditambah dengan cita-cita politik (Semaoen, 2000::68). Cita-cita politik kaum buruh adalah mewujudkan masyarakat sosialis. Guna mencapai tujuan ini kaum buruh harus memiliki pengaruh dalam pemerintahan,

dengan cara melakukan gerakan politik rakyat jelata yang oleh Semaoen disebut “gerakan demokrasi” kerakyatan (Semaoen, 2000:84).

Rakyat jelata dan kelas buruh harus berusaha agar alat-alat, modal, pabrik, mesin, tanah dan semua kapital jatuh ke tangan pemerintah yang bersemangat kerakyatan. Pemerintahan seperti ini dipilih oleh rakyat guna mengurus semua perusahaan dan perdagangan. Inilah yang disebut sosialisme atau komunisme. Sosialisme bermaksud menghilangkan semua kelas borjuis. Semua rakyat supaya bekerja pada pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, tidak ada orang atau golongan yang dapat memeras orang lain, masyarakat merupakan “surga” untuk semua umat manusia (Semaoen, 2000: 86). Di sini Semaoen menekankan pemilihan para pejabat pemerintah yang disebutnya sebagai demokrasi kerakyatan. Dalam pemikiran Karl Marx, masyarakat komunis hanya dapat diwujudkan melalui revolusi sosial di mana kaum buruh yang telah memiliki kesadaran kelas merebut alat-alat produksi. Proses ini dibantu oleh kaum intelektual, sehingga tercapai masyarakat tanpa kelas dan tanpa penindasan.

Mencermati pemikiran Semaoen, serikat buruh bukan hanya menjalankan fungsi ekonomi. Serikat juga mengemban fungsi sosial dan politik. Fungsi ekonomi memang paling menonjol, yaitu meningkatkan kesejahteraan buruh. Tetapi Semaoen juga menyadari adanya kelebihan penawaran tenaga kerja, yang mengakibatkan upah buruh rendah dan majikan dapat seenaknya menekan buruh. Guna mengurangi kondisi demikian, serikat juga harus menjalankan fungsi sosial dengan membangun kerukunan (solidaritas) sesama buruh. Untuk menghindari tekanan dan perlakuan tidak adil ini, Semaoen sejak awal tulisannya menekankan pentingnya buruh bergabung dalam serikat buruh. Kerjasama dengan *vakbond* lain sangat penting yang

kemudian disatukan di bawah *vakcentrale* guna mencapai cita-cita politik, yaitu masyarakat sosialis atau komunis. Bagi Semaoen serikat buruh memerlukan transformasi dan aliansi. Pada awalnya, serikat buruh bisa memfokuskan pada perbaikan kondisi ekonomi seperti koperasi-koperasi dan menjalankan peran bantuan sosial bagi buruh yang menderita. Tetapi langkah ini hanya sesaat, serikat buruh harus kembali ke cita-cita sejatinya yaitu mewujudkan masyarakat sosialis. Pencapaian tujuan itu tidak dapat dilakukan sendiri, *vakbond* lain yang seideologi dan terutama partai politik akan merupakan kekuatan bersama yang mampu mengalahkan kaum borjuis (McVey, 1965:35-36).

Konsep tentang serikat buruh sentral revolusioner yang meliputi semua buruh juga dikembangkan oleh Sosrokardono (van Niel, 1988:203). Sosrokardono tumbuh dalam lingkungan pegawai negeri rendah di Surabaya. Ia menjadi karyawan pegadaian di kota kelahirannya dan menjadi organisator para buruh. Pergaulannya dengan kaum pergerakan seperti Tjokroaminoto, telah membawanya ke dalam forum yang lebih luas. Baginya persoalan yang paling penting dalam gerakan buruh adalah bagaimana menyatukan kekuatan buruh untuk mengusir imperialisme di negeri ini (Razif, 1998:12). Penting ditekankan di sini bahwa Sosrokardono menggaris bawahi imperialisme dan bukan kapitalisme. Selain merupakan realitas yang dihadapi masyarakat jajahan pada waktu itu, imperialisme juga lebih keras. Pasalnya, imperialisme disertai dengan kolonialisme atau pendudukan langsung suatu negara atas suatu wilayah untuk mengambil kekayaan. Dalam imperialisme, buruh dikontrol oleh kekuatan negara penjajah untuk berkerja memenuhi permintaan pasar internasional. Meskipun demikian, dalam bagian lainnya Sosrokardono juga tidak kalah keras dalam menyerang kapitalisme. Baik kapitalisme maupun imperialisme

hanya dapat diusir jika kaum buruh bersatu memperlihatkan kekuatan yang revolusioner. Sifat revolusioner ini sangat penting untuk menghindari perundingan-perundingan yang akan mengulur jatuhnya kapitalisme dan penderitaan buruh.

Sama dengan Semaoen, Sosrokardono menekankan pentingnya perjuangan kelas. Kekuatan kaum buruh harus dibangkitkan (dia tidak menyebut kesadaran kelas) dengan mendorong semua buruh masuk ke dalam serikat buruh. Apapun lapangan kerjanya, di manapun level pekerjaannya, buruh harus bersatu menentang eksploitasi terhadap dirinya. Kekuatan buruh terletak pada jumlahnya yang besar dan solidaritas sesama buruh. Solidaritas ini telah dimiliki buruh jauh hari sebelum datangnya imperialis ke negeri ini. Solidaritas itu melemah akibat para buruh dipecah-pecah oleh kekuatan imperialis dan kolonialis. Upah dan jabatan telah menyebabkan sesama buruh melakukan eksploitasi. Pendirian seperti ini menyebabkan Tjokroaminoto turut hanyut dalam bahasa radikal yang oleh Shiraishi (1997:141) dipinjamnya dari Marco.

Ideologi sosialis radikal yang diwakili oleh Semaoen dan Sosrokardono, seperti telah dikemukakan di atas turut menjadi faktor perpecahan Sarekat Islam (SI). Tarikan ke kanan dalam SI dipelopori oleh Agus Salim. Salim berasal dari keluarga menengah Minangkabau Sumatra Barat. Sesudah menamatkan pendidikan sekolah rendah di kotanya, ia segera mendapat pekerjaan sebagai staf konsulat Belanda di Jeddah yang bertugas mengawasi jemaah haji dari Indonesia (Deliar Noer, 1982: 123; van Niel, 1988:161). Melalui pekerjaan ini Agus Salim mulai berminat terhadap kehidupan keagamaan dan menghabiskan waktu senggangnya untuk mempelajari islam. Secara kebetulan di Timur Tengah sedang berkembang pembaharuan dalam pemikiran Islam. Modernisme Islam inilah yang nantinya ia bawa ke tanah air untuk

memperbaharui gerakan sosial, utamanya gerakan Sarekat Islam. Pertemuannya dengan Tjokroaminoto berujung pada pengunduran diri Agus Salim dari pegawai pemerintah dan memfokuskan untuk mengembangkan SI. Sumbangan besar Agus Salim dalam SI adalah menekankan sifat keislaman dalam SI dan membuang gagasan Ratu Adil (van Niel, 1988:163; Shiraishi, 1997:156).

Jika konsep Ratu Adil dapat menjadi jalan tengah bagi pertarungan Marxisme dan Islam sejak berdirinya SI, maka dibuangnya konsep tersebut menyebabkan konfrontasi tidak terhindarkan. Ideologi Marxisme yang tumpang tindih dengan sosialisme dan komunisme dalam batas tertentu berjalan paralel dengan Islam. Tetapi segera mengemuka perbedaan-perbedaan pokok seperti perjuangan kelas. Tjokroaminoto lebih condong ke kanan bersama Agus Salim dan Abdul Moeis, sehingga Semaoen, Sosrokardono, Alimin dan Bergsma mempertegas ideologi sosialis-komunis yang mengedepankan perjuangan kelas secara radikal. Dengan persetujuan ini, maka ideologi sosialisme-komunisme yang mengusung prinsip perjuangan kelas diwakili oleh Pusat Serikat Buruh Revolusioner (*Revolusionare Vakcentral*), sedangkan Islam diwakili oleh PFB dan PPKB. Kurangnya dukungan PFB dan PPKB dalam rencana pemogokan buruh yang diorganisasi oleh Soerjopranoto, menyebabkan pengunduran diri anggota PFB dan PPKB, bahkan PFB kemudian bubar. Pandangan serikat buruh di bawah CSI diwakili oleh pemikiran Abdoel Moeis yang memimpin PPKB. Menurut Moeis, serikat buruh yang baik adalah yang terlebih dulu mengabdikan kepada bangsa dan setelah selesai persoalan itu baru beranjak kepada sosialisme (Razif, 1998:13). Mengabdikan kepada bangsa dalam pandangan Moeis berarti kaum buruh harus bekerjasama dengan semua golongan dalam masyarakat termasuk golongan pengusaha untuk meningkatkan kemakmuran

bersama. Kerjasama ini sangat diperlukan mengingat kaum buruh masih lemah, sedangkan usaha untuk mengalahkan pengusaha memerlukan kekuatan yang sangat besar. Konfrontasi langsung serikat buruh dengan pengusaha hanya mengakibatkan penderitaan buruh, yaitu semakin banyak buruh yang dipecat, kehilangan pendapatan dan semakin menambah kemiskinan. Kerjasama buruh dengan pengusaha diperlukan, mengingat adanya saling ketergantungan. Jika ada pertentangan antara dua kekuatan ini, maka pemerintah wajib intervensi dengan mendorong mereka untuk berunding.

Pandangan Moeis ini meneguhkan sikap pengusaha muslim. Moeis dikenal dekat dengan pengusaha muslim terutama golongan Arab. Golongan ini mempunyai andil besar dalam membesarkan SI melalui sumbangan rutin. Pergeseran SI ke kiri menyebabkan lemahnya dukungan orang-orang Arab dan SI menghadapi kesulitan keuangan yang cukup akut (Shiraishi, 1997:310). Langkah-langkah SI yang lebih ke kiri juga meresahkan pengusaha Arab dan pengusaha pribumi yang merupakan tokoh-tokoh islam. Tidak tertutup kemungkinan kedua golongan ini juga menjadi sasaran praktek perjuangan kelas, setelah kolonialis dan imperialis Belanda disingkirkan. Pemikiran harmonisasi pengusaha-buruh ini nantinya diperjuangkan oleh berbagai elemen, termasuk oleh Orde Baru dengan konsep Hubungan Perburuhan Pancasila yang kemudian diubah menjadi Hubungan Industrial Pancasila.

Di luar arus utama tersebut terdapat ideologi nasionalisme radikal, sosialisme dan tradisionalisme jawa. Memang, tidak semua lima aliran utama ideologi versi Herbert Feith dan Lance Castle tersebut mengikutsertakan buruh dan petani. Sejak periode awal pembentukan ideologi dan pengembangannya, kaum buruh dan tani hanya aktif pada masa awal pergerakan dan demokrasi liberal. Tetapi pegawai pemerintah, kaum profesional dan pemuka desa merupakan pelaku dan sasaran utama

sepanjang masa (Feith dan Castle, 1988:xxi). Ideologi nasionalisme mengemuka melalui pemikiran Soekarno. Sedangkan Sjahrir dan Hatta meskipun tidak kurang jiwa nasionalismenya, lebih banyak menjadi juru bicara kaum sosial demokrat. Ketiganya mewakili generasi modern hasil pendidikan Belanda. Kaum intelektual memang menjadi sumber ideologi utama di Indonesia sejak zaman pergerakan hingga jatuhnya Orde Baru. Hanya langkah pragmatisme Orde Baru kurang memberi ruang yang memadai dalam debat dan diskusi publik yang bisa melahirkan gagasan-gagasan mengenai sistem kemasyarakatan.

Perselisihan dalam gerakan sosial sebelum maupun setelah perang termasuk perselisihan antar partai, merupakan perselisihan ideologis. Dalam perselisihan ini masyarakat pedesaan relatif tidak terusik, akibat rendahnya mobilitas sosial warganya. Konflik ideologi dengan demikian terutama terdapat antara kelompok-kelompok karyawan atau pekerja di perkotaan (Feith dan Castle, 1988:xlvi). Kelompok ini setelah ke luar dari desa dan menetap di kota-kota, umumnya tidak memiliki ikatan sosial yang kuat. Hans Dieter Evers (1984:54) menyebut kelompok seperti ini "massa apung". Mereka telah tercerabut dari akarnya di pedesaan, tetapi belum sepenuhnya menemukan nilai baru, masih berusaha beradaptasi dengan nilai-nilai perkotaan. Tidak mengherankan jika kelompok ini paling aktif dalam merespon ideologi yang dikembangkan oleh kaum intelektual. Nasionalisme yang bangkit sejak awal abad 20 merupakan jawaban ideologis atas pencarian massa buruh perkotaan. Soekarno sejak awal terus mendorong bahwa fungsi serikat buruh adalah untuk melawan pemerintah kolonial. Buruh oleh Soekarno dianggap sebagai salah satu kekuatan penting selain petani (Soekarno, 1965: 267). Demikian pula Hatta, selain menekankan pentingnya koperasi sebagai bangun ekonomi yang tepat buat

memenuhi kebutuhan para buruh, juga peran politiknya dalam mengusir kaum kolonial. Koperasi-koperasi dan bantuan gotong royong sudah berkembang di pabrik dan bengkel-bengkel. Peran lembaga ini sudah cukup besar dalam menolong para buruh perkotaan (Ingleson, 2004:156).

Selama masa pergerakan, serikat buruh sangat aktif memainkan perannya. Aktivitas utama serikat-serikat buruh dalam masyarakat adalah mengorganisasi para buruh dalam sebuah industri, sebuah tempat kerja ataupun suatu daerah menjadi suatu tindakan bersama untuk memperbaiki gaji dan kondisi kerja serta menyelesaikan keluhan-keluhan dengan para majikan (Ingleson, 2004:241). Dalam negara otoriter, aktivitas tersebut merupakan tindakan politik yang menantang. Negara otoriter menuntut kepasipan warganya dan menempatkan pemerintah sebagai kekuatan utama yang serba mengatur. Negara sensitif terhadap kritik, terlebih-lebih yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Keberadaan organisasi massa tentu memberikan pengalaman berharga bagi anggotanya. Bukan hanya alasan ditemukannya ikatan sosial yang baru, tetapi yang lebih penting adalah belajar mengelola isu-isu fungsional. Para pekerja di lingkungan pabrik selalu berhadapan dengan isu-isu pekerjaan, mereka membutuhkan organisasi untuk memecahkan isu-isu tersebut. Fungsi yang tidak kalah penting adalah bahwa serikat buruh telah menjadi sumber kepemimpinan partai politik. Hampir semua partai politik memperoleh kader-kader pemimpin dari serikat buruh.

Dorongan masuk sebagai anggota serikat buruh, kecuali oleh kebutuhan ikatan sosial juga karena serikat buruh menyediakan keamanan sosial. Tidak terdapat kesejahteraan sosial yang disediakan oleh negara kolonial. Demikian pula para majikan sangat terbatas memberikan jaminan sosial. Tunjangan-tunjangan sosial

hanya diperuntukan bagi orang-orang Eropa dan Indo (Ingleson, 2004:227). Padahal semua pekerja perkotaan harus mampu mengatasi ancaman yang hadir bagi mereka, seperti pengangguran, penyakit, kematian dan hari tua. Mereka mengharapkan organisasi-organisasi kesejahteraan lokal dan secara nyata kepada serikat-serikat buruh untuk menyokong pada saat krisis tiba. Pelaksanaan fungsi demikian bukan hanya bermuatan ekonomi, tetapi juga politik utamanya pembelajaran demokrasi. Serikat buruh menentang rasialisme yang dipraktekkan oleh pemerintah kolonial dan mendidik anggotanya untuk memberikan pelayanan yang sama.

C. Gerakan Buruh di Awal Kemerdekaan

Gerakan buruh merupakan kekuatan sosial yang sangat aktif dan paling tua di Indonesia. Mereka bangkit bersamaan dengan tumbuhnya organisasi-organisasi modern dan mempunyai peran penting dalam perkembangan masyarakat. Jika periode awal pergerakan, gerakan buruh dihambat oleh negara kolonial, maka periode setelah kemerdekaan partai-partai menjadi penghambatnya. Sebab itu kehidupan buruh sejak awal tidak berubah banyak, seperti upah yang rendah, jaminan sosial yang minim dan peralatan kerja yang terbatas. Selain itu pemerintah masih menjadi tumpuan pencari kerja, sehingga dasar yang diletakkan oleh negara adalah bahwa departemen sipil dan militer termasuk korporasi-korporasinya merupakan majikan terbesar buruh Indonesia. Implikasinya adalah bahwa pemerintah menjadi kekuatan yang serba mengatur. Misalnya, pemogokan buruh tidak dilarang, tetapi harus dilakukan dengan ijin majikan dan pemerintah, selain itu semakin banyak aturan-aturan yang membatasi perselisihan industrial.

Banyak tokoh-tokoh partai di era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin percaya bahwa partai politik dapat menjalankan peranan utama dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya. Dibandingkan dengan periode Orde Baru, semua kabinet Indonesia masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin proburuh. Jika dicermati program-program kabinet, terlihat usaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh baik melalui perlindungan upah minimum maupun jaminan sosial (Feith, 1962). Partai-partai politik sangat aktif mengorganisasi buruh dan percaya bahwa buruh merupakan salah satu kekuatan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Pandangan yang sama juga dimiliki oleh para aktivis buruh. Bahwa jalan terbaik mewujudkan kesejahteraan buruh adalah melalui jalur politik, yaitu berkoalisi dengan partai politik yang mempunyai tujuan yang sama. Semua partai politik memiliki perhatian serius terhadap buruh, meskipun dalam perkembangannya hanya partai komunis dan sosialis yang secara serius memperjuangkan kepentingan buruh. PKI dan partai-partai sosialis sejak dini telah menetapkan program peningkatan dan perlindungan terhadap kaum buruh. Perhatian partai-partai tengah dan kanan terhadap buruh baru muncul menjelang pemilu 1955. Penggarapan terhadap buruh oleh partai ini dilakukan baik dengan memposisikan para pengurus serikat buruh dalam jabatan partai politik maupun mendorong para pimpinan serikat buruh untuk memberikan pernyataan politik yang mendukung partai tertentu.

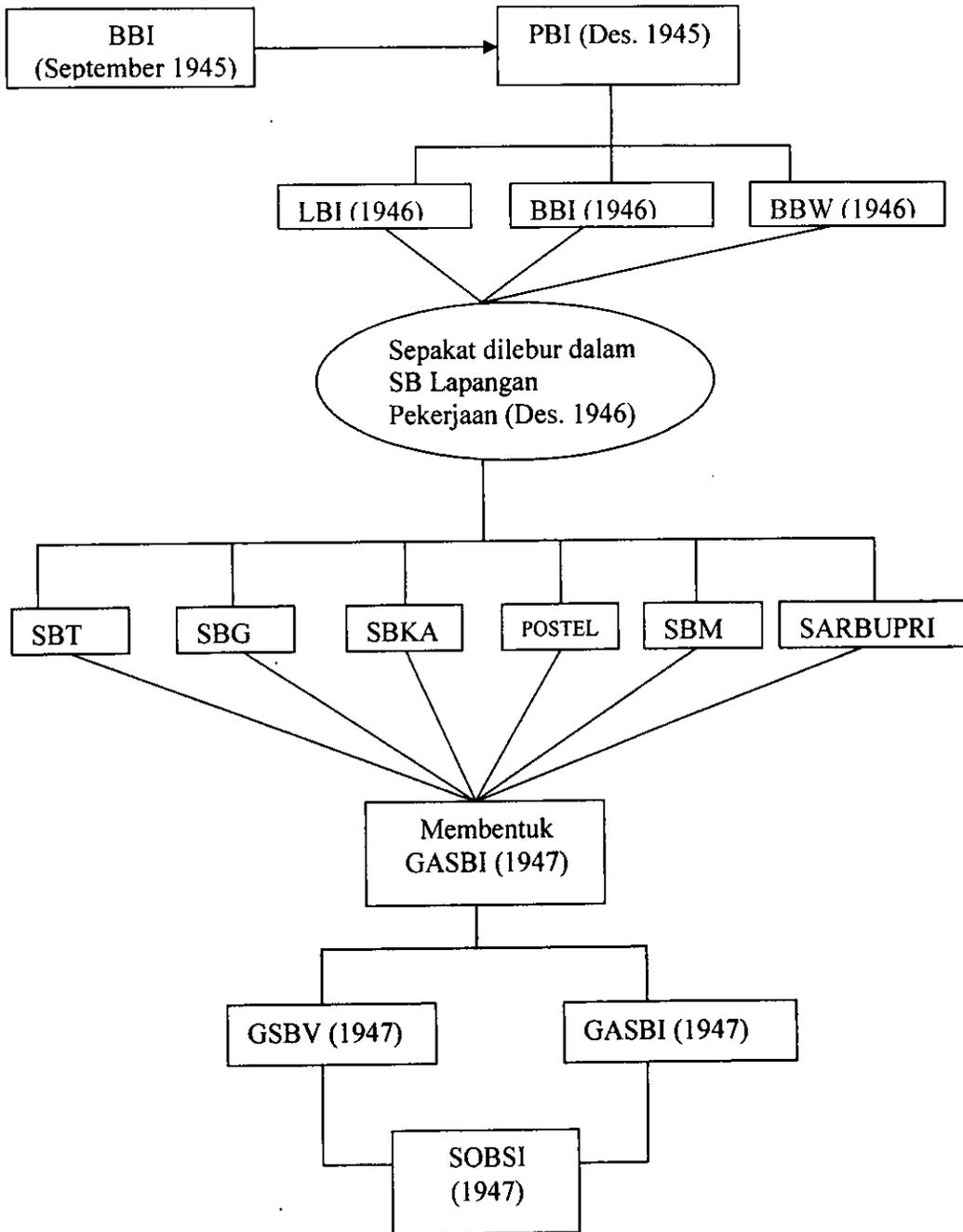
Gerakan buruh pertama yang berdiri pasca Proklamasi Kemerdekaan adalah Barisan Buruh Indonesia (BBI). Gerakan ini dipelopori oleh para tokoh buruh yang aktif dalam perang kemerdekaan seperti SK Trimurti, Soediono dan Sjamsu Harja Udaja. Pada bulan Nopember 1945, BBI mengubah diri menjadi Partai Buruh

Indonesia (PBI). Perubahan ini menunjukkan kuatnya pemikiran para tokoh buruh bahwa jalan politik merupakan cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan buruh. Sejak berdirinya, gerakan buruh di Indonesia tidak bisa membebaskan diri dari politik. Lingkungan perjuangan kemerdekaan yang menuntut semua lapisan masyarakat aktif dalam perjuangan fisik dan politik, menempatkan semua gerakan sosial sarat dengan muatan politik. Pada bulan Mei 1946 berdiri Laskar Buruh Indonesia (LBI) dan Barisan Buruh Wanita (BBW). Dua organisasi ini menyatakan terlepas dari BBI dan berusaha untuk membangun gerakan buruh yang terbebas dari politik. Tetapi daya tarik lingkungan politik yang sangat kuat, tidak mampu membawa LBI dan BBW mempertahankan idealisme ini. LBI dan BBW aktif dalam revolusi kemerdekaan dan mengantarkan dua gerakan buruh tersebut ke jenjang kepemimpinan nasional. Masing-masing tokoh gerakan ini kemudian menduduki jabatan Menteri Perburuhan (SK Trimurti, 1975).

Keinginan untuk membangun gerakan buruh yang tunggal dan kuat dimiliki oleh hampir semua tokoh buruh. Dalam pertemuan tokoh-tokoh buruh Desember 1946, SK Trimurti (1975) mengingatkan pentingnya persatuan untuk membangun kekuatan. Berkembang pula pemikiran untuk membangun gerakan buruh berdasarkan lapangan pekerjaan. Menyadari bahwa persoalan buruh berbeda-beda untuk tiap-tiap lapangan pekerjaan, maka gerakan buruh yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan buruh harus didasarkan pada lapangan pekerjaan. Dari pertemuan itulah kemudian berdiri Serikat Buruh Minyak (SBM), Serikat Buruh Gula (SBG), Serikat Buruh Postel (SBP), Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) dan sebagainya. Sedangkan BBI diubah menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI).

Tetapi kesepakatan untuk hanya bergerak di bidang ekonomi ini diingkari sendiri oleh para tokoh buruh. Sekali lagi, lingkungan politik di mana gerakan buruh lahir bersamaan dengan perjuangan kemerdekaan, tidak bisa membebaskan diri dari pengaruh politik. Inilah warisan yang paling kuat ditanamkan pada gerakan buruh Indonesia. Konflik dalam tubuh GASBI antara gerakan ekonomi atau gerakan ekonomi dan politik membawa perpecahan yang melahirkan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GBSV). Tidak semua serikat buruh yang bergabung dalam GASBI memiliki jaringan kepengurusan dari pusat sampai daerah. Demikian pula, tidak semua serikat buruh yang berdiri di awal kemerdekaan ini berdasarkan pada lapangan pekerjaan. Tidak sedikit gerakan buruh lokal, seperti Serikat Buruh Djakarta (SBD), Serikat Buruh Sumatra, Serikat Buruh Borneo dan sebagainya. Sikap terhadap Belanda terutama isi perjanjian Linggarjati, juga turut mempengaruhi perpecahan GASBI.

Fragmentasi Serikat Buruh di Awal Kemerdekaan



D. Gerakan Buruh sebagai *Onderbouw* Partai Politik

1. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)

SOBSI didirikan pada tanggal 29 Nopember 1947. Sejak berdirinya SOBSI dimaksudkan sebagai sebuah gerakan buruh yang memayungi semua serikat buruh di Indonesia. Embrio SOBSI adalah GASBI dan GBSV. Seruan para tokoh SOBSI yang menyerang kapitalisme Belanda, tuntutan kenaikan upah di perusahaan-perusahaan Belanda, pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari, upah lembur, jaminan sosial seperti pengobatan waktu sakit bahkan nasionalisasi perusahaan; segera menaikkan pamor SOBSI di kalangan buruh (Hindley, 1966:132). Organisasi ini berkembang dengan pesat. Dalam waktu enam bulan telah terdapat 34 serikat buruh yang bergabung. Kuatnya akar pemikiran sosialis dan dalam beberapa hal juga nasionalis, telah menempatkan SOBSI sebagai tumpuan harapan kaum buruh Indonesia.

Para tokoh SOBSI dan SARBUPRI aktif dalam menyusun rencana pemberontakan Madiun. Ketua SOBSI Harjono dan ketua SARBUPRI Maruto Darusman terbunuh bersama dengan banyak kader serikat buruh. Seruan Soekarno agar para buruh dan tani lebih fokus menghadapi Belanda dan tidak saling membunuh (Kahin, 1952:171), membuahkan hasil dengan penarikan diri tokoh buruh dari SOBSI, terutama sayap nasionalis. Sembilan belas dari 34 serikat buruh menarik diri dari federasi dan melancarkan protes terhadap keterlibatan tokoh-tokoh buruh dalam pemberontakan (Hindley 1966: 133). Selama satu tahun pasca pemberontakan, SOBSI praktis lumpuh dan tidak memiliki kegiatan berarti. Tetapi menjelang akhir 1949, Asarudin tokoh yang tersisa mencoba menghidupkan kembali SOBSI dengan menjelaskan hubungan SOBSI dan PKI. Ia menyatakan bahwa dominasi tokoh-tokoh komunis terjadi akibat kurang tertariknya partai-partai non

komunis dalam memajukan kesejahteraan buruh. Selain itu tokoh-tokoh non komunis dalam SOBSI yang kecewa dengan program SOBSI menarik diri, sehingga meningkatkan proporsi orang komunis dalam SOBSI (Hindley,1966:133).

Pertumbuhan kembali SOBSI tergolong cepat. Kurang dari satu tahun telah berhasil menghimpun 25 serikat buruh vertikal dengan anggota sekitar 2,5 juta orang (Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah cabang dan Jumlah Anggota SOBSI 1949-1962

| No. | TAHUN | JUMLAH CABANG | JUMLAH ANGGOTA |
|-----|-------|---------------|----------------|
| 1. | 1949 | 25 | 2,5 juta |
| 2. | 1951 | 117 | 2,5 juta |
| 3. | 1953 | 125 | 2,5 juta |
| 4. | 1955 | 128 | 2,7 juta |
| 5. | 1960 | 165 | 2,8 juta |
| 6. | 1962 | 170 | 3,3 juta |

Sumber: angka-angka di atas diambil dari majalah *Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan*, terbitan tahun 1960, 1961 dan 1962.

Struktur organisasi SOBSI terentang dari Pusat sampai ke tingkat unit kerja atau perusahaan-perusahaan. Meskipun bentuknya federasi yang beranggotakan serikat buruh pusat dan lokal, semua anggota serikat buruh dianggap langsung sebagai anggota SOBSI. Anggota biasa berpartisipasi dalam organisasi basis dan jika terdapat lebih dari satu organisasi basis di tingkat bawah, didirikan komite koordinasi. Anggota-anggota biasa di lapangan pekerjaan dikoordinasi dan dipimpin oleh Cabang SOBSI yang wilayahnya ditentukan oleh Dewan Regional. Dewan ini mempunyai tugas ganda yaitu mengkoordinasi dan memimpin serikat buruh di tingkat regional dan mengawasi pekerjaan cabang-cabang SOBSI (Hindley, 1965:136). Di tingkat pusat terdapat Dewan Nasional yang bertugas membantu

menyederhanakan serikat buruh anggota federasi, mengkoordinasikan kepemimpinan serikat buruh dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres Nasional. Dengan struktur seperti ini, SOBSI bukanlah serikat buruh biasa. SOBSI memiliki struktur organisasi yang ketat dengan disiplin yang baik. Keputusan-keputusan organisasi dijalankan oleh kepemimpinan pusat yang merupakan bagian dari kepemimpinan PKI. Oleh PKI, SOBSI dijadikan mesin untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pusat di tempat-tempat kerja dan di kalangan buruh. Apa yang dilakukan oleh SOBSI khususnya dalam kepemimpinan dan kaderisasi tidak dapat dilepaskan dengan peranan PKI. Persoalan administrasi, pelatihan kader, pemeliharaan dan perluasan anggota dan metode-metode penyelesaian perselisihan industrial, tidak dapat dilepaskan dari peranan PKI. Sebaliknya SOBSI juga memberikan dukungan penuh kepada PKI. Semua anggota federasi memberikan dukungan penuh kepada PKI melalui partisipasinya dalam program-program partai.

Pelatihan hak-hak buruh, marxisme, organisasi buruh serta pengetahuan tentang politik nasional dan internasional diberikan oleh para tokoh PKI secara teratur di berbagai level. Menurut Hindley (1966:137) sebelum tahun 1960 ini merupakan satu-satunya pelatihan yang diberikan oleh partai kepada serikat buruh. Program pendidikan dan pelatihan SOBSI merupakan mekanisme untuk melahirkan kader-kader baru dari bawah. Materi pendidikan dan pelatihan secara umum seperti dikemukakan di atas. Tetapi terdapat pula sistem pendidikan dan pelatihan secara berjenjang. Untuk tingkat paling bawah diperkenalkan masalah-masalah dasar gerakan buruh dan aturan-aturan dasar serikat buruh, termasuk di dalamnya teknik berorganisasi dan negosiasi. Mereka yang lulus dengan predikat baik diberi kesempatan mengaktualisasikan diri pada serikat buruh. Dengan cara ini mekanisme

perekrutan kader dan pemimpin dilakukan dari bawah. Tingkat berikutnya berupa pendidikan dan pelatihan metode-metode kepemimpinan dan pengendalian massa. Materi tentang marxisme dan unionisme yang lebih mendalam diberikan pula di level ini. Teknik-teknik memperluas keanggotaan seperti pembentukan tim olahraga, kesenian dan sebagainya melalui sistem sel, diperdalam pula di level ini. Mereka yang berhasil lulus dengan nilai baik, dilibatkan dalam delegasi-delegasi daerah dan nasional untuk ikut mewakili SOBSI di forum yang lebih besar dan luas.

Kelebihan lain dari SOBSI yang tidak ditemukan pada serikat buruh lainnya menurut Hindley (1965:140) adalah adanya pekerja penuh waktu di Cabang-cabang dan Pusat. Pada tahun 1962 di Pusat terdapat sekitar 50 orang staf penuh waktu termasuk tukang masak, sopir dan petugas kebersihan. Di tingkat provinsi rata-rata bekerja 9 orang dan tingkat kabupaten rata-rata 7 orang. Sedangkan di tingkat basis rata-rata terdapat 5 pekerja penuh waktu. Pada tahun 1960 menurut Hindley, terdapat sekitar 7.000 organisasi basis. Dengan kekuatan kader terindoktrinasi dan terlatih, SOBSI mampu mengorganisasi buruh di berbagai bidang pekerjaan. PKI sangat diuntungkan oleh militansi anggota SOBSI, sebab buruh merupakan kekuatan utama PKI selain petani. Keberhasilan PKI memobilisasi massa untuk kepentingan rapat raksasa, perayaan hari jadi partai atau bentuk kegiatan lain, hanya dimungkinkan dengan memobilisasi buruh dan tani.

Kebesaran SOBSI juga didukung oleh militansi anggotanya yang tersebar di berbagai serikat buruh pendukungnya, terutama SARBUPRI, SBG dan dan Serikat Pekerja Kehutanan Seluruh Indonesia (Sarbuksi). Jika pada awal berdirinya tahun 1946 Sarbupri hanya mempunyai anggota aktif 50.000 orang di seluruh Indonesia, lima tahun kemudian telah meningkat hampir sepuluh kali (Warta Sarbupri No 10

Desember 1952). Sejak berdirinya Sarbupri berhaluan kiri dan anti imperialis. Warta Sarbupri sebuah majalah bulanan untuk para buruh perkebunan, sejak penerbitannya yang pertama secara terus menerus mengutuk perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan secara gigih menuntut nasionalisasi perkebunan. Pada ulang tahunnya ke 5, Sarbupri menyatakan bahwa hancurnya Indonesia disebabkan oleh kebijakan Pemerintah yang mempertahankan negeri ini sebagai:

- a. sumber bahan-bahan mentah bagi industri negara imperialis
- b. daerah pasar penjualan bagi hasil-hasil industri negara-negara imperialis
- c. daerah penanaman dan perluasan kapital
- d. daerah sumber tenaga kerja yang paling murah di dunia (Warta Sarbupri No. 3 Juli 1951 h. 6).

Dibanding serikat buruh lain, Sarbupri merupakan anggota SOBSI yang paling kuat. Bukan hanya jumlah anggotanya yang sangat besar, tetapi juga tujuannya yang jelas yaitu mengambil alih perkebunan asing. Dukungan kaum buruh terus mengalir terhadap langkah Sarbupri ini, terlihat dari penambahan anggota yang sangat pesat. Aksi-aksi pemogokan dan pelambatan kerja (*slow down*) terus dilakukan untuk mengacaukan produksi dan menciptakan kerugian bagi pengusaha. Pelambatan kerja menjadi pilihan sebab jika para buruh mangkir atau absen maka pengusaha dapat memberhentikannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi dengan *slowdown*, upah buruh tetap dibayarkan sedangkan produksi merosot. Inilah salah satu bentuk perlawanan buruh yang oleh Scott (2000) disebut sebagai "*weapon of the weak*". Pencurian hasil perkebunan dan kampanye mendukung aksi-aksi petani liar dilakukan dalam konteks melawan kekuasaan dan kapitalisme.

Kesediaan para buruh memobilisasi diri dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik sebagai hasil dari kampanye nasionalisasi, merupakan keberhasilan penting dari Sarbupri. Ketika serikat buruh lain baru tumbuh atau

terlibat konflik internal, Sarbupri telah berhasil mengkampanyekan pentingnya nasionalisasi perusahaan asing di kalangan para buruh. Bukan hanya terbatas di situ, Sarbupri juga melancarkan serangan terhadap perusahaan kapitalis mengenai upah dan jam kerja. Serangan ini dilakukan di era militansi buruh di tahun 1950-an yang menggoncangkan kehidupan ekonomi dan politik Indonesia. Feith (1962:84) mencatat jumlah hari kerja yang hilang mencapai 700.000 pada tahun 1950-an. Pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit, di satu sisi produksi tidak berjalan dan banyak perusahaan yang gulung tikar, di sisi lain serikat buruh sangat gigih memperjuangkan kenaikan upah dan nasionalisasi perusahaan.

Serikat-serikat buruh mengklaim kemenangan atas lahirnya undang-undang perburuhan tahun 1951 yang menetapkan tujuh jam kerja sehari dan 40 jam kerja seminggu (Hawkins, 1963:263). Dipicu oleh keberhasilan itu, tuntutan kenaikan upah terus dilakukan hingga akhirnya pengusaha perkebunan tidak punya pilihan lain kecuali mengabdikan kenaikan upah sebesar 30 persen pada bulan September 1953 (Mc Vey, 1965: 263). Menanggapi kemenangan itu, Sarbupri menyatakan:

“Pemogokan berakhir dengan kemenangan pihak buruh sesudah berjalan hampir satu bulan (29 hari). Dengan perjuangan pemogokan itu Sarbupri melaksanakan dalil revolusioner, bahwa perjuangan perbaikan nasib rakyat tidak boleh ditunda sampai sempurna selesainya Revolusi Nasional Anti Imperialist. Dengan kemenangan ini kepercayaan rakyat kepada Sarbupri terus meningkat” (Warta Sarbupri Desember 1953:6).

Serikat-serikat buruh non perkebunan terpecah-pecah dalam menyampaikan tuntutan. SOBSI misalnya secara tegas menuntut kenaikan upah untuk seluruh lapangan pekerjaan, demikian pula organisasi yang bergabung di dalamnya seperti Serikat Buruh Gula (SBG), Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU), Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB), Serikat Buruh Angkatan

Udara (SERBAUD), Serikat Buruh Film (Sarbufis) dan Persatuan Buruh Minyak (PERBUM).

Sejak diundangkannya undang-undang perburuhan tahun 1951, terus berlangsung pemogokan sepanjang tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Tuntutan utamanya adalah kenaikan upah. Aktor utama dalam gerakan buruh tahun 1950-an adalah SOBSI beserta organisasi yang menjadi anggota federasinya (Feith, 1962: 83). Gerakan buruh nasionalis dan islam meskipun secara nyata ada, tetapi aktivitasnya jauh di belakang SOBSI. Hindley (1966:153) bahkan menyatakan adanya monopoli isu-isu dan perjuangan buruh oleh SOBSI dari tahun 1950 – 1965. Wacana yang dibangun PKI dan SOBSI sejak Kemerdekaan 1945, memang jauh lebih menarik bagi kaum buruh dibanding wacana yang dikembangkan oleh partai dan serikat buruh lainnya. Tuntutan nasionalisasi perusahaan, pemberlakuan upah minimum, kenaikan upah secara berkala, jam kerja 7 jam sehari, upah lembur dan jaminan sosial, sangat menarik bagi buruh di negara yang baru merdeka. Menghadapi kegigihan SOBSI dalam memproduksi wacana dan memperjuangkannya menjadi kebijakan, serikat buruh lainnya praktis kehilangan isu. SOBSI dikenal “keras kepala” dalam memperjuangkan tuntutannya. Dalam pandangan pengusaha Belanda dan Amerika, kepemimpinan SOBSI disebut tidak profesional dan membabi buta (Stoler, 2005: 224). Sebutan demikian diberikan mengingat banyaknya tuntutan yang tidak masuk akal. SOBSI tidak segan-segan melakukan perlawanan dalam bentuk terselubung, seperti mangkir, pelambatan kerja, sabotase dan pencurian guna memaksimalkan penguasaan sumberdaya perusahaan.

Namun demikian sejak tahun 1956 para pemimpin SOBSI sedikit melunak. Demikian pula tokoh-tokoh PKI. Mereka menghindari kecaman terhadap Pemerintah

dan para pengusaha. SOBSI yang biasanya cepat memberi respon terhadap kondisi ekonomi nasional yang memburuk, pada tahun 1956 tidak menyerang lawan-lawan politiknya, baik itu muslim, pengusaha maupun militer. Sikap lunak ini terkait dengan harapan SOBSI akan pembentukan Front Persatuan Nasional. Untuk mencapai tujuan itu, Konstitusi SOBSI menegaskan: “untuk dapat mengambil bagian yang aktif dalam Front Persatuan Nasional, maka kaum buruh harus terus menerus menyusun kekuatan Front Persatuan Buruh, yaitu persatuan dari kaum buruh baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam SOBSI” (Njono, 1953: 8). Gagasan untuk membentuk Front Persatuan Buruh di bawah pimpinan SOBSI sebenarnya telah mengemuka sejak tahun 1952². Tetapi pada awal tahun 1950-an itu SOBSI dihadapkan pada usaha untuk membebaskan para tokohnya yang ditahan atas perintah Kabinet Sukiman. Usaha secara nyata baru tahun 1954 bersamaan dengan kampanye pemilu 1955. Dalam usahanya memimpin Front Persatuan Buruh, SOBSI menyerukan:

“persatuan semakin kuat di kalangan buruh, juga di kalangan pemimpin-pemimpinnya yang jujur. Kegiatan memecah belah persatuan yang dilakukan oleh kaum pemodal besar-asing dan komplotan-komplotannya semakin terbongkar. Cukup banyak masalah yang menjadi kepentingan langsung kaum buruh seperti masalah-masalah upah dan harga, jaminan sosial, keganjilan-keganjilan di lapangan kepegawaian, pemecatan dan pengangguran, diskriminasi, pelanggaran hak-hak demokrasi dan sebagainya yang dapat dijadikan titik persamaan untuk dirundingkan bersama-sama. Sangat wajar jika SOBSI yang anggotanya lebih dari separuh kaum buruh memimpin Front Persatuan Buruh” (Bendera Buruh, 1956:1).

Serikat buruh lain menanggapi keinginan SOBSI untuk membentuk dan memimpin Front Persatuan Buruh secara dingin. SBII secara tegas menolak usaha

² Resolusi CC PKI, *Kewajiban Front Persatuan Buruh*. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1952. Resolusi ini memuat 5 pokok pemikiran yaitu keadaan ekonomi dan politik Indonesia, pembangunan nasional dan nasionalisasi perusahaan vital, kenaikan harga barang dan inflasi, program demokrasi rakyat dan pengusaha nasional dan serikat buruh reaksioner dan arbitrase pemerintah.

itu, sebab hanya merupakan taktik PKI dan SOBSI untuk menguasai kaum buruh demi kepentingan para pemimpinnya yang licik. Lebih lanjut SBII menyatakan:

“satu di antara hal-hal yang sulit dipertemukan antara SB umum dan yang komunis adalah dalam membicarakan trade unionisme sendiri. SB Komunis seperti di negara komunis menolak perbedaan dan demokrasi, didasarkan kenegaraan komunis seperti di negara komunis. Sedangkan SB umum didasarkan pada perbaikan nasib dalam proses ekonomi negara” (Suara Masjumi, 10 Djuli 1956).

Gagasan ini tidak dapat diwujudkan sebab kerasnya penolakan dari SB-SB non SOBSI. Meskipun demikian sesungguhnya SOBSI pantas memperoleh dukungan karena 4 alasan berikut. Pertama, SOBSI adalah serikat buruh terbesar dan paling gigih memperjuangkan kepentingan para pekerja, seperti peningkatan upah, kondisi kerja dan penolakan pemutusan hubungan kerja. Kedua, SOBSI memiliki dana dan personil yang terlatih dengan baik bahkan sebagian pengurusnya militan dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Sikap seperti ini berkat pelatihan yang rutin dilakukan sehingga kehadiran SOSBI dirasakan oleh para pekerja. Ketiga, SOBSI mengorganisasi para buruh mengikuti lapangan pekerjaan, sehingga memiliki isu-isu perburuhan yang selalu aktual dan berbeda-beda menurut pekerjaannya. Sebagai federasi, SOBSI Cabang tidak mendominasi hubungan perburuhan dengan pabrik atau tingkat basis, melainkan mengedepankan serikat buruh terkait. SOBSI sebagai sebuah gerakan baru turun jika serikat buruh di tingkat basis memerlukan dukungan kekuatan. Keempat, jaringan organisasi SOBSI tersebar luas. SOBSI pantas disebut serikat buruh nasional karena organisasinya tersebar dari Sabang sampai Merauke, meskipun kekuatan utamanya di Jawa. Demikian pula dengan gerakan buruh internasional, hanya SOBSI yang secara rutin diundang dan hadir dalam pertemuan-pertemuan internasional, khususnya WFTU yang memang berhaluan komunis. Tetapi

justro faktor keempat ini terutama ideologi komunisnya dan radikalnya gerakan SOBSI yang membuat para serikat buruh lain memandangnya sebagai lawan dan menolak kerjasama. Perpecahan dalam tubuh Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) tidak dapat dipisahkan dari tarikan sebagian pengurus KBKI oleh SOBSI, sehingga KBKI menyetujui beberapa langkah SOBSI seperti pembentukan Komite Bersama Hari Buruh 1 Mei 1953.

2. Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI)

Berbeda dengan PKI dan Masyumi yang secara keorganisasian berbasiskan buruh dan tani, PNI berbasis kaum priyayi dan kaum intelektual mapan di kota. Pengorganisasian buruh dilakukan setelah perkembangan politik tanah air mengarah pada mobilisasi massa. Dalam Kongresnya September 1951, PNI memutuskan untuk mendirikan Himpunan Buruh Indonesia (HIMBI). Sebelumnya telah berdiri Buruh Demokrat (1950) yang tidak berafiliasi dengan partai manapun. Pada 10 Desember 1952, HIMBI bersama Buruh Demokrat mendeklarasikan Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI).

Garis perjuangan politik KBKI secara jelas diuraikan dalam Parogram Umum yang dirumuskan pada waktu pembentukannya. Meskipun dalam program umum dinyatakan "KBKI mengikuti pendirian bahwa antara partai politik dan gerakan buruh tidak boleh diadakan hubungan organisatoris. Oleh karena itu KBKI berdiri bebas dari pengaruh semua partai politik", tetapi dalam prakteknya perjuangan KBKI secara jelas mengikuti PNI. KBKI lahir atas amanat Kongres PNI dan dipimpin oleh tokoh-tokoh PNI, ideologinya pun mengikuti PNI yaitu sosialisme kerakyatan. Bukti lain bahwa KBKI benar-benar organ PNI dapat disimak surat DPP PNI tertanggal 4

Pebruari 1954 kepada semua Cabang partai di daerah untuk menjelaskan sikap partai atas isu-isu buruh dan memerintahkan cabang-cabang partai untuk (1) membentuk cabang-cabang KBKI secepat mungkin, (2) membantu semua federasi yang benar-benar non partai terutama Gabungan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (GSBI)³ (3) strategi yang bijaksana harus diambil terhadap SOBSI, SOBRI dan HISSBI (Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia) dan (4) SBII dan KSBI harus dilawan karena kedua organisasi ini ditunggangi oleh Masyumi dan PSI untuk menentang kepentingan PNI (Rocamora, 1991:308).

KBKI tidak bisa menerima sepenuhnya konsep perjuangan kelas. Sikap ini untuk mempertegas hubungannya dengan PKI dan SOBSI yang nantinya justru menurunkan pendukung PNI dari kalangan buruh. Sejak berdirinya ISDV, konsep perjuangan kelas dan keadilan distributif telah ditanamkan dalam benak para buruh. Sebab itu harapan para buruh setelah kemerdekaan adalah nasionalisasi yang di tingkat bawah dipahami sebagai distribusi aset seperti tanah, uang dan pabrik kepada para buruh. Seruan Aidit terutama setelah ia memimpin PKI tentang nasionalisasi dan kemudian distribusi aset, menarik kaum buruh⁴. Sementara KBKI menganut asas sosialisme kerakyatan yang tidak bisa menerima ekonomi determinisme dan teori materialisme historis yang akan menghancurkan kelas-kelas sosial lain dalam

³ Pada saat itu serikat-serikat buruh besar dalam GSBI seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), SSKDN (Serikat Sekerdja Kementrian Dalam Negeri) dan SBDPU (Serikat Buruh Dinas Pekerjaan Umum) dipimpin oleh orang-orang PNI.

⁴ Berbagai seruan Aidit ini dapat ditemukan dalam Majalah *Bintang Merah* yang diterbitkan oleh CC PKI. Dalam edisi No. 39 Oktober 1959 ia menulis artikel "Pembangunan Organisasi Penting, Lebih Penting Lagi Pembangunan Ideologi", ia menegaskan perlunya kaum buruh memelihara dan membangun ideologi sosialisme dan komunisme dan menuntut nasionalisasi dan distribusi aset. Partai dan kaum buruh yang menolak sikap demikian (ucapan ini ditujukan pada PNI, NU dan Masyumi) adalah kaki tangan kaum borjuis dan serikat buruh kuning. Sedang dalam artikel sebelumnya "Kaum Buruh Indonesia Berjuang untuk Hak-Haknya" *Bintang Merah* Mei Tahun ke IX/ 1953, Aidit menyerang semua partai dan serikat buruh di luar SOBSI yang menolak gagasan SOBSI dalam usaha membentuk Front Persatuan Buruh.

masyarakat, SOBSI secara tegas menuntut pembagian aset dan nasionalisasi untuk buruh. Sikap KBKI ini mengecewakan Sarbupri, sehingga menarik diri dan menggabungkan diri dengan SOBSI yang dinilai lebih tegas memperjuangkan buruh.

Kurangnya kesediaan para pemimpin Cabang PNI untuk segera membentuk KBKI turut menjadi penghambat perkembangan KBKI. Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling lamban pembentukan Cabang KBKI dan paling lamban pula pertumbuhan anggotanya. Data *Suluh Indonesia* tanggal 27 Desember 1954 misalnya menyebutkan jumlah anggota KBKI Sumatra Utara 33.000 orang, Jawa Barat 10.000, Jawa Tengah 5.000 dan Jawa Timur 1.000 orang. Sementara itu pada tahun 1958 dari jumlah anggota KBKI sebesar 1.001.775 orang yang dilaporkan DPP ke Kementerian Perburuhan, hanya 18 persen berasal dari Jawa (*Tinjauan Masalah Perburuhan*, Mei 1958:8). Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah pemilih PNI pada Pemilu 1955 yang suaranya terkonsentrasi di Jawa. *Suluh Indonesia* (27-12-1954) melaporkan adanya keengganan para pengurus partai untuk menggarap buruh. Gejala ini sejalan dengan temuan Geertz bahwa PNI yang berbasis kaum priyayi Jawa tidak menarik bagi kaum buruh, sama tidak menariknya kaum priyayi dan kaum buruh itu satu sama lain.

Azas perjuangan KBKI adalah sosialisme kerakyatan. Konsep sosialisme kerakyatan menurut KBKI adalah sosialisme bangsa Indonesia yang lebih luas dan lebih umum dari pada Marxisme-sosialisme dan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat gotong royong Indonesia. Sosialisme seperti ini berbeda jauh dengan semangat revolusi yang dikobarkan oleh kaum komunis, pertentangan kelas dan diktatur proletariat. KBKI berjuang tidak untuk membentuk diktatur proletariat dengan mengobarkan pertentangan kelas, melainkan untuk "mencapai cita-cita

kebangsaan yang berdasarkan kemanusiaan dengan cita-cita demokrasi bulat berbakti penuh kepada masyarakat dengan tidak menindas kemerdekaan perorangan". Sosialisme semacam itu disebutnya *constuctief sosialisme* atau *synthese sosialisme* atau Marhaen sosialisme atau demokrasi sosialisme atau Sosialisme-kerakyatan (Program Umum KBKI 1 September 1951).

Berbeda dengan SOBSI yang bertujuan memonopoli perwakilan buruh melalui Front Persatuan Buruh, KBKI justru menganjurkan beberapa serikat buruh sesuai dengan dasar dan cita-cita hubungan perburuhan. Demi mewujudkan serikat buruh yang plural, KBKI menolak bergabung dalam federasi buruh internasional yang didominasi komunis, WFTU maupun ICFTU yang didominasi Amerika, tetapi bersedia bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional, ILO. Tedjasukmana (1959: 33) menyatakan bahwa sikap KBKI ini dimaksudkan untuk memelihara keseimbangan antara serikat buruh kiri yang menolak modal asing dan menuntut nasionalisasi dan distribusi aset dengan serikat buruh kanan yang dapat menerima modal asing, modal nasional dan menyerukan produktivitas kerja. Sikap ini juga diperlihatkan dalam berbagai pernyataan "KBKI dapat menerima kapital asing asal saja segala sesuatunya tidak merugikan buruh". "KBKI mendesak dikembangkannya kewiraswastaan nasional sepanjang hal ini tidak menciptakan kapitalisme nasional" (Rocamora, 1991: 123).

Pada awal tahun 1960-an, perpecahan KBKI tidak dapat dielakkan. Ego para tokoh partai telah mengandaskan perjuangan kaum buruh nasionalis ini. Dalam Kongres Kedua di Bandung, Ahem Eningpradja terpilih secara aklamasi untuk

membentuk DPP dengan syarat mendapat persetujuan ketua PNI⁵. tetapi Ahem yang memiliki posisi kuat di Pemerintahan, menolak syarat tersebut. Dengan dukungan GMNI, Ahem mendirikan Dewan Pimpinan Sentral (DPS) KBKI. Sedangkan pimpinan PNI bereaksi mengubah nama KBKI dengan Kesatuan Buruh Marhaen (KBM). KBKI berusaha memperkuat diri melalui kerjasama dengan militer dalam BKS-BUMIL bahkan juga mendukung berdirinya Sekbergolkar, ketika KBKI dipimpin oleh Imam Soedarwo.

KBKI dibangun dengan usaha yang sangat besar terutama di wilayah perkebunan dan industri. Alasan yang diberikan oleh PNI adalah bahwa untuk memenangkan pemilihan umum 1955, buruh sebagai kekuatan sosial perlu dirangkul (Rocamora, 1991:309). Alasan yang lebih penting adalah kebutuhan PNI akan kekuatan yang mobile, yaitu kekuatan yang leluasa bergerak baik vertikal maupun horisontal (antar wilayah dan antar kekuatan sosial lainnya). Untuk memenuhi kebutuhan itu, buruh dinilai paling tepat, sehingga PNI gigih merangkul kaum buruh⁶. Oleh karena pimpinan PNI di tingkat cabang pada umumnya pegawai pemerintah, maka sukar untuk melaksanakan pekerjaan yang *mobile* dan terus-menerus seperti dalam menghadapi kampanye. Kaum muda yang pada umumnya pekerja di swasta, pabrik maupun perkebunan memperoleh porsi yang besar sebagai aktivis partai level bawah dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik dan agregasi kepentingan. Mereka yang berjasa ini kemudian berbalik menyerang partai

⁵ Wawancara dengan Soewoso salah satu ketua KBKI dan Sekretaris pribadi Ali Sastroamidjojo pada tanggal 11 Agustus 2005 di Jakarta. Sebelum memimpin KBKI, Ahem memimpin Sarbupri sebelum bergabung dengan SOBSI. Sarbupri bersama dengan Serikat Buruh Gula (SBG) merupakan tulang punggung utama kekuatan KBKI. Setelah kedua SB itu bergabung dengan SOBSI, kekuatan KBKI merosot.

⁶ Wawancara dengan Soewoso 11 Agustus 2005 di Jakarta. Pernyataan ini dibenarkan oleh Manganar Pasaribu ketua Kesatuan Buruh Marhaen dan Suhardi Sudiro (Sekarang Sekjen DPP PNBK).

dan menurunkan perolehan suara PNI dalam Pemilu 1957 karena merasa dibohongi oleh para elite partai. Jabatan-jabatan dalam partai termasuk anggota DPR dan DPRD diisi oleh para pegawai pemerintah dan guru. Banyak aktivis partai yang menarik diri terutama kaum buruh dan kejadian tersebut turut menyumbang perpecahan dalam KBKI dan menaikkan suara PKI dalam Pemilu 1957.

Menyadari para buruh mulai meninggalkan partai dan potensinya demikian besar, PNI berusaha untuk merangkulnya kembali. DPP PNI menyerukan agar cabang-cabang partai secara aktif berunding dengan para buruh dan menekankan bahwa semua jabatan seksi perburuhan harus dipegang para buruh. Di Sumatra Utara dan Sumatra Timur sepertiga pengurus partai berasal dari para buruh (Stoler, 2005: 119). Kegigihan PNI merangkul kembali para buruh didorong oleh ketakutannya jika kaum buruh sepenuhnya berada di bawah SOBSI yang akan menguntungkan sekutu dan lawan politiknya, PKI. Penarikan diri Sarbupri dan SBG yang bergabung dengan SOBSI, memberi pukulan menyakitkan bagi KBKI. Sarbupri dan SBG kecewa dengan KBKI yang dinilainya kurang revolusioner, lebih banyak melayani kaum feodal dan kapitalis birokrat (Tinjauan Masalah Perburuhan, September 1962). Tetapi KBKI segera memperoleh energi baru ketika Masyumi dan PSI terkucil secara politis sejak tahun 1957-1958, terutama keterlibatan beberapa tokohnya dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Semakin banyak serikat buruh yang bersekutu dengan SBII dan KBSI masuk ke dalam KBKI. Keuntungan lain yang diperoleh KBKI dibandingkan dengan serikat buruh lainnya adalah pengaruh PNI dalam Kementrian Perburuhan. Dominasi KBKI dalam kementrian ini telah memberi keuntungan tersendiri, seperti dalam penentuan upah maupun konflik-konflik perburuhan yang memerlukan mediasi pemerintah (Rocamora, 1991: 315-316).

Namun, perpecahan dalam tubuh KBKI tidak dapat dihindari. Beberapa benih keretakan telah bersemi sejak hasil pemilu 1955 yang kemudian berlanjut dalam Kongres KBKI di Bandung 1962. Bibit keretakan yang tidak kalah pentingnya adalah nasionalisasi perusahaan perkapalan Belanda *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) akhir 1957 (Rocamora, 1991:316 mengutip Bachtiar Salim Haloho). KBKI adalah serikat buruh pertama yang melakukan pengambil alihan manajemen perusahaan asing dan diikuti oleh serikat buruh lainnya. Di bawah undang-undang keadaan darurat, tentara khususnya Angkatan Darat mulai ikut aktif mengendalikan perusahaan-perusahaan yang diambil alih. Meskipun mulai November 1958 perusahaan-perusahaan itu secara resmi dikembalikan kepada pengawasan sipil, tetapi Angkatan Darat terlanjur kuat dan memperoleh pijakan dalam manajemennya. Kondisi ini sangat menguntungkan posisi politik Angkatan Darat dan terutama Nasution sebagai amunisi finansial untuk menghadapi perluasan PKI dan ormas-ormasnya. Demikian pula dalam menghadapi partai-partai islam yang radikal yang cita-cita politiknya berseberangan dengan TNI-AD (Crouch, 1986:33; Sundhaussen, 1986: 216). Sampai dengan tahun 1960-an, posisi ekonomi dan politik Angkatan Darat telah demikian kukuh dan menguntungkannya untuk melaksanakan agenda-agenda politiknya.

Perkembangan ini berakibat besar bagi gerakan buruh di Indonesia. Dengan kekuasaan besar di tangannya, berlakunya undang-undang darurat, larangan pemogokan di perusahaan-perusahaan vital, kegiatan serikat buruh dibatasi. Penguasaan manajemen perusahaan yang diambil alih oleh KBKI segera direbut oleh Angkatan Darat. Sebagian besar pekerja di perusahaan adalah pendukung KBKI yang telantar dan kehilangan pekerjaan. Angkatan Darat semakin menekan para

buruh KBKI setelah muncul perintah agar para buruh meninggalkan asrama, mess dan perumahan milik KPM untuk keperluan Angkatan Darat. Menghadapi tekanan seperti ini, PNI terutama para tokohnya yang duduk di kabinet tidak memberikan reaksi. Kepercayaan kepada tokoh-tokoh PNI menurun drastis, sehingga kepemimpinan buruh di tingkat basis mendesak agar KBKI ke luar dari PNI.

Hingga Kongres Bandung 1962, masalah dalam tubuh KBKI demikian kompleks. Penolakan DPP PNI terhadap A.M. Datuk untuk duduk dalam pengurus KBKI semakin mengkristalkan konflik antara DPP PNI, KBKI dan Soekarno. Ali Sastroamidjojo sebagai ketua PNI menolak masuknya Datuk yang menjabat sebagai Ketua Serikat Buruh Departemen Pekerjaan Umum (SBDPU) dengan alasan Datuk telah membuat onar di berbagai daerah dan tidak loyal pada PNI. Namun Datuk mengirim surat protes kepada Soekarno, dengan menyatakan bahwa PNI dan KBKI telah disusupi kekuatan "kanan dan liberal". Presiden meminta Aham Eningpradja sebagai ketua KBKI untuk mengakomodasi Datuk dalam kepengurusan KBKI. Justru dalam susunan pengurus yang diumumkan sebulan berikutnya, Aham tidak memasukkan sama sekali para pengurus lama yang didukung oleh DPP PNI. Selain mengubah DPP menjadi DPS (Dewan Pimpinan Sentral), Aham juga menyatakan bahwa DPS KBKI tetap merupakan bagian dari Front Marhaenis dan ikatannya dengan partai tidak terputus. Dalam upaya memperoleh legitimasi operasional di cabang-cabang, Aham dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perburuhan menyatakan bahwa DPS KBKI secara sah diakui oleh pemerintah.

Pada 5 Oktober 1962 pimpinan KBKI pendukung partai mengumumkan kepengurusan tanpa Datuk, seminggu kemudian DPP PNI mengakui pengurus yang diketuai oleh Surojo dan Sekjen Martiman. DPP PNI mengeluarkan surat bernomor

984/Org/119/62 yang memerintahkan cabang-cabang PNI untuk bekerja bagi KBKI. Kepengurusan kembar ini membingungkan cabang-cabang KBKI dan mengurangi soliditas KBKI sebagai serikat buruh dalam merespon isu-isu perburuhan termasuk pemecatan buruh perkebunan di Sumatra Utara dan Lampung. Di sisi lain, SOBSI sebagai pesaingnya, sangat gigih membela para buruh yang dipecat. Melalui organnya, Sarbupri, menuntut pengembalian buruh yang dipecat dan pembagian beras yang sama untuk semua buruh (van der Kroef, 1965:243).

Pada Kongres KBKI versi PNI tanggal 3 Januari 1963, Ahem dan para pengikutnya dicoret dari keanggotaan KBKI. Hal yang sama dilakukan oleh DPP PNI. Langkah ini dinilai sangat terlambat sebab DPS KBKI terlanjur membesar dan menarik bagi sekutu marhaenis, seperti Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). DPS KBKI juga didukung oleh KBKI Sumatra Utara dan Jawa Barat yang merupakan kekuatan utama. Apa yang mendorong para tokoh buruh lebih mendekat ke Ahem dan rela meninggalkan PNI adalah perasaan sakit hati terhadap golongan konservatif yang bercokol di partai dan mengorbankan mereka dalam Pemilu 1955. Faktor lain adalah harapan para tokoh tersebut kepada Ahem yang adalah Menteri Perburuhan merupakan sumber kekuasaan dan kedudukan mereka di pemerintahan (Rocamora, 1991:364). Alasan yang tidak kalah penting adalah dukungan Presiden Soekarno kepada Ahem. Semua tokoh KBKI muda adalah pengagum Soekarno, sehingga tidak rela berseberangan dengan Soekarno. Sebaliknya para pengurus DPS KBKI berargumen bahwa Presiden bermaksud memaksa partai melakukan perubahan agar lebih progresif dan dinamik, namun tokoh tua seperti Ali Sastroamidjojo dan Hardi menolaknya. Soekarno kecewa dengan lambannya PNI merespon perubahan dan tidak sepenuhnya di

belakang Soekarno. Partai ini kalah cepat dan kalah progresif dibanding PKI karena dikuasai orang-orang tua.⁷ Pada hal Soekarno menginginkan sebuah partai progresif yang siap untuk mendukung gagasan-gagasannya.

Hanya dibutuhkan waktu 6 bulan DPP KBKI kembali menguasai cabang-cabang di daerah. DPS KBKI segera pudar disebabkan oleh pertama, Soekarno ternyata tidak melakukan apapun untuk KBKI Ahem dan Datuk. Dukungan Soekarno kepada DPS tidak kuat, hubungan Ahem dengan Presiden mendingin dan akhir tahun 1963 Ahem kehilangan jabatan sebagai Menteri Perburuhan. Kedua, para sejawat Front Marhaenis meninggalkan DPS, terutama PDI dan GMNI. Basis DPS dengan demikian semakin menyempit. Ketiga, tindakan Ahem yang mendekati Angkatan Darat terutama dengan SOKSI menyakitkan hati para pendukungnya. Bahkan Ahem secara terang-terangan meminta DPS KBKI untuk bergabung dengan SOKSI. Kejadian ini merupakan sebuah kemenangan besar kubu konservatif dalam PNI.

Dalam Kongres PNI yang kesepuluh di Purworejo September 1963, DPP KBKI secara resmi diubah menjadi Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM). Dalam usaha berlomba revolusioner, PNI tidak dapat menghindari kecenderungan semakin ke kiri. Hubungan dengan PKI begitu dekat yang antara lain ditunjukkan oleh kerjasama antara SOBSI dan KBM dalam melemahkan SOKSI. SOKSI, serikat buruh bentukan Angkatan Darat ini secara perlahan-lahan menggeser SOBSI dan KBM terutama di perusahaan yang dipimpin oleh militer. Pimpinan Angkatan Darat secara terbuka menganjurkan agar buruh-buruh di perusahaan bekas milik asing tidak masuk SOBSI atau KBM yang dapat mengganggu produksi. Alasan tambahan bagi KBM adalah

⁷ Wawancara dengan Soewoso 11 Agustus 2005. Pendapat ini didukung oleh Manganar Pasaribu dan A. Supardi para tokoh KBKI tahun 1960-an.

karena SOKSI turut aktif melemahkan KBM dengan cara mendukung kepemimpinan Ahem dan Datuk dalam DPS KBKI. Persaingan antara serikat buruh tersebut berlangsung di berbagai sektor pekerjaan, namun sektor perkebunan merupakan arena paling seru bersama perusahaan-perusahaan negara. Dalam usaha merebut kembali buruh-buruh perkebunan karena Sarbupri telah bergabung dengan SOBSI, KBM membentuk Kesatuan Buruh Perkebunan (KBP). Serikat buruh ini secara gigih bersaing dengan Persatuan Karyawan Perkebunan Negara (Perkappen) bentukan SOKSI baik dalam hal memperjuangkan upah, tunjangan hari raya, pensiun, maupun tunjangan kesejahteraan sosial lainnya. Konflik SOBSI-KBM di satu pihak dengan SOKSI di pihak lain memuncak menjelang tahun 1965 ketika dua serikat buruh tersebut berusaha membubarkan SOKSI.

Meskipun demikian kerjasama dengan SOBSI bukannya tanpa persaingan. KBM secara perlahan-lahan berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan buruh dari SOBSI. Dilakukanlah perubahan teknik pengorganisasian, pendekatan kepada para aktivis buruh dan pembentukan serikat buruh baru. Secara perlahan-lahan KBM mengurangi pembentukan serikat buruh berdasarkan jenis pekerjaan atau lapangan pekerjaan dan mengedepankan serikat buruh semi otonom yang lebih efisien. Melalui perubahan pengorganisasian, jumlah anggota KBM terus meningkat. Dalam Kongres KBM ke empat tahun 1965 dilaporkan jumlah anggota mencapai 1.617.000 orang. Tambahan anggota sebagian besar berasal dari SOKSI, SBII, KBSI dan SOBRI (Rocamora, 1991: 434). KBM juga mempelopri pembentukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Serikat Kerja Kementrian Dalam Negeri (SKKDN).

3. Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dan Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO)

Gagasan mendirikan serikat buruh islam telah tumbuh di kalangan tokoh Masyumi sejak berdirinya partai ini. Sebagian besar buruh Indonesia beragama Islam dan perlu dibangun wadah yang memperjuangkan aspirasi umat dan menuntun para buruh islam sesuai dengan keyakinannya (Subagio IN, 1980: 127). Tetapi alasan yang sesungguhnya adalah keinginan untuk mencegah membesarnya SOBSI-PKI, terutama dalam mengacaukan falsafah hubungan industrial⁸. SOBSI mewarisi falsafah hubungan industrial Eropa yang dibawa ke Indonesia oleh ISDV dan ditanamkan dalam VSTP. Hubungan pengusaha dan buruh merupakan hubungan yang menindas dan eksploitatif dan tidak sesuai dengan ajaran islam. Dalam Islam, majikan dan buruh adalah partner dalam produksi juga dalam bagi hasil. Bahkan islam juga menggaris bawahi agar upah buruh dibayarkan selekas mungkin. Perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh para tokoh muslim memelopori pembayaran upah per minggu agar para buruh segera menikmati jerih payahnya. Para tokoh Masyumi juga bermaksud membangkitkan kembali kepeloporan buruh islam dalam pergerakan.

Cepat membesarnya Sarekat Islam, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari peranan pekerja perkotaan yang ketika itu merupakan kelas baru (Wertheim, 1999:262). Dari sini kepeloporan buruh islam dalam pergerakan dapat dilacak. Tetapi ketika SBII dibentuk tahun 1950, kepeloporannya tidak lagi menonjol. Dalam gerakan buruh, SBII jauh tertinggal dibanding SOBSI dan KBKI/KBM. Hal

⁸ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006

demikian tidak dapat dilepaskan dari tantangan kolektif dan interaksinya secara kontinyu dengan kekuasaan ekonomi dan politik. Seperti yang diungkapkan oleh Castles (1982:133-135) di industri rokok kretek milik para ulama pribumi, tidak mendorong pertumbuhan serikat buruh. Ketika terbentuk SBII pada awal tahun 1950-an, lebih untuk kepentingan para majikannya yang aktif di Partai Masyumi. Berbeda dengan Serikat Buruh Rokok Indonesia (SBRI)-anggota SOBSI, yang sangat aktif melakukan tekanan kepada para majikan dalam memperjuangkan upah dan jaminan sosial, SBII kurang vokal dan terkesan taat dengan pemilik perusahaan. Argumen bahwa SBII tidak mengembangkan politik pertentangan dan lebih banyak bekerjasama dengan pengusaha untuk kemajuan bersama, sering memperoleh ejekan dari SBRI sebagai “serikat buruh kuning”.

Permusuhan antara SOBSI dengan SBII sangat serius dan terjadi di semua lapangan pekerjaan. Di industri rokok, seperti ditunjukkan oleh Castles (1982: 135) SBII hanya dibentuk di perusahaan rokok yang dimiliki pribumi yang aktif di Partai Masyumi. Dukungan buruh rokok terhadap SBII sangat kecil jika dibanding SBRI. Di sektor ini, SBRI tidak pernah berhasil mengajak SBII untuk melancarkan tuntutan yang berhubungan dengan upah dan jaminan sosial. Bahkan kekurangan bahan baku (tembakau dan cengkeh) di industri rokok yang merupakan basis SBRI, sulit mendapatkan bahan baku dari industri rokok yang merupakan basis SBII. Terlepas hal itu merupakan persaingan bisnis, nuansa politis dari tindakan tersebut sulit ditepis. Di sektor gula, konflik terjadi antara Serikat Buruh Gula (SBG) sebagai pendukung SOBSI dan SBII Kring Gula⁹. Konflik utamanya disebabkan oleh

⁹ Di sektor ini sebenarnya hanya ada satu serikat buruh, yaitu Serikat Buruh Gula (SBG). Pada akhir tahun 1948 pecah dalam merespon Perjanjian Renville. Para penentang Perjanjian Renville mendirikan Serikat Buruh Gula Merdeka. Pada tahun 1951 dengan dukungan SBG-SBG Jawa Timur,

tuduhan SBG bahwa SBII tidak mendukung perjuangan kaum buruh dalam meningkatkan upah dan tunjangan keluarga, perawatan sakit dan uang pensiun (Sandra, 1955: 29). Di sektor perkebunan konflik berlangsung sangat keras, di mana berlangsung beberapa kali pembunuhan. Pembunuhan di perkebunan Gajah Mentah Aceh pada 26 Juni 1951 terhadap salah satu pengurus SBSI, disebabkan oleh tindakan manajemen mereorganisasi SOBSI yang dianggap tidak taat beribadah (Berita Masyumi/BM, 29 Juni 1951). Pembunuhan terhadap tokoh lokal SBII di perkebunan Cigombong Sukabumi juga dilakukan oleh orang-orang Sarbupri yang menolak berdirinya SBII (BM, 3 Januari 1952). Sedangkan pemaksaan buruh-buruh islam untuk masuk Sarbupri di Pandeglang menyebabkan perkelahian massal yang menewaskan satu orang di pihak SBII (BM, 30 Mei 1952). Di Klaten, aparat dituduh tidak netral dalam meleraikan perkelahian antara pendukung SBII dan SOBSI di perkebunan tebu dan tembakau daerah Juwiring dan Pedan. Akibatnya anggota SBII menjadi bulan-bulanan anggota SOBSI dan mengakibatkan dua orang meninggal (BM, 24 Maret 1955).

Di industri tekstil Surabaya terjadi demonstrasi yang bertolak belakang dari kedua belah pihak. SOBSI menuntut kenaikan upah sedangkan SBII sebaliknya, menuntut upah tidak naik jika disertai pemutusan hubungan kerja beberapa buruh (TMP, 1955: 34). Di sektor perminyakan Caltex di Pekanbaru, SBII menolak mogok menuntut dipekerjakannya kembali buruh yang telah di PHK, sebab buruh tersebut anggota Persatuan Buruh Minyak (Perbum-SOBSI). Perkelahian tidak dapat dihindarkan dan beberapa orang luka-luka dari kedua belah pihak (TMP, 1956: 22).

SBG Merdeka membentuk SBG Proklamasi dan menginduk ke Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI). Di daerah-daerah di mana Masyumi kuat, digalang SBG Kring Gula, seperti di Asem Bagus Jawa Timur (Sandra, 1955:28-29).

Di pabrik makanan di Mojokerto, perkelahian anak tokoh PKI dan anak tokoh SBII di sekolah menyebabkan perkelahian pendukung SOBSI dan SBII. Sedangkan di pabrik Semen Padang, naiknya Ir. Azwar Anas sebagai Direktur Utama, mendapat penolakan dari SOBSI yang kuat di perusahaan itu. Menteri Perindustrian Jenderal M. Jusuf meminta Agus Sudono, ketua SBII untuk menghadapi SOBSI di industri tersebut. Sudono menghimpun kekuatan untuk dikirim ke pabrik semen dan mengamankan Azwar Anas. Kedatangan Azwar Anas disambut demonstrasi dari kedua belah pihak, SOBSI yang menolak dan SBII yang mendukung¹⁰

Strategi perjuangan buruh yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1920-an adalah perjuangan kelas. Kelas buruh mendefinisikan dirinya sebagai tertindas, tereksplorasi oleh majikan. Sebaliknya, majikan bertujuan melakukan akumulasi kapital dengan memeras para buruh. Cara berpikir seperti ini mengikuti teori Marx mengenai perjuangan kelas. Dominannya pemikiran tersebut, menyulitkan pembentukan identitas SBII. Dalam artikelnya di mingguan Islam *Hikmah*, Mohammad Natsir (1951) Ketua Masyumi, mengusulkan bangun kerjasama buruh-majikan untuk mengatasi persoalan perburuhan. Ia mengemukakan strategi yang dilakukan oleh para serikat buruh yang menyuburkan kedudukan tertindas dalam kelas buruh. Langkah seperti ini hanya melihat buruh semata-mata sebagai alat produksi. Strategi ini tidak senafas dengan Islam, SBII harus membangun hubungan perburuhan yang baru. "Soal nasib buruh bukanlah soal buruh semata-mata, akan tetapi berjalani dengan kepentingan majikan. Sebab itu memperbaiki nasib buruh perlu kesadaran buruh dan pengusaha, keduanya perlu kesadaran baru mengenai hak dan tanggung jawabnya, suasana saling mengerti antara kedua belah pihak sebagai

¹⁰ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006.

partners”¹¹. Sejak awal tahun 1950-an ini, SBII secara terus menerus mengedepankan konsep buruh dan majikan sebagai partner.

Sejak awal berdirinya, SBII dimaksudkan sebagai alat untuk memobilisasi buruh islam bagi kepentingan Partai Masyumi. Jusuf Wibisono, seorang kader muda Masyumi sejak awal berpendirian bahwa SBII dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan tunggal, yakni menopang partai Masyumi untuk mewujudkan cita-cita negara islam. Untuk tujuan tersebut, Jusuf Wibisono ditempatkan oleh DPP Masyumi sebagai wakil ketua SBII sekaligus sebagai penghubung antara partai dengan SBII (Subagijo IN, 1980: 131). Berbeda dengan SOBSI yang merupakan federasi serikat buruh, SBII berpendapat bahwa bentuk federasi kurang bermanfaat bagi keperluan mobilisasi, sebab tidak menjamin adanya kesatuan perintah. Kekawatiran lainnya adalah bahwa bentuk federasi akan menyulitkan kontrol dan mobilisasi untuk kepentingan politik Masyumi, mengingat banyaknya partai berazas Islam. Pada hal sejak berdirinya, SBII telah menegaskan “politik SBII adalah politik islam yang dijalankan oleh partai Masyumi” (Sandra, 1961:193).

Kesatuan SBII dengan Masyumi antara lain ditunjukkan oleh dominasi pengurus Masyumi dalam kepengurusan SBII. Selain Jusuf Wibisono sebagai ketua, terdapat pula Wartomo (sekjen), Agus Sudono (wakil sekjen) dan Moh. Anas (bendahara). Bahkan ketika Jusuf Wibisono diangkat sebagai Menteri Keuangan mewakili Masyumi, ia juga masih menjabat ketua SBII. Kuatnya SBII di suatu daerah juga berjalan seiring dengan kuatnya Masyumi di daerah tersebut, seperti

¹¹ Gagasan Mohammad Natsir inilah yang sesungguhnya menjadi embrio lahirnya konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) di masa Orde Baru. Sangat mungkin Agus Sudono yang dibesarkan dalam SBII dan kemudian GASBIINDO, mengambil alih gagasan ini dan mengembangkannya dalam HIP. Dalam buku riwayat hidupnya (1999: 89) dan wawancara dengan peneliti 12 September 2006, Sudono menyatakan bahwa konsep HIP berasal darinya. Klaim yang sama juga dikemukakan oleh Ali Moertopo (1974:18).

Jawa Barat, Jakarta, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah ini berkembang industri kecil yang rata-rata dimiliki oleh pengusaha muslim (Harvey, 1983: 87). *Berita Masyumi* yang kemudian berganti nama menjadi *Suara Masyumi* sebagai media resmi partai, selalu memuat aktivitas SBII maupun organ Masyumi lainnya. Puncaknya adalah ketika para tokoh Masyumi menyokong pemberontakan PRRI/Permesta, para pengurus SBII mengikuti jejak induknya. Namun ketika satu persatu pendukung pemberontakan ditangkap dan organisasinya diancam dibubarkan oleh Presiden, SBII segera menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi (Subagijo IN, 1980: 132). Ketika Masyumi benar-benar dibubarkan oleh Presiden, SBII tidak turut dibubarkan sebab sudah lebih dahulu menyatakan independen. Meskipun demikian para seterusnya khususnya SOBSI terus berusaha agar SBII juga dibubarkan. Selama tahun 1960, SBII terus menjadi sasaran kecaman PKI dan SOBSI bahkan mengalami tindakan kekerasan. Dalih baru bagi tindakan demikian adalah menyelamatkan jalannya revolusi. SOBSI memperoleh amunisi baru untuk melancarkan kecaman sebagai balasan terhadap tindakan serupa yang dilakukan oleh PKI dalam pemberontakan PKI 1926 dan 1948.

Peranan politik Gasbiindo yang menonjol adalah usahanya untuk ikut serta mengembalikan Irian Barat (Papua) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Konferensi *International Confederation of Free Trade Union* (ICFTU) wilayah Asia Pasifik di Manila tahun 1960, delegasi Gasbiindo yang diwakili oleh Jusuf Wibisono, Agus Sudono dan Wartomo mengajukan usul resolusi tentang tuntutan adil atas Irian Barat. Usul ini berdampak luas, sehingga dalam Konferensi ICFTU di Berlin Barat pada tahun 1962, dikeluarkanlah resolusi pengembalian Irian

Barat dari Belanda kepada Indonesia. Resolusi ini menaikkan pamor Gasbiindo bukan hanya di forum nasional, tetapi juga internasional. Di pentas nasional, Gasbiindo mulai mendapat perhatian dari militer dan golongan kekaryaan yang membidani Golongan Karya. Di forum internasional, perhatian terhadap ICFTU meningkat dengan pemberian berbagai program pengembangan termasuk dari ILO (Ramadhan KH dan Sriwibawa, 1999: 58).

Peran penting lainnya dari Gasbiindo adalah aktivitasnya dalam *silent operation* di Malaysia. Menjelang akhir tahun 1960-an, terjadi konflik etnik di Malaysia antara puak (kesukuan) Melayu dengan Cina. Konflik ini dipicu oleh kecemburuan puak Melayu atas kesuksesan etnik Cina dalam bidang ekonomi. Selain itu proporsi etnik Cina yang mencapai 38 persen dari penduduk Malaysia dianggap sebagai ancaman serius (Rochadi, 2001). Aspri Presiden Soedjono Humardani dan Ali Moertopo meminta Agus Sudono untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Malaysia guna meningkatkan kekuatan Melayu. Syarat TKI yang dikirim adalah beragama Islam dan taat beribadah. Operasi ini berjalan sukses dan ribuan tenaga kerja Indonesia berhasil dikirim ke Malaysia serta menduduki posisi penting di sana (Ramadhan KH dan Sriwibawa, 1999: 77).

Dibubarkannya Masyumi dan membesarnya peran Gasbiindo, menjadikan organisasi buruh ini sebagai incaran partai-partai politik. Yang paling potensial untuk menariknya adalah Partai Nahdlatul Ulama karena sama-sama berlatar belakang Islam. Namun demikian, Gasbiindo yang masih dikuasai oleh tokoh-tokoh Masyumi menolak desakkan NU untuk bergabung (Ramadhan KH dan Sriwibawa, 1999: 64). Gasbiindo justru menyatakan tidak terikat oleh partai politik manapun dan anggota-anggotanya bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Pada tahun 1966 para tokoh

Masyumi seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem dan Prawoto berusaha menghidupkan kembali Masyumi. Usaha ini gagal, sebab para tokoh militer yang memegang kekuasaan adalah para pelaku yang memadamkan pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung Masyumi (Magenda, 1983). Dalam pandangan politik penguasa militer saat itu, PRRI/Permesta tidak bisa dipisahkan dengan Masyumi dan Darul Islam, sehingga merehabilitasi partai ini berarti memberi amnesti politik. Para tokoh Gasbiindo terbelah dalam menyikapi tuntutan rehabilitasi ini. Jusuf Wibisono dan Dr. Sukiman dengan tegas menolak dan mereka kemudian masuk PSII. Sebaliknya, Agus Sudono mendukung dan kemudian menyesuaikan diri dengan garis politik militer tahun 1960-an.

Jalan tengah yang diambil oleh pemerintah adalah mengizinkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan menolak para tokoh Masyumi memimpin partai baru ini. Djarnawi Hadikusumo menjadi ketua umum dan Agus Sudono menjadi ketua I, sedangkan sekjen diduduki oleh Lukman Harun, tokoh muda Muhammadiyah. Dengan demikian, meskipun secara kelembagaan Gasbiindo tidak merupakan *onderbouw* partai politik, tetapi para tokohnya merupakan pendiri dan pengurus Parmusi. Serentak dengan penggabungan partai politik tahun 1973, dilakukan pula pembentukan serikat buruh tunggal oleh Pemerintah, sehingga Gasbiindo dengan sendirinya tidak eksis lagi.

4. Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)

Sarbumusi didirikan oleh Partai NU menjelang Pemilu 1955. Kebutuhan untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, memotivasi para tokoh NU menggarap buruh. Namun falsafah perburuhan yang dominan pada tahun 1950-an, tidak sejalan

dengan falsafah yang dikembangkan oleh para tokoh NU yang sebagian besar para Kyai pemimpin pondok pesantren.

Karl D. Jackson (1990) mengembangkan konsep hubungan otoritas tradisional (*tradisional authority relationship*) untuk menjelaskan kepatuhan para anak didik kyai. Menurut rumusan Jackson (1990:201) kewibawaan tradisional adalah penggunaan kekuasaan personalistik yang dihimpun melalui peranan masa lampau dan masa kini dari yang mempengaruhi sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai-nilai dan status unggul dari mereka yang mempunyai hubungan ketergantungan yang mapan dengannya. Perintah-perintahnya diterima bukan atas dasar evaluasi akan manfaat, isi dan tujuan, melainkan siapa dia dan hubungan tertentu yang telah terbangun selama puluhan tahun. Penggunaan kewibawaan tradisional seperti ini cenderung kurang rasional, sehingga hubungan-hubungan yang dibangun juga kurang rasional.

Sebaliknya perkembangan perburuhan di Indonesia menunjukkan menguatnya gerakan buruh dengan mengangkat kebutuhan hidup sehari-hari. Selain program nasionalisasi dari SOBSI dan KBKI, juga program kesejahteraan sosial dalam bentuk upah sebagai jaring pengaman. Kabinet Djuanda pada tahun 1951 berhasil merumuskan Ketentuan Upah Minimum (KUM) yang kemudian diterapkan di berbagai wilayah sesuai dengan perkembangan ekonomi (Rochadi, 1996). Perkembangan ekonomi secara terus menerus menuntut penyesuaian upah, sehingga imbalan yang tidak mengikuti standar, akan ditolak oleh para buruh. Otoritas kyai yang didasarkan atas hubungan-hubungan sosial di masa lalu, sulit menampung dinamika ekonomi dan politik aktual, sehingga Sarbumusi sebagai gerakan buruh dari kalangan NU kurang berkembang.

“Kelas” dan “perjuangan kelas”, “nasionalisasi”, “revolusi dan sosialisme terpimpin”, menjadi bahasa utama gerakan buruh tahun 1950-an. Sama dengan SBII, Sarbumusi juga menghadapi kesulitan membangun identitas. Bahasa dan konsep-konsep tersebut menjadi monopoli SOBSI, sehingga serikat buruh lain kesulitan mendefinisikan dirinya. Kesulitan lainnya adalah momentum perubahan dan isu-isu politik tahun 1950-an dan 1960-an. “Kelas” dan “perjuangan kelas”, mustahil dikedepankan Sarbumusi mengingat gerakan ini memandang majikan sebagai *Bapak Pelindung*. Demikian pula nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing khususnya milik Pemerintah dan perorangan Belanda yang dipelopori oleh SOBSI dan KBKI, tidak memberi tempat bagi Sarbumusi. Serikat buruh ini praktis kehilangan isu-isu perburuhan yang mampu mengaktualisasikannya. Sebagai gerakan buruh, fokus perhatiannya lebih banyak pada persoalan keagamaan, seperti pengajian dan bimbingan sholat (Erwiza Erman, 2005:370).

Menurut Rochijat (1985:44) Sarbumusi merupakan alat bagi tokoh-tokoh NU. Di pabrik gula Ngadiredjo Kediri, para pengurus Sarbumusi hanya menjalankan perintah dari Pengurus Cabang NU. Tuntutan kenaikan upah yang telah dirumuskan oleh para tokoh Sarbumusi, diralat setelah Pengurus Cabang NU menolaknya. Ketidakmandirian Sarbumusi juga ditunjukkan oleh perubahan tuntutan penggantian pejabat pabrik gula setelah diketahui salah satu pejabat tersebut tokoh NU. Dibandingkan dengan Serikat Buruh Gula (SBG) yang merupakan organ SOBSI, Sarbumusi sektor pabrik gula kalah jauh dalam hal mengorganisasi massa dan merumuskan tuntutan kesejahteraan buruh. SBG hampir setiap tahun menuntut kenaikan upah dan fasilitas kerja, seperti alat transportasi, tunjangan kesehatan dan perumahan. Ketiga tuntutan ini ditambah upah secara konsisten dikemukakan oleh

SBG, khususnya menjelang ulang tahun pabrik dan hari buruh 1 Mei. Namun demikian, Sarbumusi dan Kesatuan Buruh Gula (KBG) yang menjadi organ PNI, justru menggembosi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa upah dan fasilitas kerja sudah cukup bagi buruh.

Situasi di pabrik-pabrik rokok juga tidak jauh berbeda. Seperti dikemukakan oleh Castles (1982:136), bahwa buruh-buruh yang tergabung dalam serikat buruh islam banyak yang bekerja di organisasi pengusaha sigaret (OPS). Para pengurusnya rata-rata mereka memiliki kedudukan baik di pabrik rokok maupun di organisasi pengusaha rokok, sehingga tidak mungkin dari mereka lahir pemikiran-pemikiran kritis. Hubungan *patron-client* bukan hanya berlaku bagi SBII/Gasbiindo, tetapi juga di antara pengusaha yang mendirikan Sarbumusi. Ideologi mereka sangat menekankan supaya majikan dan karyawan saling bergantung, seperti suami dan isteri.

Besar kecilnya pabrik, turut berpengaruh terhadap kehadiran gerakan buruh. Di pabrik besar milik Cina, hampir pasti dikuasai Serikat Buruh Rokok Indonesia (SBRI) anggota SOBSI. Gejala ini bukan hanya di Kudus, tetapi juga di Semarang dan Demak (Castles, 1982: 137). Sarbumusi atau serikat buruh Islam lainnya, didirikan di industri kecil milik keluarga, di rumah-rumah atau di pabrik yang letaknya masih dalam pekarangan. Pembagian jabatan dalam lingkup manajerial ditangani oleh mereka yang masih memiliki hubungan darah, termasuk dalam serikat buruh. Kadang-kadang manajemen membayar biaya serikat buruh kecil ini. Sebagai dampak dari kecilnya organisasi, pembagian kerja di perusahaan juga tidak kompleks. Menurut Castles, kehadiran serikat buruh di sini tidak begitu penting. Dibanding untuk keperluan buruh itu sendiri, pembentukan serikat buruh lebih untuk

tujuan politis. Oleh sebab itu, serikat buruh islam lebih menekankan kerjasama dengan pengusaha, suatu prinsip yang dijauhi oleh SOBSI.

Segmen buruh yang bekerja di industri milik para tokoh muslim sulit sekali diorganisasi. Didirikannya serikat buruh yang didasarkan pada perbedaan kepentingan buruh dan majikan, sulit menjangkau buruh yang masih memiliki hubungan famili. Industri kecil rokok, batik, tembakau, tenun dan kerajinan kulit sebagian besar dimiliki oleh para pengusaha muslim. Seperti dilaporkan oleh Hawkins (1963:265), para buruh yang tergabung dalam serikat buruh islam tidak kritis dan kehilangan isu-isu perburuhan penting. Berbagai pemogokan dan negosiasi seakan hanya merupakan aktivitas serikat buruh yang bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia. Serikat buruh islam gagal merumuskan peningkatan kesejahteraan buruh, meskipun kehidupan mereka tidak berbeda dengan para pengikut SOBSI. Aktivitas dan solidaritas gerakan ini meningkat jika memperoleh ancaman dari SOBSI, seperti persaingan untuk memperebutkan jabatan di pabrik dan untuk mendapatkan fasilitas serikat dari perusahaan.

Perkembangan anggota Sarbumusi paralel dengan keanggotaan NU di suatu daerah. Kekuatan NU terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Sedangkan di luar Jawa, hanya di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Anggota NU terkonsentrasi di pesantren dan pedesaan. Sebaliknya, anggota Sarbumusi terkonsentrasi di usaha kecil dan menengah. Di perusahaan besar, jumlahnya tidak mampu melampaui SOBSI, KBKI, SOBRI dan GSBI. Pada tahun 1957 anggota Sarbumusi tercatat 11.950 orang. Pada tahun 1958 meningkat sedikit menjadi 12.050 orang (TMP, Mei 1958). Dibanding serikat buruh lain, perkembangan Sarbumusi sangat lambat. Misalnya, KBIM pecahan dari SBII yang

pada tahun 1957 jumlah anggotanya 41.672 orang pada Juli 1958 menjadi 45.235 orang. Bahkan SOBRI yang bernaung di bawah Partai Murba berhasil memobilisasi buruh demikian cepat, sehingga dalam waktu satu tahun berhasil menambah anggota dari 43.842 orang menjadi 281.038 pada tahun 1958 (TMP, Mei 1958:8). Pada 1962 ketika konflik antar serikat buruh berlangsung demikian sengit, Sarbumusi adalah serikat buruh yang paling kecil anggotanya bahkan dibanding serikat buruh di bawah partai kecil seperti SOB Pantjasila yang mampu memiliki anggota 61.000 pada tahun 1958 dan 70.890 pada tahun 1962 (TMP, Maret 1962:23).

Tabel 4. Serikat Buruh dan Jumlah Anggota 1957-1962

| Nomer | SERIKAT BURUH | 1957 | 1958 | 1962 |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. | SOBSI | 1.502.132 | 2.732.909 | 3.300.000* |
| 2. | KBKI | 100.758 | 1.001.775 | 1.617.000** |
| 3. | SBII/GASBIINDO | 275.000 | 600.000 | 750.000*** |
| 4. | SOBRI | 43.842 | 281.000 | - |
| 5. | GSKI | 32.777 | 145.300 | - |
| 6. | KBIM | 41.672 | 41.989 | - |
| 7. | SOB Pantjasila | - | 61.000 | 70.890**** |
| 8 | Sarbumusi | 11.950 | 12.050 | 26.300**** |

Sumber: Tahun 1957 dan 1958 diambil dari Tinjauan Masalah Perburuhan Kementrian Perburuhan RI Mei 1958 h. 8.

**Bersumber dari Rocamora, 1991: 434 data untuk tahun 1965

**** bersumber dari Tinjauan Masalah Perburuhan Maret 1962 h. 23

*** bersumber dari pernyataan Jusuf Wibisono dalam Pembentukan Gasbiindo 1960 dalam Subagijo IN, 1980:204

Sarbumusi di perkebunan Sumatra Barat dan Sumatra Utara berdiri setelah penumpasan PRRI/Permesta oleh Pemerintah Pusat. Meskipun SBII sebagai organ Masyumi telah menyatakan independen dan tidak terkait dengan partai tersebut, tetapi di tingkat bawah para buruh anggota SBII ketakutan dan masuk Kesatuan

Buruh Marhaen atau mendirikan Sarbumusi (Stoler, 2005:262-263). Peristiwa PRRI ini menjadi alasan Sarbupri memukul SBII, namun di akhir tahun 1950-an, sumberdaya Sarbupri berantakan akibat dukungan tentara pemberontak kepada SBII. Baru menjelang tahun 1960-an, Sarbupri dapat memukul balik dan hampir semua anggota SBII mendirikan Sarbumusi. NU sulit berkembang di Sumatra Barat. Masyumi dan Perti telah demikian kokoh dengan memonopoli isu-isu agama dan politik. Dapat dimengerti jika, Sarbumusi juga kehilangan tempat berpijak di bumi Minangkabau. Pembentukan Sarbumusi segera setelah penumpasan PRRI dilancarkan, menurut Stoler hanya merupakan alat para tokoh SBII yang kehilangan perlindungan.

Kejadian yang sama berlangsung di kalangan buruh tambang batubara Sawahlunto seperti yang dikemukakan oleh Erwiza Erman (2005: 365-366). Sampai tahun 1963, Sarbumusi tidak ada di kalangan buruh tambang tertua ini. Sejak tahun 1953 Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI) anggota SOBSI, berdiri dan memonopoli isu-isu serta gerakan buruh. Menjelang Pemilihan Umum 1955, berdiri SBII dan dengan menggunakan sentimen agama mengorganisasi para buruh baik yang sudah menjadi anggota SBTI maupun tidak. Peristiwa ini menimbulkan ketegangan dan konflik fisik antar pendukung kedua serikat buruh tersebut. Konflik dengan mudah dipetakan baik secara etnis maupun ideologis, sebab anggota SBTI rata-rata buruh dari Jawa yang kurang taat menjalankan ibadah. Sebaliknya anggota SBII sebagian besar adalah orang Minang yang taat beribadah. Perselisihan antar anggota kedua serikat buruh ini, selalu bermuatan etnik maupun ideologis. Setelah penumpasan pemberontakan PRRI, aktivitas SBII merosot tajam. Para buruh yang ketakutan oleh penangkapan tentara, mendirikan Perkumpulan Karyawan Tambang

Batubara (PKTB). Tujuan didirikannya PKTB ini untuk melindungi para buruh tambang yang diintimidasi oleh SOBSI. Tentara yang ditugaskan menumpas PRRI dari Divisi Diponegoro, oleh para buruh anggota SBII dianggap berpihak kepada PKI/SOBSI. Sebab itu, PKTB memperkuat diri bekerjasama dengan SOKSI (Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia) membentuk Sekber Golkar di tingkat kota.

Tetapi ikatan agama islam yang demikian kuat, membuat sebagian bekas tokoh SBII kurang bisa menerima kehadiran PKTB. Pada 1 Mei 1964 setelah selesai acara peringatan Hari Buruh, beberapa orang tokoh eks SBII seperti Zulkarnain, Bulkhani, Sjahbuddin Ali dan Kamisan, mendirikan Sarbumusi. Tujuannya adalah untuk menjadikan islam sebagai landasan perjuangan bidang perburuhan dan mewakili unsur agama islam dalam ideologi Nasakom di pertambangan batubara Ombilin. Strategi rekrutmen dan pengembangan organisasi selain menekankan agama juga etnis. Sarbumusi sejak pendiriannya tidak memfokuskan rekrutmen di kalangan buruh etnis jawa, melainkan *urang awak*. Surau dan mesjid dijadikan sebagai pusat informasi, komunikasi dan indoktrinasi prinsip-prinsip perburuhan oleh Sarbumusi (Erwiza, 2005: 367).

Sebagai serikat buruh yang bermuatan etnis dan agama, Sarbumusi sangat lemah dibanding SBTI-SOBSI dan KBM. Kelemahan Sarbumusi terletak pada kepemimpinan dan pengorganisasian (Erwiza, 2005:369). Pemimpinnya sangat elitis dan kurang menyatu dengan anggota. Dalam Dewan Perusahaan, Sarbumusi tidak memiliki wakil. Hal ini tentu melemahkan kedudukan Sarbumusi di Ombilin-Sawahlunto. Organisasi Sarbumusi juga lemah karena tidak memiliki sumberdaya baik finansial maupun tenaga kerja yang handal. Serikat buruh ini satu-satunya yang tidak memungut iuran anggota, sehingga tidak memiliki sumber untuk menjalankan

roda organisasi. Aktivitasnya kurang fokus pada masalah perburuhan, seperti peningkatan ketrampilan, pemahaman hak-hak buruh dan jaminan sosial, melainkan lebih pada masalah agama (Erwiza, 2005:370).

5. Serikat Buruh di bawah Partai-Partai Kecil

Meskipun masih terdapat beberapa serikat buruh di bawah partai politik, peranannya sangat kecil. Terdapat korelasi besarnya partai politik dengan dukungan serikat buruh. Partai-partai besar seperti disebutkan di depan, tidak begitu sulit mengorganisasi dukungan buruh. Sebaliknya partai-partai kecil, meskipun juga membentuk sayap organisasi perburuhan, dukungannya sangat kecil. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) meskipun merupakan partai tertua tidak berhasil menarik dukungan dari kaum buruh. Terbukti Gerakan Organisasi Buruh Syarikat Islam (GOBSI) yang memfokuskan pada sektor perkebunan tidak mampu bersaing dengan Sarbupri. Sejak berdiri pada 22 Maret 1953 sampai 1958 hanya memiliki anggota 1.347 orang yang terkonsentrasi di Sumatra Barat (TMP, Mei 1958:8). Bahkan di antara sesama serikat buruh islam terjadi persaingan yang disebabkan oleh afiliasi kepartaian. Ego para pemimpin serikat buruh telah membingungkan para buruh. Perkelahian antara pendukung GOBSI dan SBII berkali-kali terjadi di sektor perkebunan Sumatra yang disebabkan oleh tarik-menarik keanggotaan (TMP, Juni 1954: 18; Desember 1956: 27). Demikian pula di sektor tambang batubara di mana SBII lebih kuat dibanding GOBSI, persaingan antar keduanya juga sangat kentara. Faktor patron, yaitu tokoh partai yang duduk dalam kepemimpinan perusahaan memainkan peranan penting dalam merekrut para buruh untuk masuk serikat buruh *onderbouw* partai. Persaingan antar tokoh buruh dalam memperebutkan jabatan di

perusahaan, meluas ke persaingan antar serikat buruh sebab organisasi digunakan untuk menopang aktualisasi pemimpinnya. Memperhatikan kasus ini, konflik antar serikat buruh bukan persaingan ideologi, melainkan persaingan para aktivisnya.

Di bawah Partai Katolik berdiri Sentral Organisasi Buruh Pantjasila (SOB Pantjasila) menjelang Pemilu 1955. Serikat buruh ini mula-mula hanya ada di Semarang dan sukar menyebar ke kota-kota lain. Dengan menekankan keanggotaan yang beragama Katolik, SOB Pantjasila tidak mampu berkembang. Di daerah yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Katolik seperti di Nusa Tenggara Timur, tidak berkembang industri dan transportasi, sehingga juga tidak tumbuh golongan buruh. Data yang masuk Kementrian Perburuhan pada tahun 1957 anggota SOB Pantjasila 20.000 dan pada tahun 1958 menjadi 61.000 tersebar di berbagai daerah (TMP Mei 1958:8). Dengan anggota yang kecil pada setiap lapangan pekerjaan, SOB Pantjasila tidak mampu menggalang kekuatan guna merealisasikan pemikiran-pemikirannya. Pada tahun 1957 SOB Pantjasila berhasil mengembangkan konsep produktivitas kerja, upah keluarga dalam arti mencukupi anggota keluarga dan konsep *profitsharing* antara buruh dengan pengusaha, tetapi tidak mampu mempengaruhi para buruh lain karena kecilnya suara atau pendukung SOB Pancasila¹².

Dalam hubungan industrial, umat Katolik di dunia berpegang pada Surat Edaran Paus *Rerum Novarum* (1891) dan *Quadrogesimo Anno* (1931) tentang masalah perburuhan. Menurut dua Surat Edaran itu, hubungan perburuhan harus dilandasi pada kerjasama antara buruh dan majikan dan bukan konflik antara majikan dan buruh. Meskipun buruh dan majikan mengejar tujuan masing-masing, tetapi

¹² Konsep *profitsharing* ini nantinya menjadi salah satu unsur dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang dirumuskan tahun 1974.

tujuan itu dapat dipenuhi dengan saling bekerjasama. Sebab itu majikan dan buruh tidak boleh saling berhadapan, konfrontasi; tetapi saling melengkapi dan membagi keuntungan bersama. Pandangan ini dianut oleh Partai Katolik yang dipimpin oleh I.J. Kasimo dan Sentral Organisasi Buruh (SOB) Pancasila.

Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga membentuk Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (Kespekri) dan Serikat Buruh Kristen Indonesia (Serbukri). Kecilnya dukungan kedua serikat buruh ini, pada bulan Juli 1955 dilebur menjadi Gabungan Serikat Pekerja Kristen Indonesia (GASPERKI). Gerakan ini juga tidak mampu menarik banyak pendukung. Para buruh perkebunan yang beragama kristen di Sumatra Utara dan Sulawesi Utara, tidak seluruhnya mendukung Gasperki. Di Sumatra Utara para buruh perkebunan justru lebih banyak bergabung dengan Sarbupri. Daerah pemeluk kristen seperti Maluku, Sumatra Utara dan Sulawesi Utara, juga tidak menunjukkan statistik anggota Gasperki yang tinggi. Sentimen agama yang dikembangkan dalam gerakan buruh kurang mampu menarik dukungan, sebab persoalan kesejahteraan buruh bersifat lintas agama dan tidak terlihat adanya diskriminasi buruh berdasarkan agama pada tahun 1950-an.

6. Badan Kerja Sama Buruh Militer (BKS BUMIL) dan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI)

BKS Bumil bukanlah sebuah gerakan buruh, tetapi keberadaannya mempunyai dampak penting bagi perkembangan gerakan buruh. Demikian pula SOKSI yang merupakan himpunan karyawan perusahaan milik negara, tidak memiliki pengikut yang berarti. Tetapi kedua organisasi ini mempunyai makna penting bagi keterlibatan militer dalam perburuhan dan para tokohnya mendominasi

Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sebuah serikat buruh tunggal bentukan Pemerintah Orde Baru. Pembahasan kedua organisasi ini sangat penting dalam melacak akar kooptasi serikat buruh oleh militer.

Pada masa Demokrasi Terpimpin berlangsung pertarungan antara tiga kekuatan yaitu Presiden Sukarno, TNI Angkatan Darat dan PKI. Herbert Feith (1999b:25) menggambarkan hubungan antar ketiganya sebagai konflik yang stabil yang ditandai oleh kerjasama, kompetisi dan ketegangan di antara lawan-lawan bertanding yang setaraf. Meskipun demikian, permusuhan TNI Angkatan Darat terhadap Soekarno dan PKI tidak dapat disembunyikan. Pimpinan Angkatan Darat sejak awal telah menganggap PKI sebagai lawan mereka sesungguhnya dan ingin menghambat perkembangan partai ini. Beberapa panglima daerah secara terbuka melakukan kegiatan melawan PKI dan di bulan Agustus 1960 PKI dilarang di Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan sebagian Jawa Timur (Hindley, 1966: 294; Crouch, 1986:50; Feith, 1999:33). Presiden Soekarno turun tangan untuk membela PKI yang disebutnya sebagai kekuatan paling progresif. PKI dibiarkan meneruskan kegiatan-kegiatan yang legal dan para pendukungnya terus mendapatkan bagian kekuasaan di bawah ideologi Nasakom. Sampai tahun 1965 partai ini berkembang dengan pesat dan memiliki perwakilan di badan-badan pemerintahan yang penting serta menjalin hubungan hangat dengan Presiden.

Dalam suasana Demokrasi Terpimpin seperti itu, BKS Bumil dibentuk oleh Penguasa Perang pada Nopember 1957. Tujuannya adalah untuk memobilisasi kekuatan buruh dalam menghadapi perang khususnya merebut wilayah Irian Barat¹³.

¹³ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006

Buruh merupakan kekuatan sosial yang terorganisasi dengan baik, sehingga mudah dimobilisasi. Badan ini anggotanya terdiri dari wakil organisasi buruh dan perwira militer yang ditunjuk oleh Penguasa Perang. Pembentukan badan ini secara jelas melibatkan buruh dalam perjuangan fisik menghadapi kekuatan asing. Tujuan lain yang merupakan agenda tersembunyi tentara dikemukakan oleh Nasution (1971:71) sebagai “membangun demokrasi fungsional sebagai alternatif pemikiran Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin. Demokrasi fungsional bertumpu pada kekuatan golongan fungsional”. Di antara serikat-serikat buruh, SOBSI merupakan kekuatan yang paling responsif dalam menanggapi pembentukan BKS Bumil sebab merupakan langkah strategis untuk merealisasikan gagasan buruh yang dipersenjatai. Sikap antusias SOBSI ini diwaspadai oleh SBII, sehingga serikat buruh ini secara sembunyi-sembunyi mengadakan pertemuan dengan militer. BKS Bumil memang dikuasai oleh golongan kanan, seperti Overste Djarot (ketua) dan Agus Sudono (wakil ketua), sehingga tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengekang pertumbuhan SOBSI, terutama rencana SOBSI untuk mengambil alih perusahaan milik Belanda.¹⁴

SOBSI akhirnya berhasil mengambil alih perusahaan Belanda dan di bawah payung nasionalisme berhasil memojokkan TNI AD yang menolak pengambil alihan tersebut. BKS Bumil terpecah dalam menyikapi langkah SOBSI ini. Mayoritas buruh mendukung pengambilalihan sedang TNI AD sebagai penggagas dan pimpinan BKS Bumil, menolaknya. Akhirnya BKS Bumil tidak efektif bekerja. Tidak ingin kalah langkah oleh SOBSI, Jenderal Nasution atas desakan Overste Djarot dan Agus

¹⁴ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006

Sudono mengeluarkan pernyataan yang mendukung nasionalisasi¹⁵. Kebesaran SOBSI semakin meningkat dengan program nasionalisasi ini dan TNI berusaha untuk menghambat perkembangannya. Terjadi perlombaan antara dua kekuatan ini untuk menguasai aset-aset perusahaan asing. Namun seperti dikemukakan oleh van der Kroef (1965:263) “meskipun memiliki pengikut yang sangat besar, PKI dan organisasi pendukungnya tidak memiliki strategi yang meyakinkan untuk mencapai kekuasaan. Paling banyak yang bisa diharapkan dari PKI hanyalah memenangkan pengaruh yang lebih besar terhadap presiden untuk memperoleh dukungan politik”.

Dalam berlomba nasionalisasi ini misalnya, SOBSI hanya berteriak sambil memobilisasi massanya untuk menduduki perusahaan. Sementara TNI mendorong pembentukan Badan Nasionalisasi dan sebelum keluar undang-undang nomer 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, tentara telah menguasai manajemen di 114 perusahaan (Sugiarso Surojo, 1988:143). Jabatan-jabatan penting dalam perusahaan hasil nasionalisasi diduduki oleh tentara dan merupakan sumber penghasilan yang sangat besar bagi kelompok ini. Pada tingkat nasional, tentara berhasil menggolkan konsepnya tentang pembentukan Badan Nasionalisasi dan menguasainya. Ketua badan ini Perdana Menteri Djuanda, Ketua Harian Menteri Produksi D. Suprayogi dan memiliki sekretariat yang dipimpin oleh Kapten Suhardiman. Di perusahaan hasil nasionalisasi ini, para buruh yang bergabung dalam beberapa serikat buruh mulai didekati oleh Suhardiman untuk melepaskan keanggotaan lama dan masuk Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN)¹⁶.

¹⁵ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suhardiman pada tanggal 12 Januari 2007 dan 28 Maret 2007 di Kantor Pusat SOKSI Jakarta. Dengan merujuk pada pasal 33 UUD 1945 di mana kekayaan dikuasai negara, maka semua rakyat Indonesia adalah karyawan bagi negara. Dengan demikian tidak ada

Konsep baru yang dikedepankan dalam hubungan perburuhan adalah kerjasama pimpinan dan anak buah dalam meningkatkan kemajuan perusahaan. Gerakan untuk membangun PKPN kemudian meluas ke berbagai sektor dan pada tanggal 10 Mei 1961 dalam Rapat Pleno Pimpinan PKPN seluruh Indonesia berhasil dibentuk Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BKPPKPN) yang diketuai oleh Suhardiman dan Sekretaris Jenderal Adolf Rachman.

Dalam Musyawarah Kerja Nasional I di Palembang awal September 1962, BKPPKPN diubah namanya menjadi Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI)¹⁷. Dalam rangka menghadapi Pemilu 1963 dan menjadi anggota Front Nasional, SOKSI mengembangkan sayap organisasi yang menjadi *onderbouw*. Pada awal tahun 1963 aktif dibentuk Rukun Tani Indonesia (RTI), Persatuan Karyawan Pelayaran dan Nelayan Indonesia (Perkapelin), Pelopor Pemuda Progresif Indonesia (P3I), Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia (Pelmasi), Gerakan Cendekiawan Sosialis Indonesia (GESCI), Gerakan Wanita Sosialis Indonesia (Gerwasi), Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia (LEKRI) dan Ikatan Karyawan Rohani (IKRAR). Diakui oleh para tokoh SOKSI bahwa SOBSI jauh lebih besar, sehingga sulit menandingi apalagi mengalahkan PKI dalam Pemilu 1963. Oleh sebab itu langkah yang paling tepat adalah menggagalkan Pemilu 1963 dan mengusulkan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup. Dengan diterimanya usul itu, tidak penting pemilihan umum yang hanya akan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis¹⁸.

“buruh” dan “majikan”. Buruh dan majikan merupakan konsep komunis yang sengaja menanamkan kontradiksi.

¹⁷ Ini berbeda dengan Sugiarto Surojo yang menyatakan bahwa SOKSI dibentuk langsung oleh sejumlah tentara. “Demikianlah, dengan prakarsa pimpinan AD secara diam-diam pada tanggal 2 Desember 1962 dibentuk Persatuan Karyawan Perusahaan Negara yang kemudian menjadi SOKSI. SOKSI dipimpin oleh Mayor Suhardiman, Letkol Sukanto Sajidiman, Kapten Suwignya, Mayor Muluk Lubis, Mayor Mujono dan Mayor Muhono (Surojo, 1988:143).

¹⁸ Wawancara dengan Suhardiman Ketua Dewan Penasehat SOKSI di Jakarta 12 Januari 2007.

Perjuangan pengembalian Irian Barat berakhir pada Mei 1963. Saat itu pula Presiden mengumumkan pencabutan penerapan undang-undang bahaya (SOB) yang sangat berpengaruh terhadap politik TNI AD. Pencabutan SOB ini membatasi ruang gerak politik tentara, minimal mengurangi peluang politik untuk melakukan gerakan secara langsung. Meskipun demikian, tentara telah membangun beberapa gerakan sosial yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan politiknya. Salah satu gerakan tersebut adalah SOKSI.

Oleh Angkatan Darat, pembentukan SOKSI ditujukan untuk menarik para buruh perusahaan pemerintah agar tidak terpengaruh SOBSI dan terutama KBKI yang dikuasai kelompok kiri. Ahem Eningpraja sebagai Menteri Perburuhan yang sedang bermasalah dengan PNI dan KBKI, mengirim SOKSI sebagai wakil Indonesia dalam Kongres Buruh Asia Afrika 1963. SOKSI yang diragukan sebagai gerakan buruh dan belum “seumur jagung”, mendapat tantangan keras dari para serikat buruh utamanya SOBSI dan KBKI. Ahem yang sejak perseteruannya dengan tokoh tua PNI berpaling ke Angkatan Darat, mulai bersimpati dengan SOKSI (Rocamora, 1991:367). Angkatan Darat juga menjadi tameng SOKSI ketika serikat buruhnya ini dipersoalkan oleh SOBSI dan KBKI mengenai keanggotaannya dalam Front Nasional dan kedudukannya sebagai serikat buruh karena tidak memenuhi ketentuan dalam Penpres No. 13/ 1964 dan Inpres No. 02/1964. Kawatir keanggotaannya dicabut dan Angkatan Darat kehilangan dukungan, dibentuklah Konsentrasi Golongan Karya Buruh (Kongkarbu) yang diketuai oleh Adolf Rachman (Yoga, 2004:125). Pembentukan lembaga ini jelas mengingkari konsep “kekaryaan” atau “karyawan” yang sejak semula dikedepankan guna menolak konsep “buruh”

yang dinilai antagonistik. Di sini militer khususnya Angkatan Darat, melakukan langkah yang cerdas untuk mempertahankan cengkeraman terhadap buruh.

Persaingan serikat buruh pada era Demokrasi Terpimpin ini sesungguhnya merupakan dampak dari persaingan antara partai-partai dan Angkatan Darat. Ketika PNI memiliki hubungan dekat dengan PKI, KBKI juga menjalin hubungan mesra dengan SOBSI. Sebaliknya, ketika Angkatan Darat bersaing dengan PKI, SOKSI juga menentang SOBSI. Adanya hubungan dingin antara Angkatan Darat dan PNI, memiliki implikasi mengerasnya hubungan KBKI dan SOKSI. Tindakan para manajer di perusahaan hasil nasionalisasi membujuk para buruh untuk bergabung dalam SOKSI, menimbulkan reaksi keras SOBSI dan KBKI. Pada akhir September 1963 SOBSI dan KBKI secara bersama-sama mendesak agar SOKSI dibubarkan. Pada akhir September 1964, Ketua PNI Ali Sastroamidjojo mendesak agar serikat-serikat buruh menolak bekerjasama dengan SOKSI (Rocamora, 1991:402-403). Sementara itu dalam strategi PKI mencapai imbalan kekuasaan yang berdasarkan komunisme, terdapat program untuk melakukan serangan terhadap SOKSI (Nasution, 1967:115).

Pada akhir November 1964 diselenggarakan Musyawarah Kerja II SOKSI di Bandung. Hadir dalam acara itu para petinggi Angkatan Darat. Menpangad Jenderal Ahmad Yani dalam sambutannya menyatakan "SOKSI maju terus memperjuangkan cita-citamu. Jangan Mundur! Angkatan Bersenjata tahu apa yang saudara-saudara perjuangkan!" Para Taruna dan Tamtama juga diakui merupakan kader SOKSI. Pernyataan ini menegaskan hubungan yang semakin jelas antara SOKSI dan Angkatan Darat. Kematian Peltu Sudjono yang merupakan pengurus SOKSI (Perkappen) dalam peristiwa Bandar Betsy Sumatra Utara, menimbulkan kemarahan

Angkatan Darat. SOKSI semakin menyadari perlunya membangun hubungan yang tegas dengan Angkatan Darat guna menghadapi lawan politik kedua belah pihak. Pada Juli 1965 SOKSI mengintegrasikan diri dengan ayah kandungnya itu dalam doktrin "SOKSI Manunggal dengan Doktrin Tri Ubaya Cakti" (Depihar SOKSI, 1965).

Peran penting SOKSI dalam politik Indonesia adalah sebagai salah satu pendiri Sekretariat Bersama Golongan Karya yang merupakan kekuatan politik penting era Orde Baru. Para kader SOKSI menduduki jabatan penting dalam Pemerintahan Orde Baru. Mereka antara lain Suhardiman, Oetoyo Oesman, Mudjono, Djuhartono, Thomas Sujatno, Adolf Rachman, Suko Triwarno dan sebagainya. Format serikat buruh Orde Baru yang dipaksa tunduk pada kemauan tentara, penggunaan kata karyawan untuk menggantikan buruh, penggantian konsep "hubungan perburuhan" dengan "hubungan industrial", penolakan bangun federasi serikat buruh, larangan pemogokan dan kegemaran mencurigai para buruh sebagai sisa-sisa komunis/PKI, tidak dapat dipisahkan dari pengalaman para tokoh SOKSI tahun 1960-an.

BAB VI
PENGDANCURAN DAN
PINATAN GERAKAN
BURUH OLEH
PEMERINTAH ORDE BARU

BAB VI

PENGHANCURAN DAN PENATAAN GERAKAN BURUH OLEH PEMERINTAH ORDE BARU

A. Penghancuran Gerakan Buruh oleh Koalisi Borjuasi - Militer

Segitiga kekuatan antara Soekarno-TNI AD dan PKI yang meruncing sepanjang Demokrasi Terpimpin, mencapai klimaknya pada pemberontakan militer pro komunis pada tahun 1965¹. Dibanding dua saingannya, AD jauh lebih kuat dan memiliki langkah-langkah strategis dalam melakukan aliansi dan selanjutnya meraih kekuasaan. Permusuhan AD dan PKI yang telah terbangun lama, menemukan momentum untuk melakukan kekerasan militer dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Militer didukung oleh borjuasi, melakukan pembersihan para tokoh PKI, termasuk para aktivis organisasi di bawah PKI seperti SOBSI, BTI, Gerwani, CGMI dan sebagainya.

Penghancuran gerakan sosial buruh di akhir tahun 1960-an, tidak bisa dilepaskan dari konflik-konflik yang berlangsung sepanjang Demokrasi Terpimpin antara tentara dan PKI. Sejak awal tahun 1960-an, di pedesaan berlangsung aksi sepihak yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) dalam melaksanakan undang-undang Pokok Agraria (UU No 5/1960) dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UU No. 2/1960). Larangan pemilikan tanah di atas 5 hektar, telah mendorong BTI secara sepihak mengambil alih tanah milik para kyai dan kaum feodal. Demikian

¹ Terdapat berbagai penjelasan mengenai G 30 S. Versi resmi Pemerintah Orde Baru pemberontakan dilakukan oleh PKI. Versi ilmuwan Universitas Cornell (2001), pemberontakan itu merupakan peristiwa internal AD. Sedangkan Arnold C Brechmann (2001) berpendapat bahwa Soekarno berada di belakang peristiwa tersebut. Dale Scott (1999) menyatakan bahwa CIA merupakan dalang dari G 30 S.

pula dalam melaksanakan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil di mana penggarap berhak 60 persen dari hasil, juga dilaksanakan secara sepihak oleh BTI. Aksi itu menimbulkan reaksi dari Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (Pertanu/NU) dan Persatuan Tani Nasional Indonesia (Petani/PNI). Perkelahian massal terjadi di desa-desa bahkan tidak jarang memakan korban jiwa. Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan medan konflik terbuka antara pendukung PKI melawan NU serta PNI yang dipicu oleh aksi sepihak ini. Meskipun demikian, PKI yang secara kuantitas jauh lebih unggul berhasil menguasai lahan pertanian sejak tahun 1962. Aksi lain yang tidak kalah meresahkan adalah penurunan lurah dan protes kepada sesepuh desa yang tidak mendukung aksi sepihak. Bahkan aksi tersebut seringkali dilakukan dengan penodaan terhadap agama dan norma kesusilaan di desa. Tindakan kaum tani ini dilakukan dengan sangat kasar, bukan saja harta benda yang hilang dari kaum mapan, tetapi juga harga diri dan kehormatan.

Di pabrik-pabrik baik berskala kecil maupun besar aksi SOBSI tidak kalah sengit. Tuntutan kenaikan upah dan supaya pimpinan SOBSI menduduki posisi managerial, terus dikemukakan oleh para tokoh SOBSI. Pemogokan demi pemogokan juga terus berlangsung yang tidak jarang disertai sabotase, pencurian dan pelambatan kerja.² Ketegangan dan konflik antar serikat buruh telah membawa berbagai kemacetan dalam perusahaan, disebabkan SOBSI ingin menguasai posisi-posisi penting, mengontrol masuknya tenaga kerja baru dan membujuknya untuk menjadi anggota SOBSI. Di perusahaan tambang batubara seperti dilaporkan Erwiza Erman (2005:370) SBTI (anggota SOBSI) yang merupakan gerakan buruh terkuat, terus menyampaikan tuntutan peningkatan kesejahteraan. Kedatangan Aidit dan

² Wawancara dengan Bapak Agus Sudono 22 September 2006

Nyono (yang juga ketua SOBSI Pusat) ke Sawahlunto digunakan untuk menekan para manager memenuhi tuntutan SBTI. Posisi manager di sini lebih banyak diduduki oleh Sarbumusi dan SBII/Gasbiindo. Konflik serikat buruh di sini ditunjukkan oleh Erman sebagai konflik kekuasaan. Di perkebunan, kondisinya tidak jauh berbeda. Stoler (2005:263) mendeskripsikan bahwa sejak peristiwa PRRI, Sarbupri terus menguat dan menekan SBII/Gasbiindo. Kampanye antinasionalisme dan kontrarevolusioner digunakan untuk menghantam SBII/Gasbiindo, sehingga menjelang tahun 1965 Sarbupri menguasai sektor perkebunan. Di perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi, gerakan baru yang secara terang-terangan menentang Sarbupri adalah Perkopen (SOKSI). Sarbupri (SOBSI) sangat kuat di perusahaan-perusahaan negara, sebab dengan menguasai perusahaan negara dapat dengan mudah menguasai ekonomi nasional³. PKI sangat mengandalkan kekuatan Sarbupri, sehingga gerakan ini memperoleh dukungan kuat dari pimpinan PKI. Dalam rangka meningkatkan penguasaan perusahaann, Sarbupri meningkatkan tuntutan untuk memimpin perusahaan. Tuntutan ini direspon sangat keras oleh tentara melalui SOKSI dengan membentuk Baladika Karya, yaitu unit dalam SOKSI yang berperan sebagai kekuatan tempur⁴. Keberhasilan Sarbupri memimpin perusahaan bukan hanya melicinkan jalan PKI menguasai ekonomi nasional, tetapi juga menghilangkan sumber ekonomi militer.

Dalam studi konflik apa yang dikemukakan di atas telah terbentuk apa yang oleh Dahrendorf disebut kelompok-kelompok konflik di mana orang masuk ke dalam suatu kelompok semu yang akhirnya menjadi kelompok kepentingan ditentukan secara struktural yang kemudian saling berhadapan untuk memperebutkan

³ Wawancara dengan Tjasman ketua Serbuki dan salah satu ketua SOBSI Januari 2006

⁴ Wawancara dengan Suhardiman Januari 2007

sumberdaya (Dahrendorf, 1986:241). Sedang dalam studi gerakan, posisi BTI dan SOBSI memiliki makna strategis sebab secara terus menerus mampu mempertahankan interaksinya dengan lawan dan penguasa (Tarrow 1996:5). Bukan hanya dua gerakan sosial itu saja, hampir semua gerakan sosial tahun 1960-an memenuhi syarat, seperti tujuan bersama, solidaritas dan identitas gerakan. Sebelum peristiwa G 30 S, PKI unggul dalam perebutan sumberdaya di pedesaan. Aksi sepihak BTI di pedesaan yang diikuti oleh Sarbupri di perkebunan dan SOBSI di perusahaan-perusahaan, mengancam eksistensi kelas menengah tahun 1960-an. Tanah Jawa benar-benar berwarna merah. Aksi-aksi PKI itu disertai dengan unjuk kekuatan kaum buruh dan tani seperti apel siaga di lapangan terbuka. Jika BTI suatu desa ingin mengambil tanah di desa tersebut selalu mendapat dukungan dari BTI desa lain⁵. Praktek di perusahaan atau pabrik sedikit berbeda, di mana pencurian, pelambatan kerja, sabotase dan pemogokan lebih banyak dilakukan⁶. Di perusahaan, SOBSI juga menuntut nasakomisasi dengan meminta salah satu dari pimpinan perusahaan harus berasal dari SOBSI/PKI. Dalam menghadapi situasi tersebut, polisi kurang tegas sehingga dimaknai sebagai dukungan polisi kepada PKI yang akhirnya mempersulit posisinya di kemudian hari. Dengan latar belakang seperti ini G 30 S jelas merupakan lonceng kematian bagi PKI dan organisasi pendukungnya.

Pembunuhan massal terhadap para aktivis kiri⁷ berlangsung antara awal Nopember 1965 dan akhir Januari 1967, dalam level yang kecil pembunuhan terus berlanjut sampai tiga tahun kemudian, tetapi tidak lagi brutal dan sadis (Cribb,

⁵ Wawancara dengan KH Abdul Wahab Ketua NU Cabang Banyuwangi tahun 1962-1972 di Banyuwangi 30 Desember 2002.

⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Sudono Ketua Gasbiindo tahun 1960-an di Jakarta 12 September 2006.

⁷ Aktivis kiri merujuk pada para tokoh PKI dan organisasi massa di bawah PKI serta para pengikut Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah Ali Sastroamidjojo dan Surachman (Asu), meskipun untuk yang terakhir ini hanya sedikit.

sadis dibandingkan di wilayah lain. Mungkin justru yang paling parah dengan adanya seruan seorang kyai bahwa membunuh PKI itu halal dan merupakan perang suci. Pernyataan Jenderal Nasution bahwa “fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan”, menambah motivasi Pemuda Ansor dan Pemuda Marhaen. Seperti diceritakan oleh Rochijat (2006) di Kediri khususnya di kawasan pabrik gula Ngadirejo berlaku hitungan satu nyawa jenderal harus ditukar dengan 100 nyawa PKI. Akibat dendam yang telah memuncak yang dipicu oleh insiden Jengkol pada tahun 1961, pembunuhan terhadap aktivis PKI disebutnya sebagai “ladang pembantaian”, “seperti menyembelih binatang”. Perasaan para algojo terhadap korban seakan tidak pernah dikenal, pada hal banyak korban yang merupakan tetangganya, orang dekat, gurunya di sekolah dan anak buahnya di kantor. Rochijat menyebutkan campuran dendam, keyakinan dan sentimen kelas sosial yang menyebabkan pembantaian itu berlangsung. Serikat Buruh Gula (SBG) merupakan gerakan buruh yang sangat kuat di pabrik gula Ngadirejo. Di kalangan Sarbumusi dan Kesatuan Buruh Gula (KBG/PNI) bersikap lebih baik, membunuh daripada dibunuh. Namun, persekutuan Pemuda Ansor dan Pemuda Marhaen hanya berlangsung singkat. Memasuki tahun 1967, NU tidak melakukan pembelaan ketika tentara, Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah mengejar, menangkap dan membunuh para pendukung PNI atau Sukarnois. Dalam waktu singkat, peta politik berubah drastis di mana AD mulai secara jelas melaksanakan agenda politiknya. Penangkapan terhadap para pendukung Soekarno ini berkurang setelah KKO melakukan perlawanan terbuka kepada Angkatan Darat.

Di Solo, usaha KBKI untuk menangkap pengurus SBKA mendapat perlawanan. Para buruh kereta api mengadakan pemogokan, sehingga kereta tidak

2000:51; Sulistyono, 2000:197). Target utama pembunuhan di suatu daerah berbeda dengan daerah lain, tetapi umumnya mereka duduk sebagai pimpinan PKI. Motor utama tindakan tersebut adalah kaum muda, terutama Pemuda Ansor dan Pemuda Marhaen dengan arahan atau dukungan militer, khususnya RPKAD. Sebelum kehadiran RPKAD yang berlangsung adalah ketegangan, makian dan perusakan kantor-kantor atau atribut PKI dan ormasnya. Tetapi setelah RPKAD masuk di suatu daerah, pembunuhan massal dimulai. Seperti dikemukakan oleh Crouch (1988) perjalanan pasukan RPKAD dari Jakarta ke Bali seakan-akan menjadi petunjuk dimulainya pembunuhan massal. Kegigihan Jenderal Ibrahim Aji (Pangdam Siliwangi) mempertahankan daerahnya dari perilaku barbar, menjadikan Jawa Barat sebagai daerah dengan korban sangat sedikit.

Di daerah-daerah Banyuwangi, Kediri, Jombang, Pasuruan merupakan daerah paling banyak korban. Sebab di daerah-daerah ini ketimpangan sosial dan sentimen santri-abangan, sangat menonjol. Selain itu daerah-daerah tersebut juga merupakan benteng NU dan basis PKI (Young, 2000:121). Pembunuhan massal di Jawa Timur berlangsung dalam tiga tahap⁸. Pertama, pembunuhan tokoh-tokoh PKI, BTI, Sarbupri, SOBSI dan Pemuda Rakyat yang mendapat julukan gembong-gembong PKI. Tindakan ini dilakukan secara sporadis oleh Pemuda Ansor dan Pemuda Marhaen dengan arahan tentara. Para tokoh PKI itu ditangkap dan diseret ke luar rumah kemudian dibunuh dengan clurit atau pedang tidak jauh dari rumahnya. Mayatnya ditinggalkan begitu saja. Pasukan pembunuh yang berjumlah 20-30 orang bergerak dari satu rumah ke rumah lain. Calon korban ditentukan di mesjid sehabis sholat maghrib. Pasukan ini juga mengancam siapa saja yang berani merawat

⁸ Seperti dikemukakan oleh KH Abdul Wahab dalam wawancara dengan peneliti pada Desember 2002.

jenazah, nasibnya akan sama. Begitu takutnya para pengikut PKI, sehingga banyak mayat tergeletak atau dihanyutkan di sungai. Namun, tidak sedikit anggota keluarga yang secara sembunyi-sembunyi menguburkan jenazah yang rata-rata tanpa kepala. Pada tahap pertama ini jumlah korban di seluruh Banyuwangi diperkirakan 1500 orang⁹. Kedua, pembunuhan massal yang lebih sistematis sejak masuknya tentara secara besar-besaran di ujung timur pulau Jawa ini. Mereka yang ditengarai PKI rumahnya diberi tanda oleh Pemuda Anzor dan Pemuda Marhaen yang mengenakan seragam Pemuda Rakyat untuk dididik malam harinya, dikumpulkan di Kodim dan dibawa ke berbagai tempat seperti Rogojampi dan hutan Alas Purwo untuk dibunuh secara massal. Sama seperti pada tahap pertama, pada tahap kedua ini para korban tidak melawan. Tahap kedua ini korbannya adalah para aktivis PKI. Ketiga, pembunuhan yang sebenarnya merupakan pelampiasan dendam kepada korban. Motivasinya bukan sepenuhnya anti komunis tetapi dendam pribadi atau iri hati. Psikologi ketakutan massa telah membuka peluang terjadinya peristiwa tersebut. Orang-orang yang memiliki kedudukan sosial telah menyalahgunakan posisinya itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok, seperti penjarahan harta benda, seksual dan atau motif lain yang lebih personal. Menurut Pak Sumardi Ketua PNI Cabang Banyuwangi tahun 1960-an, jumlah total korban mencapai 38.000 orang.

Di Jombang dan Kediri kepemimpinan Sarbumusi dalam melakukan pembunuhan massal sangat menonjol. Seperti dikemukakan oleh Sulistyono (2000:159-162), para pengurus Serikat Buruh Gula (SBG) menjadi target pembunuhan massal yang pertama. Mereka yang melarikan diri dikejar dan dalam pengejaran itu pembunuhan meluas ke para anggota SBG. Pembantaian di dua kota ini tidak kalah

⁹ Angka ini dari Pak Sumardi ketua PNI Cabang Banyuwangi 1960-1970 (wawancara Desember 2002).

bisa melewati stasiun Balapan. Kedatangan RPKAD akhir Oktober 1965 baru dapat membebaskan stasiun Balapan dan menangkap para tokoh SBKA (Dinas Sejarah TNI AD, 2000:272). Para tokoh buruh di Solo kebanyakan melarikan diri ke pabrik gula dan pabrik karung di Klaten di mana SOBSI kuat. Tetapi dengan cepat pasukan Banteng Reiders berhasil menguasai kota Klaten.. Penangkapan, pembunuhan para aktivis PKI di Solo dan sekitarnya dilakukan secara langsung oleh tentara, dibantu milisi sipil seperti Hanra (Pertahanan Rakyat). Di Semarang tentara sempat terpecah antara pendukung G 30 S dan penentanginya. Kodam Diponegoro selama 5 hari berhasil dikuasai oleh Kolonel Suherman dan menyatakan sebagai pimpinan G 30 S Jawa Tengah. Peristiwa ini menempatkan Jawa Tengah sebagai daerah paling kuat pendukung G 30 S. Berbagai organisasi sosialis komunis termasuk SOBSI dan BTI tidak segera bisa dilumpuhkan. Kondisi ini telah mendorong para tokoh kiri melarikan diri ke Semarang sebagai basis perlindungan¹⁰.

Berbeda dengan pembunuhan di Jawa yang secara aktif melibatkan organisasi pemuda dan agama, di Sumatra tentara menjadi pelaku yang aktif. Para anggota PKI yang kebanyakan buruh perkebunan keturunan jawa turut menjadi faktor pendorong meluasnya pembunuhan. Permusuhan mendalam antara Sarbupri dan Perkapen (SOKSI), menghadapkan langsung militer dengan anggota PKI. Oleh SOKSI, Sarbupri dianggap sebagai ancaman nyata. Pembunuhan Peltu Sujono anggota SOKSI oleh para pengikut BTI dan Sarbupri tahun 1963 dalam peristiwa Bandar

¹⁰ Wawancara dengan Kandri Ketua BTI Banyuwangi tahun 1963-1965 pada Desember 2002. Kandri dan teman-temannya melarikan diri ke Semarang setelah sempat bersembunyi di hutan pada Oktober 1965. Dalam pembicaraan para aktivis yang sempat bertemu di Semarang akhir 1965, terjadi perpecahan antara Solo atau Semarang sebagai tujuan pelarian. Para aktivis di Banyuwangi dan sekitarnya sebelumnya melarikan diri ke Surabaya, kemudian banyak yang menuju Blitar sebagai benteng pertahanan. Semarang diputuskan sebagai tempat tinggal para aktivis karena banyak perwira AD yang simpati pada BTI dan SOBSI dan polarisasi masyarakatnya tidak setajam Jawa Timur. Keputusan ini dinilainya tepat, sebab mereka yang di Solo, Surabaya dan Blitar semuanya habis.

Betsy, menjadikan dendam SOKSI untuk menumpas BTI dan Sarburpi demikian membara. Tuntutan Sarbupri untuk turut mengelola perusahaan hasil nasionalisasi juga membahayakan posisi TNI AD. Ditambah kecaman-kecaman Sarbupri kepada manager perkebunan sebagai “kapitalis birokrat” dan tuntutan agar anggota SOBSI itu dapat menempati kepemimpinan di perusahaan sesuai konsep Nasakom. Semua ini menjadi alasan kuat bagi tentara untuk secara langsung menumpas Sarbupri. Sementara korban orang-orang Tapanuli dapat sedikit dicegah berkat sentimen etnik dan bahkan marga. Larangan para pendeta seperti halnya para pastor di Flores agar orang-orang Kristen tidak melakukan pembunuhan, berpengaruh secara nyata terhadap jumlah korban di luar Jawa.

Berapa jumlah korban, sulit diketahui dengan pasti. Para peneliti memperkirakan jumlah yang berbeda-beda, berkisar dari 150.000 sampai 2 juta jiwa (lihat tabel 1 Robert Cribb, 2000:23; Sulistyono, 2000:44-46). Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden Soekarno menyatakan korban pembunuhan massal mencapai 78.000 orang, tetapi angka itu disampaikan awal tahun 1966 ketika pembunuhan masih terus berlangsung. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) pasca jatuhnya Soeharto tidak mampu menemukan angka yang tegas. Jumlah korban diperkirakan 200 ribu orang dan data lengkap mengenai korban yang berhasil dihimpun hanya 65 ribu di seluruh Indonesia. Padahal penelitian ini dilakukan oleh para korban yang masih hidup. Berbagai kesulitan dialami oleh para peneliti, seperti ketakutan untuk berterus terang, trauma, sedih dan menangis jika harus mengemukakan peristiwa 1965, kesuksesan dalam berkarir dan ketakutan karirnya terganggu dan sikap menolak kehadiran

peneliti karena ingin melupakan masa lalu¹¹. Salah satu temuan penting dalam riset tersebut adalah bahwa tokoh-tokoh SOBSI habis terbunuh, demikian pula tokoh-tokoh serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI. Tjasman salah satu ketua SOBSI tahun 1965 menuturkan bahwa setelah dibebaskan dari penjara tahun 1979, ia berkeliling ke berbagai daerah mencari tokoh buruh teman seperjuangannya, namun tidak menemukan satu orang pun. Pernyataannya itu sejalan dengan temuan Sulistyono (2000:200), Cribb (2000) dan Weiringa (2001) dari peristiwa pembunuhan massal tersebut, hampir semua tokoh kiri habis. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar buruh yang aktif dalam politik adalah pekerja kelas menengah. Para aktivis adalah mereka yang berada di garis depan dalam gerakan sosial. Mereka inilah yang berperan dalam merintis gerakan sosial buruh dan tani, merumuskan tujuan dan memegang kepemimpinan. Sebab itu dalam usaha pembersihan, kelompok inilah yang lebih dahulu disingkirkan. Hilangnya lapisan ini dari struktur sosial masyarakat, telah meniadakan kepemimpinan gerakan berikutnya. Diperlukan waktu puluhan tahun untuk membangkitkan keberanian kaum buruh.

Setelah peristiwa G 30 S semua serikat buruh mereorganisasi diri. Semua gerakan sosial yang bernaung di bawah PKI dilarang. Beberapa serikat buruh jika ingin melakukan aktivitas harus meminta ijin pihak militer. Kekuasaan nyata sejak tahun 1966 dipegang oleh militer dan lanskap baru politik sedang dibangun. Di beberapa perusahaan yang kekurangan tenaga administrasi, dipekerjakan pensiunan tentara. Penataan struktur kepemimpinan perusahaan milik pemerintah, selalu

¹¹ YPKP merupakan organisasi para korban 1965-1966 yang dipimpin oleh Sulami dan kemudian Hasan Raid. Sekarang dipimpin oleh Kusalah Subagyo Toer. Selain DPP yang berkedudukan di Jakarta, terdapat DPD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Hingga tahun 2005, YPKP telah memiliki 78 DPD. Penulis terlibat aktif dalam penelitian ini yang menyisir daerah dari Banyuwangi sampai Sumatra Barat. Bali sulit untuk menerima YPKP. Cerita tentang berbagai pengalaman buruk, sadis dan mengerikan dari para korban, tidak penting dikemukakan di sini.

menempatkan tentara dalam jajaran eksekutif, suatu keputusan yang ganjil. Demikian pula semua kepala desa yang “hilang” tahun 1965-1967, diganti oleh tentara. Sarbumusi, Gasbiindo, SOB Pancasila, Gasperki, tidak dilarang tetapi sulit menyelenggarakan aktivitas. GOBSI yang bernaung dalam partai Murba mati dengan sendirinya. Tidak demikian halnya dengan SOKSI, seiring dengan menguatnya posisi AD dalam politik secara nasional, SOKSI memiliki peran besar di perusahaan-perusahaan. Ketua SOKSI selalu terlibat dalam menyeleksi buruh-buruh di perusahaan yang bisa dipertahankan dan harus dipecat karena dituduh ikut dalam gerakan kiri¹². Di Jawa Timur peranan demikian secara menyolok dilakukan oleh Sarbumusi (Sulistyo, 2000:220).

Terdapat faktor lain yang turut mendorong pasifnya gerakan buruh akhir tahun 1960-an ini, yaitu kesulitan ekonomi, munculnya berbagai tindakan kriminal dan stigma komunis yang tanpa proses pengadilan, langsung ditumpas. Krisis ekonomi terus berlanjut, inflasi yang membubung tinggi dan kebijakan penurunan nilai mata uang. Situasi ini melahirkan pencurian, perampokan dan kerusuhan. Di desa-desa muncul perilaku yang dikenal sebagai Gerayak (gerakan rakyat kelaparan), begal dan kecu. Sementara itu di kota kota juga marak perilaku kriminal, seperti pencurian dan perampokan. Militer menuduh bahwa tindakan itu dilakukan oleh PKI yang mengumpulkan sumberdaya untuk menyusun kekuatan kembali. Pernyataan ini jelas merupakan politisasi tindakan kriminal biasa. Teknik ini nantinya dikembangkan oleh militer jika menghadapi gangguan keamanan dan untuk menyingkirkan lawan yang tidak dikehendaki sepanjang Orde Baru.

¹² Wawancara dengan Bapak Soehardiman Januari 2007.

Sulit untuk mengesampingkan tidak adanya agenda besar militer di balik pembersihan para aktivis kiri tahun 1965-1967. Tujuan pembunuhan massal ini jelas penghancuran aktivis dan ideologi kiri dan memantapkan landasan baru bagi kekuasaan militer dengan membangun opini kaum kiri sebagai pengkhianat dan militer sebagai penyelamat bangsa. Tujuan pembantaian mulai terlihat jelas setelah satu dekade peristiwa itu terjadi. Restrukturisasi politik yang menampilkan militer di semua lini dan lapisan mempunyai misi tunggal yaitu mencegah munculnya gerakan sosial. Gerakan sosial yang dicirikan oleh mobilisasi massa perlu diakhiri secara permanen dengan menyingkirkan kekuatan massa terbesar, yaitu kaum buruh dan kaum tani. Pada akhirnya kekerasan yang dilakukan oleh militer di bawah lembaga Kopkamtib yang terentang dari Pusat hingga ke pelosok desa ini merupakan peringatan keras bagi siapapun yang berani menantang elite yang baru¹³. Besar dan luasnya cakupan pembunuhan mempermudah terciptanya hegemoni negara. Beberapa tahun setelah G 30 S, militer masih terus melakukan operasi yang merupakan pembunuhan mental para aktivis. Kopkamtib sepanjang tahun terus melakukan operasi pembersihan terhadap aparat yang dituduh tidak loyal kepada Orde Baru. Dimulai dari pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang membersihkan birokrasi sipil. Birokrasi sipil merupakan kekuatan utama PNI yang loyal kepada Soekarno. Kemenangan PNI dalam Pemilu 1955, bersumber dari

¹³ Saya setuju dengan pendapat Robert Cribb yang disampaikan kepada Michael van Langenberg (2000:99) bahwa tujuan pembantaian adalah eliminasi terhadap kepemimpinan PKI dan penghancuran struktur kader massanya. Meskipun demikian, eliminasi bukan hanya kepada pimpinan PKI, tetapi juga PNI kiri. Kelompok terakhir ini tidak pernah disebut secara tegas. Semua aktivis yang hilang tahun 1965-1967, dituduh komunis. Mereka dihancurkan sampai ke akar-akarnya (keluarganya). Pembersihan para pengikut Soekarno baru mereda setelah secara terbuka KKO menghadapi RPKAD. Di beberapa daerah yang saya teliti, aktivis PNI yang bersama NU membunuh PKI, tahun 1967 dikejar dan dibunuh oleh tentara. Ini fakta yang saya temukan baik di Banyuwangi, Semarang, Klaten, Solo, Kediri maupun Sumatra Utara. Alternatif berlindung yang cukup aman adalah pesantren dan gereja, sehingga banyak pengikut PKI dan PNI masuk agama Kristen atau Katolik.

suara kaum birokrat dan keluarganya. Pembersihan dalam Angkatan Bersenjata utamanya ditujukan kepada Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian. Sekitar 500 pejabat ketiga angkatan ini ditangkap, 300 di antaranya dari Angkatan Udara (Crouch, 1988:202). Kesempatan ini juga digunakan oleh pimpinan Angkatan Darat yang secara nyata telah memegang kekuasaan untuk mereorganisasi Angkatan Bersenjata, di mana masing-masing angkatan dipimpin kepala staf dan semua kepala staf di bawah Panglima ABRI yang dipegang langsung oleh Jenderal Soeharto.

Mencermati kekuatan baru yang muncul sejak 1966 yang terdiri dari militer khususnya AD, borjuasi, tuan tanah di pedesaan dan islam, dengan alasan masing-masing mempunyai kepentingan yang sama untuk menghancurkan gerakan buruh. Bagi militer, buruh dan tani adalah kelompok yang paling potensial melakukan gerakan radikal dan cenderung mengangkat isu-isu komunis. Sifat gerakan seperti ini bertentangan dengan kondisi politik ideal yang digambarkan oleh AD. Oleh sebab itu gerakan buruh dan tani tidak sekedar diawasi, tetapi mutlak dihancurkan. Citra buruh sebagai pembuat kekacauan dan menuntut hak-hak secara sepihak tanpa melakukan kewajiban lebih dahulu, terus dibangun oleh militer guna mengendalikan kekuatan ini. Kekacauan sosial merupakan predikat yang diberikan oleh militer kepada PKI dan ormasnya, khususnya SOBSI dan BTI. Demonstrasi dan pemogokan buruh yang lazim dilakukan oleh para buruh di semua negara, diberi stigma sebagai perilaku PKI dan sebab itu perlu dilarang. Sebaliknya predikat militer sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, penyelamat bangsa dari perilaku para pengacau, juga terus dibangun.

Bagi borjuasi dan tuan tanah di pedesaan, buruh merupakan kekuatan sosial yang potensial menggerakkan radikalisasi. Tuntutan para buruh untuk terus meminta kenaikan upah, melakukan pemogokan dan ketua serikat buruh sekaligus menduduki

salah satu direksi di jajaran pimpinan perusahaan, membuat bulu kuduk para pemodal merinding. Sedangkan para tuan tanah telah merasakan bagaimana menyakitkannya perilaku BTI yang melakukan aksi sepihak. Dalam rangka akumulasi kapital, penghancuran gerakan buruh radikal sangat menguntungkan kaum borjuis. Jumlah penduduk yang besar akan merupakan tenaga kerja murah dalam produksi, jika gerakan buruh berhasil dijinakkan. Gerakan sosial yang secara nyata menghendaki redistribusi kekayaan menakutkan para pemilik modal. Sementara dengan alasan ideologis, kelompok islam menolak komunisme yang berbasis unionisme. Dalam format borjuasi-militer, kaum buruh dan tani tidak diperlukan dalam proses pembangunan. Mereka dipaksa untuk tidak terlibat dalam politik di bawah kebijakan *massa mengambang* dengan alasan masih rendah pendidikannya dan agar fokus pada pembangunan. Pendekatan dan paksaan kepada para tokoh buruh terus dilakukan oleh militer agar format kebijakan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan stabilitas nasional dapat berjalan.

B. Penyesuaian Gerakan Buruh dengan Politik Militer

Sisa-sisa gerakan buruh yang ada, yaitu organisasi buruh di luar SOBSI, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan politik militer. Para perwira tinggi yang memegang tampuk kekuasaan tahun 1960-an adalah mereka yang aktif dalam memadamkan pemberontakan daerah tahun 1950-an. Pandangan politiknya menekankan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak pembangunan. Partai-partai politik dianggap sebagai sumber instabilitas dan gerakan buruh dipandang sebagai kekuatan radikal yang pro dengan komunisme (Moertopo, 1981:33). Oleh sebab itu, format politik yang dibangun oleh militer adalah anti partai dan anti gerakan sosial

(buruh). Para pemimpin baru yang didominasi militer selalu mewaspadaai bentuk-bentuk pengorganisasian massa. Kontrol ketat dilakukan kepada masyarakat dengan menghidupkan kembali satuan organisasi wilayah tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dan kewajiban semua organisasi mendaftarkan diri di Departemen Dalam Negeri. Aktivitas organisasi apapun termasuk ormas keagamaan harus sejjin kepolisian, tentara dan Depdagri. Tanpa restunya, sebuah organisasi akan dituduh sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) dan komunis.

Para pemimpin gerakan buruh yang tersisa menyadari bahwa struktur politik dan budayanya telah berubah. Mereka juga dituntut mengembangkan gerakan buruh yang moderat dan taat pada kehendak militer. Duduknya perwira militer sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam kabinet di awal Orde Baru menegaskan misinya untuk menjinakkan kekuatan buruh. Menaker Jenderal (Polisi) Awaoeddin Djamin selama tahun 1967-1968 terus menerus mengingatkan bahwa “buruh akan selalu menjadi masalah sampai PKI benar-benar dapat dihancurkan” (Hadiz, 1996: 5). Demikian pula pidato Ketua MPRS AH Nasution (1971: 106-107), sepanjang tahun 1966 sampai 1970 tidak henti-hentinya menyerukan kewaspadaan ABRI sebagai kekuatan penegak Orde Baru untuk selalu menindak tegas (= menghancurkan) kekuatan yang potensial disusupi komunis, seperti buruh dan tani. Pidato para pejabat negara pada awal kebangkitan Orde Baru, secara terus menerus menempatkan kaum tani dan buruh sebagai sarang komunis, sehingga dua kekuatan tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah (Moertopo, 1974).

Para pimpinan gerakan buruh yang tersisa, setelah peran Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) mereda, menjalankan tugas membantu pemerintah menarik investor asing. Tokoh buruh seperti Agus Sudono (Gasbiindo), Adolf Rahman

(SOKSI), Dahlan Siregar (Sarbumusi), M.O Tambunan (KBM), Darius Marpaung (Kespekri) dan P.D.F Manuputty (SOB Pantjasila) berkeliling ke negara-negara Eropa untuk menemui para calon investor dan meyakinkannya bahwa buruh di bawah Orde Baru bukan ancaman modal asing¹⁴. Mereka juga melakukan promosi betapa menariknya Indonesia bagi investor asing, seperti tenaga kerja yang melimpah, sumber daya alam yang kaya, kebutuhan rakyat Indonesia akan lapangan kerja dan telah disingkirkannya komunisme. Gerakan buruh radikal tidak akan muncul dan pemogokan juga bukan merupakan ancaman serius. Langkah pimpinan gerakan buruh di atas merupakan dukungan terhadap kekuasaan dan program ekonominya. Ini berarti kesadaran para pimpinan gerakan bahwa masa depan gerakan buruh sangat tergantung pada pemerintah. Kesamaan ideologi anti komunisme yang telah digalang sejak awal tahun 1960-an, kemudian kerjasama dalam KABI dan kesediaannya menarik investor, menunjukkan bahwa gerakan buruh berhasil dijinakkan militer sejak lahirnya Orde Baru.

Dukungan terhadap kekuasaan militer juga disertai harapan bahwa militer adalah satu-satunya kekuatan sosial yang mampu memimpin perubahan ke arah stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik. Para tokoh buruh sejalan dengan pemerintah bahwa stabilitas nasional merupakan syarat terlaksananya pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga terus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Gerakan buruh yang kuat akan lahir dalam perekonomian nasional yang kuat. Oleh sebab itu jika Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan pertumbuhan ekonomi terus

¹⁴ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006.

berlangsung, para tokoh buruh memiliki harapan besar bahwa gerakan buruh independen akan segera lahir seiring dengan kembalinya demokrasi di bawah Orde Baru. Disadari bahwa demokrasi dan gerakan buruh yang kuat hanya akan lahir dari ekonomi nasional yang kuat. Sebab itu tokoh-tokoh buruh sepaham dengan pemegang kekuasaan bahwa pemulihan ekonomi merupakan prioritas dan tidak boleh ada gangguan dalam produksi. Tampilnya kaum intelektual dan tokoh agama dalam pemerintahan menguatkan harapan akan kembalinya demokrasi, setelah pendukung otoriterisme (Soekarno dan PKI) disingkirkan. Berkaca pada negara-negara Barat di mana kemajuan ekonomi dan gerakan buruh yang kuat menjadi pilar demokrasi, maka para pimpinan gerakan buruh mendukung program-program pemerintah, utamanya untuk menarik investasi asing.

Hubungan kuat antara tokoh buruh dengan militer yang dibangun sejak pembentukan BKS Bumil, Sekber Buruh dan kemudian KABI, semakin menyatukan agenda perubahan kedua belah pihak. Bagi militer, stabilitas nasional merupakan syarat utama dalam pembangunan ekonomi. Sebab itu semua bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan harus sedini mungkin dikenali dan dicegah. "Pembangunan" menjadi ideologi baru bagi pemerintah Orde Baru. Demikian pula, pandangan militer terhadap partai politik dan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Pada 1966 di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung diselenggarakan seminar militer - sipil mengenai stabilisasi politik dan pembangunan. Dalam seminar itu para cendekiawan mengemukakan keras sistem politik Demokrasi Terpimpin yang penuh dengan simbol-simbol tradisional serta menekankan pentingnya modernisasi sistem sosial, ekonomi dan politik. Dalam rangka transformasi sistem ke arah yang lebih rasional, para cendekiawan bisa

menerima peranan militer sebagai stabilisator dan dinamisator. Memperhatikan dukungan intelektual ini, kekuatan-kekuatan sosial lain termasuk buruh, semakin merapat ke militer. Para tokoh buruh mulai berbicara dalam bahasa militer, seperti “stabilitas nasional”, “modernisasi”, “pertumbuhan ekonomi”, “perlunya investasi asing” dan sebagainya.

Dalam wacana baru, para pemimpin gerakan buruh mulai meninggalkan permusuhan dengan pengusaha, doktrin-doktrin Marxisme, Leninisme, Marhaenisme dan komunisme. Peranan ICFTU (*International Confederation of Free Trade Union*) tidak kecil dalam membangun gerakan buruh yang menjauh dari prinsip-prinsip perjuangan kelas. Pada Oktober 1968 di Jakarta diselenggarakan Konferensi ICFTU dengan Serikat-Serikat Buruh di Indonesia. Agenda konferensi tersebut sangat jelas, yaitu membawa serikat buruh Indonesia lepas dari pengaruh komunis atau WCL (Sudono, 1977:16). Dalam sambutannya Sudono selaku ketua Gasbiindo yang sejak awal menjalin hubungan dengan ICFTU menekankan pentingnya “gerakan buruh Indonesia harus dirobah dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan”. Para peserta konferensi juga mengakui bantuan ICFTU dalam melakukan pembaharuan gerakan buruh dengan agenda utama mencegah bangkitnya kembali PKI dan menyingkirkan falsafah perburuhan berdasarkan perjuangan kelas. Usaha untuk mengendalikan gerakan buruh dikemas dalam konsep “pembaharuan gerakan buruh” (Sukarno, 1979:13). Pembaharuan dimaksud adalah penyingkiran gerakan buruh yang mengusung ideologi sosialisme-komunisme, mencegah serikat buruh sebagai gerakan sosial dengan mengendalikan para pimpinan gerakan buruh dan memaksa semua serikat buruh bergabung dalam wadah tunggal, Federasi Buruh Seluruh Indonesia.

Perubahan drastis ini sangat sukar, mengingat ideologi sosialisme dan komunisme telah mendarah daging dalam gerakan buruh. Namun peristiwa penangkapan dan pembunuhan massal para aktivis, pengikut PKI dan pendukung Soekarno, telah membungkam dan membunuh pikiran-pikiran gerakan sosial. Para tokoh buruh seperti Suhardiman, Adolf Rahman (SOKSI) dan Agus Sudono (Gasbiindo) menyerukan agar para buruh memberi kesempatan pemerintah untuk memimpin pembangunan ekonomi dengan menarik modal asing. Dalam situasi ekonomi yang porak poranda dan politik yang tidak menentu, Pemerintah dipimpin oleh TNI harus diberi kesempatan memulihkan situasi. Investasi asing harus diijinkan beroperasi di Indonesia untuk membuka lapangan kerja bagi jutaan penganggur. Jika pengangguran tidak berhasil dikikis, pemikiran dan ideologi komunisme akan subur kembali¹⁵. Pembangunan ekonomi yang dilakukan hendaknya secepat mungkin memberi manfaat kepada rakyat, sebab itu kecuali harus berkerja keras meyakinkan negara-negara maju agar bersedia memberi pinjaman baru juga meluluskan permintaan Pemerintah Indonesia menunda pembayaran cicilan utang.

Dalam hubungannya dengan pengusaha, para tokoh buruh menekankan bahwa pengusaha adalah partner dalam produksi. Tanpa pengusaha, tidak akan ada buruh, demikian sebaliknya. Di negara yang padat penduduk seperti Indonesia di mana terjadi *oversupply* tenaga kerja, permusuhan dengan pengusaha hanya akan merugikan buruh. Sebab pendidikan dan ketrampilan buruh rendah yang memudahkan pengusaha mensubstitusi dengan mesin (mekanisasi). Dengan substitusi, produktivitas kerja jauh lebih tinggi, standar produk terjamin dan biaya operasional dapat ditekan. Di negara yang kondisi ketenagakerjaannya seperti

¹⁵ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006 dan dengan Suhardiman Januari 2007.

Indonesia, paling tepat menerapkan industri padat karya. Jenis industri ini tidak menuntut ketrampilan tinggi dan memerlukan banyak tenaga kerja. Guna mencegah rendahnya upah buruh, pemerintah perlu melindunginya dengan menentukan upah minimum. Dengan pemikiran seperti itu, para tokoh buruh meyakinkan anggotanya dalam membangun hubungan perburuhan yang baru yaitu hubungan perburuhan yang saling menguntungkan, kelak disebut sebagai Hubungan Perburuhan Pancasila.

Paradigma lain yang dicoba untuk dikembangkan adalah serikat buruh yang berorientasi pada azas kekeluargaan yang merupakan kepribadian Indonesia. Gerakan buruh dengan ideologi perjuangan kelas adalah produk asing yang dipaksakan di Indonesia, sehingga tidak cocok dan terus menerus menimbulkan pertentangan. Para buruh, pengusaha dan negara dilihat sebagai komponen dari keluarga besar, di mana yang belakangan memainkan peranan sebagai ayah yang dermawan dan bijaksana (Susetiawan, 2000; Hadiz, 2005: 11). Pemilik modal sebagai majikan merupakan pihak yang telah berbaik hati dengan menerima buruh bekerja di perusahaannya. Adalah hak pemodal untuk memberhentikan atau mempekerjakan buruh. Sebab itu pemogokan sebagai senjata para buruh tidak lazim dilakukan. Jika para buruh tidak senang dengan kebijakan pengusaha dan negara, dipersilakan mengundurkan diri dan tidak perlu menggunakan cara anarkis. Konsekuensinya, jika para buruh menggunakan hak mogok, maka akan dicap (*stigmatized*) sebagai “tidak Pancasila” dan bertentangan dengan “kepribadian bangsa”. Paradigma ini nantinya menjadi basis legitimasi ideologis untuk mengekang militansi buruh selama Orde Baru.

Gerakan buruh yang mengusung perjuangan kelas identik dengan komunisme dan karenanya harus dikubur. Koalisi pendiri Orde Baru sangat membenci konsep kelas dan mengembangkan pemikiran yang lebih holistik dalam hubungan negara

dan masyarakat. Meskipun koalisi tersebut kemudian pecah, tetapi tetap memiliki pandangan yang sama tentang gerakan buruh. Koalisi militer dan kelompok agama mendesain format hubungan perburuhan pada awal Orde Baru. Militer yang mengutamakan kesatuan perintah dan efektivitas, menghendaki gerakan buruh yang taat pada kehendak Pemerintah. Sejak awal militer menolak kata “buruh” yang memiliki konotasi eksploitatif dan perlawanan. Ali Moertopo sebagai pemikir penting Orde Baru mengemukakan bahwa tidak ada kelas dalam masyarakat Indonesia, yang ada adalah *karyawan* (Hadiz, 2005: 12). Demikian pula pandangan Mohammad Natsir mengenai kerjasama buruh dan majikan, kembali mengemuka melalui tokoh-tokoh buruh Islam seperti Agus Sudono. Latar belakang Sudono yang priyayi Jawa, anak seorang dokter perkebunan / pabrik gula serta dibesarkan dalam lingkungan borjuis, tidak bisa menerima konsep perjuangan kelas. Sebaliknya, ia mengedepankan pemikiran pentingnya kerjasama buruh dan majikan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Konsep-konsep hubungan perburuhan Katolik yang berpegang pada Surat Edaran Paus *Rerum Novarum* (1891) dan *Quadrogesimo Anno* (1931), menarik para penasehat Soeharto utamanya mereka yang tergabung dalam Opsus. Hubungan perburuhan menurut ajaran Gereja Katolik adalah hubungan kerjasama antara buruh dan majikan. Kedua kekuatan ekonomi ini tidak bisa saling menindas, meniadakan dan harus bekerjasama. Majikan yang memiliki modal dan kemampuan usaha, perlu membagi keuntungannya dengan buruh yang telah memberikan tenaganya. Untuk itu diperlukan pembukuan yang terbuka tentang biaya produksi. Para pekerja dapat mengetahui kontribusi mereka, sehingga dalam *profit sharing* para pekerja dapat menghitung porsi yang layak mereka terima. Profit sharing merupakan dasar bagi

kerjasama selanjutnya, di mana pekerja dituntut untuk bekerja keras memajukan perusahaan. Pemilik modal dengan skill bisnis, kemampuan manajemen dan dukungan teknologi, dapat terus berinovasi mengembangkan bisnisnya dengan memperdalam dan melebarkan pasar. Para buruh dituntut bekerjasama dalam produksi, dan karena buruh mengetahui porsi yang akan mereka terima, maka produktivitas buruh terus meningkat. Upah dan jaminan sosial dari perusahaan akan merupakan motivasi kerja, sehingga tidak perlu terjadi konflik antara pengusaha dan buruh seperti dalam teori marxis. Pemikiran seperti itu dianut oleh Partai Katolik yang dipimpin oleh I.J. Kasimo dan Sentral Organisasi Buruh (SOB) Pancasila pimpinan P.D.F Manuputy serta tokoh-tokoh Katolik lain yang mendukung kepemimpinan Soeharto. Meskipun jumlahnya sangat kecil, keberhasilan orang-orang Katolik berada di dekat Soeharto telah memungkinkan pemikiran tersebut menjadi kebijakan.

C. Penataan Gerakan Buruh Oleh Pemerintah Orde Baru

Koalisi antara militer dan borjuasi mengembangkan strategi pembangunan yang tidak mengikutkan buruh. Sejak awal terbentuknya koalisi ini kehendak untuk menyingkirkan buruh dari arena sosial politik sangat kuat. Konflik antara Angkatan Darat dengan PKI, SOBSI dengan SOKSI, SOBSI dengan pengusaha dan SOBSI dengan militer yang menduduki jabatan manager perusahaan yang dinasionalisasi sepanjang tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, telah menempatkan militer berhadapan langsung dengan buruh. Kekuatan agama, terutama Islam yang sejak awal tahun 1920-an bertikai dengan kaum komunis termasuk dengan SOBSI dan BTI, menambah antipati kekuatan Orde Baru terhadap buruh yang diidentikkan

dengan kaum kiri. Oleh sebab itu sejak awal Orde Baru, dikampanyekan hubungan perburuhan yang ramah dan bersahabat. Para tokoh buruh secara terus menerus memproduksi wacana mengenai perubahan jaman, perubahan paradigma hubungan industrial, di mana buruh dan majikan adalah dua pilar pembangunan yang saling bergantung.

Pemerintah melakukan restrukturisasi semua organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik. Tujuan restrukturisasi adalah untuk membentuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang tanggap dengan keinginan pemerintah pusat dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah. Partai-partai politik dipaksa untuk melakukan fusi dengan kepemimpinan yang harus disetujui oleh pemerintah. Demikian pula semua organisasi kemasyarakatan direstrukturisasi untuk dikendalikan kepentingan-kepentingannya, sehingga tidak menjadi kekuatan yang melawan pemerintah. Dasar dari penataan tersebut adalah pemikiran bahwa massa harus dijauhkan dari proses politik sehari-hari, sebab secara ekonomi dan politik hanya memboroskan. Keikutsertaan massa dalam politik cenderung merusak tatanan sosial kemasyarakatan, seperti harmoni, kerjasama dan gotong royong. Desain seperti itu sesuai dengan kehendak para pendukung Orde Baru khususnya militer dan borjuasi (Liddle, 1992:95).

Meskipun gagasan massa mengambang pada awalnya hanya ditujukan kepada kaum buruh dan tani di pedesaan yang merupakan mayoritas rakyat, dalam perkembangannya diberlakukan pula di kota-kota. Semula pemerintah masih memberi ruang gerak kepada mahasiswa sebagai kekuatan sosial. Gerakan mahasiswa dianggap merupakan suara kaum intelektual yang tidak memiliki akar massa, sehingga perlu didengar. Apalagi koalisi pemenang pertarungan 1966

termasuk di dalamnya mahasiswa. Oleh sebab itu ketika Gerakan mahasiswa 1970-1971 yang mempersoalkan pemilihan umum dan korupsi, Presiden mengundang para aktivis mahasiswa untuk berdialog. Demikian pula ketika para mahasiswa mempertanyakan proyek-proyek pembangunan yang tidak pro rakyat, seperti pembangunan TMII dan strategi pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, ditanggapi oleh Pemerintah dengan mengubah Trilogi Pembangunan yang mengedepankan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tetapi gerakan mahasiswa 1978 yang mempersoalkan kekuasaan Presiden dan kritik-kritik mahasiswa terhadap pembangunan yang menggunakan teori ketergantungan, segera dipukul oleh tentara dengan tuduhan komunis/PKI¹⁶.

Gagasan massa mengambang juga dimaksudkan untuk menciptakan kepasipan politik rakyat. Akar dari kepasipan massa dapat dilacak pada teori-teori perkembangan kapitalisme. Berkat bantuan teknologi, kapitalisme industri telah membangkitkan kekuatan produktif terbesar dalam sejarah umat manusia (Proposisi 1 Berger, 1990:48). Produktivitas yang tinggi telah memungkinkan perluasan dan pendalaman pasar sekaligus, khususnya ke Negara Berkembang. Para buruh yang dalam teori Marx menjadi tumpuan perubahan, telah menikmati kemakmuran dan akan terus menikmati kemakmuran, sehingga tidak tertarik lagi dengan perubahan. Selain faktor tersebut kemampuan kapitalisme memodifikasi dengan menjual saham

¹⁶Teori ketergantungan digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru sesungguhnya sudah sejak tahun 1973/1974. Tetapi oleh Pemerintah belum dianggap serius sebab inti dari gerakan mahasiswa tahun 1973/1974 adalah persaingan antara para Asisten Pribadi (Aspri) Presiden yang diwakili oleh Brigadir Jenderal Ali Moertopo dan Pangab/Pangkopkamtib Jenderal Soemitro. Pada gerakan mahasiswa tahun 1978 isu utamanya adalah ketimpangan pembangunan dan peranan besar lembaga keuangan internasional dalam pembangunan Indonesia. Guna mengurangi ketergantungan tersebut perlu mencari pemimpin alternatif. Mulai tahun 1978 ini gerakan mahasiswa dihadapi dengan keras oleh tentara. Digunakannya teori ketergantungan untuk melancarkan kritik, dijadikan alasan oleh militer bahwa "sisa-sisa PKI sedang menyusup ke berbagai elemen, termasuk mahasiswa untuk membangun kekuatannya kembali. Semua pihak harus mewaspadai bahaya laten komunis yang ada di bawah tanah".

kepada para buruh misalnya, telah mengintegrasikan kepentingan buruh dengan pengusaha. Kemakmuran telah menyebabkan kepasipan buruh dan tidak tertarik pada pergerakan.

Dalam kasus Indonesia di awal Orba, kepasipan massa jelas bukan produk dari kemakmuran, tetapi ketakutan dan kontrol ketat dari militer dan birokrasi. Pembunuhan massal, penangkapan dan pengembirian hak sosial ekonomi dan politik warga negara, telah membuat siapapun takut untuk membangun suatu gerakan. Gagasan untuk menciptakan kepasipan massa dengan tujuan menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dilatarbelakangi pemikiran bahwa rakyat masih bodoh, miskin dan terbelakang, sehingga mudah dihasut. Pemikiran demikian sangat dominan di kalangan petinggi militer dan intelektual pendukung Orde Baru. Pemikiran ini tentu bertolak belakang dengan realitas, sebab gerakan sosial yang bertujuan memulai suatu perubahan, menawarkan pemikiran alternatif telah sangat mengakar dalam budaya politik Indonesia. Tahun 1920-an ketika hampir semua penduduk masih buta huruf, telah bangkit gerakan sosial di Solo, Jogjakarta dan Surabaya. Justru adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat gerakan-gerakan sosial berkembang luas di Indonesia sejak awal tahun 1940-an.

Retrukturisasi dimaksudkan untuk menciptakan tertib politik. Penataan struktur politik mencakup birokrasi sipil yang terkendali, merampingkan struktur Angkatan Bersenjata, mendesain lembaga perwakilan yang tanggap dengan kehendak eksekutif, penyederhanaan partai politik, membangun perwakilan kepentingan korporatis dan membangun kantor kepresidenan yang kuat (Mas'ood, 1989:150). Dalam hal menciptakan perwakilan kepentingan korporatis, pegawai negeri dan buruh memperoleh perhatian utama. Hal demikian disebabkan keinginan dari

eksekutif untuk menggunakan birokrasi sipil sebagai kekuatan penggerak utama (prime mobile) program-program pembangunan. Pemerintah Orde Baru antipati terhadap partai politik. Lembaga ini dituduh merusak tatanan, penyebab ketidakstabilan dan konflik serta hanya mengejar kepentingannya sendiri (Liddle, 1992:95-97), oleh sebab itu Orde Baru tidak akan bekerjasama dengan partai-partai yang ada. Untuk dapat mengendalikan birokrasi, Pemerintah pertama-tama membebaskan birokrasi dari pengaruh partai khususnya Partai Nasional Indonesia (PNI).

Pada tahun 1967, Menteri Dalam Negeri mendirikan Kokarmendagri (Korps Karyawan Departemen Dalam Negeri). Tujuannya membangun loyalitas karyawan Depdagri hanya kepada pemerintah. Karyawan yang melanggar diminta mengundurkan diri. Memperhatikan efektivitas Kokarmendagri, pada tahun 1969 sejumlah departemen mewajibkan karyawan membentuk korps karyawan dalam rangka menumbuhkan monoloyalitas. Melalui Keputusan Presiden No. 82 tahun 1971 semua Kokar dipersatukan dalam wadah KORPRI. Tujuannya "menghilangkan kesetiaan pegawai negeri kepada partai-partai politik dan membina kesetiaan tunggal para pegawai negeri kepada negara RI" (Moertopo, 1975:8). Dengan terbentuknya KORPRI, kekuatan utama buruh telah berhasil dikendalikan. Pembentukan KORPRI ini disertai dengan pengelolaan uang untuk proyek-proyek pembangunan. Untuk pertama kalinya birokrasi sipil mengelola uang dalam jumlah yang sangat besar. Sebab itu, monoloyalitas tidak sulit diwujudkan. Apalagi implikasi dari tuntutan taat pada komando Pusat, sejumlah Departemen dan Pemerintah Daerah kemudian diisi oleh perwira-perwira militer yang pangkatnya disesuaikan dengan posisinya. Sejumlah posisi penting termasuk di dalamnya inspektur jenderal, ditempati militer,

sehingga menjamin efektivitas pengawasan dan komando Pusat. Depolitisasi pegawai negeri telah berhasil menjauhkan para pegawai dengan partai politik dan serikat-serikat buruh.

Langkah penataan kemudian meluas ke serikat-serikat buruh yang masih eksis. Di sini perlu dikemukakan kembali hubungan kuat antara SOKSI, militer dan BKS Bumil pada tahun 1960-an. Setelah SOBSI dihancurkan, semua serikat buruh melakukan introspeksi dan mengikuti politik militer. Sekretariat bersama Golkar dengan KONGKARBU memainkan peranan penting dalam komunikasi antar serikat buruh yang masih eksis, terutama KBKI, SOB Pantjasila, SOKSI, PGRI, PSPN serta SOBRI yang berafiliasi dengan Murba (David Revee, 1985:284). Kepemimpinan militer sangat menonjol pada awal Orde Baru, sehingga hampir semua inisiatif dan tindakan memerlukan persetujuan militer. Meskipun para serikat buruh di luar SOBSI telah mendekat ke Golkar dan SOKSI, tidak satunya militer mengakibatkan terjadinya faksi-faksi. Dalam menggagas serikat buruh tunggal bersaing para tokoh militer yang duduk dalam Golkar-SOKSI dengan Opsus. Semula faksi-faksi ini berhasil diredam dalam Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI). Tujuan KABI adalah membersihkan seluruh gerakan buruh di Indonesia dari orang-orang komunis termasuk pemikiran komunis dan membantu tegaknya Orde Baru¹⁷.

Peranan organisasi buruh internasional dalam membangun format organisasi buruh Indonesia di awal tahun 1970-an, tidak kecil. Sejak tahun 1968, ICFTU terlibat secara aktif dalam menyelenggarakan seminar perburuhan. Seminar ini menjadi arena konflik antara Golkar dan Opsus. Jenderal Sukowati sebagai Ketua Sekber Golkar

¹⁷ Wawancara dengan Agus Sudono September 2006. Pada awal tahun 1970-an Agus Sudono yakin bahwa tegaknya Orde Baru akan meningkatkan kesejahteraan buruh, sebab tujuan ekonomi Orde Baru dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan buruh.

berusaha mengembangkan sayap buruh dalam Golongan Karya. Ia antara lain berhasil mempengaruhi konferensi ICFTU dan Serikat-Serikat Buruh Indonesia Oktober 1968 dengan terbentuknya BAKERPROBI. Badan baru ini mendapat tantangan keras dari SOKSI /KONGKARBU yang mempunyai tujuan sama untuk menjadi satu-satunya wadah bagi buruh dalam Golkar. Oleh sebab itu ketua KONGKARBU/SOKSI, Adolf Rachman menolak pelaksanaan konferensi tersebut dengan alasan campur tangan asing dalam perburuhan di Indonesia¹⁸. Tetapi Adolf Rachman akhirnya bersedia menyetujui konferensi tersebut setelah diyakinkan oleh para tokoh Golkar, terutama Suhardiman. Adolf Rachman yang dibujuk untuk menjadi penghubung antara Golkar dan serikat-serikat buruh lain guna menggalang kekuatan dalam rangka membentuk serikat buruh tunggal di bawah Golkar, akhirnya bersedia menerima BAKERPROBI¹⁹.

Krisis ekonomi pada tahun 1960-an, menyebabkan banyak serikat buruh bergantung pada bantuan luar negeri. ICFTU merupakan serikat buruh Amerika Serikat yang aktif memberi bantuan, terutama kepada serikat buruh yang anti komunis. Konflik mengenai bantuan keuangan ini menyebabkan tidak solidnya sayap Golkar dalam memimpin gerakan buruh pasca 1965. SOKSI kehilangan kendali atas bantuan asing dan hanya mengandalkan bantuan dari perusahaan-perusahaan perkebunan yang dipimpin militer. Sebaliknya BAKERPROBI mendapat bantuan ICFTU. Usaha Marsekal Mursalim sebagai Menteri Tenaga Kerja untuk mengendalikan bantuan keuangan dari serikat buruh internasional, menyebabkan Menaker tidak sepenuhnya mendukung BAKERPROBI. Untuk menandingi BAKERPROBI, Menaker Mursalim mengusulkan agar semua serikat buruh bersatu

¹⁸ *Angkatan Bersendjata* 21 Oktober 1968.

¹⁹ Wawancara dengan Suhardiman Januari 2007.

dalam wadah yang dia sebut Majelis Buruh Indonesia (MBI). Gagasan ini diterima oleh semua serikat buruh. Pada November 1969 MBI diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan sedikit perubahan nama, Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). Anggota MPBI terdiri dari 21 serikat buruh, antara lain Gasbiindo (Islam-Masyumi), KUBU Pantjasila (di bawah militer), PGRI, Kongkarbu (di bawah Golkar), GOBSI (Islam), KBM (nasionalis-PNI), Sarbumusi (Islam-NU), KBIM (Islam- Masyumi), SB Pos, Telegraf dan Telekomunikasi, Perkabi (KOSGORO-Golkar), Kespekri (Kristen-Parkindo), FBI (Islam), Porbisi (Islam), KBKI (nasionalis-PNI), SOB-Pantjasila (Katolik-Partai Katolik), SOBRI (Sosialis-MURBA), Gerbumi (Islam), GSBI (Sosialis), IKM (Islam), KBSI (Sosialis) dan Kekarbu (MKGR-Golkar).

Tarik menarik antara Golkar dan Opsus untuk saling mengendalikan serikat buruh tunggal, sangat dirasakan oleh para aktivis buruh. MPBI praktis hanya merupakan tempat diskusi para aktivis buruh dan tidak memiliki agenda jelas untuk menjadi sebuah kekuatan buruh (Sukarno, 1979: 8). Penyebab utamanya adalah pengaruh para jenderal dalam tubuh Orde Baru yang ingin saling menonjol dan ikatan serikat-serikat buruh lama dengan partai masih sangat kuat. Menurut Soewoso (KBKI) dan Munir (Gasbiindo), sulit mengendalikan serikat buruh lama jika partai politik tidak dihancurkan²⁰. Akhirnya dilakukan paksaan fusi partai-partai politik menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Arsitek dari fusi tersebut adalah Ali Moertopo yang sejak awal memiliki agenda menata partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Baik partai politik maupun ormas diberlakukan massa mengambang untuk mencegah bangkitnya gerakan sosial

²⁰ Wawancara dengan Soewoso Agustus 2005 dan dengan Munir Maret 2006.

yang *genuine* dan kepemimpinan yang mengakar. Lebih lanjut massa mengambang untuk menghancurkan struktur kaderisasi di luar kehendak militer.

Pada tanggal 21 – 28 Oktober 1971 diselenggarakan Seminar oleh MPBI yang tidak melibatkan ICFTU, tetapi menggandeng Friedrich Ebert Stiftung (FES), sebuah organisasi buruh di Jerman Barat yang berafiliasi dengan Partai Sosial Demokrat. FES mempunyai misi untuk membangun gerakan buruh yang memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan buruh. Pembaharuan gerakan buruh yang lebih peduli pada kesejahteraan, menjadi komitmen FES. Sebab itu dalam seminar tersebut digagas bagaimana pembaharuan gerakan buruh dalam arti lebih memfokuskan pada usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh²¹. Agus Sudono menyampaikan pemikiran bahwa gerakan buruh yang sehat, kuat, demokratis, bebas dan bertanggung jawab mempunyai tugas mencapai perbaikan nasib buruh sekaligus menciptakan kesejahteraan umum yang adil dan merata melalui pembangunan sosial ekonomi (Sudono, 1981:16-17). Guna mencapai gerakan buruh yang demikian, perlu dilakukan perubahan mendasar, yaitu:

1. Gerakan buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun. Dengan perkataan lain harus merupakan gerakan buruh murni (*pure trade union*).
2. Di bidang keuangan harus tidak tergantung kepada sumber dana di luar organisasi buruh. Intensifikasi pemungutan iuran harus dilakukan antara lain dengan sistem *check-off*.
3. Serikat buruh-serikat buruh yang ada harus ditata kembali dan dipersatukan melalui pendekatan-pendekatan satu sama lain atau melalui undang-undang sebagai salah satu sarana “social engineering”, yaitu dengan mengeluarkan undang-undang perserikatan buruh (*Trade Union Act*).
4. Struktur gerakan buruh Indonesia harus dirombak, yaitu untuk setiap lapangan pekerjaan hanya ada satu organisasi buruh, serikat buruh lapangan pekerjaan (*industrial union*). Kemudian industrial union ini diikat dalam satu wadah, yaitu Kongres Serikat-Serikat Buruh Indonesia/ Federasi Serikat-Serikat Buruh Indonesia.

²¹ Wawancara dengan Agus Sudono

Sudono mengakui bahwa usaha mewujudkan gagasannya itu merupakan kerja sangat keras, sebab kultur gerakan buruh Indonesia sarat dengan muatan politik. Ia mengakui sulit memisahkan gerakan sosial buruh dengan gerakan politik. Gerakan buruh yang lahir di masa kolonial sarat dengan muatan politik dengan kandungan ideologi sosialis. Tetapi pembaharuan gerakan buruh awal tahun 1970-an yang dia pelopori memiliki momentum yang tepat untuk meninggalkan kandungan politik dan ideologi sosialis. Momentum tersebut adalah penumpasan G30S/PKI, strategi pembangunan yang melibatkan modal asing dan pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang yang anti sosialisme dan komunisme.

Pemikiran Sudono tersebut menunjukkan ketergantungan para pimpinan buruh ketika itu pada Pemerintah. Misalnya, kesediaan Sudono dan kawan-kawan untuk mengubah format gerakan buruh yang telah bertahun-tahun mereka perjuangkan. Diperlukannya undang-undang yang hanya mengakui satu serikat buruh, berarti menyerahkan kepada Pemerintah untuk mengatur serikat buruh, sesuatu yang telah bertahun-tahun ditolak oleh para pemimpin buruh. Demikian pula dengan gagasan untuk membangun serikat buruh berdasarkan lapangan industri (*industrial union*), menunjukkan akan tamatnya sejarah gerakan buruh Indonesia. Lebih khusus lagi tamatnya gerakan buruh dalam arti yang sesungguhnya, yaitu gerakan buruh yang berbasis pada gerakan massa.

Persaingan Sudono dan Adolf Rachman (SOKSI) segera mengemuka setelah seminar yang difasilitasi oleh FES Oktober 1971 tersebut. Kedekatan Agus Sudono dengan kelompok OPSUS telah memungkinkan ide-idenya sejalan dengan kelompok tersebut (Hadiz, 1996:12). Sudono menghendaki dirombaknya struktur serikat buruh, di mana untuk setiap lapangan pekerjaan hanya ada satu serikat buruh. Kemudian

industrial unions ini diikat dalam satu wadah, apakah itu berbentuk “kongres” atau “federasi” (lihat no. 4 di atas). Sebaliknya, Adolf Rachman menghendaki pembentukan suatu organisasi tunggal yang lebih longgar yang tidak mematikan serikat buruh lama. Bentuk “konfederasi” dia tawarkan di mana serikat buruh lama yang kuat dapat bertahan melalui proses “seleksi alamiah”. Menurut idenya hanya serikat buruh yang mempunyai anggota paling banyak dalam suatu perusahaan yang akan dibiarkan hadir. Akhirnya hanya serikat buruh yang mempunyai jumlah anggota paling banyak yang dapat diterima dalam konfederasi. Serikat-serikat buruh kecil akan dipaksa membubarkan diri atau bergabung dengan yang lebih besar. Dengan pemikiran seperti itu, maka MPBI dapat diarahkan menjadi konfederasi. Sedangkan Rasjid St Radjamas mengusulkan tiga federasi yang mewakili Golkar, PDI dan PPP (Hadiz, 1996:12-13).

Gagasan Sudono mendapat dukungan kuat dari Opsus, sebaliknya Adolf Rachman dan Rasjid Radjamas menegaskan sikapnya dengan mengadakan Ikrar Bersama MPBI yang isinya MPBI sebagai “identitas satu-satunya wadah persatuan kaum buruh”. Ikrar yang diselenggarakan Mei 1972 tersebut dipimpin oleh Adolf Rachman dan Rasjid St Raadjamas dan diikuti oleh 21 serikat buruh, yaitu Gasbiindo, Kubu Pantjasila, PGRI, Kongkarbu, Gobsi Indonesia, KBM, Sarbumusi, KBIM, SSPTT, Perkabi, Kespekri, FHI Indonesia, Porbisi, KBKI, SOB Pantjasila, SOBRI, Gerpumi, GSBI, IKM, KSBI dan Kekarbu MKGR (Sudono, 1981: 34 Lampiran 2). Hubungan dekat Adolf Rachman dengan para pimpinan serikat buruh lama, menyebabkan ia sukar menerima perombakan serikat buruh. Meskipun dibesarkan dalam SOKSI, namun ia juga menyadari bahwa peranan serikat-serikat buruh lama sangat besar, sehingga hanya bisa dimatikan melalui seleksi alamiah.

Menyadari bahwa dukungan dari Adolf Rachman sukar diperoleh, maka Agus Sudono atas desakan Ali Moertopo menyelenggarakan pertemuan di Kantor BAKIN tanggal 20 Pebruari 1973. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh 9 orang yaitu Agus Sudono (Gasbiindo), Sofyan Hamdani (Gasbiindo), Oetoyo Oesman (SOKSI), Rasjid St Radjamas (KBM), Radjudin Jusuf (KBM), Sutanto Martoprasono (Sarbumusi), Taheransjah Karim (Sarbumusi), Sukarno (Departemen Pertanian) dan Sukijat (Departemen Dalam Negeri). Deklarasi tersebut memuat 6 pernyataan pokok, antara lain (1) bertekad bulat menyatukan organisasi-organisasi buruh, (2) penyatuan tersebut dilakukan dengan jalan penataan organisasi-organisasi buruh secara integral, (3) Gabungan serikat buruh Indonesia dalam bentuknya yang baru untuk menghimpun kaum buruh non pegawai negeri dan mewakili kaum buruh Indonesia baik nasional maupun internasional dan (4) Gabungan organisasi-organisasi buruh Indonesia akan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, bebas, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ILO²².

Deklarasi sesungguhnya tidak mendapat dukungan luas. Para ketua serikat buruh yang diundang menolak bentuk baru serikat buruh ini, sehingga hanya Gasbiindo, SOKSI, Sarbumusi dan KBM. Hal ini menunjukkan dengan jelas tidak mungkin gerakan buruh berkembang di luar kehendak pemerintah. Satu tahun kemudian, FBSI dinyatakan sebagai satu-satunya vaksentral di Indonesia hasil

²² Agus Sudono menyatakan bahwa desakan Ali Moertopo begitu kuat, sehingga para tokoh buruh yang sebelumnya telah dilobi olehnya, merasa ditinggalkan. Pada hal Sudono tetap berusaha memegang teguh komitmen para tokoh buruh. Perpecahan antar para tokoh buruh utamanya antara Sarbumusi, KBKI-KBM di satu pihak dengan Gasbiindo, SOB Pantjasila, Kespekri dan serikat buruh lainnya berhubungan dengan konsep buruh, karyawan dan kedudukan pegawai negeri sipil termasuk yang bekerja di perusahaan-perusahaan Negara. Ali Moertopo sebenarnya keberatan dengan kata "buruh" dan menghendaki kata "karyawan". Sebab itu jika para tokoh buruh tetap menggunakan kata "buruh", PNS tidak boleh dimasukkan dalam FBSI. Akhirnya keluarlah pernyataan poin 3 tersebut. *Wawancara dengan Agus Sudono September 2006.*

peleburan oleh Depnakertranskop. Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. PER-01/MEN/-1975 tentang Pendaftaran Organisasi Buruh, yang intinya membatasi (melarang) berdirinya organisasi buruh di luar FBSI,²³ gerakan buruh di Indonesia telah tamat. FBSI sesuai dengan proses pembentukannya dan orang-orang yang duduk di dalamnya, lebih merupakan sarana pengendalian buruh bagi Pemerintah.

Tersisihnya Adólf Rachman yang merupakan tokoh SOKSI dan Kongkarbu / Golkar, mengindikasikan kalah kuatnya gerakan ini dibanding OPSUS. Sejak awal tahun 1960-an, SOKSI menjadi alat militer untuk melawan SOBSI. Tetapi awal tahun 1970-an ketika penataan organisasi buruh dilakukan, militer terpecah dalam beberapa faksi. Selain faksi dalam Golkar, juga terdapat faksi yang lebih radikal di bawah Jenderal HR Dharsono yang menghendaki pembaharuan politik menjadi sistem Dwi partai (Mas'ood, 1989; Chrouch, 1988). Faksi lainnya adalah sekelompok perwira tinggi di bawah Jenderal Soemitro dan yang paling berpengaruh saat itu adalah faksi militer yang tergabung dalam Aspri dan OPSUS. Gasbiindo yang dekat dengan OPSUS lebih mendapat dukungan, sehingga beberapa tahun kemudian berhasil membawa Agus Sudono sebagai Ketua FBSI dan anggota DPR mewakili Golkar. Pada hal Agus Sudono adalah kader SBII/Gasbiindo, Masyumi dan sebagai salah satu pendiri Parmusi (Sudono, 1999: 74-75). Latar belakang seperti ini tentu sulit diterima oleh SOKSI dan Golkar. Namun ada faktor lain, yaitu dukungan ICFTU yang sejak tahun 1950-an bekerjasama dengan Gasbiindo dan mengenal

²³ Pasal 1 b Peraturan tersebut menyatakan Serikat Buruh adalah suatu organisasi yang didirikan oleh dan untuk buruh secara sukarela, berbentuk kesatuan dan mencakup satu lapangan pekerjaan yang disusun secara vertical dari Pusat sampai Unit Kerja. Pasal 2 menyatakan bahwa yang dapat didaftar di Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, ialah organisasi buruh yang berbentuk organisasi buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 c yang mempunyai pengurus daerah sekurang-kurangnya di 20 daerah Tingkat I dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 15 serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.b.

dekat Sudono yang juga menjadi salah satu ketua ICFTU. SOKSI yang bergabung dalam WLC yang lebih banyak dikuasai oleh serikat buruh kristen, dinilai kurang kuat dalam menarik investor asing. Ketokohan Sudono di dunia perburuhan juga lebih unggul dibanding para saingannya. Faktor-faktor itulah yang menghantarkan Sudono memimpin FBSI.

Meskipun terdapat beberapa pemikiran tentang pembaharuan sistem politik, dalam hubungannya dengan gerakan buruh, militer mempunyai visi yang relatif sama yaitu perlunya organisasi buruh tunggal, taat pada komando militer dan tidak mengganggu investasi. Sebagai organisasi buruh tetap diijinkan, tetapi sebagai gerakan buruh – dicegah dengan berbagai cara. Pencegahan ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang tenang. Untuk itu konsep hubungan industrial yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan konflik khususnya konflik kelas antara majikan dan buruh, diubah menjadi Hubungan Perburuhan Pancasila. Pidato Presiden di DPR 16 Agustus 1973 menekankan “Dalam alam Pancasila tidak ada tempat bagi sikap saling berhadap-hadapan atau penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah”.

Penataan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti di atas oleh Schmitter (dalam Mas'oed, 1989:12) disebutnya korporatisme negara. Menurut Schmitter korporatisme adalah:

“suatu sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan), tidak saling bersaing, diatur secara hirarkis; yang diakui atau diberi ijin (kalau tidak diciptakan sendiri) oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan mematuhi pengendalian-pengendalian tertentu dalam pemilihan pimpinan mereka dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan”.

Konsep tersebut dinilai oleh Mas'ood terlalu lunak sebab dalam prakteknya di Indonesia dilakukan dengan penindasan. Oleh sebab itu konsep di atas dilanjutkan dengan kalimat “dengan tujuan menindas konflik kelas dan kelompok kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan dan kerjasama dalam hubungan antara negara dan masyarakat” (Mohtar Mas'ood, 1989:13). Pembentukan organisasi-organisasi tunggal dalam suatu bidang kehidupan dimaksudkan untuk menindas konflik kelas, sesuatu yang sangat dibenci oleh militer dan borjuasi.

Penindasan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya konflik kelas dan gerakan buruh, berhasil dicapai. Tetapi tujuan lain seperti menciptakan keselarasan, kesetiakawanan dan kerjasama dalam hubungan buruh-negara, tidak berhasil dicapai. Dengan menggunakan konsep Alfred Stepan (1978), Hadiz (1996; 1997, 2004) menyebut penataan seperti itu sebagai korporatisme eksklusiver, bukan korporatisme negara. Sebab penataan oleh pemerintah Orde Baru bercirikan usaha-usaha kelompok elite dalam masyarakat untuk meredam dan mengubah bentuk (*deactivate and restructure*) “kelompok-kelompok kelas pekerja yang menonjol” melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat koersi. Korporatisme eksklusiver berbeda dengan korporatisme inklusiver yang bercirikan akomodasi dan inkorporasi kelompok-kelompok tersebut oleh negara. Dengan mencermati kekuatan gerakan, maka model tersebut akan memilih pada gerakan yang kuat untuk dikooptasi dan yang lemah untuk direpresi.

Tetapi mengkaji dengan seksama hubungan gerakan buruh di Indonesia dan negara, terdapat faktor lain yang tidak mungkin dipilih oleh negara Orde Baru, yaitu gerakan buruh dan gerakan sayap kiri lainnya. Jadi koersi negara terhadap gerakan buruh lebih dari kepentingan kapitalisme dan tahap perkembangan kapitalisme.

Meskipun harus diakui bahwa keterlambatan industrialisasi di Indonesia turut mempersulit gerakan buruh. Namun dalam hubungan negara dan gerakan buruh, negara merupakan alat militer dan borjuasi untuk merepresi buruh. Sebab itu sejarah Orde Baru adalah sejarah penindasan terhadap buruh dan gerakan kiri lainnya. Sejak militer aktif dalam perusahaan pertengahan tahun 1950-an dan kerjasama para perwira dengan pengusaha Cina, militer mempunyai agenda melenyapkan gerakan buruh yang radikal atau buruh yang tidak patuh pada militer. Kekuatan buruh bukan dipandang sebagai kekuatan produktif yang mampu menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam mengakumulasikan kapital, tetapi kekuatan yang harus patuh pada pengusaha. Sebab keberadaan buruh berkat jasa baik pengusaha. Pandangan demikian terlihat jelas dalam konsep Hubungan Perburuhan Pancasila.

Oleh sebab itu penjelasan tindakan represif negara Orde Baru terhadap buruh dengan mengikuti argumen korporatisme, tidak tepat. Pembantaian kaum kiri Indonesia oleh militer yang mendahului industrialisasi, merupakan penuntasan dendam dan persaingan sejak tahun 1950-an. Militer sebagai pemenang memerlukan pembenaran. Pembenaran tersebut diletakkan pada kebutuhan untuk “mengalihkan rakyat dari ikatan ideologi yang sempit kepada usaha-usaha pembangunan”. Oleh sebab “pembangunan memerlukan ketenangan, keselarasan dan harmoni yang merupakan kepribadian bangsa”, maka kekuatan kiri yang “mengganggu jalannya pembangunan”, harus ditindas. Bukan hanya “gerakan buruh yang menonjol” seperti konsep korporatisme eksklusiver yang diredam dan dikendalikan, tetapi semua gerakan buruh. FBSI yang diakui sebagai satu-satunya organisasi buruh oleh pemerintah Orde Baru, bukanlah suatu gerakan. Dilihat dari proses pembentukannya, orang-orang yang duduk di dalamnya dan aktivitasnya, FBSI tidak menunjukkan

tantangan kolektif yang memposisikannya sebuah gerakan sosial (buruh). Bahkan syarat minimal sebuah gerakan yang diarahkan untuk melakukan suatu perubahan, tidak dipenuhi oleh FBSI.

BAB VII
INDUSTRIALISASI: DARI
PENGENDALIAN KE
PERLAWANAN BURUH

BAB VII

INDUSTRIALISASI: DARI PENGENDALIAN KE PERLAWANAN BURUH

A. Pengendalian Gerakan Buruh dalam Rangka Industrialisasi

Strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan. Trilogi ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam pelaksanaannya logi pertama dan kedua yang sangat menonjol, sementara logi ketiga jarang dibicarakan secara serius. *Pertumbuhan* dan *stabilitas* merupakan kata kunci dalam pemerintahan Orde Baru. Tidak ada pembangunan tanpa keduanya. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin tertinggi Orde Baru, Presiden Soeharto merekrut teknokrat dan ahli-ahli ekonomi untuk menyusun rencana pembangunan, merekrut militer sebagai tulang punggung penjaga stabilitas dan menggunakan birokrasi sebagai pelaksana pembangunan (Liddle, 1992: 102). Ketiga kekuatan ini menjalin kerjasama yang saling menopang, dengan Presiden Soeharto menjalankan fungsi keseimbangan. Sering kali terjadi friksi antara pendukung nasionalisme ekonomi dan pendukung liberalisasi, namun Soeharto masih mampu mengendalikan situasi sampai akhirnya menyerah pada tahun 1998.

Stabilitas nasional oleh para pendukung Soeharto dipahami sebagai kelangsungan pemerintahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak terjadinya gejolak sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban (Moertopo, 1981:33). Pengawasan dan pengendalian terhadap kekuatan-kekuatan asing dan dalam negeri yang potensial mengganggu jalannya pembangunan, dilakukan secara kontinyu oleh militer melalui pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI. Militer melalui lembaga-lembaganya seperti Kodam, Kodim, Koramil, KOPKAMTIB, BAKIN dan BAIS,

serta lembaga-lembaga sipil yang diintervensi oleh militer, melakukan kontrol secara ketat terhadap aktivitas masyarakat. Kecuali dengan mengendalikan massa melalui pembentukan organisasi korporatis, pemerintah melalui tangan-tangan militer juga secara aktif mengawasi perilaku masyarakat sampai ke tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Konsep RT/RW bentukan Jepang ini dihidupkan kembali oleh Ali Moertopo mengingat potensinya yang besar dalam mengendalikan massa. Melalui instrumen tersebut, perilaku masyarakat dipantau oleh pihak keamanan dari hari-ke hari.

Konsep massa mengambang dan strategi pengendalian massa di atas, terbukti efektif menjaga stabilitas nasional selama hampir tiga dasawarsa. Di bidang perburuhan, militer menempatkan sejumlah personilnya dalam serikat buruh mulai dari unit kerja (perusahaan) sampai DPP FBSI. Di unit kerja, militer atau pensiunan militer bertindak sebagai kepala personalia, kepala keamanan lapangan atau pabrik. Posisi ini memberinya wewenang untuk mengontrol setiap buruh yang akan masuk kerja dan pulang kerja¹. Di perusahaan yang mempekerjakan buruh perempuan, kontrol (pemeriksaan/penggedahan) yang dilakukan oleh petugas keamanan yang hampir semua laki-laki, sering menempatkan buruh perempuan sebagai obyek. Di level yang lebih tinggi, yaitu di tingkat basis, kepengurusan SPSI tidak terlepas dari kontrol militer. Jika bukan militer yang menjadi salah satu ketua, militer atau pengusaha menempatkan orang-orangnya untuk memimpin SPSI. Demikian pula di level yang lebih tinggi, seperti DPC dan DPW. Di masa Soedomo sebagai Menteri

¹ Wawancara dengan M. Rodja, Ketua SPSI Reformasi Nopember 2006. HM Rodja memulai profesinya sebagai pengacara masalah-masalah perburuhan. Dari sini ia terlibat aktif memperjuangkan para buruh yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan. Ia juga aktif dalam kepengurusan SPSI di wilayah Jakarta dan menjadi anggota DPRD mewakili PPP (1987 – 1997). Tahun 1998 mendirikan SPSI Reformasi.

Tenaga Kerja dikeluarkan SK Nomor 342/1986 tentang Penanganan Perselisihan Industrial yang melegalisasi militer dan polisi turut serta dalam menangani perselisihan industrial, mulai dari tingkat pabrik sampai tingkat propinsi.

Pengendalian yang lebih sistematis dilakukan melalui pembentukan FBSI/SPSI. Pengendalian dilakukan mulai dari menyeleksi orang-orang yang akan duduk sebagai pengurus SPSI. Dalam kasus-kasus tertentu, kepengurusan SPSI dibentuk secara sepihak oleh pengusaha dengan tujuan untuk memuluskan terbentuknya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Para pengurus SPSI di tingkat kabupaten atau kota, dikendalikan dalam kerangka Golongan Karya, demikian seterusnya sampai ke DPP Pusat. Sedangkan pengendalian secara langsung dilakukan melalui pertemuan konsultasi antara pengurus SPSI, APINDO dan Muspida setempat². Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang jauh lebih besar seperti ini, para buruh tidak memiliki kekuatan sama sekali. Di tingkat pusat, Dewan Pengupahan, Dewan Produktivitas juga bertindak sebagai sarana pengendalian buruh.

Mekanisme lain dari pengendalian buruh adalah dengan menerapkan konsep Hubungan Perburuhan Pancasila yang kemudian diubah menjadi Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Prinsip-prinsip pokok dari HIP adalah sebagai berikut (Sukarno, 1979:67-69). Pertama, prinsip kerjasama antara pekerja dengan pengusaha, yaitu parner dalam produksi (*partner in production*). Buruh sebagai pemilik tenaga kerja memiliki kewajiban untuk meningkatkan produksi. Sebagai imbangannya ialah parner dalam keuntungan (*partner in profit*), yaitu pengusaha sebagai pemilik modal wajib membagi keuntungan kepada para pekerjanya dalam bentuk upah yang layak, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja. Kedua, azas tanggung jawab (*partner in*

² Wawancara dengan H.M. Rodja Nopember 2006

responsibility). Azas ini mengandung dua segi, yaitu para buruh bertanggung jawab dalam mewujudkan kemajuan perusahaan, sebagai imbangannya pengusaha bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan buruh. Ketiga, mawas diri. Azas ini perlu dilakukan oleh ketiga pelaku dalam HIP yaitu, buruh, pengusaha dan pemerintah. Baik buruh, pengusaha dan pemerintah dituntut oleh konsep HIP mawas diri guna mengetahui seberapa besar ketiganya telah berperan dalam membangun *industrial peace*.

Implementasi konsep HIP dalam hubungan perburuhan lebih merupakan alat bagi pemerintah dan pengusaha untuk melegalisasi berbagai pelanggaran, baik mengenai upah, jam kerja, jaminan sosial dan menghindarkan konflik industrial dengan bersandar pada ideologi HIP. Instrumentasi nilai-nilai kultural tradisional bagi legitimasi otoritas seperti itu dilakukan secara luas dengan penerapan P-4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Nilai kultural dipaksakan untuk menciptakan kepatuhan kepada otoritas, baik politik (militer/Pemerintah) maupun ekonomi (pengusaha). Ideologi harmoni dalam hubungan industrial lebih berfungsi sebagai kontrol para pekerja (Susetiawan, 2000:78). Berbagai pelanggaran tentang upah dan jaminan kerja, kemudian direduksi sebagai kebaikan hati para pengusaha dan pemerintah. Upah bukan lagi hak yang harus diterima oleh buruh atas sejumlah pekerjaan yang telah mereka lakukan. Demikian pula proses menjadi buruh (rekrutmen) dipahami sebagai kebaikan hati pengusaha dan pemerintah yang telah memberikan kesempatan kerja. Hubungan kerja yang diikat oleh Perjanjian Kerja dan KKB, menjadi tumpul maknanya. Jika para buruh tidak bersedia menerima ketentuan yang ditetapkan pengusaha, dipersilakan mengundurkan diri. Di sini, hubungan industrial diubah sebagai hubungan yang personal melalui unsur-unsur dalam HIP.

Pemerintah dan pengusaha dicitrakan sebagai pelindung dan pemberi kerja, sedangkan buruh ditempatkan sebagai anggota keluarga yang harus patuh kepada Pemerintah sebagai kepala keluarga.

Strategi pembangunan yang dirancang dan diterapkan oleh militer dan teknokrat, memang tidak memerlukan partisipasi buruh di dalamnya. Gerakan buruh yang efektif dipandang sebagai bertentangan dengan kepentingan nasional. Sebab itu buruh ditampilkan sebagai sosok pengganggu stabilitas dan hambatan dalam pembangunan ekonomi³. Sepanjang sejarah Orde Baru, dapat dipaparkan usaha-usaha pihak keamanan melakukan pendekatan terhadap para aktivis untuk menyetujui konsep massa mengambang, partisipasi minim dari masyarakat dan dominasi militer dalam politik Indonesia. Sejak tahun 1966 sampai terbentuknya FBSI, tidak ada gerakan buruh yang serius melakukan mobilisasi. Tetapi protes-protes sporadis berlangsung di berbagai tempat. Terlebih-lebih setelah peristiwa Januari 1974, pemogokan-pemogokan kecil berlangsung di beberapa perusahaan di Bekasi, Pulo Gadung dan Tangerang. Kerusuhan, riot atau huru-hara adalah gerakan sosial yang tidak terorganisasi dan cenderung anomik. Sebagai sebuah perilaku anomik, ia juga tidak memiliki kepemimpinan, ikatan sosial dengan struktur yang mapan dan cenderung menyembunyikan identitas kolektif. Tindakan demikian muncul dalam masyarakat yang dikontrol ketat oleh aparat keamanan dan diperlakukan secara mengambang. Menurut laporan ILO, selama 1967-1977 berlangsung 60 kasus pemogokan terutama di industri tekstil (INDOC, 1981). Persoalan upah dan jaminan sosial paling dominan dalam kasus tersebut yang menunjukkan strategi industrialisasi lebih pro pengusaha dan pemerintah.

³ Wawancara dengan Dita Indah Sari Nopember 2007

Kecenderungan negara dan aparatusnya menguasai bidang-bidang kehidupan masyarakat dan mendominasi proses sosial politik, juga mempunyai pembenaran teoritik. Dalam teori modernisasi, negara dipahami sebagai agen pembangunan. Tidak adanya kekuatan sosial seperti pengusaha nasional yang kuat, menempatkan negara dan aparatusnya sebagai agen utama modernisasi. Di Indonesia lingkungan kultural patrimonial turut membantu melegitimasi negara sebagai agen, beserta jargon-jargon kultural seperti mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, negara ibarat sebuah keluarga dan kepala keluarga sebagai pelindung kepentingan semua golongan. Bukan kebetulan jika para teknokrat yang direkrut oleh Soeharto akhir tahun 1960-an adalah orang-orang yang dididik dalam teori modernisasi yang ketika itu telah berkembang di Amerika Serikat.

Karya penting Huntington (1968) yang kemudian mempengaruhi para perencana pembangunan Indonesia, menekankan modernitas berdasarkan pemeliharaan yang berhasil atas stabilitas politik. Peran institusi negara adalah mencegah terjadinya kemerosotan ke dalam bentuk kerusuhan. Stabilitas harus terus ditegakkan guna menjamin kelancaran modal atau investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara kelompok masyarakat yang telah meningkat pendapatannya, akan menuntut partisipasi. Peran negara dalam hal ini adalah menciptakan kelembagaan yang berfungsi menampung partisipasi tersebut. Teori ini menyediakan pembenaran intelektual bagi berbagai tindakan negara termasuk kekejamannya dalam menjinakkan oposisi dan gerakan sosial atas nama stabilitas yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Di bawah Orde Baru, perilaku negara sangat massif. Otoriterisme yang berlangsung secara sistematis di bawah Orde Baru oleh Mohtar Mas'oe'd (1989) disebutnya otoriterisme birokratis dan korporatisme negara, meminjam dan menyempurnakan konsep dari O'Donnel dan Schmitter. Argumen pokok otoriterisme birokratis adalah pentingnya peranan pejabat (militer) dalam persoalan politik yang didukung oleh teknokrat sipil dan modal domestik maupun internasional. Proses pembuatan kebijakan publik hanya terbatas pada sekelompok kecil elit di Jakarta, sedang partisipasi masyarakat dikendalikan melalui sejumlah lembaga perwakilan kepentingan yang dibentuk untuk itu. Instrumen otoriterisme adalah struktur-struktur politik, seperti birokrasi sipil yang terkendali, Angkatan bersenjata yang padu, kantor kepresiden dan sekretariat negara yang berfungsi sebagai dapur, lembaga perwakilan yang tanggap dengan kehendak eksekutif dan sejumlah struktur korporatisme negara. Terdapat beberapa penjelasan lain, seperti kapitalisme negara dari Robison (1986; 2001) dan negara kapitalis rente dari Tornquist (1990).

Bagian ini tidak bermaksud menguji dan membandingkan akurasi teori-teori tersebut, sebaliknya ingin menggunakannya untuk menjelaskan munculnya negara kapitalis Indonesia dan kepentingannya yang terus menerus menekan gerakan sosial (buruh). Oleh sebab itu argumen teori-teori kemunculan negara kapitalis Indonesia dan penetrasinya terhadap buruh akan dikutip untuk mendukung argumen dalam bab ini, bahwa industrialisasi yang dilakukan dengan mengebiri hak-hak buruh dan mengistimewakan para pejabat negara dan pengusaha, telah membentuk arena gerakan sosial buruh.

Dalam wacana sosial politik Indonesia senantiasa terdapat asumsi bahwa negara adalah pelindung kepentingan umum. Konsep tersebut secara implisit

disinggung dalam konstitusi, sehingga para pejabat sering menyebut “berdasarkan konstitusi”. Sampai tingkat tertentu, hal ini merupakan warisan perjuangan kemerdekaan. Pemikiran politik yang mengemuka sepanjang sejarah pergerakan kebangsaan dan masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin, tidak ditemukan gagasan membangun masyarakat kapitalis. Sebaliknya, pasar perlu diintervensi oleh negara demi keadilan sosial. Negara dituntut menjalankan peranan demikian rupa, sehingga ketimpangan sosial harus diminimalkan. Negara memiliki peranan yang sah dalam perekonomian seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Para pejabat militer dan teknokrat sipil dalam jumlah yang terbatas menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang dirancang secara bertahap. Tahapan ini dikenal sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada Pelita I dan II, pembangunan industri ditekankan pada (1) industri-industri yang mendukung dan saling terkait dengan sektor pertanian, terutama yang menghasilkan peralatan pertanian dan memproses produk-produk pertanian, (2) industri yang dapat menghasilkan atau mengemat devisa negara dengan cara memproduksi barang-barang pengganti impor, (3) industri yang relatif banyak menggunakan tenaga kerja daripada mesin. Sedangkan pada Pelita III sebagai bagian dari usaha Delapan Jalur Pemerataan, perhatian pada usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja lebih diprioritaskan di samping pembangunan industri hulu seperti kimia dan logam dasar. Mencermati arah pembangunan industri seperti di atas, terlihat adanya tahapan ke arah pendalaman industri.

Tetapi seperti ditunjukkan oleh Hadiz (2005:13) perencanaan pembangunan tidak dapat dijalankan dengan baik karena pertarungan antar kekuatan sosial yang memperebutkan arena negara. Pertarungan ini bukan antar kelas sosial, melainkan

antar faksi dalam elite politik khususnya pendukung nasionalisme ekonomi, pendukung liberalisasi dan penganut paham patrimonial. Para pendukung nasionalisme ekonomi yang berada di sekitar para jenderal seperti Ibnu Sutowo, M. Jusuf, Achmad Tirtosudiro, dan disokong oleh A.R Soehoed, Hartarto, Ginanjar Kartasasmita dan B.J. Habibie, percaya sepenuhnya bahwa negara harus menjalankan peranan dominan dalam industrialisasi. Kelompok tersebut berhadapan dengan penganjur strategi pembangunan pro pasar di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro dan koleganya dari Tim Ekonomi Orde Baru. Selain itu terdapat pula kelompok loyalis Soeharto yang tidak terlalu mempersoalkan strategi pembangunan ekonomi, tetapi lebih fokus pada kelanjutan pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto. Mereka ini berada di sekitar Sekretariat Negara di bawah kepemimpinan Soedharmono dan sebelumnya juga mencakup para Aspri Presiden.

Sampai pertengahan tahun 1980-an, kelompok pertama menikmati kemenangan. Strategi pembangunan ekonomi ditandai tiga ciri penting, yaitu pengaturan penanaman modal asing yang semakin ketat. Kedua, kebijakan industri dan perdagangan yang lebih proteksionis dan ketiga, kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah semakin berwatak intervensionis, terutama setelah peristiwa Malari 1974. Semua ini akibat diterapkannya kebijakan industrialisasi substitusi impor/ISI (Saidi, 1998:77; Tulus Tambunan, 2001:29). ISI berhasil dijalankan berkat pendapatan negara yang melimpah dari *boom* minyak. Selain dapat mengontrol jenis investasi dan industri yang akan dibangun, *boom* minyak juga memungkinkan Pemerintah dapat melaksanakan pemerataan pembangunan melalui Proyek Inpres (Sjahrir, 1992).

Pada awal tahun 1970-an, modal asing mencapai 57 persen dari seluruh investasi non migas (Palmer, 1979:51). Perkembangan sektor industri ini tergolong

pesat. Selama Pelita I pertumbuhan industri cukup mengesankan dengan menyumbang 11,8 persen produk domestik bruto. Peran sektor pertanian masih dominan dengan menyumbang 53,9 persen. Sepanjang tahun 1970-an sektor industri tumbuh rata-rata 14,9 persen per tahun. Pada tahun 1983 kontribusi sektor industri terhadap PDB meningkat menjadi 18,7 persen. Tetapi pembentukan angkatan kerja (buruh) industri sangat lambat. Hanya 7,8 persen angkatan kerja yang dapat diserap oleh sektor industri pada tahun 1971. Angka ini meningkat menjadi 8,2 persen pada tahun 1986, setelah sebelumnya 11,8 persen pada tahun 1980. Sementara pertanian masih menjadi andalan utama dengan mempekerjakan 62,0 persen angkatan kerja (Sjahir, 1992: Tabel 5 dan 7). Lambatnya pembentukan buruh industri ini disebabkan jenis industri yang dikembangkan di Indonesia adalah industri padat modal yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.

Industrialisasi di bawah bimbingan negara ini dimungkinkan oleh penghasilan minyak dan gas bumi yang meningkat tajam di pasar internasional. Pertumbuhan sektor manufaktur tertinggi terjadi pada tahun 1974 dan 1980, yakni tahun-tahun setelah kenaikan harga minyak yang besar. Di sektor industri manufaktur produksi didominasi oleh besi, baja, semen, pupuk, kimia dasar dan kayu lapis (Hal Hill, 1990:33). Jenis industri seperti ini memerlukan modal yang sangat besar. Jenis industri lain yang lebih dulu berkembang adalah minyak dan gas bumi. Pertamina sebagai perusahaan negara melakukan monopoli di sektor ini, termasuk pemasarannya. Di sektor otomotif, kepentingan para birokrat dan pengusaha Jepang memonopoli produksi dan distribusi, sehingga harga mobil tiga kali lipat di banding produk yang sama di luar negeri. Perusahaan yang padat modal lebih banyak memerlukan tenaga terampil, sehingga menyerap tenaga kerja yang terbatas. Hal ini

menghambat pembentukan kelas buruh di perkotaan. Para migran dari desa yang jumlahnya sangat besar gagal menjadi buruh di pabrik dan lari ke sektor jasa yang prematur.

Pesatnya pertumbuhan sektor industri dalam waktu yang sangat singkat dimungkinkan berkat keberhasilan pemerintah mengendalikan pengusaha dan buruh. Pengendalian pengusaha utamanya dilakukan terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia (API). Wadah formal pengusaha yang memperhatikan masalah perburuhan adalah Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia (PUSPI). Wadah ini dinilai oleh Kaskopkamtib Laksamana Sudomo kurang mampu menghadapi buruh. Sebab itu Kaskopkamtib menyarankan untuk mengubah bentuk organisasi yang lebih mencerminkan kesetupadaan pengusaha. Usul Sudomo ini ditolak oleh Ketua PUSPI Harlan Beki (*Sinar Harapan* 26 Januari 1982). Namun, ketika Sudomo menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja tahun 1983, PUSPI berhasil diubah menjadi API. Dalam perkembangannya, API berubah menjadi Apindo.

Sejak menjabat Kaskopkamtib kemudian Pangkopkamtib, Sudomo memiliki perhatian sangat besar terhadap masalah perburuhan. Dalam evaluasi tahunan mengenai masalah gangguan ketertiban, gejala perburuhan selalu menempati urutan teratas. Pada akhir September 1982 misalnya, Sudomo menyatakan bahwa gejala perburuhan bersumber dari masalah upah (71 persen). Sisanya mengenai pembentukan serikat buruh, jaminan sosial dan pemutusan hubungan kerja (*Sinar Harapan*, 27 September 1982). Sedangkan pemogokan disebutnya sebagai cara-cara komunis yang setelah kudeta 1965 bergerak di bawah tanah. Masih terjadinya pemogokan menurutnya belum dipahaminya Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) dan adanya anasir perburuhan yang mempraktekkan gaya komunis. Tidak jarang

Sudomo mengunjungi pabrik-pabrik dan menemui para buruh yang melakukan pemogokan. Kedatangan Sudomo merupakan sinyal akan keterlibatan militer dalam menyelesaikan masalah perburuhan. Tidak lama setelah kedatangan Sudomo, polisi atau tentara setempat akan bekerja intensif untuk “mengamankan” para buruh yang dianggap sebagai pimpinan. Pemogokan kemudian diselesaikan dengan pendekatan keamanan, sehingga esensi masalahnya tidak pernah disentuh⁴.

Intervensi negara dalam kehidupan perburuhan semakin intensif sejak Menteri Tenaga Kerja dijabat oleh Sudomo (1983 – 1988). Di bawah kepemimpinan Sudomo, kebijakan perburuhan mengalami perubahan mendasar, utamanya keterlibatan langsung tentara dan polisi dalam menghadapi pemogokan buruh, mengubah struktur Dewan Tripartit Nasional, mempertegas bentuk FBSI lebih unitaris dan mengganti beberapa istilah di bidang perburuhan yang dianggapnya tidak sesuai dengan ideologi dan kepribadian bangsa. Keterlibatan tentara dan polisi dalam pemogokan buruh, telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Aparat keamanan ini diundang oleh pengusaha untuk menyelesaikan pemogokan buruh yang ujung-ujungnya pemecatan terhadap beberapa buruh yang dituduh sebagai dalang. Tidak sedikit buruh yang dipanggil ke kantor polisi atau Koramil dan pemecatan dilakukan di kantor aparat keamanan tersebut. Menurut Mohammad Sadli, keterlibatan tentara dan polisi diperlukan dalam meredam gejolak para buruh, mengingat stabilitas diperlukan guna menjamin kelangsungan produksi. Para tokoh buruh banyak yang tidak memikirkan persoalan makro seperti stabilitas, produktivitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga hanya memperjuangkan kepentingan sempit para buruh. Keterlibatan aparat keamanan

⁴ Wawancara dengan Dita Indah Sari Nopember 2007.

dalam pemogokan buruh bukan sesuatu yang ganjil, sebab aparat mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban⁵.

Keterlibatan militer dalam urusan perburuhan memiliki akar yang dalam, khususnya sejak masuknya militer dalam perusahaan-perusahaan negara hasil nasionalisasi tahun 1950-an. Peran demikian dikonkritkan lagi ketika perusahaan-perusahaan menyeleksi ulang para buruh, untuk menyingkirkan mereka yang diduga terlibat G 30 S. Tidak sedikit tentara atau polisi yang memegang jabatan kepala personalia perusahaan dan cenderung menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah perburuhan. Sejarah ingatan militer dan polisi dalam menghadapi buruh adalah sejarah tentang peranan SOBSI/PKI. Sebab itu sepanjang keterlibatan militer dalam perburuhan, para buruh selalu diposisikan sebagai komunis. Stigma komunis sangat efektif meredam daya kritis buruh dan memaksa buruh mengikuti kehendak pengusaha. Data yang diolah dari berita media massa⁶ tahun 1980-1984, menunjukkan bahwa 92 persen para aktivis buruh yang menggalang pemogokan dipecat dari perusahaannya, dengan tuduhan resmi “membuat kekacauan di perusahaan”, “merusak citra FBSI”, “mengadu domba para buruh”, “anak atau keluarga komunis”, “mempraktekkan cara-cara komunis di perusahaan” dan “tidak mematuhi peraturan perusahaan”. Peran militer ini dilegitimasi oleh Menaker Sudomo dengan Keputusan Menteri nomer 342/1986. Dalam Kepmen ini secara tegas dinyatakan bahwa aparat keamanan (Korem, Kodim dan Kores) memikul tanggung jawab menyelesaikan perselisihan perburuhan, terutama bila mengarah kepada aksi mogok. Dengan payung hukum yang lebih tinggi

⁵ Wawancara dengan Mohammad Sadli tanggal 2 Nopember 2005 di CSIS Jakarta.

⁶ Diolah dari berita yang dimuat di *Kompas*, *Merdeka*, *Sinar Harapan*, *Sinar Pagi* dan *Terbit* yang terbit di Jakarta antara tahun 1980 – 1984.

di mana aparat memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban, maka pemogokan yang didefinisikan sebagai kekacauan dan ketidaktertiban, menjadi urusan polisi dan tentara. Padahal UU no. 22/1957 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menjamin hak mogok bagi buruh dan *lock out* bagi pengusaha. Tindakan represif militer terhadap buruh yang paling sensasional adalah pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah pada tahun 1993 di Kodim 0816 Sidoarjo (Supartono, 1999).

Di masa Sudomo keberadaan lembaga kerjasama Tripartit juga dipertegas. Melalui Peraturan Menaker No. 258/MEN/1983, lembaga Tripartit diperluas ke tingkat regional dan sektoral dengan memasukkan pimpinan daerah. Lembaga ini semula hanyalah media dialog antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Dalam memperingari hari buruh tahun 1968, para buruh merasa pentingnya menyamakan pemikiran antara ketiga pihak tersebut. Pada tahun 1973 dalam usaha mengendalikan buruh dan pengusaha, pemerintah menggunakan wahana ini. Melalui Keputusan Menakertrans No. 382/MEN/1973 badan ini memiliki kedudukan yang legal dalam bentuk Sekretariat Bersama. Melalui Keputusan Menakertrans No. 35/MEN/1979, kedudukannya ditingkatkan menjadi Dewan Tripartit Nasional. Sampai tahun 1983, Dewan ini hanya berfungsi sebagai lembaga konsultasi dan media dialog yang mempertemukan buruh, pengusaha dan pemerintah di tingkat nasional. Fungsinya menjadi sangat strategis di bawah Menaker Sudomo, di mana lembaga ini berperan merumuskan kebijakan perburuhan di tingkat Pusat maupun Daerah. Tidak jarang kebijakan yang dilahirkan bertentangan dengan undang-undang yang ada. Misalnya, mekanisme pemutusan hubungan kerja yang telah diatur dalam UU No. 22/1957 direduksi oleh Kepmen No. 1108/1986. Dalam Kepmen ini mekanisme PHK

melanggar hak-hak buruh untuk mendapatkan pesangon dan upah selama dalam proses PHK.

Langkah Sudomo yang paling menguras energi adalah mengubah FBSI menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). FBSI yang merupakan “federasi” antar Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP), dipandanginya sebagai konsep liberal. Konsep “federasi” tidak sejalan dengan bentuk negara kesatuan dan sila-sila dalam Pancasila. Sebab itu ketika Kongres FBSI II tahun 1985, para pejabat Depnaker berusaha keras mempengaruhi keputusan Kongres agar menerima usulan Menaker mengubah nama FBSI menjadi SPSI dan struktur organisasi yang federatif menjadi unitaris. Dengan bentuk unitaris, SPSI semakin terkontrol dan terpusat. Tujuannya untuk memfasilitasi industrialisasi berorientasi ekspor di mana para buruh perlu dikendalikan melalui sistem komando. Serikat-serikat buruh lapangan pekerjaan (SBLP), diubah menjadi sektor-sektor yang sentralistis untuk memudahkan komando dari Pusat yang banyak diduduki oleh militer⁷.

Seluruh proses pengendalian buruh tersebut diarahkan dalam rangka pembangunan industri yang terus memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, implikasi dari rangkaian kekerasan terhadap kelas bawah dan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada kroni-kroni pejabat negara telah melahirkan kapitalisme negara. Kepentingan-kepentingan birokrat politik yang semula berada di sekitar Pertamina dan Bulog, menjadi menggejala di semua lini departemen melalui badan usaha milik negara. Ketika keuangan negara melemah dan pemerintah terpaksa harus berganti haluan dengan menerapkan kebijakan ekspor non migas, kepentingan

⁷ Wawancara dengan Dita Indah Sari (Nopember 2007), Muchtar Pakpakhan (Mei 2007) dan Rekson Silaban (Mei 2007).

birokrat politik telah menggurita dan menggerogoti keuangan negara melalui sektor perbankan. Negara dipaksa menalangi uang yang digunakan oleh bank-bank secara tidak terkontrol, di mana bank ini mengucurkan pinjaman kepada perusahaan milik keluarga mereka sendiri. Selain itu korupsi berkembang demikian jauh yang tidak mampu dikendalikan oleh para pejabat negara. Sebagian hal demikian sebagai imbalan kepatuhan mereka kepada pejabat-pejabat pusat, sebagian lagi merupakan konsekuensi dari oligarki.

Tujuan dari industrialisasi di era *boom* minyak diarahkan untuk pembangunan kemandirian nasional yang pernah digagas oleh Soekarno. Pemerintah menyediakan sektor-sektor tertentu bagi penanaman modal domestik dan asing, sebagian besar yang memerlukan teknologi khusus dan jumlah modal yang besar (Hadiz, 2005:182). Fenomena ini memperlihatkan bahwa negara secara aktif memprakarsai industrialisasi dan membalikkan logika teori ketergantungan di mana negara merupakan tawanan modal asing. Negara Orde Baru merupakan promotor yang aktif minimal bagi kepentingannya sendiri. Rejeki minyak tidak dibayangkan sebelumnya. Pada awal pemerintah Orba yang dikenal sebagai periode stabilisasi, minyak mempunyai peranan minimum. Fokus pemerintah pada penjadwalan utang-utang luar negeri yang dibuat oleh Pemerintah Soekarno dan memperoleh pinjaman baru. Sebab itu perencanaan ekonomi yang lebih pro pasar menggairahkan para teknokrat dan ekonom. Tetapi rejeki minyak telah mengubah semuanya, utamanya menguatnya posisi kelompok pendukung nasionalisme ekonomi (Robison, 1986:131; 1998:130).

Industrialisasi di era ini kecil sumbangannya pada penciptaan lapangan kerja karena lebih fokus pada industri padat modal. Sementara kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, industri padat modal yang memerlukan tenaga dengan skill

tinggi, tidak dapat dipenuhi. Sebagai substitusinya adalah mesin-mesin berteknologi tinggi dan tenaga konsultan yang didatangkan dari luar negeri. Ciri lainnya dari industri Indonesia adalah besarnya inefisiensi (Robison, 1998:115; Kunio, 1990: 101). Karena sektor industri dibangun dengan bantuan banyak subsidi, maka produksinya tidak efisien. Harga barang menjadi demikian tinggi, sehingga mematikan pasar dalam negeri. Inefisiensi juga sebagai akibat dari besarnya biaya birokrasi dalam produksi, mulai biaya keamanan dan perijinan-perijinan.

Jatuhnya harga minyak di pasar internasional pada pertengahan tahun 1980-an, telah memaksa pemerintah melakukan kebijakan penyesuaian. Untuk menggantikan devisa dari minyak yang hilang, pemerintah berpaling kepada strategi berorientasi ekspor. Langkah pertama dalam menyelamatkan APBN adalah dengan membatalkan proyek-proyek industri dan infrastruktur besar dan memperbanyak sumber-sumber pendapatan dalam negeri, terutama melalui pajak. Di samping itu pemerintah mendorong investasi asing dengan cara mengubah atau mencabut berbagai pembatasan yang berlaku sejak tahun 1970-an (Pangestu, 1992:194). Para perencana ekonomi yang dikenal sebagai pendukung pasar bebas, mendapatkan peluang untuk mengendalikan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Para ekonom segera memperkenalkan berbagai paket deregulasi yang tujuannya untuk mendorong investasi dalam bidang industri olahan dan terutama untuk mendukung produksi berorientasi ekspor. Paket-paket deregulasi memberi berbagai kemudahan kepada para investor antara lain pembebasan bea impor atas bahan baku yang dipakai untuk produksi ekspor, dibentuknya zona pengolahan produk ekspor, kemudahan perusahaan asing untuk mendapatkan pinjaman mata uang rupiah, hak untuk menyalurkan barang-barang buaatannya sendiri di Indonesia dan hak untuk menanam

modal dan mengambil alih perusahaan nasional (Robison, 1998:120). Kebijakan banting stir ini mengubah secara drastis para pelaku ekonomi politik, di mana para pengusaha dalam dan luar negeri memainkan peranan utama.

Perubahan kebijakan industrialisasi ini tidak memberi keuntungan berarti bagi kaum buruh. Justru dalam rangka mengejar ekspor non migas, menarik modal asing dan menciptakan lingkungan bisnis yang memungkinkan akumulasi kapital, negara semakin bersikap otoriter terhadap buruh. Berbagai pelanggaran hak-hak buruh berlangsung secara telanjang, seperti pelanggaran pembayaran upah buruh sesuai Ketentuan Upah Minimum (kemudian diganti dengan upah minimum provinsi), penolakan pengusaha terhadap upah lembur, perpanjangan jam kerja, pelanggaran jaminan sosial dan terus dikondisikannya pendisorganisasian buruh (Rochadi, 1999). Dengan demikian, tidak sepenuhnya tepat untuk menyimpulkan bahwa pendisorganisasian buruh berhubungan erat dengan kepentingan kapitalisme negara. Penetrasi dan pendisorganisasian buruh yang terus berlanjut ketika kebijakan industrialisasi berorientasi ekspor, lebih merupakan kebutuhan bersama antar elit-elit yang bersaing untuk tetap mencegah gerakan buruh yang punya potensi radikal yang tetap dipandang sebagai ancaman. Kejayaan gerakan buruh tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, merupakan pengalaman pahit bagi kaum borjuis apapun strategi industralisasinya.

Pengalaman Indonesia ini berbeda dengan Korea Selatan yang juga dikenal menerapkan kebijakan ISI di awal tahun 1950-an dan kemudian berganti IOE pada awal tahun 1960-an. Gerakan buruh di Korea Selatan juga ditindas sebelum industrialisasi berkembang, penindasan juga dilakukan secara sistematis termasuk dengan menerapkan korporatisme negara. Setelah krisis ekonomi akhir tahun 1990-an,

semua kekuatan bersatu untuk menyelamatkan negara Korea Selatan. Sistem demokrasi disepakati sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Menyadari sempitnya pasar dalam negeri dan potensi ekspor yang demikian besar, maka kebijakan IOE terus dipertahankan dengan merambah pasar di Asia Tenggara, Asia Selatan bahkan ke Eropa Barat. Perubahan kebijakan ini menggeser hubungan buruh-pemerintah dan pengusaha, yang semula disingkirkan menjadi digandeng dalam konsep korporatisme masyarakat (Tulus Warsito, 2007). Kebebasan berserikat dan tawar menawar kolektif berlangsung secara terbuka, sehingga antara buruh dan pengusaha bekerja sama dalam kerangka kelembagaan yang kuat.

Kebutuhan bagi elit politik Orba setelah kebijakan penyesuaian ini adalah angkatan kerja yang murah, berdisiplin tinggi, tidak terorganisasi dan tetap mengutamakan hubungan industrial yang aman. Negara memerlukan ini semua dalam rangka mendapatkan devisa dari ekspor non migas, terutama untuk membayar utang-utang luar negerinya. Jenis-jenis industri yang kemudian masuk adalah industri yang memanfaatkan kondisi global kapitalisme, yaitu industri ringan, padat karya dan berupah rendah⁸. Jenis industri seperti ini tumbuh pesat sejak akhir tahun 1980-an dan menarik para pekerja muda usia dari desa. Mereka pada umumnya bergerak di tekstil, produk tekstil, sepatu dan alas kaki, makanan ringan dan mainan anak-anak. Jenis industri seperti ini tidak memerlukan ketrampilan pekerja. Justru dibutuhkan para pekerja yang taat dan bersedia dibayar murah. Inilah peluang yang menguntungkan pekerja perempuan dan anak-anak. Mereka ini jauh lebih mudah mendapatkan pekerjaan, sebab dalam konsep upah golongan ini selalu dihitung

⁸ Wawancara dengan Dita Indah Sari Nopember 2007

lajang, sehingga tidak menanggung ekonomi keluarga. Selain itu kelompok ini juga dikenal taat pada manajemen dan tidak memiliki potensi melakukan kerusuhan⁹.

Industri ringan kaki (*footloose*) adalah industri yang tidak mengakar dalam arti tidak mempunyai ketergantungan bahan baku dan ketergantungan pada tenaga kerja trampil. Industri seperti ini tidak sedikit yang merupakan buangan dari negara-negara industri baru yang telah berhasil naik tangga, sehingga tidak efisien lagi jika masih tetap mengelola industri ringan. Sebagai contoh, investasi Korea Selatan naik 70 persen untuk jenis industri ini setelah deregulasi. Sedangkan industri ringan dari Taiwan dan Singapura yang bergerak di bidang elektronika dan kimia, naik sekitar 90 persen¹⁰. Kedua negara itu berhasil naik tangga setelah meningkatkan produksi dalam negeri untuk kepentingan ekspor (Alexander Irwan, 1999:67). Pertumbuhan investasi baik proyek maupun nilainya meningkat tajam pasca deregulasi (lihat Tabel 1). Indonesia dinilai sebagai negeri yang molek untuk investasi, sebab berbagai persyaratan seperti stabilitas politik, upah buruh yang murah, tersedianya sumberdaya alam yang besar, tersedianya tenaga kerja yang besar dan sarana serta prasarana seperti transportasi dan komunikasi, tersedia di negeri ini. Berbagai produk sepatu dan alas kaki, makanan dan mainan anak-anak menyerbu Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif stabilitas politik dan upah buruh murah. Kemajuan teknologi informasi dan kecenderungan pergerakan modal global, telah membuat jenis industri seperti ini mudah berpindah lokasi (relokasi), mencari tempat yang paling menguntungkan. Negara-negara yang kelebihan tenaga kerja dengan

⁹ Wawancara dengan Dita Indah Sari Nopember 2007.

¹⁰ *Kompas*, 12 April 2001.

ketrampilan rendah, tidak memiliki pilihan lain kecuali mendisiplinkan tenaga kerjanya.

Implikasi lebih lanjut dari merajalelanya industri ringan adalah hubungan kerja berdasarkan kontrak. Oleh sebab perusahaan tidak mempunyai kepentingan bisnis jangka panjang karena tidak menguntungkan, maka para buruh bekerja berdasarkan kontrak. Sistem kontrak ini melemahkan buruh, sebab tidak ada kepastian kerja dan terhambat melakukan aktivitas perburuhan¹¹. Rantai nilai dari industri ringan memang rendah, bahkan dalam tempo sepuluh tahun telah banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dan relokasi. Setelah Indonesia menikmati masa pertumbuhan tinggi awal tahun 1990-an, kemudian tersaingi oleh Vietnam yang menawarkan stabilitas politik, upah murah dan produktivitas kerja yang cukup tinggi.

Tabel 5. Persetujuan Investasi 1967-2002

| TAHUN | PMDN | | PMA | |
|-------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | PROYEK | NILAI (MILYAR RUPIAH) | PROYEK | NILAI (MILYAR RUPIAH) |
| 1967 | - | - | 13 | 210,6 |
| 1977 | 157 | 490,2 | 21 | 187,3 |
| 1990 | 1.331 | 58.856,6 | 444 | 9.639,6 |
| 1995 | 793 | 69.844,7 | 782 | 39.891,6 |
| 1998 | 320 | 57.938,3 | 1.034 | 13.585,5 |
| 2000 | 355 | 92.410,4 | 1.524 | 15.420,0 |
| 2002 | 55 | 7.530,2 | 287 | 1.373,8 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, April 2003

B. Beberapa Bentuk Perlawanan Buruh

Sejak akhir tahun 1980-an, di beberapa wilayah Indonesia tumbuh zona-zona industri yang secara khusus dibangun untuk ekspor. Pertumbuhan industri ini telah

¹¹ Dikemukakan oleh semua nara sumber: HM Rodja, Dita Indah Sari, Muchtar Pakpahan dan Munir.

dibarengi dengan meningkatnya secara kuantitatif jumlah buruh. Jika pada tahun 1980 hanya ada 1,7 orang yang bekerja di sektor industri manufaktur, pada tahun 1995 telah menjadi 10,2 juta orang dan pada tahun 2003 telah mencapai 14,6 juta (BPS, 2004). Gelombang tenaga kerja dari desa ke kota ini segera mengisi kebutuhan pekerja di zona-zona industri, kawasan berikat atau kawasan industri. Di Jakarta dan sekitarnya mereka menyesaki wilayah pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Selain itu para pekerja dari desa juga menyerbu kota-kota besar yang mulai menjadi lokasi pabrik seperti Surabaya, Semarang, Medan dan Makasar. Dari para nara sumber dapat diketahui bahwa buruh angkatan kedua industrialisasi memiliki ciri-ciri: berusia muda (15 – 40 tahun), berpendidikan sekolah menengah cenderung meningkat, rata-rata berasal dari desa, ikatan sosial dengan desa masih sangat kuat, proporsi pekerja perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tinggal secara mengelompok terutama berdasarkan ikatan daerah asal, akses terhadap informasi (terutama koran) sudah mulai meningkat¹².

Ciri-ciri sosial dan demografis tersebut yang membedakan dengan buruh angkatan pertama industrialisasi yang dimulai awal tahun 1970. Buruh tahun 1990-an lebih terdidik sebagai hasil dari perluasan pendidikan melalui proyek sekolah Inpres, lebih banyak mengkonsumsi media massa, lebih mobile secara fisik dan berusia muda. Oleh seorang ahli teori modernisasi Daniel Lenner (1983) individu-individu seperti itu disebutnya mampu melakukan mobilitas psikis, yaitu kemampuan membayangkan peran sosial orang atau kelompok lain yang memiliki posisi sosial ekonomi lebih tinggi. Para buruh memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi upah

¹² Wawancara dengan Rekson Silaban (Mei 2007), Muchtar Pakpahan (Mei 2007) dan Dita Indah Sari (Nopember 2007).

yang layak mereka peroleh dalam kerja panjang di sektor industri. Demikian pula mereka bisa menilai apa yang seharusnya dilakukan oleh tentara, polisi, SPSI dan pemerintah pada umumnya. Pendeknya para buruh secara individual dan kolektif mulai mempertanyakan keadilan.

Tidak kalah penting peranan dari zona-zona industri tersebut adalah pembentukan kesadaran sosial dan solidaritas sosial. Hidup di lingkungan pabrik cepat mendewasakan para buruh dan meningkatkan solidaritas. Mereka hidup dari upah yang ada dan bekerjasama dengan para buruh lain untuk menyasati upah yang pas-pasan, seperti menyewa rumah bersama, menggunakan alat masak secara bersama-sama, membayar listrik dan perabotan mandi secara bersama-sama. Dari pengalaman ini tumbuh ikatan sosial antar mereka untuk saling membantu dan melindungi jika mendapat masalah. Pembicaraan antar buruh di lingkungan tempat tinggal juga mencerdaskan buruh akan isu-isu perburuhan, seperti pembagian kerja, promosi, kenaikan upah dan manajemen perusahaan. Pertukaran informasi mengenai kebijakan masing-masing perusahaan dalam pengupahan dan pemberian jaminan sosial, berlangsung di kalangan buruh ini. Seringkali asal daerah menjadi ikatan bersama, namun secara perlahan-lahan mengikis digantikan dengan persoalan-persoalan konkrit, seperti upah dan kondisi kerja¹³.

Merujuk pada teori pembentukan kelas dari Marx, lingkungan kehidupan buruh berperan dalam membentuk isu-isu kehidupan, pekerjaan dan akan eksploitasi mereka oleh pemilik alat produksi. Pengalaman bersama dalam membahas kondisi sosial mereka akan menyadarkan posisi sosial mereka dalam berhadapan dengan

¹³ Seperti dikemukakan oleh Sri Widiyati dan Naning, buruh di PT MR dan PT Sanyo yang kemudian menjadi aktivis buruh di perusahaan tersebut. Wawancara April 2006.

managemen perusahaan maupun aparatus negara. Pengalaman ini akan membawa solidaritas bersama, bahwa mereka adalah orang-orang senasib, sepenenderitaan dan karenanya perlu saling bekerjasama (Magnis Suseno, 2000:166-167). Latar belakang pendidikan, konsumsi media massa dan mobilitas sosial, turut membantu memperkuat posisi sosial buruh. Kondisi seperti ini secara psikologis dan materialistik telah memenuhi persyaratan dasar terjadinya gerakan sosial menurut teori Smelser (1976) maupun Horton dan Hunt (1992). Kekecewaan dan kegelisahan para buruh menyikapi kehidupannya dibandingkan dengan penilaian mereka kepada hak-hak yang diterima pengusaha dan aparatus negara, bukan hanya merupakan *structural conduciveness* dan *stuctural strain* seperti yang dikemukakan Smelser, tetapi telah masuk tahap ketiga yaitu *growth and spread of a generalized belief*, bahwa para buruh mulai muncul keyakinan perlu melakukan sesuatu untuk perubahan.

Kebijakan industrialisasi untuk ekspor yang dilakukan dengan penindasan dan pelanggaran hak-hak buruh, telah membentuk arena gerakan buruh. Arena yang dimaksud adalah lahirnya ketidakpuasan dari massa buruh yang tidak terorganisasi yang dapat muncul sewaktu-waktu dalam bentuk kerusuhan. Kantong-kantong industri dan komunitas buruh juga memiliki peranan dalam membangkitkan solidaritas dan kesadaran terhadap posisi sosial buruh dalam proses produksi. Ditunjang dengan latar belakang pendidikan dan kerja para aktivis buruh dari LSM, pelatihan-pelatihan terselubung, mulai bangkit keberanian untuk menuntut hak-hak buruh, meskipun tuntutan tersebut masih bersifat normatif. Pemogokan buruh pada periode ini merupakan tahap lebih lanjut dari ketidakpuasan ke aksi.

Bagi Dahrendorf (1986) kondisi seperti itu baru menghantarkan para buruh kepada terbentuknya kelompok-kelompok semu (*quasi group*) dan bukan kelompok kepentingan (*interest group*), sebab persyaratan dasar untuk melahirkan kepemimpinan gerakan tidak terpenuhi. Persyaratan dasar tersebut adalah kondisi politik, yaitu adanya kebebasan menyatakan pendapat secara terbuka. Oleh Sydney Tarrow (1996), kondisi ini disebutnya struktur peluang politik (*political opportunity structure*). Ketatnya kontrol militer dan birokrasi, digunakannya kekerasan serta stigma komunis dan pengebirian hak-hak ekonomi (PHK) kepada para buruh, tidak membawa buruh kepada formalisasi gerakan seperti dalam teori Horton dan Hunt (1992) atau *mobilization for action* dari Smelser (1976), tetapi perlawanan terselubung, pemogokan dan kerusuhan.

Menurut Siahaan (1996) perlawanan terselubung merupakan jalan keluar yang ditempuh petani sebagai respon atas hegemoniknya sistem politik Orde Baru. Model penjelasan yang sama dapat diterapkan untuk kasus buruh. Menurut Sri Widiyati dan Naning¹⁴, para buruh baik laki-laki maupun perempuan melakukan perlawanan terselubung untuk mengelakkan bahaya protes terbuka. Protes terbuka akan mudah ditangkap Satpam dan polisi serta berujung pada PHK. Dengan PHK para buruh tidak memiliki sumber pendapatan untuk menopang kehidupannya serta membiayai sekolah adiknya di desa. Perlawanan yang lazim dilakukan para buruh adalah mencuri bahan baku maupun produk yang siap dipasarkan. Di sini para buruh

¹⁴ Sri Widiyati adalah buruh di PT MR di Jalan Raya Jakarta Bogor. Ia tamatan SMA berasal dari Sukoharjo Jawa Tengah. Karena keaktifannya, ia pernah menjadi Bendahara UK SPSI PT MR. Kemudian ia terpilih menjadi salah satu ketua. Naning adalah buruh operator di PT Sanyo yang bergerak di bidang komponen elektronika juga berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor. Ia tamatan SMA berasal dari Nganjuk Jawa Timur. Naning aktif dalam serikat pekerja antara lain pernah menjadi pengurus UK SPSI Sanyo. Sekarang aktif sebagai salah satu pengurus Serikat Pekerja Bogor. Data mengenai perlawanan terselubung berasal dari dua nara sumber ini. Wawancara dilakukan bulan April 2006 saat keduanya menyiapkan diri memperingati Hari Buruh 1 Mei 2006.

bekerjasama dalam klik yang membentuk mata rantai mulai dari gudang bahan baku-operator mesin – produksi awal dan pengepakan yang siap dipasarkan. Buruh yang terlibat dalam klik cukup banyak antara 5 sampai 10 orang dan tidak jarang melibatkan pengawas. Pencurian yang sangat menyolok terjadi di tahap pengepakan dan pengeluaran barang dari gudang. Pengepakan yang arus barangnya demikian cepat, para buruh sering melakukan pelambatan kerja, sehingga kecepatan laju barang yang digerakkan ban berjalan lebih kencang dibanding dengan tangan-tangan buruh untuk memindahkannya. Akibatnya, satu – dua buah barang jatuh di bagian akhir dan sebagian dari barang itu dikantongi oleh para buruh di deretan akhir. Pada saat tertentu harus segera pindah posisi untuk mengamankan barang yang dikantongi. Biasanya alasan ke kamar kecil atau sholat digunakan untuk memindahkan barang hasil curian. Mengingat panjangnya mata rantai, maka praktek pencurian sebenarnya berlangsung sistematis.

Akomodasi para buruh terhadap sistem eksploitasi pabrik dengan jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang tidak nyaman adalah melalui pelambatan kerja (*slow down*), berlama-lama di kamar kecil atau memperlama waktu sholat. Aturan-aturan kerja di pabrik terutama tentang waktu kerja dan jam istirahat, telah dibuat demikian tegas. Memperhatikan ketentuan tertulis, buruh baru sulit dapat menyiasati jam kerja yang demikian panjang. Tetapi para buruh senior memahami bagaimana membengkokkan aturan di tempat kerja untuk meraih keuntungan. Selain dengan pelambatan kerja dan memperlama waktu sholat, sejumlah pekerjaan tertentu telah dikondisikan pada jam kerja reguler untuk nantinya mereka selesaikan pada jam kerja lembur. Waktu lembur yang dibayar khusus, sesungguhnya hanya merapikan hasil kerja jam reguler. Cara seperti ini dilakukan terutama para buruh di industri pakaian

dan alas kaki dan komponen alat elektronik. Pelambatan kerja dikenal sebagai “pemogokan gaya itali” yang sangat efektif diterapkan di Polandia dan berhasil menjatuhkan Pemerintah Komunis yang terkenal otoriter (James C. Scott, 2000:47).

Perlawanan yang umum dilakukan oleh para buruh adalah “hanya bekerja jika diawasi”. Perlawanan jenis ini terutama berlangsung di perusahaan yang tidak menghitung upah berdasarkan hasil kerja individual. Seperti di perusahaan rokok yang diteliti oleh Ines Symth dan Mies Grijns (1999), para buruh mensiasati hasil kerja. Para buruh perempuan hanya menggunakan cengkeh di bagian atas saja supaya lebih cepat dalam melinting rokok dan hasil kerjanya berlipat. Melinting tanpa cengkeh jauh lebih mudah dan lebih cepat. Upah buruh yang dibayarkan berdasarkan jumlah lintingan rokok, menjadi berlipat ganda. Cara seperti ini jelas menurunkan kualitas produk rokok.

Dalam teori perlawanan antar kelas, teknik-teknik *low profile* seperti itu dipandang lebih rasional oleh James Scott (2000) dan sangat tepat untuk struktur kelas sosial para petani. Jika hal yang sama dilakukan oleh para buruh di perkotaan, apakah hal ini karena kultur agraris yang masih kuat pada diri para buruh atau tiadanya struktur sosial yang mampu menyalurkan aspirasi para buruh? Bagaimana pun teknik seperti itu dapat menunjukkan eksistensi para petani dan buruh secara politik. Teknik yang khas rakyat kecil dilakukan juga dengan pertimbangan sederhana, yaitu menghindari konfrontasi langsung dengan pihak-pihak yang berkuasa baik secara ekonomi maupun politik. Pertarungan terbuka antar kekuatan ini jelas tidak akan seimbang dan hanya akan berakhir dengan penderitaan lebih bagi petani dan buruh. Namun cara-cara prosaik, sporadis dan terkadang tidak terencana serta lebih individual ini, tidak memberi harapan perubahan jangka panjang.

Bentuk perlawanan lain adalah pemogokan dan kerusuhan. Meskipun dihadapi oleh militer dan polisi secara keras, tetapi pemogokan buruh di zona-zona industri berlangsung marak sejak akhir tahun 1980-an. Gelombang pemogokan buruh ini dipicu oleh kondisi perburuhan dan peluang politik yang mulai terbuka. Pada kondisi intern, selain faktor-faktor demografis dan lingkungan kerja pabrik yang telah dikemukakan di atas, juga upah buruh yang rendah. Upah buruh dibayar berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Studi yang penulis lakukan pada tahun 1993, menunjukkan bahwa upah buruh di beberapa propinsi rata-rata hanya mencapai 80 persen KFM. Pada hal jika upah dibayar sesuai dengan Ketentuan Upah Minimum (KUM), kesejahteraan buruh masih di bawah garis kemiskinan (Rochadi, 1996). Kondisi seperti ini menimbulkan protes keras ICFTU. Serikat buruh Amerika Serikat ini melaporkan ke ILO dan mengkampanyekan penolakan produksi Indonesia, sebab dilakukan dengan melanggar hak-hak asasi buruh (Peggy Kelly, 2002:16).

Selain itu dalam tubuh elit politik Indonesia pada awal tahun 1990-an mengalami perpecahan (friksi). Merosotnya pendapatan negara dari minyak telah menyebabkan berkurangnya sumberdaya yang dapat didistribusikan kepada para pendukung Soeharto. Fraksi ABRI dalam MPR secara terbuka menolak pencalonan Soedharmono sebagai Wakil Presiden. Presiden Soeharto pun mulai menjaga jarak dengan ABRI dan membina struktur baru untuk menopangnya yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dalam tataran kebijakan berlangsung perdebatan antara strategi industrialisasi yang mengedepankan nasionalisme ekonomi dengan konsekuensi tetap merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme atau pro pasar yang menuntut efisiensi dan transparansi di semua lini. Tidak homogennya elit

politik, telah membuka peluang munculnya gerakan sosial buruh seperti SBMSK, SBSI dan PPNBI yang akan dibahas kemudian.

Peranan para aktivis perburuhan terutama LSM perburuhan sebagai *intelektual outside* yang memberi pencerahan kepada para buruh, tidak kecil. Semua aktivis buruh yang kemudian membangun gerakan buruh menantang dominasi SPSI, adalah para intelektual. Munculnya kaum intelektual dan bukan kaum buruh sejati dalam gerakan buruh, dianggap oleh para aktivis sebagai sesuatu yang wajar. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, ketatnya kontrol pemerintah, ketakutan akan penindasan dan kehilangan sumberdaya utama yaitu pekerjaan; kaum intelektual perlu mengambil alih kepemimpinan untuk membangkitkan kesadaran dan keberanian kaum buruh. Peran kaum intelektual ini hanya bersifat sementara, yaitu ketika diperlukan kekuatan pencerahan untuk mendobrak kekuasaan ekonomi yang eksploitatif dan kekuasaan politik yang otoriter¹⁵. Kaum buruh memerlukan kepemimpinan dari luar yang berperan semacam agen perubahan.

Perlawanan dalam bentuk pemogokan tidak berlangsung secara terorganisasi. Rencana pemogokan disebarluaskan secara diam-diam dari mulut ke mulut, sering kali dengan kode tertentu. Warna, bunyi besi yang dipukul dan sirene pabrik, sering menjadi kode dimulainya pemogokan. Para buruh juga mengembangkan kata-kata, bahasa dan nyanyian yang *diplesetkan* untuk menyampaikan keresahan. Sindiran, ejekan dan *labeling* (memberi julukan) dikembangkan oleh para buruh dengan tujuan untuk memperkuat *in-group*. Para buruh juga mengenakan atribut-atribut tertentu, baik sebagai topi, ikat kepala, kaca mata atau warna pakaian, dengan tujuan

¹⁵ Peran seperti ini diakui oleh semua pemimpin gerakan buruh seperti HM Rodja, Dita Indah Sari, Muchtar Pakpahan dan Egy Sudjana (Nopember 2007). Alinea ini dan seterusnya berasal dari wawancara dengan nara sumber.

memperkuat identitas *in-group*. Para pegawai administrasi, mandor, pengawas dan unsur-unsur manajemen lain serta para pejabat pemerintah dipandang sebagai *out-group*.

Pimpinan mogok muncul ketika pemogokan telah memasuki tahap kematangan. Ketika diperlukan sejumlah orang untuk mewakili buruh dalam perundingan, tokoh-tokoh yang sebelumnya bergerak di bawah tanah, muncul ke permukaan sebagai pemimpin formal. Pimpinan gerakan ini pada umumnya adalah buruh dengan latar belakang pendidikan cukup tinggi (rata-rata SLA), telah bekerja sebagai buruh cukup lama dan pada umumnya tinggal dalam komunitas buruh. Mereka umumnya juga individu yang secara intelektual cukup baik dibanding rata-rata buruh dan mengkonsumsi media massa secara aktif. Pemahaman para pimpinan ini mengenai kebijakan perburuhan, khususnya mengenai pengupahan, jam kerja dan jaminan sosial, juga di atas rata-rata para buruh. Latar belakang seperti ini yang menempatkannya sebagai pimpinan gerakan dalam komunitas pabrik. Tidak sedikit para pemimpin ini memiliki hubungan baik dengan para aktivis LSM perburuhan. Peran aktivis LSM perburuhan dalam mengangkat isu-isu perburuhan baik melalui kerja di tingkat akar rumput maupun melalui pembentukan opini publik, sangat besar dalam membentuk agenda perburuhan.

Tabel 6. Pemogokan Buruh 1980-2003

| TAHUN | JUMLAH PEMOGOKAN | BURUH YANG TERLIBAT | JAM KERJA YANG HILANG |
|-------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1980 | 100 | 32.287 | 328.466 |
| 1985 | 78 | 21.148 | 55.001 |
| 1990 | 61 | 31.234 | 262.014 |
| 1995 | 276 | 126.855 | 1.300.001 |
| 1996 | 360 | 221.557 | 2.497.973 |
| 1998 | 278 | 152.495 | 1.550.945 |
| 2000 | 273 | 126.045 | 1.281.242 |
| 2003 | 298 | 198.568 | 1.243.765 |

Sumber: Depnakertrans, 2006

Di antara kasus-kasus pemogokan buruh yang berujung pada kerusuhan adalah pemogokan buruh di Medan 14 April 1994. Pemogokan ini merupakan kulminasi dari rangkaian pemogokan buruh yang sudah berlangsung sejak tahun 1990¹⁶. Disebut kulminasi, sebab dalam pemogokan tersebut melibatkan buruh dalam jumlah yang sangat besar (sekitar 20.000 – 30.000 orang) dengan tuntutan yang merupakan kristalisasi dari pemogokan-pemogokan sebelumnya, yaitu (1) tuntaskan kematian Rusli, (2) tuntaskan kasus PT Korek Api Deli, (3) Naikkan upah buruh menjadi Rp 7.000/hari dan (4) berikan kebebasan berserikat dengan mengakui SBSI sebagai serikat buruh. Perlakuan aparat negara dan pengusaha terhadap buruh di Medan tidak berbeda dengan tempat lain, yaitu represif dan eksploitatif. Para buruh yang mogok menuntut THR dan pembayaran upah sesuai dengan UMR, dihadapi oleh militer dengan keras sehingga memakan korban, mulai dari penyiksaan sampai kematian. Di Medan penyiksaan terhadap buruh di PT KAD dan kematian Rusli, menimbulkan kemarahan besar para buruh. Emosi buruh ini ditambah penolakan

¹⁶ Wawancara dengan Muchtar Pakpahan Mei 2007

pengusaha membayar upah sesuai UMR dan THR, semakin mengkristalkan sikap antipati buruh. Aparatus kewan dan birokrasi yang diharapkan berpihak kepada buruh, justru sebaliknya. Para pemimpin protes semakin sadar bahwa perjuangan hanya bisa mengandalkan kekuatan akar rumput termasuk LSM perburuhan.

Pemogokan di beberapa wilayah yang berlangsung sebelum kerusuhan Medan 1994, dipicu oleh persoalan upah dan perlakuan aparat keamanan terhadap buruh. Secara telanjang aparat berpihak kepada pengusaha yang sebagian besar keturunan Cina. Kesenjangan sosial antara keturunan Cina dan penduduk pribumi terutama buruh, memang sangat menyolok. Para pengusaha keturunan ini secara terbuka menyatakan antipatinya kepada buruh yang dianggap mengganggu produksi. Beberapa pelanggaran kebijakan Menaker oleh pengusaha seperti tidak membayar upah sesuai UMR, tidak memberikan THR, menolak membayar upah lembur, mempekerjakan buruh lebih dari 40 jam seminggu, tidak menyediakan fasilitas kerja dan keamanan kerja, melakukan PHK secara sepihak dan melakukan *lock out* tanpa memberitahukan kepada para buruh, tidak pernah ditindak oleh aparat negara. Sikap diskriminatif seperti ini pada awalnya hanya dipahami para aktivis buruh, tetapi tidak diresponnya tuntutan upah dan THR, PHK massal di PT Industri Karet Deli serta *lock out* di PT. KAD, meyakinkan buruh akar rumput bahwa aparat keamanan benar-benar di pihak pengusaha. Pada titik ini emosi dan radikalisasi buruh akar rumput benar-benar memuncak. Untuk terjadinya kerusuhan, tinggal menunggu faktor picu yang bisa berasal dari tindakan dan seruan apapun yang menghadapkan buruh dengan pengusaha Cina. Pada kasus kerusuhan April 1994 tersebut faktor picunya adalah provokasi militer, Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Pemuda

Pancasila¹⁷. Kelompok ini di Jl. Semarang dan Jl. Surabaya melakukan pelemparan toko-toko dan memancing buruh yang dalam emosi tinggi. Kerusuhan pun tidak terhindarkan.

Bentuk perlawanan lain adalah berdirinya serikat buruh tandingan SPSI, yaitu Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBMSK) yang berdiri tahun 1990, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) berdiri 1992 dan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) berdiri tahun 1994. Tiga serikat buruh ini didirikan oleh para aktivis buruh dari LSM, khususnya LBH Jakarta dan LPHAM yang dipimpin oleh HJ Princen. Respon aparat sangat keras terhadap ketiga serikat buruh tandingan ini, mulai dari tuduhan PKI, penutupan kantor karena tanpa ijin, pembubaran acara karena tanpa ijin sampai penangkapan dan penyiksaan para pengurusnya. Rangkaian tindakan ini dimaksudkan untuk menggagalkan berdirinya serikat buruh di luar SPSI karena dapat mengancam kelangsungan strategi pengendalian buruh. Menghadapi perilaku represif militer, hanya SBSI yang secara terbuka berani menyatakan eksistensinya dan melakukan aktivitas seperti pelatihan dan pembentukan pengurus cabang di berbagai wilayah.

Di bawah kontrol ketat militer, peluang politik sangat terbatas untuk melakukan aktivitas gerakan. Sebab itu aktivitas hanya berlangsung di kalangan aktivis LSM yang memiliki keberanian melawan otoriterisme. Inilah makna kepeloporan gerakan sosial. Gerakan sosial terorganisasi memerlukan keberanian dan pengorbanan sejumlah orang untuk melakukan perubahan, sehingga bukan hanya menjelaskan partisipasi orang-orang dalam gerakan. Kepeloporan gerakan buruh

¹⁷ Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Muchtar Pakpahan dalam wawancara dengan peneliti April 2007. Lihat juga Muchtar Pakpahan, *Lima Tahun Memimpin SBSI Pilihan atau Panggilan*. Jakarta: Pustaka FAS, 1997. h. 137. Muchtar Pakpahan, *Rakyat Menggugat 1 Sebuah Pledoi*. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2002.

seperti pada periode-periode sebelumnya, dilakukan oleh aktivis non buruh. Mereka yang tergolong kelas menengah pada masanya yang memiliki pemikiran untuk membangun sistem sosial dan sistem politik yang lebih demokratis. Kerja para aktivis sebagian besar berupa diskusi masalah-masalah perburuhan. Tiga persoalan mendapat perhatian aktivis yaitu pengupahan, kebebasan berserikat dan pemberdayaan atau advokasi buruh baik yang telah terkena PHK atau pun yang masih aktif.¹⁸ Dalam hal pengupahan, para aktivis mengkritisi kebijakan pengupahan buruh, pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha, serta melakukan pembelaan agar terjadi perubahan kebijakan dan pengusaha mentaati kebijakan tersebut. Dalam kasus ini, para aktivis masih mengacu kepada implementasi kebijakan Depnaker dan tidak merumuskan alternatif kebijakan.

Dalam hal kebebasan berserikat, para aktivis mengacu kepada Konvenan ILO No. 87, undang-undang nomer 21 tahun 1954 yang menekankan bahwa para buruh bebas membentuk serikat buruh. Undang-undang ini direduksi oleh Kepmenaker No 01 tahun 1975 yang mengatur syarat-syarat pembentukan serikat buruh. Para aktivis mendesak dicabutnya SK Menaker tersebut dan mempersoalkan kebebasan berserikat melalui jaringan NGO internasional serta mengadukan ke ILO: Pemerintah Amerika mengancam akan mencabut fasilitas GSP (*General System Preference*) yang diberikan Indonesia jika Pemerintah tidak memperhatikan hak-hak buruh. Sedangkan para buruh Eropa berkampanye untuk tidak membeli produk Indonesia karena dibuat dengan melanggar hak-hak buruh. Demikian pula kehadiran Menaker Cosmas Batubara dalam Konferensi ILO di Genewa tahun 1992, ditolak oleh Sidang ILO

¹⁸ Pendapat ini dikemukakan oleh Danu Rudiono dalam percakapan dengan peneliti Januari 2006 di Jakarta.

karena tidak mewakili buruh. Setelah Menaker berjanji untuk memperbaiki hak-hak buruh, diterima oleh Sidang ILO. Tahun 1994 keluar dua keputusan Menaker yang bertolak belakang. SK No. KEP 15A/MEN/1994 memberikan kebebasan kepada buruh untuk berserikat di luar SPSI. SK ini merupakan tanggapan pengaduan ICFTU ke ILO bahwa di Indonesia berlangsung pelanggaran hak-hak buruh secara masif. Sedangkan Permen No. 01/MEN/1994 kembali menegaskan bahwa SPSI adalah satu-satunya organisasi pekerja baik di tingkat perusahaan maupun tingkat nasional.

Dalam hal pemberdayaan buruh, para aktivis banyak yang menerjunkan diri menjadi buruh di suatu pabrik. Mereka bekerja layaknya buruh dan tinggal bersama dengan para buruh di perkampungan atau di lokasi penampungan buruh yang disediakan perusahaan. Sambil mempelajari implementasi kebijakan ketenagakerjaan di suatu perusahaan, para aktivis menemukan berbagai penyimpangan dan mendiskusikannya dengan para buruh. Peran aktivis di sini adalah melakukan penyemaian ide-ide pergerakan, mensosialisasikan undang-undang ketenagakerjaan dan menggalang solidaritas buruh. Buah dari model pemberdayaan seperti ini adalah munculnya keberanian buruh dalam menuntut hak-haknya, terutama implementasi UMR dan kebebasan berserikat. Meningkatnya frekuensi pemogokan dan meluasnya tuntutan, tidak bisa dipisahkan dari kerja para aktivis tersebut.

C. Struktur Industri dan Partisipasi Buruh

Industrialisasi yang berlangsung sejak Pemerintah Orde Baru, sangat berhasil dalam meningkatkan pendapatan nasional dan membuka peluang kerja. Industrialisasi yang dilakukan di bawah bimbingan negara juga menggambarkan struktur industri. Konsep struktur industri seperti yang ditunjukkan pada uraian

mengenai kerangka konseptual adalah terjadinya transformasi dan diversifikasi industri mulai dari yang berbasis pada sumberdaya alam kepada sumberdaya manusia. Arah transformasi telah disusun oleh PBB (UNIDO) dengan memberi kode ISIC 31 ke ISIC 39. Semakin padat teknologi atau tenaga ahli, semakin dalam struktur industri suatu negara. Sebaliknya, industri yang hanya mengandalkan sumberdaya pertanian dan alam, kurang kandungan teknologi dan tenaga ahli. Rumusan sederhana untuk mengetahui transformasi tersebut adalah dengan memperhatikan nilai output atau nilai tambah per subsektor atau kelompok industri dalam pembentukan total nilai output dari sektor industri manufaktur.

Bagian ini menunjukkan dangkalnya industrialisasi di Indonesia yang berakibat pada pembentukan pekerja (buruh) tidak terampil. Proses ini dapat disebut sebagai *deskilling*, di mana para buruh harus melamar pekerjaan dengan menurunkan ijasanya. Para tamatan SLA melamar dengan ijazah SMP atau SD, sebab peluang kerja tersebut yang tersedia. Implikasinya adalah jenis pekerjaan yang lebih rendah dibanding kemampuan buruh dan upah yang rendah. Untuk maksud tersebut, dikemukakan dua jenis data. Pertama data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Kedua, data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

Model umum untuk menjelaskan transformasi struktural adalah dengan mencermati kontribusi sektor terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara masing-masing sektor dapat dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan kontribusi sub sektor tersebut kepada total sektoral dan daya serapnya terhadap pekerja. Untuk keperluan tersebut digunakan data sekunder hasil riset Badan Pusat Statistik berbagai tahun. Statistik industri publikasi BPS telah demikian maju dan datanya dapat dipertanggungjawabkan (Hal Hill, 1990:3).

Industri manufaktur Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pertengahan tahun 1980-an. Gambaran komprehensif mengenai struktur industri Indonesia disajikan pada Tabel 5 yang mencakup data sumbangan relatif pada nilai tambah total industri manufaktur di samping juga sumbangan relatif dalam penyerapan tenaga kerja. Pada Tabel 5 tersebut ditunjukkan bahwa struktur industri didominasi oleh industri pangan, minuman dan tembakau (rokok). Tempat kedua diduduki industri tekstil, pakaian jadi, produk kulit dan alas kaki. Kedua jenis industri ini tidak memiliki kandungan teknologi dan tidak memerlukan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi. Sedangkan untuk industri yang memerlukan keahlian sumberdaya manusia, angkanya di bawah 10 persen. Untuk industri dengan kode ISIC 38, kontribusi peralatan profesional bahkan *dapat diabaikan (negligible)*.

Tabel 7. Struktur Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja (1986)¹⁹

| Kode | Industri | Keluaran (milyar Rp) | Penyerapan TK (ribu) |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 31 | Produk pangan, minuman, tembakau | 22,5 | 33,9 |
| 32 | Tekstil, produk tekstil, produk kulit, alas kaki | 10,6 | 32,8 |
| 33 | Produk kayu dan mebelair | 8,9 | 11,6 |
| 34 | Produk kertas, percetakan dan penerbitan | 2,6 | 3,4 |
| 35 | Kimia dasar, Migas, produk karet dan plastik | 36,2 | 11,6 |
| 36 | Porselin, produk gelas, semen, produk bangunan, bahan tambang | 4,4 | 7,5 |
| 37 | Logam Dasar | 5,6 | 0,7 |
| 38 | Produk Logam, mesin, peralatan listrik, peralatan transpor dan peralatan profesional | 9,2 | 9,6 |
| | TOTAL | 100 | 100 |

Sumber: diolah kembali dari Hal Hill (1990b:84)

Untuk mengetahui perubahan struktur industri sejak awal industrialisasi, dikemukakan Tabel 8 yang menunjukkan perbandingan dengan data tahun 1975 di mana Indonesia sedang mengawali industrialisasi. Tabel 8 ini menunjukkan bahwa baik sumbangan relatif terhadap keluaran maupun penyerapan tenaga kerja, telah terjadi perubahan struktural. Selama kurun waktu 1975-1986 terjadi perubahan di mana industri yang lebih padat karya yang berhubungan dengan sektor pertanian seperti pangan, minuman dan tembakau, menurun dari 72,1 persen menjadi 62,2 persen pada tahun 1986. Tabel tersebut juga menunjukkan di mana perubahan struktur penyerapan tenaga kerja kurang menyolok dibanding perubahan keluaran.

¹⁹ Tabel ini bersumber dari Sensus Ekonomi Nasional tahun 1986. Salah satu tujuan sensus tersebut untuk mengetahui struktur industri di era deregulasi dan debirokratisasi. Industri di sini mencakup industri besar, menengah dan kecil. Riset dengan tujuan seperti ini tidak terdapat lagi dalam sensus tahun berikutnya. Pada industri kelompok 35 termasuk migas, jika migas dikeluarkan maka angkanya hanya 10,9 milyar rupiah dengan penyerapan tenaga kerja 10,7 ribu tenaga kerja.

Tabel 8. Perubahan Struktural Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja (1986)

| ISIC | Industri | Keluaran | | Penyerapan TK | |
|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------|------|
| | | 1975 | 1986 | 1975 | 1986 |
| 31, 32, 33, 342, 355, 356, 39 | Ringan | 72,1 | 62,2 | 80,6 | 77,0 |
| 341, 351, 353, 36, 37 | Pengolahan Berat | 13,7 | 24,5 | 11,1 | 14,0 |
| 38 | Rekayasa Berat | 14,2 | 13,3 | 8,3 | 9,0 |
| | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: diolah kembali dari Hal Hill (1990b: 84)

Partisipasi angkatan kerja paling dominan di sektor tradisional. Hingga tahun 1986 setelah digenjotnya ekspor non migas sejak 1983, tidak terjadi perubahan berarti. Buruh masih terkonsentrasi di sektor industri ringan dengan 77 persen. Sampai tahun 1986 ini tidak terjadi pendalaman industri dan masih berorientasi pada investasi-investasi industri ringan yang padat karya yang produknya berorientasi ekspor. Sementara dilihat dari kontribusi terhadap pembentukan PDB, pada tahun 1997 sektor industri hanya menyumbang 22,63 persen (tahun 1983 menyumbang 18,3 persen) dengan partisipasi pekerja mencapai 12,36 persen (Tambunan, 2001:32). Krisis ekonomi pada tahun 1998 yang memicu pemutusan hubungan kerja telah menurunkan jumlah buruh dari 32,86 persen dari total pekerja menjadi 27,33 persen pada tahun 2002. Sejalan dengan itu meningkat proporsi pekerja yang menjalankan usaha dengan dibantu anggota rumah tangga.

Tabel 9. Pekerja Menurut Status Pekerjaan tahun 1998 dan 2002

| Status Pekerjaan | 1998 | | 2002 | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Berusaha Sendiri tanpa Bantuan Orang Lain | 20.523.338 | 23,41 | 17.632.909 | 19,24 |
| Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga | 19.690.059 | 22,46 | 22.019.393 | 24,03 |
| Berusaha dengan buruh tetap | 1.525.625 | 1,74 | 2.786.226 | 3,04 |
| Buruh/Karyawan | 28.805.421 | 32,86 | 25.049.793 | 27,33 |
| Pekerja Keluarga | 17.128.006 | 19,53 | 24.158.845 | 26,36 |
| Jumlah | 87.672.449 | 100,00 | 91.647.166 | 100,00 |

Sumber: SAKERNAS 1998 dan 2002

**Tabel 10. Pekerja Menurut Sektor Industri 2004 – 2007
(dalam jutaan orang)**

| Sektor Industri | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pangan, Minuman, Tembakau | 3,92 | 3,51 | 4,96 | 4,48 |
| Tekstil, Produk Tekstil, Produk Kulit, Alas Kaki | 2,29 | 2,21 | 2,24 | 2,18 |
| Produk Kayu dan mebelair | 2,71 | 2,51 | 2,68 | 3,03 |
| Kertas, Percetakan, Penerbitan | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,34 |
| Kimia dasar, Produk Karet, Plastik | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,74 |
| Porselin, Produk Gelas, Semen, Bangunan, Bahan Tambang | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 0,99 |
| Logam dasar | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Produk Logam, Mesin, Peralatan Listrik, Transportasi, Profesional | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,94 |
| Jumlah | 11,65 | 10,94 | 12,83 | 12,76 |

Sumber: BPS, berbagai penerbitan. Data diolah kembali

Tabel 11. Pekerja Menurut Klasifikasi Industri 2004 – 2007 (%)

| Klasifikasi Industri | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|
| Industri Ringan | 80,94 | 79,80 | 82,22 | 81,3 |
| Industri Pengolahan Berat | 12,36 | 12,8 | 11,38 | 11,4 |
| Industri Rekayasa Berat | 6,7 | 7,4 | 6,4 | 7,3 |
| Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS, berbagai penerbitan. Data diolah kembali

Sampai tahun 2007 struktur industri di Indonesia tidak mengalami pendalaman, bahkan oleh beberapa ahli disebut mengalami gejala deindustrialisasi (Chatib Basri, 2007; Mudrajad Kuncoro, 2007). Peranan industri ringan sangat besar dalam menyerap tenaga kerja. Sebelum krisis ekonomi (1997) industri ringan mempekerjakan 77 persen dari total angkatan kerja, sedangkan pada tahun 2007 sektor ini mempekerjakan 81,3 persen angkatan kerja. Sedangkan industri rekayasa berat dan industri berat relatif konstan (Tabel 7). Gejala deindustrialisasi oleh Basri (2007) ditunjukkan dengan semakin menurunnya kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDB. Sedangkan Kuncoro (2007) menunjukkan bahwa deindustrialisasi terutama terjadi di industri padat karya. Dengan menggunakan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di mana ekspor industri padat karya menurun tajam, penutupan usaha dan relokasi industri, deindustrialisasi telah menambah angka pengangguran. Deindustrialisasi menurut Kuncoro disebabkan oleh (1) kenaikan biaya produksi sehingga tidak efisien, (2) membanjirnya impor barang industri yang lebih murah khususnya dari China dan Taiwan. Sementara Basri berpendapat bahwa faktor penegakan hukum dan efisiensi produksi lebih penting dibanding faktor lainnya.

Data sekunder tersebut sangat penting untuk memberi gambaran mengenai hubungan struktur industri dan partisipasi buruh. Keputusan untuk menggunakan data sekunder ini diambil mengingat sangat sukar dan mahal untuk mengkaji struktur industri dengan data primer. Untuk mendapatkan gambaran mengenai partisipasi buruh lebih lanjut, berikut ini dikemukakan uraian partisipasi buruh dari sudut pandang nara sumber yang mencakup keanggotaan dan lapangan pekerjaan utama.

Semua serikat buruh yang dijadikan sampel penelitian, tidak memiliki data akurat mengenai jumlah anggota. KSPSI tetap menjadi pilihan utama para buruh dengan menghimpun lebih dari 2,5 juta, diikuti SBSI dengan 698 ribu anggota. Sisanya menghimpun anggota di bawah 150 ribu orang, KOSBI bahkan hanya mampu menarik 5.000 orang²⁰. Daerah-daerah industri merupakan basis utama serikat buruh. Daerah industri dijadikan sasaran penggarapan para aktivis untuk menarik anggota. Di daerah ini tinggal ribuan buruh yang bekerja di perusahaan sekitar²¹. Lingkungan seperti ini sangat kondusif untuk memahami praktek hukum ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan dan isu-isu perburuhan lainnya. Sebab pembicaraan mengenai apa yang seharusnya (*what should be*) terjadi dapat langsung dikontraskan dengan apa yang benar-benar terjadi. Para buruh mudah memahami di mana letak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Semua pertemuan informal dapat dijadikan media sosialisasi dan informasi mengenai serikat buruh. Pertemuan arisan, pengajian maupun acara syukuran (menyunatkan anak, ulang tahun, perkawinan), tidak terbebas dari pembicaraan mengenai kesejahteraan buruh,

²⁰ Hanya SBSI yang memiliki administrasi baik termasuk catatan keuangan dan keanggotaan. Serikat Buruh lain hanya menyatakan perkiraan. Jadi angka-angka yang disebut tidak tepat.

²¹ Peneliti tinggal selama satu minggu di komunitas buruh Ciracas Jakarta Timur. Di daerah ini terdapat beberapa perusahaan besar seperti PT Centex yang memproduksi tekstil, PT Mustika Ratu yang memproduksi alat-alat kosmetika, PT Kong Huan yang memproduksi makanan kaleng dan sebagainya.

kebebasan berserikat dan serikat buruh yang dinilai paling konsisten memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kecuali SPSI, hampir semua serikat buruh menggunakan korban PHK dari perusahaan asal korban untuk merekrut para buruh menjadi anggota SB. Korban PHK setelah memperoleh pendampingan dan pembelaan atas kasusnya, dijadikan relawan yaitu orang yang diminta oleh para aktivis dan pimpinan serikat buruh untuk menjadi juru kampanye dan merekrut anggota di pemukiman buruh. Motivasi relawan adalah *berjuang* untuk membela kaum buruh dan kaum lemah yang dilemahkan oleh pengusaha dan pejabat negara²². Oleh sebab itu dalam mengkampanyekan serikat buruh dan pentingnya para buruh bergabung, pengusaha dan pejabat negara menjadi sasaran kritik para relawan. Para relawan adalah orang-orang muda yang memiliki militansi tertentu dengan kepercayaan diri yang tinggi. Perbendaharaan kata *kiri*, seperti kapitalisme, neoliberalisme, eksploitasi buruh dan penindasan buruh oleh modal, melekat dalam percakapan sehari-hari. Satu hal penting yang membedakan para relawan atau aktivis ini dengan buruh pada umumnya adalah keyakinannya akan aksi-aksi kolektif melalui serikat buruh dan kemungkinannya untuk sukses.

Di komunitas buruh, hubungan berdasarkan etnis dan asal daerah jauh lebih kuat dari pada agama. Ikatan etnis berperan penting dalam rekrutmen buruh di suatu perusahaan dan pada akhirnya juga partisipasi dalam gerakan buruh. Tokoh yang berjasa membawa buruh untuk bekerja di perusahaan, akan menjadi panutan dalam pergaulan sehari-hari. Pada waktu-waktu tertentu tempat tinggal tokoh menjadi pusat berkumpulnya para buruh dan tokoh memberikan beberapa nasehat, mulai dari

²² Bandingkan dengan motivasi para aktivis buruh di Belanda seperti yang diteliti oleh Klandermans dan Oegema (1987:522). Di Indonesia kata *berjuang* selalu digunakan oleh para relawan dan aktivis yang menunjukkan unsur pertentangan kolektif yang jelas. Di Belanda kepentingan para aktivis buruh adalah untuk mencegah penurunan kesejahteraan.

bersikap di tempat kerja sampai pergaulan sehari-hari. Kebiasaan meminjam uang, alat masak, pakaian dan alas kaki, berlangsung antar buruh dalam ikatan etnik dan daerah asal. Kebiasaan seperti itu menunjukkan perkawanan yang kuat dan nyaris tanpa jarak. Ikatan demikian juga berperan penting dalam menampung calon pekerja yang baru datang dari daerah. Dalam melamar pekerjaan, hubungan sosial memainkan peranan penting. Berkat jasa menghubungkan ini, tokoh nantinya sangat berpengaruh dalam tindakan buruh sehari-hari, termasuk partisipasinya dalam gerakan buruh. Dengan pola seperti ini, hubungan *patron client* sesungguhnya tidak hilang dalam komunitas buruh.

Partisipasi buruh dalam gerakan buruh rendah. Menurut Sri Widiyati²³ pengurus UK SPSI PT MR, hanya sekitar 2 persen buruh PT MR yang berhubungan dengan pengurus UK. Namun jika ada masalah, para buruh kompak. Ketakutan buruh untuk aktif dalam serikat buruh antara lain disebabkan oleh ketakutannya berurusan dengan manajemen perusahaan yang berakibat dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Ketika wawancara untuk rekrutmen, para buruh telah berjanji tidak akan melakukan protes dan pemogokan. Jika perusahaan sedang menghadapi masalah, para buruh juga berjanji untuk memahami dan membantunya. Oleh sebab itu gerakan buruh yang berhadapan dengan pengusaha, menakutkan para buruh. Selain itu stigma bahwa gerakan buruh merupakan aktivitas kaum kiri masih kuat dalam benak para buruh. Ikut dalam gerakan berarti harus siap kehilangan pekerjaan, berhadapan dengan aparat keamanan dan merusak hubungan personal dengan pihak pemberi kerja. Cara-cara protes dan pemogokan serta melawan pengusaha yang telah berjasa memberikan pekerjaan, adalah cara-cara kaum komunis.

²³ Wawancara April 2006.

Pandangan bahwa gerakan buruh identik dengan kaum kiri, masih kuat di benak para buruh. Ketakutan yang bersumber pada trauma masa lalu, seperti penindasan dan pengebirian hak-hak sosial ekonomi, menjadi hambatan mental para buruh. Dalam kondisi seperti ini tidak muncul independensi. Teknik penguasaan bukan dengan penindasan, melainkan dengan simbol-simbol kultural seperti hutang budi, dikedepankan terus untuk mengendalikan buruh. Pengendalian dengan persetujuan secara sadar semacam ini oleh Gramsci (Roger Simon, 2000:15) disebut hegemoni. Kondisi ini mampu bertahan tidak terlepas dari tingginya pengangguran. Dalam situasi *oversupply* tenaga kerja, para buruh lebih mandahulukan keselamatan (*safety first*) dengan mempertahankan pekerjaan yang ada. Partisipasi buruh dalam gerakan buruh dianggap membahayakan kelangsungan pekerjaan, sehingga dapat dipahami jika jumlah partisipan kecil.

Hampir semua serikat buruh yang dikaji mengandalkan buruh industri ringan. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Reformasi (FSPTSK Reformasi) telah memisahkan diri dari KSPSI tahun 1999²⁴, tulang punggung KSPSI berubah di sektor makanan, minuman, pertanian, perkebunan, kehutanan dan tembakau. Keanggotaan KSPSI 85 persen berasal dari buruh industri padat karya, sehingga pelatihan yang diprogramkan tidak berjalan²⁵. Sedangkan SBSI mengandalkan sektor buruh perkebunan dan buruh industri tekstil dan alas kaki. Demikian pula serikat buruh yang lebih kecil seperti SBMS, PPMI, KBM, Gasbiindo dan KOSBI. Selain

²⁴ Sebelumnya FSPTSK menjadi tiang utama penyangga SPSI. Setelah memisahkan diri tahun 1999 dengan nama FSPTSK Reformasi, SPSI mengalami penurunan jumlah anggota yang drastis. Tahun 1999 terjadi pergolakan dalam tubuh SPSI, di mana hampir semua sektor atau SBLP bermaksud memisahkan diri. Dalam Kongres ke III di Solo (2003) FSPTSK mengubah namanya menjadi Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) diketuai oleh R. Aksan. Kini SPN dipimpin oleh Bambang Wirahyoso.

²⁵ Wawancara dengan Ketua KSPSI Sjukur Sarto April 2007.

jumlah buruh industri ringan paling banyak, juga masalah hubungan industrial di sektor ini paling rawan. Misalnya, tingginya pelanggaran upah, tingginya PHK sepihak dan keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah.

Jumlah anggota menjadi ukuran kebesaran gerakan buruh. Sebab itu para aktivis terus berupaya meyakinkan buruh pentingnya mereka bergabung dalam gerakan. Protes dan demonstrasi yang ditandai dengan pengerahan massa, menjadi momentum penting untuk menilai kekuatan gerakan buruh. Dalam protes menentang revisi undang-undang No. 13 tahun 2003 awal tahun 2006, para pimpinan serikat buruh diberi target pengerahan massa. Massa terbesar adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang mengepung Jakarta selama sehari penuh. Sedangkan Gasbiindo, PPMI, SERPI dan KOSBI, tidak terlihat massanya secara fisik yang dapat diamati dari ikat kepala yang dikenakan. Kecenderungan mengukur kekuatan gerakan secara kuantitatif, mengabaikan kualitas gerakan, seperti jumlah perjanjian kerja bersama yang berhasil dibuat, pendidikan para kader, pelatihan organisasi dan teknik-teknik negosiasi dan sebagainya.

Kebijakan Menaker dan perusahaan turut mempengaruhi pola seperti di atas, sebab dalam berbagai forum, seperti Dewan Pengupahan, pengiriman delegasi ke pertemuan buruh internasional dan bipartit, pemerintah dan pengusaha hanya memperhitungkan serikat buruh yang besar²⁶. Akibatnya serikat buruh yang mengejar kualitas, sering tertinggal dalam forum buruh dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara kelembagaan. Kalah massa ini juga mengakibatkan para buruh kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan pengusaha.

²⁶ Seperti dikemukakan oleh Rekson Silaban, Dita Indah Sari dan HM Rodja dalam wawancara dengan peneliti.

Industrialisasi di Indonesia berbeda perkembangannya dibanding Korea Selatan. Korea Selatan memulai industrialisasi tahun 1954 dengan fokus pada industrialisasi substitusi impor (ISI). Kebijakan ini berlangsung sampai tahun 1961 yang berhasil berkat pasokan tenaga kerja murah dari pedesaan. Oleh karena ISI menekankan pada industri berat, hanya mampu menampung 4,9 persen pekerja (Hyung-Seong Yu, 1993:271). Periode kedua dengan kebijakan industri berorientasi ekspor (IOE) ditandai dengan campur tangan negara yang besar. Intervensi negara dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan industri, mendisiplinkan buruh, mencegah gerakan buruh yang *genuine* dan membasmi serikat buruh yang tidak patuh. IOE dipadati dengan industri padat karya dan menyediakan lapangan kerja yang luas bagi buruh namun tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi. Kontrol ketat negara berdampak pada rendahnya keanggotaan serikat kerja. Hanya 12,4 persen pekerja yang menjadi anggota FKTU. Namun di luar FKTU berkembang gerakan buruh tidak terorganisasi, protes, pemogokan dan perlawanan sehari-hari (Hyung-Seong Yu, 1993:273).

Sampai pada tahap tersebut, industrialisasi dan gerakan buruh di Indonesia tidak berbeda jauh dengan Korea Selatan. Setelah industrialisasi tahap ketiga yang lebih fokus pada industri berat dan kimia, mengubah secara kualitatif struktur industri di Korea Selatan. Pada awal tahun 1980-an, proporsi pekerja yang bekerja di industri berat dan kimia menyamai pekerja di industri ringan. Jika industri ringan hanya melahirkan komunitas kelas pekerja yang sangat penting dalam membangkitkan kesadaran dan solidaritas, maka industri berat lebih maju lagi, yaitu mempertajam isu-isu pekerjaan, upah yang sesuai dengan resiko pekerjaan, jam kerja, alih teknologi dan kompetisi dengan industri sejenis di negara lain. Implikasi

lebih lanjut dari struktur industri ini adalah pengorganisasian buruh yang berdasarkan lapangan pekerjaan (*industrial union*). Fragmentasi gerakan buruh lebih didasarkan kepada ketrampilan dan lapangan kerja yang lebih kualitatif sebab isu lapangan kerja yang berbeda-beda.

Di Indonesia, industrialisasi belum mampu mengembangkan industri berat dan kimia serta mesin-mesin berteknologi tinggi. Akibatnya konsentrasi buruh di industri ringan. Fragmentasi gerakan buruh yang muncul dan berkembang kemudian adalah fragmentasi yang tidak berdasarkan ketrampilan kerja dan penguasaan teknologi, tetapi mengambil fragmentasi sosial dan politik. Selain faktor ini, warisan sejarah di mana gerakan buruh tidak bisa memisahkan diri dari politik, perkembangan demokrasi dan krisis ekonomi, turut mempengaruhi berkembangnya gerakan buruh dualistik yang lebih fokus kepada persoalan-persoalan politik

Melalui kajian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, selama 40 tahun industrialisasi di Indonesia tidak mengalami pendalaman. Industri andalan tetap minyak dan gas bumi, sedangkan partisipasi buruh lebih 80 persen masih di industri ringan. Jenis industri seperti ini tidak memerlukan ketrampilan kerja yang tinggi. Akibatnya, isu-isu perburuhan didominasi oleh persoalan klasik seperti pengupahan dan tunjangan hari raya. *Kedua*, seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk jenjang sekolah lanjutan²⁷, tidak berlangsungnya pendalaman industri mengakibatkan terjadinya *deskilling*, di mana para pencari kerja melamar pekerjaan dengan menurunkan ijazah yang sebenarnya dan menggantinya dengan ijazah yang lebih rendah. Hal demikian dilakukan untuk menyesuaikan

²⁷ Merujuk Sensus Penduduk tahun 2000, APS untuk sekolah dasar mencapai 99 persen, SLTP mencapai 89 persen dan SLTA mencapai 67 persen.

peluang kerja yang ada. Pada level ini berlangsung kemubaziran sumberdaya manusia, di mana investasi pendidikan tidak menghasilkan *output* yang setara. Implikasi yang lebih serius adalah hilangnya motivasi kerja, rendahnya produktivitas kerja dan upah yang tidak sesuai dengan produktivitasnya. *Ketiga*, mengingat upah buruh rendah, status rendah, maka usaha-usaha untuk meningkatkan kedua hal tersebut dilakukan melalui mekanisme non konvensional, yaitu bergabung dengan serikat buruh, melakukan tekanan kepada pihak manajemen dan pemerintah, jika gagal dengan negosiasi mereka melakukan demonstrasi dan pemogokan. Mekanisme kelembagaan tidak berkembang, sebab buruh menuntut upah naik baik untuk menyesuaikan inflasi maupun kenaikan harga, sementara pengusaha menuntut upah harus sesuai dengan produktivitas kerja. *Keempat*, gerakan buruh sebagai kekuatan untuk melakukan kontrol maupun mobilisasi, terfragmentasi berdasarkan ikatan-ikatan sosial politik dan bukannya lapangan pekerjaan karena isu-isu peningkatan kualitas kerja tidak relevan dalam industri ringan. Persoalan ini memiliki implikasi luas, seperti terus langgengnya gerakan buruh dualistik, yaitu gerakan buruh yang lebih fokus pada persoalan-persoalan sosial dan politik seraya mencari celah untuk mempengaruhi pemerintah agar kebijakan perburuhan lebih berpihak kepada buruh.

BAB VII
KONTINYUITAS
FRAGMENTASI DAN
KELEMAHAN GERAKAN
BURUH PASCA ORDE
BARU

BAB VIII

KONTINYUITAS FRAGMENTASI DAN KELEMAHAN

GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU

A. Romantisme Politik

SOBSI berhasil dalam kepemimpinan gerakan sosial buruh tahun 1950-an sampai awal 1960-an. Nasionalisasi perusahaan asing dan pembentukan Dewan Buruh mulai dari tingkat perusahaan sampai tingkat nasional adalah program SOBSI yang paling radikal. Program ini memiliki kandungan ideologis sosialis-nasionalis, sehingga juga diikuti oleh serikat buruh lainnya, seperti KBKI. Meskipun militer paling diuntungkan dengan program nasionalisasi, SOBSI sebagai pencetus dan garda depan implementasi, dikenang sebagai gerakan buruh yang memiliki program jelas dan berani melaksanakannya.

Kehebatan SOBSI adalah ideologinya. Dengan mewarisi serikat buruh kereta api masa kolonial, SOBSI merupakan gerakan buruh yang secara tegas memperjuangkan masyarakat sosialis-komunis. Ajaran sosialisme-komunisme menjadi materi pelatihan dan pendidikan kader buruh, sehingga para kader mulai dari tingkat perusahaan (basis) sampai tingkat pusat bukan hanya disaring berdasarkan kualitas kepemimpinan, melainkan juga pengetahuan mengenai sosialisme-komunisme. Dibandingkan serikat buruh lain di masanya, SOBSI lebih *genuine* dan militan, sehingga tidak mudah “terbeli” oleh kekuatan lain¹.

Militansi inilah yang merupakan salah satu kekuatan SOBSI, sehingga mampu memelihara pertentangannya dengan kekuatan sosial lain dalam masyarakat. Menurut pandangan tokoh Serbuki tersebut, gerakan buruh sekarang miskin ideologi, miskin pemikiran dan mengejar kepentingan sesaat yaitu uang dan jabatan di pabrik. Gerakan seperti ini sejak masa Pergerakan mudah mengalami perpecahan dan tidak

¹ Wawancara dengan Tjasman (mantan Ketua SOBSI) pada April 2005

akan memperbaiki nasib buruh, tetapi hanya untuk pimpinannya. Ideologi merupakan cita-cita sekaligus ajaran yang membimbing gerakan. Perbedaan gerakan buruh yang satu dengan lainnya terletak pada ideologi. Meskipun lapangan pekerjaannya berbeda-beda, tetapi dapat diikat dalam satu cita-cita yaitu ideologi.

Terlepas dari ketidaksetujuannya terhadap ideologi SOBSI, gerakan buruh semacam ini menjadi harapan para aktivis buruh pasca Orde Baru. Pada masa Soeharto pun, SOBSI menjadi rujukan para aktivis gerakan buruh tahun 1960-an yang kecewa dengan FBSI. Diakui oleh para aktivis lama seperti Agus Sudono, Ali Djunaedi, Munir, Saiful DP dan Manganar Pasaribu², bahwa serikat buruh mereka pada tahun 1960-an tidak sekuat dan se-militan SOBSI. Meskipun sakit hati dengan tindakan SOBSI, mereka mengakui bahwa pembelaan SOBSI terhadap buruh jauh lebih militan dan *genuine*.

“Pada masanya SOBSI adalah gerakan buruh terkuat dengan anggota terbanyak. Mereka hebat dalam mengumpulkan dan memobilisasi massa, meskipun seringkali tidak rasional. Misalnya buruh dijanjikan kenaikan upah, pada hal perusahaan terseok-seok³.”

Gerakan buruh akan tumbuh kuat dalam perekonomian yang juga secara terus menerus mengalami pertumbuhan. Untuk itu, stabilitas politik yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi harus diciptakan. Pemerintah perlu aktif untuk merencanakan pembangunan ekonomi. Peran seperti ini disokong oleh semua gerakan buruh yang tersisa termasuk FBSI yang dibentuk tahun 1973.

FBSI dapat menerima peran pemerintah dan terutama militer dalam pembangunan, sebab yang diperlukan Indonesia pada akhir tahun 1960-an adalah stabilitas politik, penundaan pembayaran utang luar negeri, investasi dan bantuan dari negara donor untuk mengentaskan kemiskinan. Peran besar

² Wawancara dengan Agus Sudono (Gasbiindo) September 2006, Manganar Pasaribu (KBM) Oktober 2007, Djunaedi Ali (Sarbumusi) Oktober 2007, Munir (KOSBI) Nopember 2007.

³ Wawancara dengan Agus Sudono (Gasbiindo) September 2006.

pemerintah diperlukan sebab tidak ada kekuatan sosial yang mampu memimpin perubahan masyarakat⁴.

KBKI/KBM, Gasbiindo dan Sarbumusi secara diam-diam berebut pengaruh pemerintah khususnya terhadap kelompok-kelompok militer yang kuat, yaitu Opsus dan Golkar, sambil mengharapkan mereka akan menggantikan peran SOBSI jika ekonomi meningkat. Sebab itu mereka bersedia keliling Eropa untuk meyakinkan calon investor bahwa buruh Indonesia bukan hambatan investasi. Mereka juga cepat menyesuaikan diri dengan agenda politik militer, termasuk restrukturisasi serikat buruh.

Menurut Agus Sudono, hanya dalam perekonomian yang maju, gerakan buruh dapat tumbuh dengan kuat. Tanpa pertumbuhan ekonomi, tidak akan tercipta lapangan kerja dan kelas buruh tidak akan tumbuh. Sebab itu pengusaha dan buruh merupakan kekuatan yang saling menopang dan harus saling bekerjasama. Format hubungan industrial yang tepat untuk Indonesia, bukanlah konflik kelas seperti diperjuangkan SOBSI, melainkan partner dalam produksi, partner dalam keuntungan dan partner dalam perjuangan. Syarat yang diperlukan untuk itu adalah transparansi manajemen khususnya pengelolaan keuangan. Serikat buruh di suatu perusahaan akan melakukan kontrol. Ketika perusahaan dalam tahap perkembangan, serikat buruh bersama dengan pengusaha berjuang untuk membesarkan perusahaan. Ketika perusahaan mencapai tahap kedewasaan di mana keuntungan telah demikian besar, maka perusahaan harus membayar buruh sesuai dengan kemampuan keuangannya. Di sini prinsip partner dalam keuntungan harus diimplementasikan. Format hubungan seperti itu tidak bisa diterapkan, sebab selama Orde Baru pemerintah

⁴ Wawancara dengan Agus Sudono (Gasbiindo) September 2006

berpihak kepada pengusaha. Kebijakan-kebijakan perburuhan, mulai dari pengupahan, jaminan sosial sampai serikat buruh, didesain untuk membela pengusaha. Bahkan kebijakan-kebijakan itu dipertahankan dengan penindasan terhadap hak-hak buruh. Para aktivis buruh Orde Lama ini tidak membayangkan bahwa pemerintah Orde Baru akan mengembangkan sistem pengekangan hak-hak buruh yang otoriter. Usaha membangun gerakan buruh yang militan, akan disamakan dengan membangun kekuatan sosialis-komunis dan sebab itu mudah ditindas.

Sebab itu ketika Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, gerakan buruh lama dibangkitkan⁵ kembali oleh para aktivis lama atau mereka yang memiliki hubungan ideologis dan emosional dengan harapan dapat menggantikan peran SOBSI dalam perjuangan buruh. Para aktivis ini mengharapkan kembalinya peranan serikat-serikat buruh lama dalam hubungan industrial di Indonesia. Harapan ini didukung oleh beberapa fakta. Pertama, lahirnya kembali partai-partai lama dengan pola pengorganisasian seperti masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Pola aliran yang dikembangkan oleh partai-partai pada masa itu, diyakini akan muncul kembali dan serikat buruh akan berperan sebagai salah satu *onderbouw* partai. Pola seperti ini sukar dihilangkan, sebab berakar pada kultur masyarakat Indonesia yang kuat. Kultur yang dimaksud adalah realitas yang tidak bisa ditolak bahwa terdapat pembelahan struktural masyarakat Indonesia yang tidak menipis atau menghilang seperti yang diharapkan para penganjur teori modernisasi. Berbagai pola

⁵ Para nara sumber menolak konsep *dihidupkan*, sebab serikat buruh mereka tidak pernah mati, hanya tidak aktif menjalankan fungsinya karena dilarang oleh pemerintah. Deklarasi Sarbumusi misalnya bertema "Kebangkitan dan Berfungsinya kembali Sarbumusi", KBM beserta eksponen Marhaen menyatakan *kebangkitan* kaum marhaen.

pengorganisasian massa meskipun muncul basis fungsional dan ideologi sekuler lain, sulit untuk meninggalkan agama.

Kedua, selama empat dasawarsa pembangunan ekonomi telah berhasil menambah kekuatan buruh. Pertumbuhan kelas buruh demikian signifikan yang tidak bisa diabaikan dalam konstelasi politik lokal maupun nasional. Di era ekonomi kapitalistik seperti awal milineum ketiga ini, isu-isu perburuhan akan terus menguat seiring dengan pertumbuhan kelas buruh. Tidak ada kebijakan perburuhan yang tidak dikritisi serikat buruh, beberapa di antaranya ditolak melalui demonstrasi. Keberhasilan gerakan buruh Indonesia menyusun draf rencana undang-undang perburuhan (ketenagakerjaan), RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penolakan para buruh atas revisi undang-undang ketenagakerjaan dan penolakan Keputusan Menaker yang tidak berpihak kepada buruh, adalah beberapa bukti yang dapat disebut.

Tokoh-tokoh buruh Orde Lama yang aktif kembali pasca Soeharto adalah Agus Sudono (Gasbiindo), Munir (Gasbiindo, SERPI, KOSBI), Alie Ermas (Gasbiindo, SERPI), Djufnie Ashary (Gasbiindo, FARKES Reformasi), HM Yahya (PPMI, GOBSI), Sutanto Martoprasono, Ali Djunaedi (Sarbumusi), Syaiful DP (Gasbiindo, FSP KEP Reformasi), Madjuri (KBKI, FBI), Manganar Pasaribu (KBM) dan Moh. Ali (KBKI). Para tokoh buruh Orde Lama ini memiliki pemikiran bahwa gerakan buruh tidak bisa memisahkan diri dari politik⁶. Sejak kelahirannya, gerakan buruh di Indonesia menyatu dengan gerakan politik. Demikian pula pada masa perjuangan kemerdekaan. Puncaknya adalah adanya hubungan organisatoris antara

⁶ Wawancara dengan Agus Sudono (GASBIINDO) Manganar Pasaribu (KBM) dan Ali Djunaedi (Sarbumusi).

gerakan buruh dengan partai-partai politik. Seperti dijelaskan pada bab 5, partai-partai membangun pola aliran untuk berkomunikasi dan memperoleh dukungan massa. Semua bidang kehidupan dijadikan basis sosial dukungan, sehingga untuk buruh dapat ditemukan buruh marhaen, buruh NU, buruh Katolik dan sebagainya. Pada masa Orde Baru, gerakan buruh juga menjadi bagian penting dari kekuatan Golkar. Buruh dihimpun dalam wadah tunggal dan dimobilisasi untuk mendukung Golkar. Buruh tidak mampu mengaktualisasikan ide dan aspirasinya karena penindasan militer yang berarti juga politisasi. Hal ini menunjukkan bahwa buruh merupakan kekuatan sosial yang selalu diperhitungkan dalam politik nasional. Selain itu para aktivis buruh perlu menyadari bahwa tanpa dukungan dan kerjasama dengan partai politik, tidak mungkin bisa memperbaiki kesejahteraan buruh⁷.

Pandangan bahwa suatu gerakan memerlukan ideologi yang jelas, bukan monopoli SOBSI, tetapi juga tokoh buruh Orde Lama lainnya. Para aktivis lama masih yakin bahwa peta ideologi politik tahun 1950-an akan berkembang kembali pasca Soeharto.

“Partai-partai politik akan membangun pola aliran seperti halnya masa Orde Lama di mana buruh akan diperebutkan oleh partai-partai. Demikian pula petani dan yang lain-lainnya. Akan muncul buruh nasionalis, buruh islam seperti jaman Orde Lama, sebab itulah bangunan dasar politik Indonesia yaitu politik untuk memperjuangkan keyakinan dan ideologi”⁸.

Gerakan-gerakan yang muncul nantinya akan menginduk kepada partai politik sebagai organisasi yang secara sah berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan menyusun kebijakan. Ideologi partai disebarluaskan lebih lanjut oleh gerakan-gerakan yang menjadi *onderbouw*. Kenyataannya, partai-partai politik yang muncul

⁷ Wawancara dengan Manganar Pasaribu Oktober 2007.

⁸ Wawancara dengan Manganar Pasaribu Oktober 2007.

semuanya mengusung ideologi nasionalisme, sosialisme, Islam, Kristen, Katolik dan etnik atau daerah. Pembangunan yang dilakukan selama masa kepemimpinan Soeharto hanya menegaskan kekuatan tengah (nasionalis). Pertumbuhan kekuatan tengah demikian pesat, sehingga partai-partai yang muncul untuk memperebutkan suara kelompok ini juga demikian banyak. Perpecahan partai-partai politik baik sebelum maupun sesudah Orde Baru, tidak didasari pada ideologi, tetapi lebih pada kepentingan sempit para aktivis dan pengurus. Sementara peta ideologi tidak bergeser jauh dari tahun 1950-an, sebab itulah basis sosial masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Jika ada perubahan adalah tenggelamnya ideologi sosialis-komunis dan munculnya ideologi liberal dari kalangan usahawan, termasuk di dalamnya para usahawan muda yang dibesarkan oleh kapitalisme negara dan kapitalisme rente. Usahawan jenis ini mulai menguasai Golkar sejak awal tahun 1990-an.

Dari peta ideologi partai tersebut, pada masa Orde Lama gerakan buruh yang kuat mengusung ideologi komunisme dan sosialisme. Tetapi dua ideologi tersebut masih sulit untuk bangkit dan berkembang di Indonesia. Kecuali adanya hambatan struktural berupa Ketetapan MPRS No. XXV/1966, juga adanya trauma kolektif atas pembantaian massal tahun 1965-1967. Namun sejak tahun 1998 mulai tumbuh partai politik dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan sosialisme, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Peristiwa G 30 S oleh para aktivis buruh diakui sebagai hambatan terbesar untuk membangun kesadaran dan solidaritas buruh. Pengalaman akan penyiksaan fisik dan ekonomi yang dialami oleh sanak keluarga, tetangga maupun cerita yang didengar dari orang tuanya, telah tertanam di benak pekerja yang lahir tahun 1970-an

maupun 1980-an. Tidak kalah pentingnya adalah pendidikan yang mereka peroleh di sekolah mengenai citra buruk komunisme dan sosialisme, benar-benar telah mencuci pikiran para buruh. Oleh Agus Sudono situasi seperti itu disebutnya sebagai prestasi Orde Baru dalam membasmi komunis.

“Kesulitan kaum buruh menerapkan teori kelas karena teori tersebut utopis, bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia, sehingga dihadapi semua lapisan masyarakat secara bersama. Psikologi massa seperti ini adalah prestasi pemerintah, oleh karena gaung besar gerakan buruh adalah melawan pengusaha, phobia terhadap komunis sering diartikan phobia kepada buruh”.⁹

Semua bentuk perbedaan kepentingan dengan pengusaha dan keamanan diberi label “kiri” yang disamakan dengan komunisme. Cara pandang seperti ini adalah hasil depolitisasi Orde Baru.

Menghadapi situasi demikian, para aktivis buruh Orde Lama tetap optimis bahwa format *onderbouw* partai politik akan kembali menguat sebab gerakan buruh tidak mungkin membebaskan diri dari politik dan gerakan buruh selalu memerlukan aliansi strategis. Selain telah ditunjukkan oleh partai-partai politik yang kembali mengusung pola aliran sejak 1999, sejumlah tokoh lama yang tidak punya peluang aktualisasi, muncul kembali untuk memimpin aliran ini. Lima partai besar pemenang Pemilu 1999, hanyalah Golkar yang bukan warisan aliran. Para tokoh buruh yang lahir dari gerakan buruh memerlukan mobilitas vertikal. Posisi yang tepat bagi mereka adalah partai-partai politik. Sebab itu hubungan partai politik dan gerakan buruh adalah hubungan yang permanen yang didasarkan pada ideologi.

Namun pemikiran para aktivis buruh lama tersebut setelah lebih dari tujuh tahun berjalan, tidak menunjukkan tanda-tanda menguatnya hubungan gerakan buruh dengan partai politik. KBM, KBKI, KOSBI, SERPI, Gasbiindo, Sarbumusi dan

⁹ Wawancara dengan Agus Sudono (Gasbiindo) Oktober 2007

GOBSI yang didirikan kembali oleh para tokoh buruh lama, tidak dapat menjalankan aktivitas layaknya sebuah gerakan. Kelemahan utama dari serikat buruh tersebut adalah kekaburan anggota atau pengikut gerakan. Kekaburan ini dapat ditemukan dari sulitnya menemukan para pengikut atau anggota gerakan tersebut di perusahaan-perusahaan atau komunitas buruh yang mereka klaim sebagai basisnya. Selain itu kekaburan juga ditunjukkan dari tidak adanya aktivitas organisasi gerakan seperti musyawarah, kongres, musyawarah kerja yang melibatkan pengurus di berbagai level. Oleh sebab itu tidak pernah berlangsung struktur mobilisasi dan aksi-aksi kolektif. Serikat buruh di atas sekedar wadah tanpa berfungsi sebagai struktur mobilisasi.

Kekaburan anggota menyebabkan hilangnya fungsi gerakan. Dalam gerakan sosial, wadah penting tetapi yang tidak kalah penting adalah para pendukung gerakan, sehingga dapat dibentuk kerangka aksi kolektif. Tanpa pendukung gerakan yang merupakan kekuatan utama gerakan sosial, sebuah wadah tidak dapat berperan sebagai struktur mobilisasi dalam rangka membangun kerangka aksi kolektif untuk menetapkan tujuan perubahan. Dalam hal ini para aktivis lama telah lama meninggalkan arena perburuhan dan selama masa penindasan dan kekewaan buruh tahun 1990-an, mereka tidak muncul membela buruh. Romantisme yang dibangkitkan kembali pasca Soeharto, kehilangan daya tarik bagi buruh. Tokoh-tokoh ini beserta ideologi gerakan yang ditawarkan tidak lagi mengakar, sehingga wadah yang dibangun hanya merupakan forum diskusi para aktivis lama. Diakui oleh para aktivis bahwa mereka tidak dikenal oleh kaum muda dan cerita pengalaman mereka kepada para buruh, tidak mendapat respon positif.

“Dibanding para pemimpin buruh sekarang, kami memang sulit untuk berkomunikasi dengan para buruh. Kami bercerita dulu tentang masa lalu dan perjuangan kami. Juga melalui orangtua mereka yang masih hidup, kami bisa membangkitkan kembali gerakan ini, yang tidak kalah penting adalah peranan Kyai”¹⁰.

Tetapi diyakini bahwa hal ini hanya masalah waktu. Sejak kebangkitannya kembali, serikat buruh lama ini tidak menyelenggarakan kongres, sehingga kepemimpinan tetap dipegang para pendiri. Meskipun memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tidak dipatuhi sehingga roda organisasi tidak berjalan.

Romantisme atas ideologi dan gerakan masa lampau seperti ini hanya menampung para aktivis politik, bukan buruh sejati. Tidak mengherankan jika tema-tema diskusi mereka lebih sarat dengan persoalan politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum atau aktivitas partai politik. Sedangkan masalah perburuhan yang jauh lebih penting dan mendesak dibicarakan, tidak menjadi agenda organisasi. Serikat buruh lama seperti KBM, KOSBI, GOBSI, Sarbumusi yang merupakan *onderbouw* partai politik, juga kurang memperhatikan pendidikan buruh. Forum beberapa aktivis politik seperti ini nampaknya sengaja didirikan sebagai posisi tawar dalam partai induknya, sehingga lebih merupakan politisasi buruh. Dalam kongres atau muktamar partai, gerakan buruh seperti ini akan proaktif untuk mendapatkan status resmi mengirim utusan dan beberapa person akan mencari posisi dalam partai politik tersebut. Oleh karena tidak memiliki anggota yang jelas, tidak ada biaya, tidak memiliki cabang-cabang yang memadai, maka gerakan ini tidak berjalan sebagaimana layaknya sebuah gerakan. Namun kondisi ini sangat menguntungkan bagi pengurusnya, sebab akan digunakan sebagai posisi tawar dalam partai. Dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, gerakan

¹⁰ Wawancara dengan Ali Djunaedi (Sarbumusi) Oktober 2007

buruh seperti ini aktif menawarkan dukungan kepada calon kepala daerah atau calon Presiden.

Selain itu kepentingan dari para aktivis politik tersebut adalah keinginannya untuk memelihara hubungan dengan Departemen Tenaga Kerja, terutama dalam membahas agenda penting perburuhan dan penentuan wakil serikat buruh Indonesia di forum internasional. Kebijakan Depnaker dalam mengirim utusan ke luar negeri adalah dengan mengundang semua serikat buruh yang terdaftar di Depnaker. Utusan serikat buruh akan diajak musyawarah dan dalam penentuan wakil Indonesia dilakukan voting. Manaker berusaha menyingkirkan para tokoh buruh yang tidak dikehendaki. Para aktivis buruh yang tidak memiliki akar dan dukungan, sengaja merapat ke Menaker agar terpilih mewakili Indonesia. Mereka ini tidak berani menyampaikan gagasan yang bertentangan dengan gagasan Menaker. Akibatnya wakil-wakil Indonesia ke konferensi buruh internasional diwakili oleh para aktivis yang tidak memiliki dukungan buruh. Dengan demikian fragmentasi gerakan buruh juga dimanfaatkan oleh Menaker untuk mengadu domba antar mereka, sehingga muncul orang yang dikehendaki pemerintah. SBSI yang merupakan serikat buruh terbesar kedua di Indonesia, dalam pertemuan buruh internasional berkali-kali tidak terpilih dalam musyawarah. Utusan SBSI dapat berangkat setelah ILO memintanya secara khusus¹¹.

Untuk memberikan gambaran mengenai gerakan buruh dengan pola lama, dikemukakan dua kasus yaitu Sarbumusi dan Kesatuan Buruh Marhaen (KBM), dua gerakan buruh yang kuat pada masa Orde Lama.

¹¹ Wawancara dengan Muchtar Pakpahan Mei 2007 dan Rekson Silaban Mei 2007.

Berbeda dengan serikat buruh lainnya, Sarbumusi adalah serikat buruh yang eksis pada masa Orde Lama dan tidak aktif dalam gerakan buruh selama masa Orde Baru. Sarbumusi merupakan anak cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak secara tegas mencantumkan hubungan dimaksud, tetapi kontak antar para tokoh rutin terjadi. Dialog dan konsultasi antara tokoh-tokoh Sarbumusi dengan PKB intens dilakukan. Para pengurus Sarbumusi pun duduk sebagai anggota legislatif baik di Daerah maupun di Pusat melalui PKB. Secara struktural, Sarbumusi tidak memiliki hubungan dengan PKB, tetapi dengan NU. Baik Sarbumusi maupun PKB dibentuk oleh NU. Sebab itu Sarbumusi juga merupakan kekuatan sosial yang menopang NU. Anggota NU yang berprofesi sebagai buruh adalah pendukung Sarbumusi¹².

Pada masa awal Orde Baru sampai pembentukan SPSI, Sarbumusi tidak begitu kecewa dengan penunggalan organisasi buruh yang dimotori pemerintah. Melalui FBSI yang berbentuk federasi, Sarbumusi masih menguasai beberapa SBLP khususnya perkebunan dan pabrik gula. Mengingat SBLP merupakan kekuatan yang secara riil menguasai buruh, maka pembentukan FBSI di Pusat, Daerah dan Cabang, tidak mempengaruhi penguasaan Sarbumusi kepada dua SBLP tersebut. Tetapi setelah FBSI diubah menjadi SPSI yang berbentuk unitaris tahun 1985 dan SBLP dibubarkan diganti dengan sektor-sektor industri, Sarbumusi kehilangan kendali dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya layaknya gerakan buruh. Aktivitas para tokoh Sarbumusi beralih ke Partai Persatuan Pembangunan. Para buruh yang menjadi anggota SBLP tetap dijadikan pendukung PPP, sebab NU merupakan salah satu penyokong berdirinya PPP.

¹² Wawancara dengan Ali Djunaedi (Sarbumusi) Oktober 2007.

Dasar perjuangan Sarbumusi adalah *fatoniyah*, *basoriyah* dan *imaniyah*¹³. Ada pemisahan antara bagaimana hubungan sesama manusia, hubungan seseorang dengan negara dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Sarbumusi tidak sekedar memperjuangkan hubungan industrial yang sekuler, tetapi hubungan yang diridhoi Allah. Sebab itu agama memiliki peranan penting dalam meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan pekerja.

“Jika kesejahteraan lahiriah yang terus dikejar, maka tidak akan pernah cukup mengingat kebutuhan manusia tidak terbatas. Tetapi dengan mensyukuri apa yang diterima dan dimiliki sebagai karunia illahi, maka nafsu untuk mengejar harta benda akan terkendali. “Syukur kepada yang Maha Kuasa” juga ditekankan Sarbumusi dalam hubungannya dengan pengusaha. Dengan demikian, permusuhan dengan pemodal tidak dikenal dalam konsep Sarbumusi”¹⁴.

Kekecewaan terhadap Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang mengabaikan dimensi ini, telah menghilangkan kendali buruh dan pengusaha, sehingga keduanya saling berhadap-hadapan. Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penengah, lebih berpihak kepada pengusaha, sehingga meskipun keuntungan pengusaha terus meningkat, kesejahteraan buruh menurun.

Aktivitas Sarbumusi hanya menonjol di wilayah Jawa Timur. Hal ini disebabkan di wilayah itulah Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi induknya sangat kuat. Para pekerja sektor niaga, koperasi dan bank diikuti buruh pabrik dan perkebunan Jawa Timur merupakan pendukung Sarbumusi. Meskipun pada tahap awal Djunaedi Ali sebagai ketua Wilayah merasa kesulitan mensosialisasikan Sarbumusi, namun dengan bantuan sejumlah badan otonom NU seperti Fatayat, Muslimat, Pemuda Ansor, PMII dan IPNU; berhasil membangun kembali Sarbumusi.

¹³ Wawancara dengan Ali Djunaedi Nopember 2007

¹⁴ Wawancara dengan Ali Djunaedi Nopember 2007

Forum pengajian dan tasyakuran digunakan untuk mensosialisasikan Sarbumusi, Pertanu dan Lesbumi. Dalam pertemuan NU di beberapa Cabang dan Wilayah, dorongan agar para buruh menjadi anggota Sarbumusi juga terus dilakukan. Dari berbagai media sosialisasi, pengajian dan tasyakuran ini dinilai oleh Djunaedi Ali yang paling efektif dalam merekrut anggota¹⁵. Para tokoh buruh dari Pusat langsung diterjunkan ke pengajian-pengajian untuk dapat memberikan informasi yang tepat mengenai Sarbumusi.

Cepat meningkatnya pertumbuhan anggota, menurutnya merupakan kerja semua pihak terutama para pengurus NU. Serikat buruh yang paling mendapat pukulan adalah FSPSI yang sebelumnya memonopoli. Jika pada tahun 2000 jumlah anggota Sarbumusi hanya 125.000 orang pada akhir tahun 2005 meningkat menjadi 450.000 orang. Pendidikan diselenggarakan setiap hari minggu di masing-masing cabang yang pada tahun 2005 jumlahnya telah mencapai 91 cabang. Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI tahun 1999 membanggakan warga NU dan turut mempengaruhi meningkatnya jumlah anggota dan mempercepat konsolidasi. Secara bersamaan pada tahun 2004 juga meningkat jumlah tokoh NU dari Jawa Timur yang menjadi tokoh nasional dari berbagai badan otonom NU. Situasi ini juga turut membantu mempercepat para buruh NU pulang kandang.

Sarbumusi menjalin kerjasama dengan serikat buruh lain seperti SBSI, FSPSI, KBKI, KBM, FNPBI dan berbagai serikat buruh lokal. Kerja sama dilakukan dalam menyikapi isu-isu strategis yang tidak terbatas pada masalah perburuhanan. Diskusi secara kontinyu diselenggarakan untuk menyamakan pandangan para aktivis buruh dan menyikapinya. Akhir diskusi tidak selalu melahirkan kesepakatan, tetapi

¹⁵ Wawancara dengan Ali Djunaedi Nopember 2007

diusahakan tercapainya kesepakatan. Hasil minimal adalah dipahaminya pandangan dan sikap masing-masing serikat buruh mengenai isu tertentu.

Sesungguhnya banyak kesamaan pandangan para aktivis berkaitan dengan otonomi daerah, tunjangan pesangon, jam kerja, upah minimum propinsi, hubungan dengan pengusaha dan pemerintah. Tetapi kecurigaan bahwa yang satu ditunggangi yang lain sangat kuat di antara para aktivis. Faktor kedekatan dengan pengusaha atau dengan pemerintah akan mempercepat hancurnya kesepakatan, perpecahan organisasi dan akan membingungkan para buruh di lapangan.¹⁶

Kasus kedua adalah Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM). Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) dibangkitkan kembali dari kevakuman oleh para aktivis lama pada 5 September 1998. Gerakan ini tetap mengusung ideologi marhaenisme dan bukan buruhisme. Dasar pemikiran inilah yang menyebabkan KBM menolak bergabung dengan SB yang telah ada.

“Sebagian besar SB telah terkooptasi oleh kapitalisme lebih-lebih pada masa Orde Baru. Jawaban untuk mengatasi masalah kemasyarakatan di Indonesia termasuk masalah perburuhan bukan menganut kapitalisme atau sosialisme, tetapi marhaenisme. Di Indonesia, kapitalisme tidak memiliki akar, justru menjadi musuh di masa perjuangan. Meskipun terdapat nilai-nilai kapitalisme yang harus dapat diambil oleh buruh, tetapi menganut prinsip kapitalisme sepenuhnya akan menghancurkan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedangkan prinsip sosialisme seperti yang dianut sebagian besar gerakan buruh di Indonesia, akan menyebabkan pengusaha asing enggan berinvestasi¹⁷.”

Marhaenisme mengedepankan kerjasama dalam berpikir, belajar dan berjuang. Gerakan buruh yang mengusung marhaenisme menekankan militansi, radikal dan revolusioner, tetapi bebas dari sentimen suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam hubungan antar golongan, KBM mengedepankan nasionalisme, patriotisme, demokrasi kerakyatan dan theisme. Nilai-nilai semacam ini tidak

¹⁶ Wawancara dengan Ali Djunaedi Nopember 2007

¹⁷ Wawancara dengan Manganar Pasaribu Ketua KBM pada Oktober 2007

diperjuangkan oleh gerakan buruh lain. Sebaliknya, KBM mengutuk gerakan buruh yang dibungkus dengan SARA. Tetapi tetap menghormati gerakan buruh yang didasarkan pada sektor industri, lapangan pekerjaan (*trade union*) atau *labour union*. Kehendak untuk menempatkan marhaenisme sebagai arus utama hubungan industrial ini mendorong para aktivis lama aktif kembali dalam KBM.

KBM menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mewarisi ideologi dan perjuangan Marhaenisme. "Partai ini kental dengan feodalisme dan konservatisme, sehingga tidak lagi menjadi tumpuan perjuangan rakyat kecil. Orang hanya tertarik dengan Megawati sebagai anak Soekarno tanpa mengetahui pemikirannya dan orang-orang yang dekat kepadanya"¹⁸. Partai yang sejalan dengan KBM adalah Partai Nasionalis Banteng Kerakyatan (PNBK). Oleh sebab itu KBM berusaha untuk berjuang bersama PNBK. Namun demikian KBKI yang berpusat di Surabaya tidak merupakan lawan atau pesaing KBM. KBKI dan KBM banyak melakukan kerjasama dalam pendidikan perburuhan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa gerakan buruh lama yang dibangkitkan kembali oleh para aktivisnya berusaha untuk menghidupkan kembali politik aliran pasca Soeharto. Kejayaan serikat buruh di bawah partai-partai tahun 1950-an dan awal 1960-an, diyakini sebagai format paling tepat dalam hubungan gerakan sosial (buruh) dengan partai politik. Dengan demikian, gerakan buruh menjadi salah satu penopang partai politik, sarana mobilisasi, kaderisasi dan komunikasi politik. Namun seperti dapat disaksikan kiprahnya selama 7 tahun terakhir, gerakan buruh semacam itu tidak memiliki sumberdaya untuk mencapai tujuan gerakan. Uang, anggota, jaringan antar serikat buruh maupun di luarnya, kader-kader yang berlapis mulai dari

¹⁸ Wawancara dengan Manganar Pasaribu Ketua KBM pada Oktober 2007

tingkat perusahaan sampai tingkat nasional dan kepemimpinan yang militan, merupakan sumberdaya gerakan yang menentukan kekuatan gerakan. Ketiadaan sumberdaya menyebabkan gerakan buruh macet, bahkan siklus organisasi juga macet. Organisasi semacam ini merupakan kenangan masa lalu para aktivis politik yang tidak memiliki aktivitas nyata dalam bidang perburuhan, terutama posisinya sebagai sebuah gerakan buruh.

Sebuah gerakan sosial tanpa dukungan riil sejumlah individu tidak memiliki legitimasi, sebab kapasitas atau kompetensi institusi dalam menciptakan kelembagaan untuk memperjuangkan dan melindungi para buruh, tidak mereka miliki. Unsur pokok dari legitimasi gerakan sosial adalah representasi. Gerakan sosial buruh dituntut untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan buruh. Oleh sebab itu kelompok sasaran harus terlibat secara nyata untuk menjamin tidak terjadinya *disconnection* (keterputusan). Adanya representasi dan koneksi yang terus menerus memungkinkan bekerjanya organisasi sebagai sebuah gerakan sosial, yaitu memelihara tantangan kolektif dengan kekuatan dominan.

B. Pengorganisasian

Gerakan dapat dengan tegas dibedakan berdasarkan organisasinya. Gerakan sosial tidak sama dengan organisasi gerakan sosial. Terdapat gerakan sosial yang tidak teorganisasi yang menekankan pada aksi-aksi episodik seketika, sehingga tidak memperlihatkan aksi penuh pertentangan yang berkelanjutan. Untuk tujuan mendeskripsikan fragmentasi gerakan, kajian mengenai pengorganisasian dapat menunjukkan pepecahan, aliansi, sektor industri yang menjadi tumpuan, struktur organisasi, struktur mobilisasi dan aksi-aksi kolektif.

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

Struktur organisasi KSPSI hirarkis dan terpusat, tetapi kurang profesional. Independensi serikat pekerja sangat tinggi dibandingkan pada masa Soeharto meskipun bentuk organisasinya federasi. KSPSI mempekerjakan 21 orang, rata-rata tamatan SMA. Mereka menjalankan tugas-tugas administrasi, keamanan dan kebersihan. Sebelumnya organisasi ini bernama FBSI, kemudian berganti SPSI dan terakhir dengan nama FSPSI. Ketika masih bernama FBSI, menghimpun 21 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) yang merupakan arena bagi serikat buruh lama untuk beraktivitas. Seperti lapangan pekerjaan perkebunan (SBLP Perkebunan) dikuasai bersama oleh kader KBM dan Sarbumusi, sebab dua serikat buruh ini sangat kuat di perkebunan setelah ditinggalkan SOBSI. Di SBLP rokok dan tembakau, setelah SOBRI (anggota SOBSI) hancur, digantikan oleh Gasbiindo dan Sarbumusi. Arena ini hilang sama sekali ketika FBSI berubah menjadi SPSI sebab tidak ada lagi SBLP. Perlawanan para aktivis buruh terhadap restrukturisasi Sudomo ini disebabkan hilangnya arena bagi SB-SB lapangan pekerjaan. Kongres FBSI tahun 1985 mempunyai 3 agenda penting yaitu “penggantian Agus Sudono dengan tokoh buruh dari kalangan nasionalis Golkar, mengganti sebutan buruh menjadi pekerja dan mengubah struktur dan nama FBSI menjadi SPSI”¹⁹.

Bentuk federasi menurut Sudomo tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan dan sila ketiga Pancasila. Sudomo menghendaki struktur organisasi yang unitaris untuk menjamin para pengurus daerah taat pada komando dari Jakarta. Dengan

¹⁹ Wawancara dengan Hikayat Atika Karwa (Ketua SPSI 1985 – 2000) pada Januari 2008. Menurut Atika, persoalan yang paling berat adalah mengganti Agus Sudono dan mengubah struktur organisasi. Rapat berkali-kali *deadlock* dan peserta Kongres banyak yang meninggalkan ruangan.

unitaris, level paling bawah organisasi berupa unit kerja yang didirikan di setiap perusahaan. Kemudian di tingkat kabupaten atau kotamadya dibentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan di tingkat provinsi dibentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Perubahan ini menyingkirkan sama sekali tokoh buruh lama dan memasukkan para birokrat, militer dan orang-orang muda non buruh dalam unit kerja, DPC, DPD dan DPP. Struktur birokrasi seperti ini mengikuti struktur organisasi militer (dan polisi), seperti Kodam, Kodim dan Koramil. Dalam prakteknya, setiap level militer mengontrol organisasi buruh. Bentuk unitaris memiliki implikasi pada standarisasi yang dikontrol oleh birokrasi. Upah buruh diberikan secara seragam berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR), tidak lagi berdasarkan kemampuan perusahaan. Sebelumnya, banyak perusahaan khususnya perusahaan asing dan pekerjaan beresiko tinggi, membayar upah buruh jauh di atas UMR. Standarisasi juga diberlakukan dalam menyikapi buruh yang kritis terhadap peraturan kerja di perusahaan. Akhirnya masalah-masalah manajemen perusahaan yang dikritisi buruh bukan lagi menjadi urusan internal perusahaan, tetapi menjadi urusan militer. Bentuk penghancuran gerakan buruh mencapai puncaknya dengan hilangnya serikat buruh lapangan pekerjaan (SBLP). Bukan hanya hilangnya arena bagi para tokoh buruh, tetapi juga hilangnya isu-isu perburuhan berdasarkan lapangan pekerjaan.

Tekanan dari serikat buruh internasional dan ILO terhadap pemerintah Indonesia agar memberikan kebebasan berorganisasi bagi buruh dan boikot produk-produk Indonesia ke Eropa, Amerika dan Australia, mengubah kebijakan perburuhan

khususnya struktur organisasi SPSI²⁰. Sejak tahun 1995, SPSI diubah ke dalam bentuk federasi yaitu federasi SPSI (FSPSI). Industri-industri yang ada dibagi menjadi tiga belas sektor dan berdasarkan sektor ini pula buruh-buruh diorganisasi. Buruh sektor industri didaftarkan secara nasional dan dibentuk federasi. Setiap serikat buruh harus mengacu kepada sektor-sektor industri dan pemerintah dapat membubarkan serikat buruh. Dari sini terus berkembang keinginan para tokoh buruh untuk membentuk kembali SBLP. Sampai tahun 1998 telah terbentuk 14 serikat pekerja sektoral. Konsep ini tetap dipertahankan oleh Menaker, tetapi para aktivis buruh yang lahir dari perusahaan/pabrik, menuntut ditetapkannya SBLP sebagai konsekuensi bentuk Federasi.

Fragmentasi dalam tubuh FSPSI kali pertama berlangsung tahun 1998 ketika 11 sektor memisahkan diri membentuk Federasi SPSI Reformasi. Dasar pemikiran yang mendorong pemisahan adalah bahwa

“FSPSI oleh para buruh tidak dianggap sebagai serikat buruh yang sesungguhnya. Dalam kepengurusannya, terdapat militer dan orang-orang yang tidak pernah menjadi buruh. Selain itu oleh serikat buruh internasional dan ILO, SPSI dianggap sebagai organ pemerintah dan tidak pernah diakui secara penuh sebagai serikat buruh. Para pejabat ILO di Jakarta pun secara terang-terangan mendorong pemisahan dan memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kongres dan menyewa kantor”²¹.

Kekuatan penggerak utama pemisahan ini adalah serikat pekerja sektoral yang menginginkan kembali otonomi seperti halnya SBLP-SBLP yang mulai bangkit setelah SPSI berubah menjadi FSPSI tahun 1995. Faktor lain perpecahan tersebut adalah:

²⁰ Wawancara dengan Hikayat Atika Karwa (Ketua SPSI 1985 – 2000) pada Januari 2008.

²¹ Wawancara dengan H.M. Rodja Sekjen FSPSI Reformasi pada Mei 2007. H.M. Rodja adalah pengacara perburuhan dan sejak tahun 1960-an bergabung dalam Sarbumusi. Ia pernah menjadi buruh tekstil di Bekasi dan sejak umur 20 tahun aktif di Sarbumusi. Selain menjadi salah satu ketua SPSI tahun 1995, ia juga pernah menjadi pengurus DPD PPP dan anggota DPRD DKI Jakarta.

“mandeknya kaderisasi kepemimpinan dan keinginan para buruh memimpin gerakan. Masuknya tentara, birokrat Depnaker bahkan pengusaha menyebabkan orientasi gerakan tidak jelas. Ada keinginan kuat dari buruh untuk menjadikan SPSI sebagai gerakan buruh yang sesungguhnya”²²

Para pendukung FSPSI-R adalah para pimpinan 11 sektor yaitu SP Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK), SP Farkes, SP Perakayuan dan Kehutanan, SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi; SP Pertanian dan Perkebunan, SP Transportasi, SP Rokok, Makanan dan Minuman; SP LEM, SP KPI, SP Pariwisata dan SP KEP. Terjadi ketegangan dalam rapat untuk mendeklarasikan SPSI-R. Atika Karwa salah satu ketua FSPSI meminta agar Rapat yang diikuti 11 sektor ini hanya mempersiapkan calon-calon ketua FSPSI. Jika di luar agenda tersebut, hendaknya rapat tidak membawa nama SPSI. M. Rodja sebagai pimpinan setuju dengan tawaran Atika Karwa tersebut dan disusunlah nota kesepakatan antara kedua kubu. Tetapi, Rodja dan kawan-kawan tetap berjalan dengan agendanya yaitu mendeklarasikan berdirinya SPSI-R, sebab forum menghendaki pemisahan dengan SPSI²³.

Minimal ada 5 faktor yang mendorong terjadinya perpecahan ini. Pertama, perubahan SPSI ke FSPSI tahun 1995 telah diikuti dengan pembentukan kembali serikat buruh berdasarkan lapangan pekerjaan. SBLP-SBLP ini ingin eksis kembali guna mengembalikan otonomi yang pernah mereka miliki sebelum tahun 1990. Para pendukung pemisahan menghendaki arena yang lebih luas guna menyatakan kepentingan mereka. Kedua, FSPSI oleh para buruh tidak dipandang sebagai serikat buruh yang memperjuangkan kepentingan buruh. Citra bahwa FSPSI sebagai organ pemerintah masih sangat kuat di kalangan buruh. Oleh sebab itu para buruh meragukan eksistensi dan independensinya dalam memperjuangkan kepentingan

²² Wawancara dengan H.M. Rodja (Ketua FSPSI Reformasi) Mei 2007.

²³ Wawancara dengan H.M. Rodja (Ketua FSPSI Reformasi) Mei 2007

buruh. Ketiga, kuatnya dukungan serikat buruh internasional. ICFTU, ACILS dan ILO secara terbuka menyokong pemisahan dengan memberikan dana kongres, sewa kantor dan pelatihan-pelatihan. Dana inilah yang menghidupi FSPSI Reformasi. Keempat, peluang politik yang terbuka. Pasca Soeharto terdapat peluang yang sangat terbuka dengan ratifikasi konvensi ILO No 87 oleh pemerintah Indonesia, sehingga para buruh memiliki kebebasan untuk mendirikan serikat buruh. Peluang ini dimanfaatkan oleh para aktivis buruh, termasuk mereka yang tergabung dalam FSPSI yang berusaha membangun gerakan buruh yang benar-benar memperjuangkan kepentingan buruh. Kelima, munculnya partai-partai politik baru pada tahun 1998 dan 1999 yang oleh para tokoh buruh dijadikan aliansi strategis. Para pengurus FSPSI secara perlahan-lahan kembali ke "habitat"-nya, sehingga Golkar tidak lagi menjadi rumah bersama. Faktor ini semakin jelas pada perpecahan tahap berikutnya, di mana secara perlahan-lahan 4 partai besar (Golkar, PDIP, PPP dan PKS) berusaha untuk mendapatkan dukungan buruh FSPSI.

Perkembangan menyolok lainnya adalah berdirinya serikat buruh berdasarkan lapangan pekerjaan (sektor industri). Bentuk serikat seperti ini paling tepat sebab perkembangan masalah perburuhan sejalan dengan perkembangan industri. Sektor pendidikan, wartawan, angkutan danau-feri dan sungai, tenaga kerja luar negeri dan maritim secara serentak membentuk serikat buruh dan menggabungkan diri dengan FSPSI. Selain itu sector-sector yang pengurusnya memisahkan diri dari FSPSI, dibentuk kembali oleh Sjukur Sarto dan Datuk Bagindo. Di samping itu, 3 SP kembali ke FSPSI yaitu SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PPMI), SP-KPI dan SP Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (SP RTMM), sehingga pada tahun 1999 FSPSI terdiri dari 15 serikat pekerja.

Tuntutan untuk mendirikan SP yang lebih fokus kepada sektor industri atau lapangan pekerjaan terus meningkat. Hal ini merupakan gejala positif karena perhatian terhadap perkembangan industri semakin besar. Menurut Sjukur Sarto, Ketua KSPSI:

Motivasi para ketua SP untuk menjadi tokoh nasional dan menjadi bagian yang diperhitungkan oleh serikat buruh internasional, ILO, Depnaker dan partai-partai politik, mendorong serikat pekerja/serikat buruh untuk mempersempit basis pengorganisasian. Tumbuhnya banyak serikat pekerja dengan mempersempit lapangan industri tidak dapat dipisahkan dari keinginan para aktivis buruh lokal menjadi tokoh nasional”²⁴

Hal ini dapat disimak misalnya dengan perubahan yang sangat cepat pada bentuk organisasi di sektor transportasi. Dalam tubuh SP Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan Telekomunikasi (ADDFEST), masing-masing unit membentuk Serikat Pekerja sampai ke tingkat nasional, seperti Ikatan Pengemudi Indonesia, Pusat Kerukunan Sopir Taksi Indonesia, Serikat Pekerja Danau dan Sungai dan sebagainya. Demikian pula dengan sektor RTMM, dibentuk kembali SP Rokok dan Tembakau dan SP Makanan dan Minuman. SP/SB tersebut kemudian mengikatkan diri dalam bentuk federasi. Hingga tahun 2001 telah terbentuk 17 federasi dan FSPSI dalam kongresnya tahun 2001 diubah menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sebelum berbentuk konfederasi, SP NIBA dalam FSPSI memisahkan diri dan mendeklarasikan berdirinya Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia (FOKUBA).²⁵ Penolakan terhadap penunggalan serikat buruh dan kendali

²⁴ Wawancara dengan Sjukur Sarto (Ketua KSPSI) Mei 2006.

²⁵ Nama FOKUBA telah digunakan sejak 1985, tetapi merupakan Forum Komunikasi Bank-Bank Asing. Seluruh bank-bank asing di Indonesia telah memiliki serikat pekerja, KKB dan tidak ada gejalak berarti sampai pertengahan tahun 1990-an. Oleh karena namanya telah luas dikenal, maka dalam deklarasi Maret 1998, nama tersebut dipertahankan.

pemerintah, menjadi penyebab pemisahan tersebut. Pengurus SP NIBA lebih banyak dipegang oleh birokrat dan iuran anggota tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka. FSPSI baik bentuk organisasi, kepemimpinan dan kinerjanya menjadi musuh bersama. Setelah satu tahun berdiri, FOKUBA mengalami konflik tentang dua persoalan penting yaitu bantuan SB asing dan konstitusi organisasi. Para pekerja bank nasional menolak bantuan SB asing sebab lebih banyak dimanfaatkan para pekerja bank-bank asing. Terjadi ketimpangan SDM antara bank nasional dan bank asing, sehingga bantuan SB asing seperti pelatihan dan pertemuan-pertemuan internasional, akan lebih menguntungkan pekerja bank asing²⁶. Oleh sebab itu para pekerja bank nasional untuk sementara menolak bantuan SB asing, sehingga hal tersebut perlu diatur dalam konstitusi. Tetapi justru masuknya ketentuan bantuan asing ini dalam konstitusi, menjadi penyebab konflik yang lebih luas. Hal ini dimaknai oleh pekerja bank asing sebagai sikap final FOKUBA. Sebagai reaksinya, para pekerja bank asing menyatakan keluar dari FOKUBA dan Februari 1999 menyatakan berdirinya Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia). Dalam kongresnya tahun 2000, ASPEK tidak hanya menjadi wadah para pekerja bank, tetapi memperluas diri mencakup sektor komunikasi, percetakan, penerbitan, media, niaga dan perdagangan (Kosuke Mizuno, Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati, 2007:221-222 dan 367-368).

Sementara itu dalam tubuh KSPSI terus berlangsung konflik sejak kongres 2000 yang menempatkan Jacob Nuwa Wea sebagai ketua umum. Jacob dihadapkan kepada masalah bagaimana mempertahankan soliditas gerakan menghadapi beberapa

²⁶ Selain memiliki administrasi yang lebih baik seperti paspor, pekerja bank asing juga lebih baik dalam penguasaan bahasa asing. Pimpinan bank asing pun lebih mudah member ijin kepada pekerjanya, seperti mudah member ijin ke luar negeri dan memberi fasilitas biaya transportasi dan akomodasi.

SP yang terus menggembosinya. Tindakan yang dilakukan adalah dengan menarik mereka yang telah ke luar kembali masuk SPSI dan menggembosi gerakan di luar SPSI. Tiga SP yang menyatakan ke luar dan bergabung dengan FSPSI-R, berhasil ditarik kembali. Sedangkan dalam usaha mempertahankan keanggotaan buruh di plan level (perusahaan/pabrik), Jacob membentuk kembali SP-SP di tingkat nasional, seperti SP TSK, SP Farkes, SP Metal, SP Pariwisata, SP KEP dan sebagainya. Sepanjang tahun 2001 sampai Kongres VI tahun 2005, KSPSI relatif terkendali di bawah Jacob. Tantangan berarti datang dari KSBSI dan FSPSI Reformasi dan kemudian KSPI. Usaha untuk menjaga kekuatan KSPSI dan membawa para buruh seluruh Indonesia sebagai pendukung PDI-P adalah dua agenda penting KSPSI di bawah Jacob. Dua agenda ini gagal, perkembangan SP/SB di luar KSPSI jauh lebih pesat terutama dalam membangun konsolidasi dan kekalahan PDI-P pada Pemilu 2004, membangkitkan kubu Golkar melalui SOKSI untuk mengambil alih kepemimpinan Jacob Nuwa Wea²⁷.

Hasil Kongres VI di Yogyakarta tahun 2005, dipersoalkan oleh para penentang Jacob utamanya kubu Sjukur Sarto, tokoh lama SPSI yang dikenal sebagai kader SOKSI (Golkar). Orang-orang luar SPSI yang dibawa Jacob dipersoalkan, khususnya Latief Nasution yang memegang jabatan Sekretaris Jenderal dan Dhiana Anwar sebagai Bendahara Umum. Keduanya belum tergabung dalam SPSI dan dikenal sebagai orang dekat Jacob yang berasal dari PDI-P. Dalam Rakernas bulan Pebruari 2007, Jacob diminta segera menonaktifkan kedua pengurus tersebut, tetapi ditolakny. Akibatnya, kubu Sjukur Sarto pada bulan Agustus 2007 menyelenggarakan Kongres yang dipercepat yang menempatkan Sjukur Sarto

²⁷ Wawancara dengan Suwarno Sahari (Sekjen KSPSI Kubu Jacob) Nopember 2007.

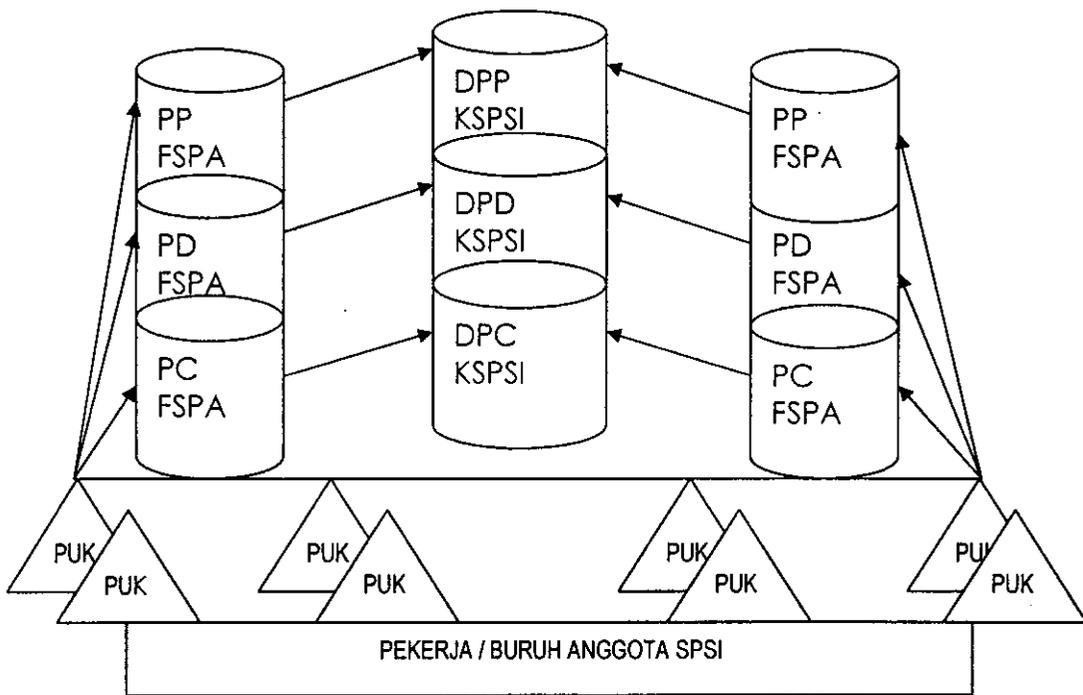
sebagai Ketua Umum dan Sekjen M. Ch. David. Langkah Sjukur ini berbuah pemecatan. Sebanyak enam orang pengurus teras KSPSI kubu Sjukur dipecat oleh Jacob Nuwa Wea, yaitu Sjukur Sarto, Hikayat Atika Karwa, M. Ch. David, Yeni Amir, Sudarto dan Safril Arsjad. Pada bulan Pebruari 2008, kubu Jacob menyelenggarakan Kongres yang menempatkan Jacob dan Suwarno Sahari sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam tubuh KSPI terdapat dua pengurus kembar yang masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah dengan dukungan Serikat Pekerja Anggota (SPA), DPD dan DPC.

Dalam tubuh FSPSI Reformasi juga terjadi pergolakan. Desakan dari pimpinan SP kepada Rodja agar lebih terbuka terhadap perubahan bentuk organisasi, tidak diresponnya. Rodja menghendaki agar bentuk federasi tetap dipertahankan sambil memperkuat serikat-serikat pekerja industri anggotanya. Tetapi SPMI, Farkes, KEP dan Kahutindo telah mengalami perubahan bentuk organisasi dengan lebih fokus pada sektor industri. Dengan motivasi untuk menjadi tokoh buruh nasional dari masing-masing sektor industri dibentuklah serikat pekerja sektoral vertikal. Masing-masing anggota FSPSI Reformasi telah berubah menjadi federasi, dengan alasan sektor-sektor industri harus memiliki serikat pekerja nasional agar para pekerja dapat terus mengikuti isu-isu perubahan teknologi dan perburuhan. Rodja berpendapat bahwa bentuk seperti itu belum saatnya, sebab di masing-masing sektor industri organisasinya masih lemah. Sikap Rodja tidak didukung oleh pimpinan SPA dan serikat buruh internasional.

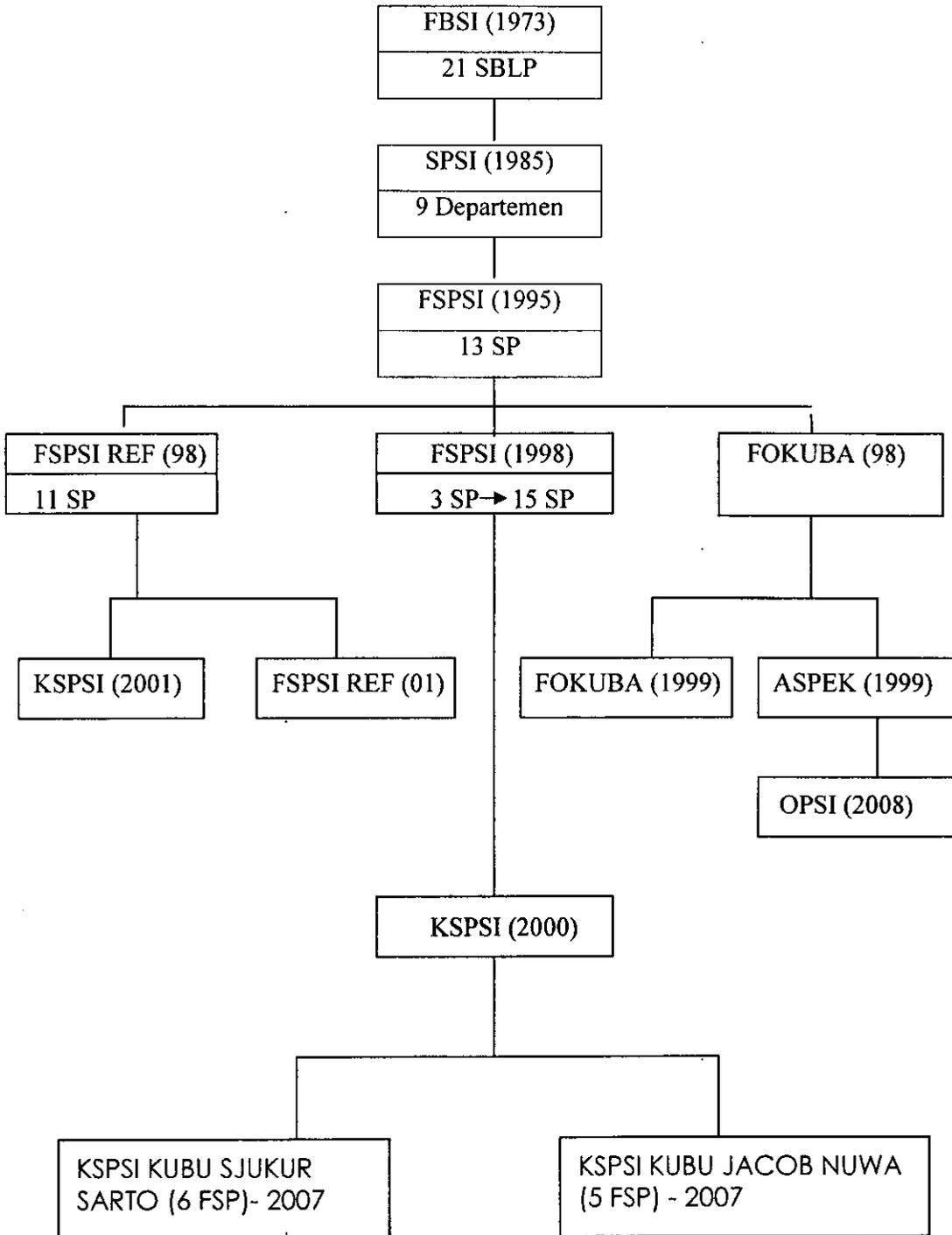
Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah penolakan Rodja terhadap aliansi strategis yang dibutuhkan FSPSI R. Sebagian besar tokoh FSPSI Reformasi seperti Tamrin Mosi, Said Iqbal (FSPMI) dan Bambang Wirahyoso (SPN), dekat

dengan Partai Keadilan (Sejahtera). Sedangkan Rodja menginginkan agar para buruh anggota FSPSI Reformasi mendukung PPP. Perbedaan pemikiran dan afiliasi partai ini kemudian mendorong dibentuknya Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang anggotanya 8 Federasi SP, yaitu FSPMI, Perkebunan, FKEP, SPN, SP Farkes, SP Pariwisata, PGRI dan Kahutindo.

Struktur Organisasi KSPSI



Fragmentasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)



2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia (KSBSI)

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada tahun 2003 membentuk konfederasi, setelah serikat-serikat buruh yang bergabung di dalamnya membentuk federasi. Terdapat sebelas federasi, yaitu Federasi Serikat Buruh Pertambangan dan Energi SBSI, Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau SBSI, Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan SBSI, Federasi Konstruksi, Umum dan Informal SBSI, Federasi Kimia dan Kesehatan SBSI, Federasi Transport dan Angkutan SBSI, Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu SBSI, Federasi Serikat Buruh Pendidikan, Pelatihan dan Pegawai Negeri SBSI, Federasi Logam, Mesin dan Elektronik SBSI, Federasi Serikat Buruh Hukatan SBSI dan Federasi Buruh Pelabuhan, Pelaut dan Nelayan SBSI. SBSI dibentuk oleh para buruh dan aktivis buruh ketika kekuasaan Orde Baru demikian kokoh. Orang-orang yang secara aktif mendukung SBSI adalah para buruh dan aktivis buruh yang kecewa dengan sistem perburuhan ketika itu, terutama peran pemerintah yang berpihak kepada pengusaha, PHK sepihak, pembayaran upah di bawah UMR, kemandulan SPSI dan kondisi kerja yang rendah. Dalam Pertemuan Buruh Nasional di Cisarua Bogor 1992, para aktivis buruh dan para buruh yang dibelanya memiliki pengalaman yang sama mengenai kondisi perburuhan di berbagai daerah dan menyimpulkan bahwa “perbaikan nasib buruh hanya bisa diperjuangkan oleh buruh melalui serikat buruh yang independen²⁸”.

Motor pembentukan SBSI adalah beberapa LSM seperti Forum Adil Sejahtera, YBKS, Yayasan Komunikasi dan YSAM. Sedangkan dari serikat buruh lokal adalah Forum Komunikasi Buruh Jabotabek (FKBJ), Koperasi Sejahtera Buruh

²⁸ Wawancara dengan Muchtar Pakpahan Mei 2007.

(Medan), Serikat Tolong Menolong Buruh (Pematang Siantar) dan Koperasi Asah, Asih dan Asuh (Solo). Sejak berdirinya tahun 1992, SBSI terus mendapat gangguan dari aparat keamanan.

“Pembubaran acara yang diselenggarakan oleh SBSI, penangkapan, interogasi, penahanan dan penyiksaan para pengurusnya, PHK dari perusahaan terhadap buruh yang menjadi anggota SBSI, tuduhan kristenisasi dan tuduhan membangkitkan kembali komunisme melalui SBSI; adalah beberapa contoh gangguan dimaksud”²⁹.

Semua pengurus SBSI baik di Pusat maupun di daerah pernah ditangkap, ditahan dan disiksa oleh aparat keamanan jika menolak mundur dari SBSI. Namun demikian para aktivis SBSI tetap berani menghadapi resiko dan terus memperjuangkan hak-hak buruh. Para aktivis menempuh prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Misalnya syarat-syarat untuk mendirikan serikat pekerja mengikuti Permenaker No. Per 03/MEN/1993. Syarat menyelenggarakan pertemuan meminta ijin kepolisian setempat dan seterusnya. Tetapi semua aparatus tetap menolak memberi jawaban.

Pengorbanan luar biasa seperti itu meyakinkan banyak buruh di berbagai daerah yang kecewa dengan FSPSI dan kondisi perburuhan pada umumnya. Dalam waktu satu tahun telah berdiri 40 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan mendapat pengakuan ICFTU di Brussel. Dukungan juga datang dari Atase Peburuhan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Belanda, ILO dan *World Confederation of Labor* (WCL) di Brusel. Banyaknya lembaga-lembaga internasional yang terlibat ini memperluas persoalan perburuhan di Indonesia di fora internasional.

“Salah satu strategi kami adalah melakukan internasionalisasi masalah perburuhan dan kesewenang-wenangan terhadap SBSI. Kami melakukan kontak rutin dengan kedubes AS, ILO dan WCL. Mereka pun melaporkan

²⁹ Wawancara dengan Muchtar Pakpahan Mei 2007.

perlakuan militer terhadap SBSI, sehingga tekanan datang dari negara dan masyarakat internasional”³⁰

Dengan demikian, pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia akan menjadi isu internasional dan pemerintah Indonesia akan menghadapi tekanan yang lebih kuat dari organisasi buruh internasional. Pemikiran seperti itulah yang dikembangkan oleh para aktivis SBSI. Ketika Muchtar Pakpahan ditangkap dan dipenjara misalnya, Pemerintah Indonesia menghadapi kritik dari ILO, ICFTU, WCL dan beberapa serikat buruh di Belanda dan Australia. Serikat-serikat buruh di Eropa juga menyerukan boikot terhadap produk Indonesia, dengan alasan diproduksi dengan melanggar hak-hak buruh³¹.

Selama tahun 1990-an, SBSI menjadi bulan-bulanan pihak keamanan. Para buruh yang terlibat dalam SBSI diberhentikan dari perusahaan tempat kerjanya. Para pengurus dikejar-kejar oleh aparat keamanan, ditangkap, diinterogasi dari pagi sampai pagi lagi tanpa makan dan minum dan disiksa; kantornya menjadi sasaran penggrebagan dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan dibubarkan oleh militer dan polisi³². Pemogokan buruh di Medan pada April 1994 yang mengakibatkan kerusuhan, digunakan oleh aparat keamanan untuk menangkap seluruh pimpinan SBSI, menahan dan mengadilinya. Selama empat tahun sesudahnya, SBSI tidak melakukan kegiatan berarti. SBSI mulai aktif kembali bersama mahasiswa melakukan demonstrasi sejak awal tahun 1998 sampai Mei 1998 yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sepanjang tahun-tahun yang

³⁰ Wawancara dengan Muchtar Pakpahan Mei 2007.

³¹ Wawancara dengan Rekson Silaban Mei 2007

³² Wawancara dengan Rekson Silaban Mei 2007.

panas (1998-1999), SBSI juga aktif menolak pemutusan hubungan kerja dan menuntut kebebasan berorganisasi.

Mencermati kondisi politik tahun 1990-an di mana kontrol militer terhadap kekuatan sosial masih sangat kuat, keberanian tokoh-tokoh buruh memimpin demonstrasi merupakan keberanian yang luar biasa. Di sini diperlihatkan makna gerakan sosial sebagai tantangan kolektif. Selain itu mereka yang tergabung dalam SBMS, SBSI dan kemudian PPBI, adalah para pioneer yang menjadikan gerakan buruh memiliki arti penting secara politik karena menunjukkan pertentangannya dengan kekuasaan. Adanya pengorbanan dari sejumlah tokoh, menunjukkan bahwa gerakan sosial buruh tidak semata-mata dipandang sebagai pilihan rasional seperti dikemukakan oleh Olson (1965). Tidak tepat pula kesimpulan dari Tornquist (2003:81) bahwa partisipasi buruh dalam menjatuhkan Soeharto sangat minim. Gerakan buruh adalah pelopor dalam menentang otoriterisme Orde Baru. Tanpa protes kaum buruh sepanjang tahun 1990-an, tidak tercipta kondisi yang memungkinkan bangkitnya gerakan mahasiswa. Sebelum jatuh korban di kalangan mahasiswa, telah lebih dahulu lahir para martir di kalangan buruh seperti Marsinah (Sidoarjo), Suharti (Bandung) dan Rusli (Medan).

SBSI merupakan gerakan buruh yang berhasil dalam memperjuangkan peninjauan kembali upah minimum setiap tahun. Selain itu SBSI adalah penggagas undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan undang-undang serikat buruh. Kehadiran SBSI membawa perubahan sangat penting dalam perburuhan Indonesia. Selain pioner dalam perjuangan kebebasan berserikat, ia juga mempunyai peran penting dalam memandang hubungan gerakan buruh dengan partai politik.

Struktur organisasi SBSI disusun mengikuti pola unitaris yang mengandalkan kesatuan perintah (komando) untuk menjamin arus komunikasi dari atas ke bawah. Struktur unitaris ini sama dengan struktur organisasi-organisasi pada masa Orde Baru yang dikenal sebagai organisasi korporatis yang mengikuti pola militer. Di tingkat Pusat terdapat Pengurus Pusat diikuti dengan Koordinator Wilayah yang berkedudukan di Provinsi. Selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota membawahi beberapa Pengurus Komisariat yang ada di wilayah kecamatan. Penggunaan wilayah sebagai satuan organisasi untuk semua federasi yang tergabung dalam KSBSI ini menegaskan KSBSI sebagai *general union*. Dengan pola semacam ini keanggotaan organisasi tidak dibatasi pada buruh tetap, tetapi buruh kontrak, buruh borongan dan pekerja sektor informal juga dapat menjadi anggota. Kelebihannya, jika seorang buruh diberhentikan dari perusahaan, keanggotaannya tidak otomatis berakhir. Sedangkan kelemahannya adalah isu-isu perburuhan terlalu umum, tidak fokus pada perkembangan industri dan teknologi. Disiplin anggota juga rendah, sebab kontrol tidak dilakukan secara melekat seperti halnya pada serikat buruh lapangan pekerjaan (SBLP).

KSBSI merupakan jaringan gerakan buruh dan gerakan sosial non buruh. Jaringan gerakan buruh mencakup 11 federasi yaitu Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu; Federasi Transportasi dan Angkutan; Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran dan Hotel; Federasi Logam, Mesin dan Elektronik; Federasi Kehutanan, Perkayuan, Pertanian dan Perikanan; Federasi Pertambangan dan Energi; Federasi Kimia dan Kesehatan; Federasi Media Informasi dan Grafika; Federasi Konstruksi, Umum dan Informal; Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan dan Federasi Pelaut dan Nelayan. Selain itu KSBSI juga membangun jaringan dengan

gerakan sosial non buruh seperti Sisbikum, YLBHI, Yayasan Arek, KAAA, Alpha Omega, ICW, INFID dan WALHI. Dalam usahanya memperluas jaringan gerakan, KSBSI juga menggalang pembentukan Forum Komunikasi Tripartit Indonesia (FKTI) dan aktif dalam Forum Solidaritas Unionis Indonesia (FSU) yang merupakan jaringan antar serikat buruh di tingkat Pusat. FSU pada mulanya hanya dimaksudkan untuk memobilisasi massa dalam rangka May Day, tetapi telah meluas sebagai forum diskusi dan tukar pendapat antar aktivis buruh mengenai isu-isu perburuhan.

Hubungan dengan partai politik ambivalen. Pada awalnya SBSI mendukung Partai Demokrasi Indonesia (Perjuangan). PDI khususnya kubu Megawati sejak tahun 1992 berusaha agar SBSI mendapat pengakuan Pemerintah. Dukungan PDI itu dibalas SBSI dengan menggalang massa untuk mendukung Megawati memimpin PDI. Massa SBSI menjadi kekuatan depan dalam membubarkan Kongres PDI di Medan yang dimotori Pemerintah. Demikian pula dalam mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta yang kemudian berakhir dengan penyerbuan aparat tanggal 27 Juli 1996. Tetapi masuknya para perwira militer dan orang-orang Golkar yang pernah membubarkan acara-acara SBSI serta menangkap dan menyiksa para tokoh SBSI, menyebabkan SBSI menarik dukungan³³. Kemudian SBSI mendirikan Partai Buruh Nasional (PBN). Dalam Pemilu 1999, PBN tidak mendapat kursi di Parlemen Pusat. Munculnya tokoh-tokoh yang tidak dikenal dan penolakan beberapa pengurus SBSI terhadap pendirian PBN, menyebabkan PBN tidak mendapat dukungan penuh para buruh. Dalam Pemilu 2004, PBN berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Dukungan para buruh tetap lemah. Antara lain disebabkan oleh tidak dikenalnya para calon anggota legislatif oleh para

³³ Wawancara dengan Muchtar Pakpahan Mei 2007.

buruh. Menurut Pakpahan, PBN kesulitan mendapatkan calon yang berkualitas, seperti pendidikan sarjana, aktif dalam serikat buruh dan memahami persoalan-persoalan perburuhan³⁴. Perubahan sikap pimpinan SBSI juga tidak sepenuhnya didukung oleh para buruh. Di tingkat *grass roots*, dukungan diberikan kepada PDI-P. Sedangkan dalam Pemilu 2004, pengurus SBSI terpecah antara pendukung pembentukan PBSD dengan Muchtar Pakpahan sebagai pimpinannya dengan mereka yang menginginkan ditundanya pendirian partai (diuraikan lebih lanjut di bawah ini). Untuk menghadapi Pemilu 2009, PBSD diubah menjadi Partai Buruh (gagal dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU, tetapi menang dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi) dan akhirnya menjadi peserta Pemilu 2009.

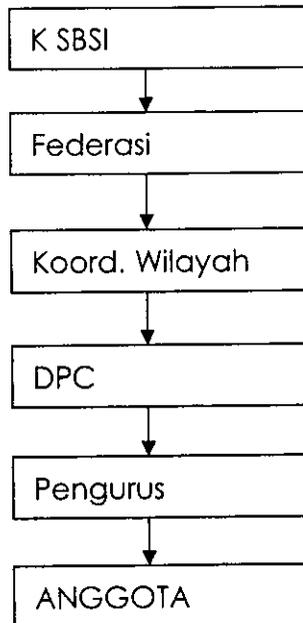
Dengan serikat buruh asing, KSBSI membangun jaringan dengan *Arab Trade Union* dan *Malaysia Trade Union*. Selain itu KSBSI berafiliasi dengan WCL (*World Confederation of Labor*) dan merupakan anggota penuh BATU ASIA (*Brotherhood of Asian Unionist*) dan *International Transport Workers Federation* (ITF). Dukungan serikat buruh internasional, terutama WCL, ICFTU, AFL-CIO dan UAW terhadap KSBSI telah diberikan sejak tahun 1992 dan masa kritis kebangkitan SBSI yaitu dari tahun 1994 sampai 1998. Dukungan terutama dalam pendanaan untuk pelatihan kader-kader SBSI dan tuntutan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengakui SBSI sebagai serikat buruh. Ketika Muchtar Pakpahan ditahan akibat pemogokan buruh Medan 1994, semua serikat buruh di atas mengecam pemerintah Indonesia dan menuntut pembebasannya³⁵. Pengorbanan Muchtar Pakpahan merupakan investasi

³⁴ Wawancara dengan Muchtar Pakpahan Mei 2007

³⁵ Wawancara dengan Rekson Silaban Mei 2007.

berharga bagi gerakan SBSI, hingga sejak tahun 2002 menjadi gerakan buruh yang paling diperhitungkan oleh Pemerintah dan APINDO.

Struktur Organisasi KSBSI



Fragmentasi SBSI dapat dilacak dari para aktivis yang membentuknya tahun 1992. Para aktivis hak asasi manusia yang aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, prihatin dengan kondisi perburuhan tahun 1980-an. Melalui kajian dan diskusi tentang berbagai pelanggaran HAM, disimpulkan bahwa pelanggaran hak-hak buruh adalah yang tertinggi³⁶. Aparatus negara secara terbuka membela pengusaha dan menindas buruh dengan melakukan penyiksaan, pelanggaran pembayaran upah, tidak memberikan jaminan sosial, kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kemandulan SPSI. Para buruh yang

³⁶ Seperti dimuat dalam *Laporan Keadaan Hak-Hak Asasi Manusia* yang terbit secara kontinyu tahun 1980 – 1992.

mengadukan masalahnya ke LBH tidak ada yang berani melakukan perlawanan. Dimotori oleh para aktivis LBH Jakarta seperti Hendarji, Mulyana Kusumah, H.J. Princen dan Saut Aritonang dari SPSI, pada tahun 1990 dibentuklah Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBMSK). Ketuanya H.J. Princen dan Sekretaris Saut Aritonang. Gerakan ini langsung mendapat perlawanan dari aparat negara. Tetapi NOVIB dan HIVOS, terus mendukung antara lain melalui bantuan dana dan kampanye di Eropa untuk memperoleh pengakuan dari serikat buruh di Eropa.

Langkah NOVIB dan HIVOS ini memancing emosi Pemerintah, sehingga akhirnya Pemerintah menolak peranan Belanda dalam menggalang bantuan untuk pembangunan di Indonesia melalui IGGI (*Inter Government Group on Indonesia*). Pembubaran IGGI ini akhirnya menghentikan peranan NOVIB dan HIVOS dalam menyalurkan bantuan untuk LSM di Indonesia. Sementara itu H.J. Princen ditangkap dan diinterogasi sedang Saut Aritonang tidak diketahui keberadaannya. SBMSK pun akhirnya tidak berjalan. Pada tahun 1992 ini pula Muchtar Pakpahan mengambil inisiatif untuk mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Meskipun mendapat perlawanan termasuk dari kalangan LSM yang khawatir penangkapan dan penghancuran gerakan akan semakin meluas, Muchtar terus berjalan hingga akhirnya berhasil menyelenggarakan Kongres I pada Juli 1993. Sama seperti kasus SBMSK, bantuan dana dari luar negeri khususnya WCL menyebabkan konflik dalam tubuh SBSI. Ditambah tekanan dari aparat keamanan dan ancaman pemecatan dari perusahaan bagi buruh yang tergabung dalam SBSI, banyak aktivis SBSI yang berkualitas mengundurkan diri. Tuduhan dari aparat negara terhadap SBSI antara lain, “bangkitnya anak-anak PKI”, “komunisme gaya baru”, “kolaborator asing” dan “menjual negara”. Tuduhan ini telah mempersulit ruang gerak para aktivis SBSI dan

keluarganya. Tidak sedikit dari mereka yang didatangi intelijen diminta mundur dari SBSI dan dijanjikan posisi/jabatan di perusahaan³⁷.

Sebagai gerakan baru yang lahir tahun 1990-an, SBSI mendapat dukungan dari semua pihak yang berseberangan dengan Pemerintah. Para elit politik yang tersingkir ke luar arena baik karena kompetisi intern dalam tubuh ABRI, Golkar maupun para pendukung Soekarno, secara diam-diam mendukung SBSI. Dukungan dari ILO, Atase Perburuhan Kedutaan Amerika Serikat, Inggris dan Belanda, telah menambah kekuatan SBSI. Berkat dukungan itu SBSI secara mendadak mencuat ke forum internasional³⁸, sehingga dukungan dari serikat buruh di berbagai negara terus mengalir. Bantuan keuangan juga diberikan, sehingga SBSI dapat menyusun agenda kerja, seperti melakukan pelatihan dan menyelenggarakan Kongres. Pemerintah terutama TNI dan POLRI merupakan penghalang utama agenda kerja SBSI, tetapi hal itu disikapi oleh para pengurusnya secara lapang dada. Musuh bersama ini telah mempererat hubungan para pengurus SBSI, sehingga rela berkorban waktu, tenaga, biaya dan penderitaan.

SBSI juga menjadi tumpuan para aktivis buruh yang memiliki idealisme memperjuangkan kesejahteraan buruh. Para aktivis buruh yang menolak kooptasi Golkar dan militer dan diberhentikan dari pekerjaannya, didekati oleh Muchtar Pakpahan untuk bergabung. Ketua SPSI Jakarta Timur Razak Yahya yang

³⁷ Seperti dikemukakan oleh Razak Yahya, Sunarti dan Gunawan kepada peneliti Nopember 2007.

³⁸ Hal ini dikarenakan penangkapan Gregory Talcott Atase Perburuhan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 28 Oktober 1992. Media internasional mempublikasikan penangkapan tersebut oleh Kodim Tangerang dan kritik, tekanan terus mengalir dari serikat-serikat buruh Amerika Serikat dan Eropa.

diberhentikan dari jabatannya³⁹, beberapa buruh yang diberhentikan dari perusahaan karena aktivitasnya memperjuangkan buruh, seperti Raswan, Sunarti, Bernard Nainggolan, David Pella, Siti Musdalifah dan Tohap Simanungkalit adalah para pendiri SBSI. Hingga tahun 1995, militansi dan dedikasi para pengurus SBSI sangat tinggi. Adu domba yang dilakukan oleh intelijen seperti “SBSI adalah komunisme baru”, “SBSI sebagai sarana kristenisasi” serta tekanan secara sistematis kepada semua pengurus SBSI untuk menghancurkan SBSI, secara perlahan-lahan berhasil ditepis dan soliditas pengurus SBSI dapat dipertahankan. Demikian pula ketika beberapa pengurus puncak SBSI ditahan dan disiksa, militansi para pengurus tidak mengendur. Namun sejak akhir tahun 1998, ketika kebebasan berorganisasi telah diraih, justru soliditas dan militansi SBSI mulai merosot.

Konflik dalam tubuh SBSI kali pertama terjadi ketika Muchtar Pakpahan keluar dari penjara tahun 1995. Selama dalam tahanan, SBSI dikendalikan oleh Razak, Sunarti dan Tohap Simanungkalit (Pakpahan, 1997:180). Sunarti menjelaskan bahwa

“Guna membiayai berbagai keperluan organisasi, kami berhasil mengembangkan usaha Koperasi Buruh, Travel Biro dan Lembaga Bantuan Hukum. Melalui usaha ini diperoleh pemasukan keuangan yang cukup untuk biaya operasional kantor dan kegiatan penggalangan di daerah-daerah. Selain itu kami juga melakukan lobi ke serikat buruh di Eropa dan Australia agar melakukan ancaman pemogokan atau penolakan memproses barang-barang dari Indonesia di pelabuhan laut dan udara jika Muchtar Pakpahan tetap ditahan”.⁴⁰

³⁹ Pengurus SPSI Cabang Jakarta Timur dibekukan oleh DPD SPSI Jakarta karena Razak Yahya menolak mengerahkan dukungan buruh ke Golkar dalam Pemilihan Umum 1987. Tetapi Razak ditawarkan sebagai salah satu ketua di DPD SPSI Jakarta. Razak menolak dan diberhentikan sebagai anggota SPSI. Kemudian ia mendirikan Forum Komunikasi Pekerja se-Jakarta Timur. Melalui wadah ini ia menggalang kesadaran dan kebersamaan buruh di Jakarta Timur (Wawancara Nopember 2007).

⁴⁰ Wawancara dengan Sunarti, dan Gunawan Nopember 2007.

Melalui tekanan WCL, ICFTU, AFL-CIO dan serikat buruh di beberapa negara, akhirnya Muchtar Pakpahan dibebaskan pada Oktober 1995. Kepemimpinan SBSI segera diambil alih oleh Muchtar Pakpahan.

Langkah penting yang diambil adalah membangun kembali SBSI di daerah yang berantakan akibat peristiwa Medan 1994. Untuk maksud tersebut semua anggota DPP diterjunkan ke daerah dan melakukan lobi ke WCL, ICFTU dan ke serikat buruh di Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hasilnya sungguh mengejutkan di mana DPC-DPC bisa dihidupkan kembali dan bantuan keuangan dari organisasi buruh di Eropa dan Amerika Serikat berhasil diperoleh dalam jumlah sangat besar. Begitu besarnya keuangan SBSI hingga pengurus DPD dan DPC digaji setiap bulannya⁴¹. Dana yang sangat besar ini telah menyebabkan suburnya nepotisme.

“isteri dan saudara-saudara Muchtar Pakpahan ikut mengurus unit-unit usaha yang dibentuk SBSI tanpa persetujuan pengurus. Demikian pula masuknya sejumlah orang dari Medan ke kantor SBSI tanpa melalui keputusan DPP, telah mengecewakan para pendiri SBSI”⁴².

Menurut Razak Yahya salah satu pengurus awal SBSI, “uang telah membutakan hati para aktivis buruh, sehingga saling berebut ke luar negeri, ke daerah-daerah dan fasilitas kantor seperti mobil dan sepeda motor”⁴³. Pada awal tahun 1996, Netty Saragih, Mehbob dan Yakob Erneste menarik diri dari SBSI dan mendukung berdirinya Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI). Sedangkan Razak Yahya, Muslim Panjaitan dan Eliasa Budianto (Ketua DPC Bandar Lampung) bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan dengan

⁴¹ *Focused Group Discussion* yang diikuti oleh Raswan, Sunarti, Gunawan, Razak Yahya, dan beberapa buruh lainnya di Pulo Gadung pada Nopember 2007.

⁴² Wawancara dengan Sunarti dan Gunawan Nopember 2007

⁴³ Wawancara dengan Razak Yahya Nopember 2007.

bantuan CIDES ikut mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI). YKPI dibentuk oleh para aktivis CIDES dan ICMI seperti Adi Sasono, Didik J. Rachbini, Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. Razak Yahya menyatakan bahwa “isu agama dan pencitraan negatif Muchtar seperti anak PKI memang dikedepankan oleh beberapa orang untuk memecah SBSI dan sebagai wujudnya adalah sekelompok muslim yang bergabung ke dalam YKPI”.⁴⁴ Isu ini sangat strategis sebab sejak berdirinya ICMI 1990, Pak Harto mulai menjauh dari ABRI dan berusaha merangkul kelompok Islam. Terjadi fragmentasi dalam tubuh militer dan birokrasi yang dikenal sebagai “ABRI merah putih” dengan “ABRI Hijau”. Demikian pula persaingan strategi pembangunan antara teknokrat di bawah Widjojo Nitisastro dan Teknolog di bawah B.J. Habibie. ABRI Hijau dan B.J. Habibie di atas angin, terbukti dari dipegangnya jabatan-jabatan strategis oleh orang-orang dekat BJH terutama dalam tubuh militer.

“Islamisasi birokrasi” demikian menurut Robert Hefner (1997) mempunyai dampak terhadap perpecahan SBSI. Melalui Mendagri Yogi SM dan Pangab Jenderal Faisal Tanjung serta Kasospol ABRI Jenderal Syarwan Hamid, terus dibangun citra negatif SBSI. Sebaliknya, kegiatan YKPI yang secara aktif menggembosi SBSI, memperoleh dukungan ICMI dan militer sayap hijau. YKPI antara lain meminta agar AAFLI tidak memberikan bantuan kepada SBSI. Selain itu beberapa bekas pimpinannya seperti Razak Yahya, Muslim Sahid dan M. Luthfi Hakim dengan menggunakan bendera YKPI berhasil membentuk Serikat Pekerja Tingkat Pabrik (SPTP) yang kemudian justru didorong masuk SPSI. Beberapa daerah di mana

⁴⁴ Wawancara dengan Razak Yahya Nopember 2007

tokoh-tokoh ini berpengaruh seperti Lampung, Aceh, Tangerang dan Jakarta Timur, para buruh yang tergabung dalam SBSI diminta untuk menggabungkan diri dengan SPSI. Inilah perpecahan pertama yang sangat serius di mana kekuatan politik seperti birokrasi dan militer secara aktif menggembosi SBSI. Kedekatan SBSI dengan PDI (P) meresahkan beberapa tokoh muslim. Secara terbuka Eliasa Budianto menyatakan bahwa “kita muslim tidak boleh dipimpin oleh non-muslim” (Pakpahan, 1997:192). Demikian pula Eggy Sudjana, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap SBSI,

“Sebuah gerakan buruh yang dipimpin oleh orang-orang nasrani dan mendapat bantuan biaya dari serikat buruh internasional yang juga didominasi Kristen. Pola seperti itu tidak bisa menghilangkan tuduhan adanya agenda Kristen internasional di Indonesia melalui gerakan buruh⁴⁵ .

Mulailah mereka membahas serikat buruh yang berbasis agama yang nantinya berdiri Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Jika perpecahan pertama dipicu oleh nepotisme dan adu domba militer/birokrasi di antara pengurusnya, maka perpecahan kedua sifatnya lebih strategis. Sebagai kekecewaan terhadap kinerja Partai Buruh Nasional (PBN) dalam pemilu 1999 yang memakan biaya SBSI tidak kecil dan hasilnya tidak memuaskan, maka agenda membentuk partai harus ditunda sampai SBSI benar-benar kuat secara organisatoris⁴⁶. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mandiri secara finansial, mampu menyelenggarakan kongres secara teratur, mampu melindungi anggotanya dari tindakan sewenang-wenang pengusaha dan mampu menyelenggarakan pelatihan kader-kadernya secara kontinyu dan berjenjang, sehingga tumbuh kesadaran bersama

⁴⁵ Wawancara dengan Eggy Sudjana pendiri PPMI Nopember 2007.

⁴⁶ Wawancara dengan Sunarti, Raswan dan Gunawan Nopember 2007.

akan pentingnya serikat buruh⁴⁷. Para aktivis SBSI sepakat bahwa suatu saat SBSI harus membentuk partai sebagai alat perjuangan politik. Berkaca pada Negara-negara maju di mana serikat buruh menjadi tiang utama dan mesin partai, maka dipercaya bahwa tidak ada partai politik yang secara gigih memperjuangkan kepentingan buruh, selain partai yang dibentuk dan dipimpin oleh para buruh. Sebab itu ideologi buruhisme harus lebih dahulu dipahami dan menjadi sikap para aktivis SBSI.

Tetapi kelompok Muchtar Pakpahan bersikeras mendirikan partai (Partai Buruh Sosial Demokrat). Tanpa partai buruh, maka perjuangan buruh akan sia-sia sebab buruh hanya akan menjadi objek partai, yang hanya dibutuhkan suaranya dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu untuk memperjuangkan kepentingan politik buruh, harus dibentuk partai buruh. Pertentangan antara kedua kubu ini semakin memuncak di mana nepotisme dan uang ikut menjadi pendorong. Kelompok Sunarti curiga jika uang yang dipinjam dari Jamsostek sebesar 1,2 milyar rupiah sebagian digunakan untuk keperluan partai. Akhirnya kelompok Sunarti mengadukan Pakpahan ke polisi. Dalam persidangan yang diwarnai ketegangan antar kedua kubu, hakim akhirnya membebaskan Pakpahan dari tuntutan jaksa. Buntut dari perseteruan tersebut adalah dipecatnya 33 orang dari kelompok Sunarti. Mereka ini dipimpin oleh Raswan mendirikan SBSI 1992.

Menurut Rekson Silaban Ketua SBSI, "Sunarti dan kawan-kawan diperalat oleh Jacob Nuwa Wea yang meminta SBSI mendukung PDI-P dalam Pemilu 2004".⁴⁸ Jacob semasa menjabat Menaker dikenal gigih mendekati beberapa serikat buruh yang tergolong besar, seperti SBSI dan SPN (KSPI). Tujuannya sangat jelas,

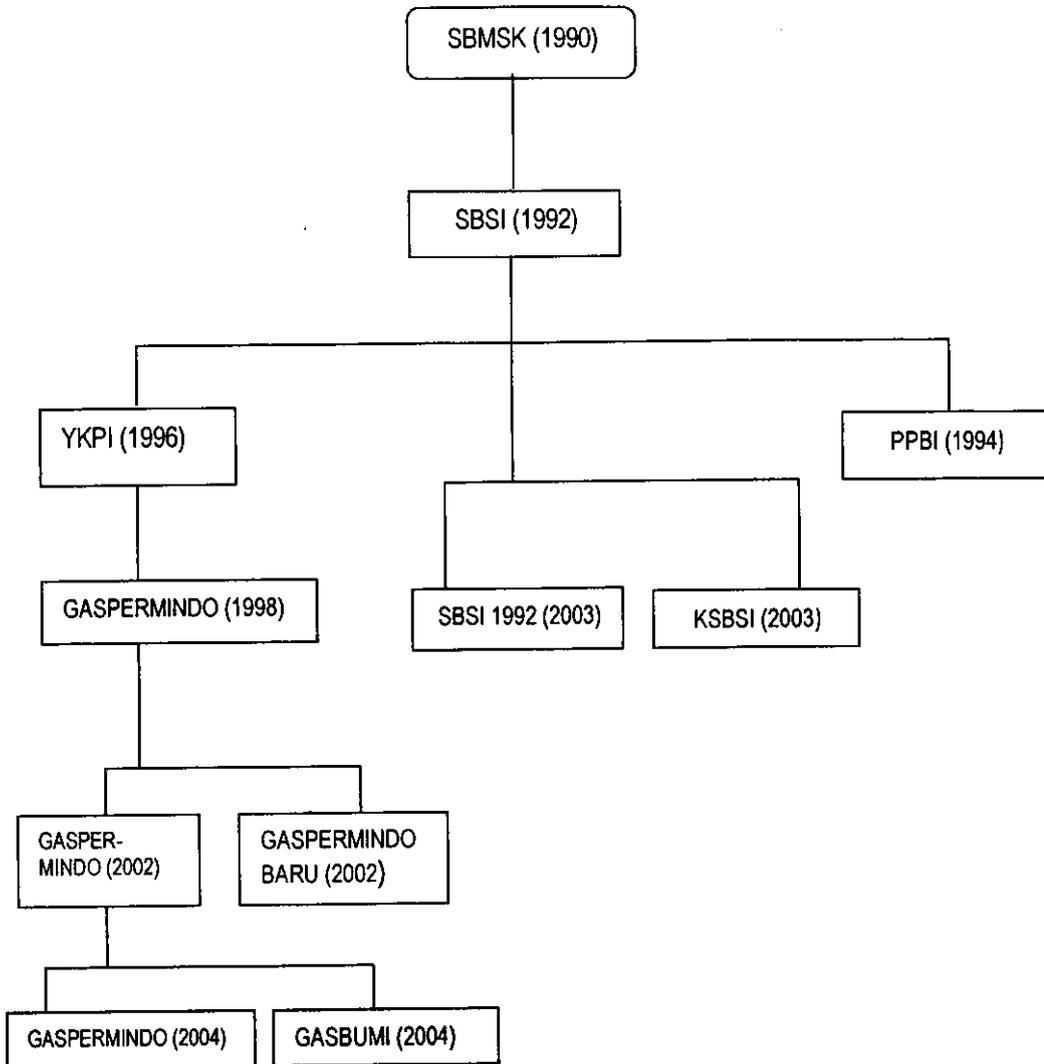
⁴⁷ Disimpulkan dari FGD Nopember 2007.

⁴⁸ Wawancara dengan Rekson Silaban Mei 2007.

yaitu membawa serikat buruh tersebut dalam gerbong PDI-P. Tetapi Pakpahan dan Silaban menolaknya sebab di bawah PDI-P, tidak ada perhatian terhadap buruh. Undang-undang No. 13/2003 yang lahir era kepemimpinan Megawati, tidak berpihak kepada buruh. Demikian pula beberapa pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan dan pelanggaran pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak mampu dicegah oleh Menaker yang juga ketua serikat buruh⁴⁹. Berbagai fakta ini meyakinkan para aktivis SBSI bahwa tanpa partai yang benar-benar dilahirkan dan dikelola oleh para buruh, tidak akan ada pemihakan kepada buruh.

⁴⁹ Wawancara dengan Rekson Silaban Mei 2007.

Bagan Fragmentasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia



3. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)

Kasus berikutnya adalah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). Gerakan ini tidak bisa dipisahkan dengan Dita Indah Sari. Dita mengawali aktivitas gerakan dari Forum Belajar Bebas (FBB), sebuah kelompok studi

mahasiswa progresif yang membahas masalah demokrasi dan keadilan sosial. Melalui buku-buku dan majalah yang dibacanya serta keterlibatannya secara aktif dalam diskusi dengan sesama aktivis, Dita sampai pada kesimpulan bahwa sistem ekonomi dan politik yang dianut oleh Pemerintah Orde Baru menempatkan rakyat sebagai obyek semata-mata. Oleh karenanya diperlukan pembelaan rakyat secara nyata.

“Sebagian besar rakyat hidup sebagai buruh dan petani, sehingga pembelaan nyata hanya mungkin dilakukan dengan membangun gerakan buruh atau gerakan petani. Di masa Orde Baru, buruh adalah obyek yang diperas tenaga kerjanya demi keuntungan pengusaha yang bekerjasama dengan penguasa. Bahkan buruh merupakan daya tarik investasi dengan upah murah”⁵⁰.

Dasar pemikiran ini yang menghantarkan Dita mendirikan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI). PPBI beranggotakan Pusat Perjuangan Buruh di kota-kota industri, seperti Jabotabek, Surabaya, Medan, Semarang, Solo dan Bitung. Pada tahun 1998, Dita juga aktif dalam Komite Buruh untuk Aksi Reformasi (KOBAR). KOBAR adalah gerakan buruh dan mahasiswa yang berdiri pada 8 Juli 1998. Gerakan ini dideklarasikan di kampus Universitas Indonesia Salemba dimotori oleh mahasiswa. Bagi kelompok ini, kejatuhan Soeharto juga atas peran besar kekuatan buruh. Mahasiswa sejak tahun 1996 menyusup ke pabrik-pabrik dan meyakinkan buruh pentingnya melakukan demonstrasi ke luar pabrik agar aspirasinya diketahui masyarakat luas. Oleh sebab itu mahasiswa dan buruh sepakat memakai nama lain di luar SPSI dan PPBI. Disepakati oleh mereka bahwa nama gerakan harus

⁵⁰ Wawancara dengan Dita Indah Sari pada Juni 2007.

mencantumkan kata “reformasi” agar sejalan dengan tuntutan mahasiswa⁵¹. Para aktivis KOBAR sesungguhnya tidak berbeda dengan PPBI.

Tanggal 22 Juni 1998 para buruh yang bergabung dalam KOBAR mendatangi Posko Perjuangan Rakyat UI di kampus Salemba. Tujuannya untuk menyelenggarakan Rapat Akbar Buruh se Jabotabek. Ribuan buruh yang telah siap masuk Jakarta dari Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang dihadang oleh aparat dan dihalau kembali ke wilayah masing-masing. Militer juga membubarkan kumpulan massa di Jakarta, terutama di sekitar wilayah Salemba. Jam 12.00 militer melakukan *swiping* di kampus UI Salemba. Mereka yang bukan mahasiswa disuruh ke luar kampus UI. Terjadi bentrok fisik antara militer dan mahasiswa. Beberapa mahasiswa diseret karena menghalangi penangkapan terhadap buruh. Sampai pukul 14.00, massa tidak mau membubarkan diri sehingga militer memberi ultimatum “tembak di tempat”. Massa kocar kacir dan menyelamatkan diri ke berbagai arah. Sekitar 500 orang berkumpul di YLBHI yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari kampus UI. Mereka ini mengadakan mimbar bebas dan menyampaikan tuntutan:

- a. Bebaskan Dita Indah Sari
- b. Naikkan UMR sebesar 100 persen
- c. Turunkan harga
- d. Stop Pemutusan Hubungan Kerja
- e. Berikan kebebasan berorganisasi bagi buruh
- f. Stop campur tangan militer dalam perburuhan
- g. Cabut undang-undang ketenagakerjaan⁵².

⁵¹ Wawancara dengan Nurhazanah Munaf ketua KOBAR (1998 – 1999 dan Ketua FNPBI tahun 1999-2001) dan kemudian Ketua Serikat Buruh Indonesia Perjuangan (SBIP) pada Januari 2008.

Aliansi antara buruh dan mahasiswa juga berdiri di beberapa kota yaitu Solidaritas Buruh Indonesia (SBI) di Jakarta, Persatuan Buruh Semarang (PBS), Pusat Perjuangan Buruh Surakarta (PPBS), Pusat Perjuangan Buruh Surabaya (PPBS), Dewan Buruh Sumatra Utara (DBSU) dan Pusat Perjuangan Buruh Bitung (PPBB). Pada Kongres I di Lembang tanggal 14-16 Mei 1999, gerakan buruh lokal ini sepakat mendirikan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)⁵³. Organisasinya berbentuk Dewan Buruh. Pemilihan bentuk organisasi ini didasari pemikiran bahwa gerakan buruh sering dikhianai oleh para pengurusnya yang bekerjasama dengan pengusaha menindas buruh. Para pimpinan serikat buruh menjadi elitis dan mudah melakukan kompromi dengan pengusaha. Selain itu represi oleh aparatus negara menyebabkan gerakan buruh terhenti akibat tidak adanya kepemimpinan. FNPBI menyimpulkan bahwa persoalan seperti itu dapat diatasi dengan membangun organisasi yang mampu mengurangi represi dan kooptasi oleh pemerintah maupun pengusaha.

“Dewan buruh memilih pengurus dan mengontrol aktivitas serikat buruh. Bila terjadi sesuatu kepada pimpinan serikat buruh seperti penangkapan dan PHK, para buruh tetap bisa digerakkan karena ada pimpinan yang lain. Bentuk organisasi Dewan Buruh juga dimaksudkan sebagai media yang lebih tepat dalam mewujudkan demokrasi kerakyatan yang menjadi cita-cita perjuangan FNPBI”⁵⁴.

Dalam demokrasi kerakyatan, seluruh buruh terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan kontrol terhadap kepemimpinan. Gagasan untuk membangun demokrasi kerakyatan dalam implementasinya harus melibatkan kekuatan akar rumput, yaitu buruh dan petani. Buruh harus menjadi pelaku aktif

⁵² Wawancara dengan Nurhazanah Munaf pada Januari 2008.

⁵³ Wawancara dengan Dominggus Oktavianus Oktober 2007.

⁵⁴ Wawancara dengan Dominggus Oktavianus Oktober 2007.

demokrasi dan hal itu dimulai dari kemerdekaan berserikat dan membangun kekuatan sosial politik yang berbasis kaum buruh⁵⁵.

Dari beberapa gerakan buruh yang ada, FNPBI adalah satu-satunya yang merintis gerakan dengan membangun kesadaran di kalangan buruh. FNPBI masuk ke pabrik-pabrik dengan menerjunkan para mahasiswa yang juga bekerja sebagai buruh atau membina mahasiswa yang juga buruh menjadi kader. Salah satu prinsip perjuangannya adalah bahwa gerakan buruh adalah gerakan ekonomi dan politik.

“Tidak mungkin mencapai tujuan ekonomi tanpa tujuan politik. Sebab itu gerakan dibangun dari bawah dengan menyadarkan para buruh tentang hubungan produksi. Para buruh harus dibangkitkan dari kepasipan dan itu harus dimulai dari pabrik-pabrik”⁵⁶.

Pengorganisasian dimulai dengan membangun komite-komite di tingkat pabrik. Beberapa komite kemudian digabung seperti Komite Buruh untuk Aksi Reformasi (KOBAR). KOBAR adalah gabungan dari komite-komite di kawasan Jabotabek. KOBAR dirintis oleh Dita Indah Sari, Ilhansyah dan Wahyu. Komite sejenis juga dibentuk di Surabaya dan sekitarnya dengan berdirinya Pusat Perjuangan Buruh Surabaya (PPBS). Dominggus Oktavianus dan Ganjar Krisdian adalah pengagas dan pendiri PPBS. Sedangkan Anita Sitanggang dan Satwa Ginting menggarap buruh di Sumatra Utara dengan mendirikan Dewan Buruh Sumatra Utara (DBSU). Dewan ini membangun kesadaran kepada para buruh industri maupun perkebunan. Respon dari buruh perkebunan ternyata lebih besar dibanding buruh industri. Hal ini tidak terlepas dari telah mengguritanya cengkeraman buruh perkebunan oleh para pemodal sejak masa kolonial. Di sini DBSU menyadarkan buruh bahwa sistem ekonomi dan sistem politik mengeksploitasi mereka.

⁵⁵ Wawancara dengan Dominggus Oktober 2007.

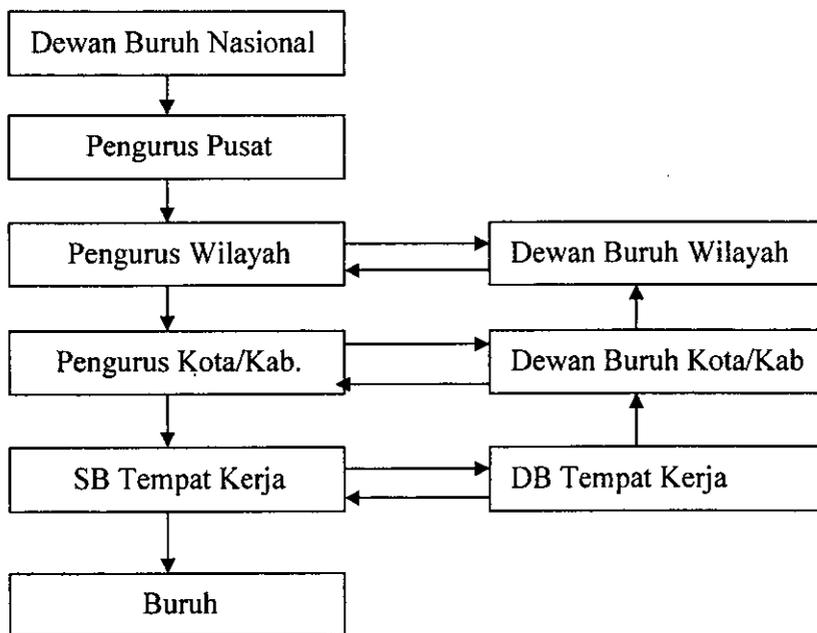
⁵⁶ Wawancara dengan Dominggus Oktober 2007.

Serikat Buruh Indonesia (SBI) didirikan oleh Wiwik dan Mutiara Lusiana di Bandung. SBI juga merupakan jaringan antar kelompok-kelompok buruh pabrik. Hal yang sama juga berlangsung di Semarang, seperti yang diorganisasi oleh Aris dengan Pusat Persatuan Buruh Semarang (PPBS). Aris adalah korban PHK dari perusahaan yang memproduksi bahan pembuat plastik di Semarang. Kegigihannya memperjuangkan pembayaran upah sesuai UMR dan THR sejak tahun 1996, berakibat pada PHK. Alasan resmi PHK adalah tidak mematuhi peraturan perusahaan dan tidak bisa bekerjasama dengan pihak manajemen. Di Solo, Sindhu mengorganisasi para buruh yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Buruh Surakarta (PPBS). Sebagian besar anggota PPB Surakarta adalah buruh pabrik diikuti buruh serabutan (buruh harian) dan pekerja sektor informal.

Di samping gerakan-gerakan buruh, FNPBI membangun jaringan dengan Komite Anti Penindasan Buruh (KAPB), Aliansi Kawasan, Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Anti WTO (KAWTO), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Kelompok Aceh, Kelompok Papua dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). Jaringan dimaksudkan untuk membangun kekuatan dengan memperluas dan memperbanyak sumberdaya. Berbeda dengan gerakan-gerakan buruh lokal yang membangun jaringan konglomerat, gerakan sosial lain membangun struktur yang longgar. Memperhatikan isu-isu bersama yang diusung dan tuntutan-tuntutannya, mereka memiliki ideologi yang sama yaitu demokrasi kerakyatan. Baik gerakan buruh lokal penyokong FNPBI maupun gerakan sosial yang beraliansi dengan FNPBI, memiliki pemimpin masing-masing. Tetapi pimpinan FNPBI ditaati oleh pimpinan gerakan buruh pendukungnya. Sedangkan dengan gerakan aliansi, meskipun memiliki kesamaan visi, tidak taat dengan keputusan FNPBI. Hubungan

dapat didefinisikan sebagai pertalian, keanggotaan yang tumpang tindih dan berbagai kegiatan yang diikuti dari beberapa kelompok yang berbeda. Kesamaan ideologi merupakan kekuatan yang dapat mengintegrasikan gerakan-gerakan sosial tersebut. Tetapi perbedaan wilayah gerakan dipililihlah aliansi longgar⁵⁷.

Struktur Organisasi FNPBI



Perpecahan FNPBI terjadi pada tahun 2002, ketika Nurhasanah (salah satu ketua FNPBI) dan Ilyansyah (Sekjen FNPBI) menuntut perubahan strategi perjuangan⁵⁸. Bagi kedua aktivis yang menguasai basis sektor makanan dan minuman ini, perjalanan FNPBI mengalami kemunduran dibanding SB lain. Hal ini disebabkan “kurangnya memperhatikan dinamika di tingkat basis. Sebagai SB yang

⁵⁷ Wawancara dengan Domingus Oktober 2007

⁵⁸ Wawancara dengan Nurhazanah Munaf Januari 2008.

menempatkan kepentingan dan perjuangan buruh, maka seharusnya dinamika di tingkat basis (perusahaan/tempat kerja), menjadi prioritas”.⁵⁹ Setelah tiga tahun berjalan, para pengurus pusat lebih banyak menyuarakan kepentingan buruh secara umum dan alpa membangun SB yang kuat. Para aktivis Pusat sibuk dengan isu-isu yang terlalu luas bahkan secara langsung tidak berhubungan dengan kepentingan buruh, seperti penolakan kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik dan sebagainya. Sementara para buruh di tingkat basis yang menunggu hasil perjuangan konkrit, kurang diperhatikan.

Selain masalah di atas, strategi perjuangan yang mengandalkan pemogokan juga menimbulkan kekecewaan sebagian pengurus Pusat. Pemogokan seharusnya terorganisasi dari tingkat pabrik. Pabrik merupakan pusat kekuatan buruh, sehingga harus menjadi pusat perjuangan buruh. Pemogokan di luar pabrik sangat penting terutama ditujukan kepada kebijakan pemerintah yang tidak pro buruh. Perjuangan FNPBI yang mengandalkan protes dan pemogokan, sangat mudah dihadapi oleh aparatus Negara. Perjuangan juga harus diarahkan ke dalam dengan memperkuat gerakan dengan menambah kekuatan dan meningkatkan kesadaran buruh akan pentingnya solidaritas.

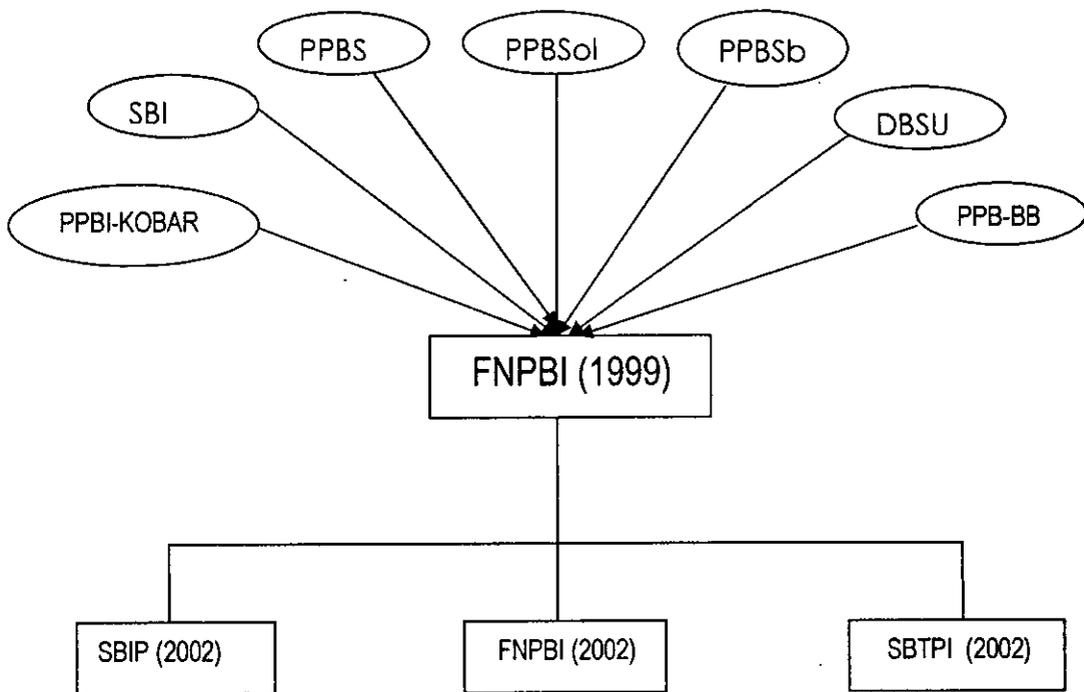
Nurhazanah mengundurkan diri dari FNPBI tahun 2002 dan mendirikan Serikat Buruh Indonesia Perjuangan (SBIP). Anggotanya lebih banyak buruh sektor makanan dan minuman terutama di Tangerang, Bekasi dan Karawang. Ideologi gerakan buruh ini sama dengan FNPBI, yaitu menolak neoliberalisme sebagai manifestasi nyata penindasan buruh. Bedanya, SBIP akan lebih menekankan kepada kekuatan gerakan dengan menambah jumlah anggota dan meningkatkan kesadaran

⁵⁹ Wawancara dengan Nurhazanah Munaf Januari 2008.

dan solidaritas buruh. Pemogokan dan mobilisasi buruh tidak akan menjadi senjata SBIP dan akan mengandalkan kepada negosiasi. Pemogokan merupakan jalan terakhir ketika sejumlah tahap negosiasi telah ditempuh. Ilyansyah juga ke luar dari FNPBI dan mendirikan Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI). Dengan demikian, FNPBI terpecah menjadi tiga gerakan buruh.

Sejak 2004 dengan tujuan untuk memperkuat gerakan, maka SBIP bergabung dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Fragmentasi FNPBI



4. Serikat Buruh Berasas Islam

Gerakan buruh yang menegaskan perjuangannya untuk menegakkan syariat Islam adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Gagasan untuk membentuk serikat pekerja ini dicetuskan oleh Eggi Sudjana, salah seorang peneliti di *Centre for Information and Development Studies* (CIDES), sebuah lembaga kajian di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Eggi menghubungi para tokoh buruh yang pernah aktif dalam gerakan buruh Islam, seperti Syaiful DP, Bahar Muid, Muhammad Yahya dan Yakob Sofyan untuk mendiskusikan rencana pembentukan PPMI. Keprihatinan Eggi mencermati kondisi perburuhan tanah air selama tahun 1990-an di mana para buruh terus menurun kesejahteraannya dan demonstrasi yang berlangsung hampir setiap hari, mendorongnya untuk mendeklarasikan PPMI pada 3 Maret 1998 di Mesjid Komplek Arco Sawangan-Bogor.

Selain itu, besarnya buruh islam yang tidak tersentuh oleh perlindungan SPSI, mendorong Eggi dan kawan-kawan menghantar pembentukan PPMI.

“Serikat buruh yang mengatasnamakan Islam sebelumnya gagal dalam memadukan hukum ketenagakerjaan dengan hukum Islam, akibatnya yang terjadi adalah pengisapan dan penindasan terhadap buruh. Selain itu dominasi pengusaha asing dan keturunan Cina dalam perekonomian Indonesia, memberi peluang semakin besar terhadap pengabaian hak-hak buruh”.⁶⁰

Pengusaha cenderung mendekati aparat negara untuk menertibkan buruh karena biayanya lebih sedikit. Sebagai sebuah ideologi dan prinsip hidup, Islam diyakininya merupakan aturan yang sempurna dan mengatur hubungan industrial yang jauh lebih baik. Dalam perjuangannya, PPMI mengedepankan prinsip ukhuwah (persaudaraan),

⁶⁰ Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007.

baik secara vertikal maupun horisontal. Oleh sebab itu PPMI menempatkan pemerintah dan pengusaha sebagai mitra.

Kegagalan PPMI di bidang perburuhan juga disebabkan oleh semakin meningkatnya peranan SBSI dalam pembelaan buruh. Dalam pandangan PPMI, “SBSI tidak akan mampu menyelesaikan persoalan perburuhan sebab sebagian besar pengurusnya baik di pusat maupun di daerah beragama Kristen atau Katolik”⁶¹. Perbedaan keyakinan ini tidak akan mampu menggerakkan buruh dalam meningkatkan kesejahteraan. Tidak tertutup kemungkinan merosotnya ajaran Islam di kalangan buruh karena para buruh didorong berperilaku yang kurang sesuai dengan keyakinannya. Bukti akan hal ini adalah

“terus didorongnya para buruh melakukan demonstrasi, pemogokan dan perlawanan terhadap pemerintah B.J. Habibie yang secara nyata menghadapi persoalan ekonomi yang akut. Pemerintah Habibie mewarisi kondisi ekonomi dan politik yang sangat berat. Tetapi SBSI di bawah Muchtar Pakpahan bukan membantu pemerintah untuk menstabilkan perekonomian, justru melakukan tuntutan kenaikan upah dan jaminan sosial. Ini bukti bahwa ajaran Islam tidak dipahami dan diterapkan”⁶².

PPMI mengecam keras seruan SBSI yang menuntut kenaikan upah dan pembayaran THR. Dalam pernyataan politiknya akhir tahun 1998, PPMI antara lain menyerukan:

“PPMI meminta kepada para pekerja di seluruh Indonesia agar tidak mengikuti dan menuruti provokasi-provokasi politik segelintir orang yang merugikan pekerja dan mengganggu konsentrasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Pada saat kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, paling penting bagi pekerja adalah tetap dapat bekerja dengan baik dan produktif untuk dapat hidup dan survive dan ikut memikirkan serta membangun harga diri bangsa dan kejayaan Indonesia” (PPMI, 1998).

Kelemahan gerakan buruh pada masa lampau adalah “tidak adanya kepemimpinan dan arahan yang benar-benar memperjuangkan buruh, miskin strategi, terlalu

⁶¹ Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007

⁶² Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007

menekankan jumlah anggota dan gagap terhadap perubahan”.⁶³ Gerakan buruh yang tidak bebas dan berada di bawah partai politik atau organisasi kemasyarakatan, akan sulit berkembang dan tidak akan memiliki militansi dalam memperjuangkan buruh.

“Untuk sementara para buruh bisa bergabung dengan PPP, PBB atau PKS. Tetapi nantinya buruh harus mendirikan partai sendiri yang dipimpin oleh buruh. Pemimpin Indonesia nantinya harus dari partai buruh, sehingga persoalan kebutuhan dasar rakyat bisa diatasi dengan baik”⁶⁴.

PPMI memilih melakukan aliansi secara strategis dengan kekuatan sosial lain dan tidak permanen dan mendukung partai politik yang memperjuangkan syariat islam.

PPMI tidak memiliki jaringan dengan gerakan buruh lain, tetapi beberapa kali melakukan kerjasama dengan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermino). Para pendiri dan pengurusnya dikenal aktif dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Meskipun demikian PPMI beberapa kali terlibat dalam kerjasama strategis. Eggi Sudjana salah seorang pimpinan PPMI sebelumnya dikenal sebagai ketua Pemuda Ka'bah, sebuah Ormas pemuda yang dibentuk oleh Partai Persatuan Pembangunan. Sepanjang tahun 1998-1999, Eggi dengan PPMI sangat aktif mencari dukungan untuk Habibie. Pada Maret 2001, PPMI melakukan aliansi dengan Gaspermino pimpinan Jumhur Hidayat mengerahkan massa ke Istana Merdeka dan meminta Presiden Abdurrahman Wahid mundur. Aliansi dengan ormas Islam lain sering dilakukan dalam menyikapi isu-isu strategis. Misalnya, pada Agustus 2001 PPMI bersama dengan Front Pembela Islam dan Persaudaraan Muslim se-Dunia menuntut pemberlakuan syariat Islam ke DPR.

⁶³ Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007.

⁶⁴ Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007.

Mereka menyatakan dengan memberlakukan syariat Islam, berbagai krisis bangsa yang dihadapi ini akan dengan mudah teratasi.

PPMI mencita-citakan masyarakat Indonesia yang didasarkan kepada syariat Islam.

“Bagi kita umat Islam, paradigma buruh sebagai alat produksi harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Bekerja merupakan perwujudan aktualisasi diri manusia untuk menyempurnakan dunia sekaligus bekerja untuk tugas kekhalfahannya di muka bumi”.⁶⁵

Mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah umat Islam, harus menggali nilai-nilai Islam soal dunia kerja. Al-Quran sudah secara lengkap mengatur itu, sehingga jika hukum Islam diterapkan, penderitaan buruh akan sirna”.⁶⁶

Aliansi dengan ormas Islam lain juga dilakukan PPMI sepanjang tahun 2004-2005 terutama dengan Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Hal itu dilakukan dalam rangka “membangun kekuatan Islam dengan mempersatukan gerakan Islam yang telah ada dan gerakan yang bukan berdasarkan Islam tetapi dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam”.⁶⁷ Tuntutan PPMI sepanjang tahun ini jauh dari isu-isu perburuhan. Bersama ormas-ormas tersebut PPMI menuntut pemberlakuan syariat Islam dengan mengepung gedung DPR/MPR pada Agustus 2004. Sedangkan pada November 2004 aliansi ormas-ormas tersebut menuntut pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dan menolak tuduhan yang ditujukan kepada Amir Mujahidin Indonesia tersebut. Meskipun usaha-usaha tersebut tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi aliansi antar ormas Islam ini berhasil dalam menguatkan jaringan gerakan sosial berbasis Islam. Isu-isu yang berhubungan dengan agama Islam, seperti pembuatan karikatur Nabi Muhammad di salah satu

⁶⁵ Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007

⁶⁶ Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007.

⁶⁷ Wawancara dengan Eggi Sudjana Nopember 2007.

koran Denmark dan pernyataan Paus tentang Perang Salib dalam kunjungannya di Jerman awal tahun 2007, diprotes oleh aliansi antar ormas Islam termasuk di dalamnya PPMI.

Sebelumnya sepanjang tahun 2000, PPMI mengecam para tokoh Islam yang memimpin negeri ini yang tidak mampu menegakkan syariat Islam. Dalam pidatonya di hadapan massa pendukung Front Hizbullah akhir tahun 2000, Eggi Sudjana Ketua Umum PPMI menyerukan agar semua ormas Islam bersatu melakukan revolusi Islam seperti halnya di Iran. Menurutnya, reformasi tidak akan menghasilkan apa-apa bagi umat Islam Indonesia. PPMI akan terus mengajak ormas-ormas Islam bersatu berjuang sampai hukum Islam ditegakkan.

Namun, seruan tersebut tidak menarik bagi serikat buruh Islam lainnya. Tidak semua serikat buruh Islam bercita-cita memberlakukan syariat Islam dan mendirikan Negara Islam. Gasbumi yang didirikan oleh Razak Yahya dan beberapa aktivis lain, menggunakan asas Islam untuk mengembalikan cita-cita luhur gerakan kepada kesejahteraan buruh. Dari pengalamannya dalam gerakan buruh baik di SPSI, SBSI, YKPI dan Gaspermindo, disimpulkan bahwa:

“Tanpa tuntunan moral yang kuat, gerakan buruh sangat mudah dikhianati oleh para para aktivisnya. Komitmen para aktivis cepat melemah jika sudah bersentuhan dengan materi dan meninggalkan buruh yang seharusnya diperjuangkan”.⁶⁸

“Islam membimbing kami dalam gerakan khususnya moral gerakan. Tetapi kami tidak mengharapkan lahirnya negara Islam seperti Iran atau Pakistan”.⁶⁹

Kontradiksi antara pengejaran status dan materi dalam gerakan dengan moralitas puritan, berusaha diselesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Gerakan-

⁶⁸ Wawancara dengan H. Razak Yahya Nopember 2007

⁶⁹ Wawancara dengan H. Razak Yahya Nopember 2007

gerakan sosial termasuk gerakan buruh yang mengusung asas islam, ternyata tidak satu bahasa. Di satu pihak mengejar cita-cita masyarakat islami, di pihak lain hanya menjadikan islam sebagai pengikat bersama.

Akar gerakan buruh Islam dapat dilacak sejak awal tahun 1900-an dengan berdirinya Sarikat Islam. Di era kemerdekaan, terutama menjelang pemilihan umum 1955, para buruh memperoleh penggarapan intensif dari partai-partai politik dan fragmentasi gerakan buruh mengikuti fragmentasi partai. Pola *onderbouw* ini oleh rejim Orde Baru dianggap sebagai sumber ketidakstabilan politik, sehingga semua serikat buruh dipaksa bergabung dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) tahun 1973. Meskipun demikian, Gasbiindo, GOBSI, Sarbumusi dan serikat buruh lain tidak membubarkan diri. Gasbiindo dan Sarbumusi merupakan serikat buruh islam yang kuat dalam sejarah gerakan buruh Indonesia. Hampir semua aktivis buruh islam disemai dari dua gerakan tersebut. Jusuf Wibisono, Agus Sudono, Syaiful DP, Ali Ermas dan Munir yang merupakan aktivis SBII, KBIM dan kemudian Gasbiindo serta Susanto Martoprasonto dan Ali Djunaedi dari Sarbumusi, menjadi sumber gagasan gerakan buruh Islam.

Berdirinya PPMI, Gasbumi, GOBSI, KOSBI, SERPI di samping Gasbiindo dan Sarbumusi, melibatkan tokoh-tokoh yang pernah eksis dalam gerakan buruh Islam sebelum 1973. Tokoh-tokoh ini pulalah yang memberikan pemikiran garis perjuangan gerakan, meskipun tidak selalu duduk di eksekutif. Gasbiindo dideklarasikan kembali 8 Januari 1999 dengan perubahan nama Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia. Perubahan ini merupakan siasat sesaat untuk melihat

perubahan politik di akhir tahun 1990. Sebab dalam buku saku Gasbiindo⁷⁰, dijelaskan bahwa gerakan ini lahir 27 Nopember 1947 dan tahun 1999 merupakan pendeklarasian kembali. Artinya, Gasbiindo yang dideklarasikan kembali itu kelanjutan dari SBII yang merupakan anak cabang Partai Masyumi. Pengurus Gasbiindo (baru) pun didominasi oleh pengurus Gasbiindo tahun 1960-an, seperti Agus Sudono, Ali Ermas, Munir, Syaiful DP dan Jakob Sofjan. Selain itu, Gasbiindo masih tercatat sebagai anggota ICFTU, sehingga mempunyai keuntungan karena mendapat pengakuan dan bantuan internasional.

Gerakan ini mengalami perpecahan serius tahun 2001. Perebutan kepemimpinan antara Agus Sudono dan Ali Ermas – Munir serta pengorganisasian gerakan, menyebabkan Ali Ermas dan Munir menarik diri. Menurut Ali Ermas,

“pendeklarasian kembali Gasbiindo sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1995 bersama beberapa tokoh ICMI. Gasbiindo sejak semula dimaksudkan untuk menghidupkan kembali format gerakan buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh yang mayoritas islam”.⁷¹

Sejak awal berdirinya Gasbiindo dimaksudkan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dengan mengaktualisasikan ajaran islam. Oleh sebab itu Gasbiindo harus kembali ke cita-cita semula baik ketika masih bernama SBII atau Gasbiindo tahun 1960-an. Tetapi Agus Sudono menolaknya dan berupaya untuk mempertahankan posisinya dengan mempertahankan nama Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia. Ali Ermas menilai bahwa Sudono telah keluar dari cita-cita semula⁷². Sedangkan Sudono beralasan bahwa langkah yang ditempuhnya sesuai dengan keputusan Kongres. Kongres I tahun 2001 masih mempertahankan Sudono dan

⁷⁰ *Gasbiindo (Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia)*, Solo: tanpa Penerbit, 2000.

⁷¹ Wawancara dengan Ali Ermas Nopember 2007

⁷² Wawancara dengan Ali Ermas Nopember 2007

menolak “kembali ke khithah 1947”. Selain itu, gerakan buruh menurut Konvensi ILO No. 87 tidak boleh bersifat sektarian. Serikat buruh harus terbuka bagi semua buruh, tanpa membedakan jenis kelamin, etnik dan agama⁷³.

Ali Ermas dan Munir kemudian mendirikan Serikat Pekerja Islam (SERPI) pada tahun 2001. Tujuan SERPI adalah meningkatkan kesejahteraan buruh berdasarkan ajaran Islam. Keduanya menolak bergabung dengan SB yang telah ada, sebab “arah perjuangan SB lain mengkhianati Islam”. Sebagai kekuatan terbesar dari rakyat, buruh Islam kurang diperhatikan oleh para tokoh gerakan buruh, tokoh partai dan elit politik negeri ini. Para buruh harus disadarkan bahwa perubahan hanya berasal dari kekuatan mereka sendiri. Sebab itu pembangunan kesadaran gerakan buruh islam sangat penting dilakukan agar segera disadari oleh para buruh pentingnya membangun gerakan yang kuat. Gerakan seperti ini harus didasarkan kepada nilai-nilai yang diyakini benar oleh para buruh, menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari dan secara terus menerus memberi harapan akan perubahan yang lebih baik.

“Islam sebagai sistem nilai mampu memenuhi tuntutan tersebut, sehingga mewujudkan masyarakat Islam dapat dimulai dengan terlebih dahulu mengimplementasikan konsep ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi islam, negara wajib melindungi para buruh dari perlakuan sewenang-wenang pengusaha. Sistem ekonomi yang dipraktekkan Orde Baru di mana negara menjadi pelindung pengusaha, bertentangan dengan cita-cita SERPI”⁷⁴.

Relasi antara pengusaha dan buruh harus dibimbing oleh etika islam. Oleh sebab itu Islam bukan hanya menjadi tali pengikat gerakan, tetapi juga menjadi tujuan gerakan. Islam yang telah menjadi agama mayoritas buruh harus diberi makna lebih di mana agama yang mengatur secara lengkap sistem politik dan ekonomi ini

⁷³ Wawancara dengan Agus Sudono Oktober 2007.

⁷⁴ Wawancara dengan Ali Ermas Nopember 2007.

perlu dipahami oleh para buruh⁷⁵. Karenanya program SERPI selain memperjuangkan kesejahteraan buruh juga meningkatkan pemahaman para buruh terhadap Islam. Pelatihan-pelatihan yang diikuti para buruh selalu mengandung muatan peningkatan pemahaman terhadap Islam. Meskipun demikian, SERPI menolak membangun hubungan yang permanen dengan partai politik. SERPI menyatakan diri independen dan pilihan politik diserahkan kepada masing-masing anggota yang mayoritas buruh industri ringan sektor makanan, minuman dan garmen. Dalam hubungan dengan gerakan sosial lain pun SERPI membatasi diri hanya dengan gerakan sosial yang memiliki cita-cita atau ideologi yang sama. Hal ini menempatkan SERPI terkekang dan tidak mampu melakukan aktivitas layaknya sebuah gerakan sosial.

Persoalan ini yang membuat Munir sebagai salah satu pendirinya mengundurkan diri dan mendirikan Kongres Buruh Islam (KOSBI) pada 6 Nopember 2002. Bagi Munir, “pilar gerakan buruh terletak pada kesadaran buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kerjasama antar mereka. Bangun kerjasama yang paling tepat adalah koperasi”⁷⁶. Ekonomi islam harus dibangkitkan melalui koperasi. Sebab itu Koperasi yang oleh Bung Hatta disebut sebagai “soko guru ekonomi Indonesia”, harus menjadi kekuatan terdepan dalam gerakan buruh. Terus-menerus membicarakan Islam tanpa memberi bukti-bukti konkrit hanya membuat para buruh apatis dengan gerakan dan tidak percaya dengan pimpinannya. Gerakan buruh perlu melakukan orientasinya ke dalam dan ke luar. Ke dalam secara terus-menerus membangun kesadaran berorganisasi, menyelenggarakan pendidikan dan

⁷⁵ Wawancara dengan Munir Nopember 2007

⁷⁶ Wawancara dengan Munir Nopember 2007.

pelatihan dan ke luar membangun jaringan dengan sesama gerakan buruh, gerakan sosial lain dan partai-partai politik.

Kembalinya para aktivis buruh Islam Orla dalam gerakan buruh sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1996. Meningkatnya peranan ICMI dalam politik Indonesia, meningkatkan harapan para aktivis politik Islam termasuk para tokoh buruhnya. Beberapa pertemuan diselenggarakan di kantor CIDES atau ICMI untuk menggagas format politik di era transisi kepemimpinan Pak Harto dan pasca Soeharto. Para tokoh buruh lama dan generasi mudanya percaya bahwa kekuatan Islam akan memainkan peranan penting⁷⁷. Oleh sebab itu ICMI mulai aktif mendekati kelompok-kelompok sosial, buruh, petani, mahasiswa, perempuan dan sebagainya. Para tokoh muda aktif mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI). Yayasan inilah yang nantinya menjadi embrio Gaspermindo (bagi yang menolak label agama) dan PPMI (bagi yang secara terbuka mengusung label agama). Namun tujuannya sama, yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil dan membangun format gerakan yang benar-benar berbasis pada orang-orang kecil⁷⁸.

Tokoh Gerakan Organisasi Buruh Syarikat Islam (GOBSI) yang merupakan *onderbouw* Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang mendukung PPMI adalah Muhamad Yahya. Ia tertarik dengan ketegasan PPMI yang secara terbuka memperjuangkan para buruh Islam⁷⁹. Tetapi langkah yang ditempuh PPMI dinilai terlalu radikal dan membahayakan masa depan para buruh. PPMI dinilai gagal

⁷⁷ Wawancara dengan Juhur Hidayat (Staf CIDES, Pengurus ICMI, Pendiri Gaspermindo, Sekjen Partai Daulat Rakyat, dan Kepala BNP2 TKI) Januari 2008.

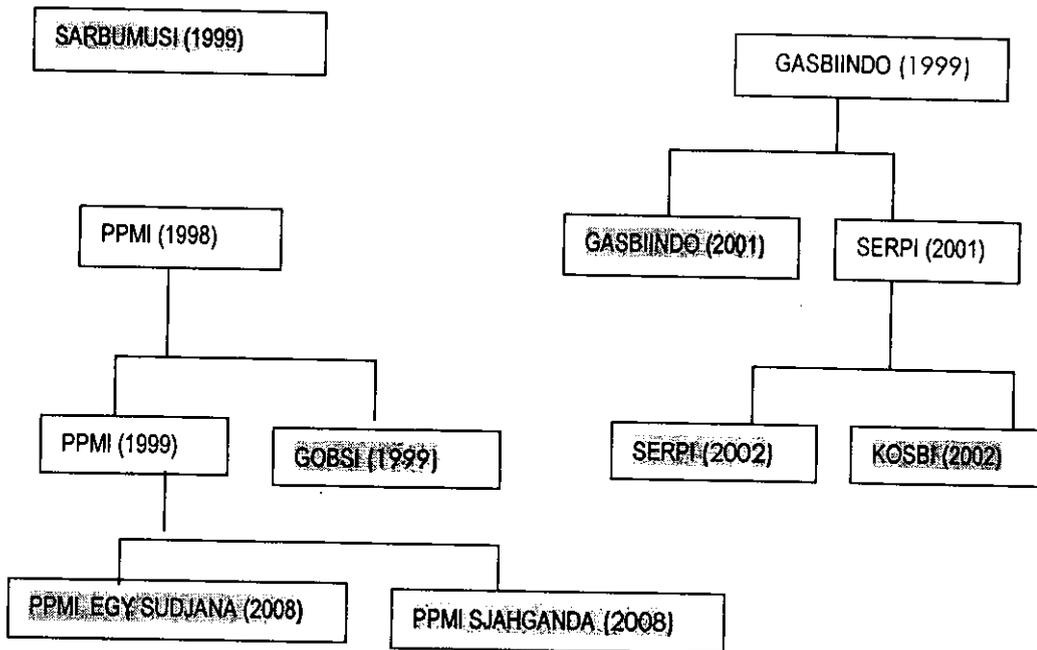
⁷⁸ Wawancara dengan Juhur Hidayat Januari 2008.

⁷⁹ Wawancara dengan M. Yahya Ketua GOBSI Oktober 2007.

melakukan konsolidasi, sosialisasi dan kaderisasi. Sebaliknya ia sibuk dengan usaha-usaha untuk melakukan tekanan kepada pemerintah dan pengusaha bahkan dengan cara-cara kekerasan. Selama bergabung dengan PPMI, M. Yahya mendapat pelajaran berharga yaitu bahwa kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam membangun gerakan buruh yang kuat. Pengusaha tidak mungkin ditempatkan sebagai rival, sebaliknya merupakan partner dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Oleh sebab itu, ia ke luar dari PPMI yang tidak focus pada peningkatan kesejahteraan buruh.

Ketika menghidupkan kembali GOBSI, tidak lagi mengusung asas islam melainkan Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Nama GOBSI tetap dipertahankan sebab oleh para buruh ia dikenal sebagai tokoh GOBSI. Serikat buruh yang tergabung dalam GOBSI adalah serikat buruh tekstil, logam, elektronika, restoran dan buruh bengkel. Dengan meniadakan label "islam", anggotanya justru terus bertambah. Jika pada tahun 2000 anggotanya hanya 1.200 orang, tahun 2007 telah meningkat menjadi 3.800 orang. Meskipun demikian, karena sebagian besar anggotanya buruh lemah, maka iuran bulanan tidak berjalan. Persoalan yang dihadapi oleh anggota GOBSI adalah pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja dan buruh-buruh kontrak atau honor/pekerja lepas. Dalam memperjuangkan hak-hak buruh, GOBSI sering tidak mampu bekerja sendiri. Aliansi dengan gerakan buruh lain dilakukan untuk menambah kekuatan dan mensukseskan perjuangan. Misalnya, dalam memperjuangkan upah anggotanya yang menjadi buruh tekstil PT Alisan, GOBSI meminta bantuan SP TSK-SPSI.

Fragmentasi Serikat Buruh Berasas Islam



Melalui kajian latar belakang berdirinya keenam gerakan buruh di atas, dapat diketahui perbedaan pengorganisasian gerakan buruh. Sejak Zald dan Ash (1966) memperkenalkan perbedaan antara gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial, perhatian tentang aspek-aspek organisasi gerakan sosial terus menguat. Organisasi gerakan bahkan menjadi ciri khas gerakan sosial, sebab mengandung makna interaksi yang berkelanjutan dengan penuh pertentangan. Kondisi ini menarik dan menjamin adanya peluang yang berkelanjutan bagi para aktivis buruh untuk berpartisipasi dalam gerakan. Perubahan pengurus dalam gerakan buruh juga menunjukkan peranan penting organisasi sebagai penjamin kelangsungan gerakan. Begitu pentingnya peranan organisasi gerakan, semua aktivis gerakan berusaha untuk

mengendalikannya. Motivasi sempit ini turut memberi andil berlangsungnya fragmentasi.

Keenam gerakan buruh yang dikaji secara jelas memperlihatkan jaringan antar organisasi. KSPSI, KSBSI, PPMI, FNPBI, Sarbumusi dan KBM, merupakan konglomerat organisasi. Selain itu gerakan-gerakan tersebut juga merupakan jaringan longgar antar organisasi nasional dan internasional. Kekecualian diberikan kepada PPMI yang membangun jaringan gerakan dengan sesama ormas Islam. Dalam kiprahnya kurang intens mengusung isu-isu perburuhan, sebaliknya yang menonjol adalah perjuangan menegakkan syariat Islam dan pembelaan terhadap tokoh-tokoh dan nilai-nilai Islam. Selain itu aktivitas PPMI lebih diarahkan untuk mendukung kekuasaan terutama kepemimpinan B.J. Habibie. Dengan pemerintah pengganti B.J. Habibie, PPMI melancarkan kritik keras bahkan memobilisasi massa untuk menjatuhkan Presiden Gus Dur.

Berdasarkan orientasi, basis massa, sumberdaya, medan multi organisasi dan struktur organisasi, dapat dibedakan 4 tipe gerakan buruh. Pertama, gerakan buruh *onderbouw* partai politik dan serikat buruh politik. Orientasi gerakan ini untuk mendukung partai politik dan mendukung kekuasaan. Cita-cita atau ideologi gerakan sama dengan partai politik induknya atau kekuasaan yang didukung. Di sini partai politik atau kekuasaan yang didukung lebih menentukan arah gerakan dibanding kebutuhan riil buruh. Sebab itu agenda gerakan lebih ditentukan oleh kekuasaan atau partai politik. Hubungan dengan partai merupakan hubungan struktural. Basis massa sebagian besar bukan buruh sejati, tetapi massa secara beraneka ragam. Terdapat pedagang asongan, pedagang pasar, kuli angkut barang, buruh sektor informal, penganggur, buruh pabrik dan buruh sektor jasa. Tidak sedikit dari serikat buruh tipe

ini yang tidak memiliki anggota riil dan hanya sekelompok kecil aktivis. Sumberdaya terutama uang dan fasilitas kantor berasal dari partai induknya atau kekuasaan yang disokong. Partai politik membentuk sayap buruh atau serikat buruh lama dibangkitkan kembali dan menginduk pada partai yang dahulu melahirkannya. Partai dan para pengurus partai menjadi sponsor dana, terutama jika serikat buruh dimobilisasi untuk kepentingan pemilihan kepala daerah. Tentu partai induknya mendapatkan dana dari calon kepala daerah. Medan organisasional gerakan seperti ini sangat lemah, sebab tidak memiliki independensi dalam membangun jaringan. Dengan sesama gerakan buruh tidak terbangun relasi yang kuat, sehingga isu-isu perburuhan yang merupakan agenda utama serikat buruh sering tidak direspon oleh gerakan seperti ini. Selain itu serikat buruh lain sering mengambil jarak untuk menghindari kooptasi partai. Struktur organisasi yang dikembangkan oleh gerakan buruh tipe pertama ini umumnya unitaris, di mana pengurus pusat dan terutama partai politik sangat menentukan agenda kerja organisasi. Organisasi gerakan dipimpin oleh para aktivis partai baik di pusat maupun di daerah. Termasuk dalam tipe ini adalah Sarbumusi, KBM, KOSBI, GOBSI dan PPMI.

Kedua, lembaga swadaya masyarakat perburuhan. Orientasi gerakan ini mengkritisi kebijakan publik dan menggugat simbiosis mutualisma Pemerintah – pengusaha. LSM semacam ini tumbuh sejak masa Orde Baru dan mempertahankan eksistensinya sampai pasca Soeharto. Berbagai kebijakan pemerintah era Soeharto sangat menguntungkan pengusaha. Seperti pengupahan, mendirikan serikat pekerja, pembentukan KKB, jaminan sosial tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja. Hal ini dilakukan sebab dalam sistem kapitalisme rente yang dikembangkan Orde Baru, tenaga kerja murah menjadi andalan menarik investasi. Tugas aparatus negara dalam

sistem ini adalah mendisiplinkan tenaga kerja. Industrialisasi pun tidak berhasil naik ke anak tangga menengah dan terus menerus terjebak pada anak tangga nilai tambah padat karya. Penunggalan serikat pekerja menjadi salah satu strategi untuk mendisiplinkan buruh. Akibatnya pembelaan terhadap buruh dilakukan oleh LSM perburuhan. Orientasi LSM ini pada awalnya pembelaan terhadap para buruh yang di-PHK dan berbagai pelanggaran hak buruh lainnya khususnya pengupahan dan kebebasan berserikat. Pada awal tahun 1990-an, mulai merasuk ke perusahaan, pabrik atau komunitas buruh untuk melakukan penyadaran akan hak-hak buruh, mengkritisi peraturan-peraturan perburuhan yang melanggar hak-hak buruh. SBSI dibentuk oleh LSM perburuhan semacam ini, demikian pula FNPBI. Sampai lima tahun kepemimpinan Muchtar (1992 – 1997), SBSI masih didominasi para aktivis LSM perburuhan, seperti FAS, Yayasan Komunikasi, YBKS dan sebagainya. Transisi kepemimpinan dan rekrutmen anggota buruh sejati mulai berlangsung pada awal tahun 1998, ketika pemerintah memberi kebebasan berserikat. Dari beberapa LSM perburuhan, SBSI paling sukses melakukan transformasi ke gerakan buruh sejati. Perubahan ini disertai sikap dari independensi ke akomodasi sejak tahun 2004.

Sebagai konsekuensi dari orientasi gerakan yang mengusung ideologi sosialisme dan mengancam neoliberalisme, LSM perburuhan aktif melakukan demonstrasi yang menentang kebijakan publik yang tidak pro sosialis, termasuk kenaikan harga BBM, WTO, utang luar negeri dan undang-undang investasi. Rapat-rapat dan pendidikan politik aktif dilakukan yang melibatkan bukan hanya anggota gerakan tetapi juga mahasiswa. Kelompok terakhir ini menjadi target rekrutmen untuk memelihara militansi gerakan. Interaksi dengan buruh intensif dilakukan terutama jika ada kasus PHK di perusahaan atau pelanggaran hak-hak buruh secara

massif. Anggota gerakan ini tidak banyak, hanya sekumpulan aktivis LSM. Paling banyak 20 orang setiap LSM. Kantor atau sekretariat mereka tidak tetap (berpindah-pindah) yang disewa secara swadaya. Sumberdaya mereka sangat terbatas, terutama berasal dari sponsor dan pendiri. Oleh karena lebih mengandalkan pembelaan dan bukan kaderisasi dari kalangan buruh, LSM perburuhan tidak berjuang untuk menghasilkan PKB, bahkan tidak punya serikat pekerja basis di perusahaan.

Tetapi jaringan antar organisasi baik dengan sesama serikat pekerja maupun LSM lainnya sangat kuat. LSM seperti ini juga menjadi pelopor jaringan gerakan untuk isu-isu tertentu, misalnya menghadapi SK Menteri Tenaga Kerja No. 78 tahun 2001, yang lebih merugikan buruh dalam penetapan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dibanding SK Menaker No. 150 tahun 2000, dibentuk Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Jaringan ini kemudian dipertahankan untuk menolak rencana pemerintah merevisi UU ketenagakerjaan, RUU Investasi, utang luar negeri, tarif dasar listrik dan penghapusan KKN. Selain itu juga dibentuk Komite Anti Penindasan Buruh (KAPB) dalam menolak rencana Pemerintah merevisi UU No. 13 tahun 2003. Di daerah LSM perburuhan dan non perburuhan membentuk Forum Pembela Hak Buruh (FPHB) dalam menyikapi rencana pemerintah merevisi UU ketenagakerjaan.

Struktur organisasi gerakan seperti ini berusaha untuk mengadopsi konsep organisasi sosialis dengan mengedepankan struktur "dewan buruh" baik di pusat maupun di daerah/wilayah. Di Indonesia, gagasan dewan buruh kali pertama dikemukakan oleh PKI dan di era Soeharto diambil alih SBSI. Pada pemilu 2004 di mana SBSI menjadi sponsor Partai Buruh Sosial Demokrat, SBSI masih memperjuangkan pembentukan Dewan Buruh. Namun dalam struktur organisasinya,

SBSI tidak mengedepankan Dewan Buruh. Sebaliknya FNPBI sebagai satu-satunya gerakan yang menetapkan struktur Dewan Buruh, juga tidak memperlihatkan aktivitas nyata lembaga ini. Kepemimpinan FNPBI dalam gerakan buruh sangat besar terutama yang melibatkan LSM perburuhan. Pembentukan jaringan gerakan (istilah yang digunakan para aktivis buruh untuk menyebut medan multiorganisasi), seperti ABM dan FPHB, adalah salah satu contohnya. SBSI di bawah Rekson Silaban tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe kedua gerakan buruh meskipun berakar dari sini.

Ketiga, gerakan buruh akomodatif. Orientasi gerakan ini menjaga agar buruh tidak menjadi kekuatan yang menakutkan pemerintah dan pengusaha, tanpa merugikan kepentingan buruh. Gerakan ini berpegang pada falsafah bahwa buruh adalah partner bagi pemerintah dan pengusaha. Ketiganya (tripartit) merupakan kekuatan yang saling bergantung, sebab itu harus membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Falsafah seperti itu dikenal sebagai Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Jika serikat buruh terlalu kuat akan tumbuh kecenderungan untuk mengontrol aset perusahaan seperti yang dipraktekkan oleh SOBSI. Serikat buruh akan menjadi kekuatan penting dalam menentukan kebijakan perusahaan, sehingga pemodal akan kehilangan independensi dalam mengontrol modalnya. Pola seperti ini tidak menarik bagi investor dan menghambat penciptaan peluang kerja. Sebaliknya, pengusaha yang terlalu kuat akan menerapkan hukum pasar tenaga kerja, sehingga kesejahteraan buruh akan merosot tajam, sebab kondisi ketenagakerjaan yang *oversupply*. Sebab itu Pemerintah harus pro aktif menjadi penengah dalam konflik seperti itu, sehingga baik kepentingan buruh maupun pengusaha sama-sama diakomodasi. Namun tanpa serikat buruh, tidak ada kekuatan yang mengontrol pemerintah dan pemodal. Sebab itu tugas

serikat buruh adalah memperjuangkan kepentingan buruh sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) di tingkat perusahaan dan memperjuangkan perlindungan buruh sesuai undang-undang perburuhan.

HIP merupakan pola ideal dalam membangun hubungan industrial sebab kepentingan, kewajiban dan hak keduanya sama-sama dijamin. Gerakan buruh yang kuat melindungi kepentingan buruh tanpa mentoleransi kepentingan pengusaha dan pemerintah tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Keluar masuknya buruh dalam suatu perusahaan akan dikontrol oleh buruh, sehingga pengusaha akan dipermainkan oleh para tokoh buruh. Dengan HIP terdapat kewajiban pengusaha untuk membagi hasil keuntungan, sehingga kesejahteraan pekerja berjalan paralel dengan kemajuan perusahaan. Keduanya juga terikat oleh prinsip mawas diri, di mana baik buruh maupun pengusaha tidak bisa melakukan tindakan sepihak dan prinsip keseimbangan dan keserasian, di mana usaha memajukan kesejahteraan buruh paralel dengan usaha melindungi kepentingan perusahaan.

Di era Orde Baru konsep tersebut menjadi alat melegitimasi pengendalian buruh oleh aparat keamanan. Berbagai pelanggaran hak-hak buruh dilakukan atas nama implementasi HIP termasuk PHK. Namun oleh KSPSI dan Gasbiindo yang dipimpin oleh Agus Sudono, ideologi HIP masih terus diperjuangkan dan diyakini sebagai sebuah ideologi yang tepat dalam relasi buruh-pengusaha dan pemerintah. Gerakan buruh ini memiliki basis massa yang sangat besar, untuk KSPSI bahkan paling besar dibanding yang lainnya. Di era Soeharto masuknya buruh dalam FBSI/SPSI merupakan kewajiban, sehingga anggota SPSI meliputi semua pekerja formal. Pada awal tahun 2008 anggota KSPSI mencapai 4.576.440 orang dari

28.520.000 pekerja formal atau 16 persen. Sebagian besar adalah anggota federasi serikat pekerja tekstil, sandang dan kulit, perkebunan dan SP Rokok, tembakau, makanan dan minuman. Anggota SP sektor padat karya mencapai 72 persen atau 3.295.037 orang.

Relasi KSPSI dengan gerakan sosial lain kurang kuat, kecuali dengan SOKSI, MKGR dan KOSGORO. Ketiga tiang utama Golkar ini menempatkan orang-orangnya dalam kepengurusan KSPSI khususnya kubu Sjukur Sarto. Relasi dengan SB/SP lain kurang kuat, seperti tidak adanya agenda gerakan bersama, tidak terlibatnya SPSI dalam jaringan gerakan bersama maupun aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan bersama-sama dengan SP/SB lain. Oleh tipe gerakan buruh kedua, tipe ketiga ini dipandang sinis karena dianggap sebagai alat kekuasaan dan anggota-anggotanya adalah para penakut dalam mengambil resiko atau mereka yang sekedar mempertahankan pekerjaan. Mereka mulai melirik gerakan buruh lain jika ada masalah seperti pengupahan dan PHK⁸⁰. Struktur organisasi federasi dimaksudkan untuk memberikan otonomi penuh kepada serikat buruh dalam kaderisasi, penguatan dan mempertajam isu-isu pengembangan sesuai dengan bidang pekerjaan. Sedangkan konfederasi dimaksudkan untuk memperkuat gerakan dengan menghimpun sumberdaya yang lebih besar. Jumlah anggota, iuran, fasilitas kantor, merupakan sumberdaya utama gerakan. Berbeda dengan gerakan buruh lain yang sulit memanfaatkan dana Jamsostek, KSPSI mendapatkan pendanaan baik operasional gerakan, gedung dan fasilitasnya dari Jamsostek. Rata-rata dalam satu tahun KSPSI mendapat Rp 750 juta dari Jamsostek. Konflik dalam tubuh KSPSI babak kedua selain alasan politik untuk menguasai sumberdaya gerakan antara kedua

⁸⁰ Wawancara dengan Dominggus Oktavianus ketua FNPBI Oktober 2007.

kubu yang berasal dari PDI-P dan SOKSI (Golkar), juga alasan ekonomi terutama memanfaatkan dana Jamsostek. Menurut UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, lembaga ini berbentuk BUMN yang diwajibkan membayar pajak dan deviden kepada pemerintah. Direktur dan jajarannya ditentukan oleh Menaker. Peran pemerintah dalam mendistribusikan bantuan uang buruh ini sangat besar dan sejarah menunjukkan bahwa hanya serikat buruh yang mendukung pemerintah yang mendapat kucuran dana.

Keempat, gerakan berorientasi organisasi. Gerakan buruh tipe ini berusaha membangun organisasi sebagai sumberdaya dan kekuatan gerakan. Kepemimpinan gerakan diperkuat dengan dipilih dari para buruh secara bertingkat. Gerakan ini mempunyai organisasi hirarkis, terpusat dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaannya. Tawar menawar kolektif berlangsung melalui koordinasi antar cabang secara nasional. Di kantor pusat maupun cabang terdapat sejumlah staf yang bekerja penuh waktu. Meskipun terpusat, cabang-cabang memiliki ruang gerak yang sangat besar dalam melakukan tawar menawar kolektif. Kebijakan pengupahan buruh misalnya ditentukan secara kedaerahan, sehingga diperlukan kemampuan cabang-cabang untuk bernegosiasi dan melakukan tawar menawar kolektif.

Organisasi baik di pusat maupun cabang mempunyai pembagian tugas yang jelas. Hubungan antara pusat dan cabang serta anggota federasi diatur secara jelas, demikian pula mengenai hak dan kewajiban. Organisasi gerakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Sebab itu mempertahankan kelangsungan organisasi merupakan usaha para partisipan sambil secara terus menerus meningkatkan perolehan sumberdaya. Dengan penguasaan sumberdaya yang semakin besar, maka organisasi akan mampu mengembangkan kekuatan untuk mengubah tatanan sosial

termasuk kebudayaan. Pimpinan organisasi bertugas meningkatkan perolehan sumberdaya dan mengalokasikannya secara tepat. Sebab itu pimpinan digaji secara memadai, layaknya seorang manajer perusahaan.

Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Mereka yang akan duduk sebagai pengurus harus mengikuti sejumlah pelatihan. Pengurus di tingkat basis (perusahaan) harus telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat dasar. Sedangkan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan ini disyaratkan lulus pelatihan dasar perburuhan. Pelatihan yang dikembangkan serikat buruh tipe ini adalah pelatihan yang mengarah pada ketrampilan berorganisasi. Tema-tema "Prinsip-prinsip Manajemen dalam Organisasi", "Hak-Hak Buruh", "Latihan Dasar Kepemimpinan", "Bipartit dan Tripartit", "Pelatihan untuk Pelatih" dan sebagainya dilakukan secara berkelanjutan. Sumber dana untuk pelatihan ini berasal dari lembaga-lembaga internasional seperti ILO, ACILS, FES dan IKV. Para pemberi dana senantiasa memantau pelaksanaan pelatihan dan mengevaluasinya, baik materi maupun metode.

Basis massa gerakan buruh berorientasi organisasi adalah buruh-buruh sejati. Sebagai gerakan yang berorientasi organisasi dan mengandalkan organisasi sebagai kekuatan gerakan, para partisipan diorganisasi secara hirarkis baik sektoral maupun federasi dan konfederasi untuk memudahkan pengelolaan, mobilisasi dan kontrol. Hubungan dengan daerah dan cabang dilakukan secara intensif, terutama untuk memastikan aliran iuran anggota dan pelaksanaan program. Iuran anggota menjadi tulang punggung pemasukan dan digunakan untuk biaya operasional, pelatihan dan pengiriman delegasi ke pertemuan nasional dan internasional. FSPMI dapat dikelompokkan dalam gerakan buruh tipe keempat, meskipun belum sepenuhnya.

Sedangkan KSBSI pada awalnya mengembangkan gerakan buruh militan yang secara perlahan-lahan mengarah ke pengembangan organisasi sebagai sumberdaya gerakan. Tetapi akhir-akhir ini orientasinya mengikuti gerakan tipe ketiga.

Kemampuan FSPMI terus mengembangkan organisasinya tidak terlepas dari sumberdaya yang dimiliki gerakan tersebut. Pada tahun 2007 misalnya, gerakan ini memiliki pemasukan 2,5 milyar rupiah, di mana 1,96 milyar rupiah di antaranya hasil iuran para anggota. Anggota diwajibkan membayar iuran (*check of system/COS*) sebesar 1 persen dari upah per bulan. Sebesar 40 persen untuk organisasi dan 60 persen untuk serikat pekerja perusahaan (PUK). Buruh yang tidak membayar dikenakan sanksi dan hilang hak suaranya. Sebagai gerakan buruh yang basisnya buruh industri metal, ketrampilan dan pendidikan para buruh setingkat lebih tinggi dibanding buruh industry padat karya. Anggota FSPMI 60 persen berpendidikan SLTA, 21 persen D3 dan S1, sisanya SD, SMP dan S2. Kesadaran mereka berorganisasi sangat tinggi terbukti dari peningkatan jumlah anggota, peningkatan iuran, jumlah PKB yang berhasil dibuat dan upah mereka yang lebih tinggi dibanding UMP.

Tabel 12. Perkembangan Jumlah Anggota, PUK, COS, PKB dan Upah Buruh yang tergabung dalam FSPMI

| Komponen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Anggota | 100.368 | 105.985 | 110.878 | 122.882 |
| Jumlah PUK | 221 | 237 | 270 | 337 |
| COS/Th/Rupiah | 1,5 M | 1,43 M | 1,7 M | 2,5 M |
| Jumlah PKB | 90 | 84 | 113 | 132 |
| Upah UMP | 100 % | 100% | 105 % | 105% |
| Upah Perusahaan | 105 % | 110 % | 110 % | 110 % |

Sumber: DPP FSPMI, April 2008.

Klasifikasi yang dibuat oleh Kosuke Mizuno (2007:17-19) mengabaikan dimensi orientasi gerakan, sumberdaya yang dimiliki dan pertentangan kolektif yang dilakukan. Akibatnya ia tidak mampu melihat berkembangnya gerakan buruh yang berawal dari LSM, LSM Perburuhan dan serikat buruh *onderbouw* partai politik. Mizuno membedakan 4 gerakan buruh yaitu pertama, *enterprise union* adalah serikat buruh yang ruang lingkup kegiatannya khusus di suatu perusahaan atau pabrik dan keanggotaannya terikat dengan statusnya sebagai pekerja di perusahaan/pabrik tersebut. Pola pengorganisasian yang dilakukan SPSI mulai dengan pembentukan PUK termasuk dalam kategori ini. Kedua adalah *general union* yang bersifat lintas industri dan lintas sektoral. Ketiga, *industrial union* yang merupakan organisasi menurut sektor industri dan keempat *craft union* yang merupakan gerakan buruh sesama profesi. Di Indonesia akibat perkembangan industri yang lambat, maka *industrial union* tidak mendapat tempat. FSPMI yang memulai gerakannya dari pola *enterprise* semakin mengarah kepada *industrial union* karena dukungan kualitas sumberdaya dan kemampuannya menghimpun gerakan dari industri sejenis.

Kecenderungan yang kuat adalah tumbuhnya *general union* yang bersifat lintas industri. Hal ini tidak terlepas dari sejarah gerakan buruh di Indonesia yang tidak bisa memisahkan diri dari politik dan agama. Di negara industri hubungan antara ketrampilan buruh, sektor industri, upah dan pengembangan organisasi gerakan sangat kuat. Perkembangan isu-isu pekerjaan, resiko pekerjaan, upah dan jaminan sosial, tidak terlepas dari jenis industri. Di Korea Selatan, industri tekstil dan sepatu tidak lagi kompetitif karena hanya menggunakan teknologi rendah. Jenis industri ini tidak menarik para pekerja untuk bergabung. Jika pekerja bersedia bekerja di sektor tersebut, tidak lagi efisien bagi perusahaan. Akibatnya, perusahaan

jenis ini dipindahkan ke Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Industri Korea Selatan telah naik kelas memasuki tahap industri berat, sehingga para buruh pun mengorganisasi diri sesuai dengan sektor industri. Dukungan kualitas sumberdaya manusia dan perkembangan teknologi telah membentuk serikat buruh yang kuat dan tidak terfragmentasi. Pengupahan buruh ditentukan menurut sektor industri dan resiko pekerjaan.

C. Kepemimpinan Gerakan

Studi klasik mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh Weber (1963, 2002) mengidentifikasi tiga tipe, yaitu kepemimpinan tradisional, karismatik dan legal formal. Organisasi gerakan sosial yang dicirikan oleh ikatan longgar antara pemimpin dan pengikut, para pemimpin lebih mengandalkan kepemimpinan tradisional dan karismatik dalam memobilisasi para anggota. Kepercayaan kepada masa depan yang lebih baik yang dirumuskan oleh para pimpinan gerakan, hubungan sosial dan pribadi yang tertanam demikian lama antara pimpinan dan pengikut, menjadi kekuatan pengikat yang menyebabkan anak buah bersedia melakukan perintah pimpinan. Kepemimpinan demikian diperoleh berkat investasi yang besar dalam hal waktu, usaha, energi dan uang. Studi Kartodirdjo (1989) maupun Karl D Jackson (1990) menunjukkan bahwa kepemimpinan karismatik sangat efektif dalam memobilisasi massa. Kepercayaan anak buah kepada pimpinan yang sangat kuat menumbuhkan kepatuhan untuk melakukan apapun atas perintah pimpinan. Namun demikian, pemimpin yang bertahan dalam waktu lama menyebabkan macetnya sirkulasi elit dalam organisasi. Para aktivis yang telah mencapai posisi strategis akhirnya mencari atau membuat gerakan tandingan, baik karena alasan untuk

mencapai posisi puncak maupun untuk mendapatkan sumberdaya yang lebih besar. Akibatnya, terjadi perpecahan dalam gerakan sosial. Kepemimpinan tradisional juga menyebabkan gejala yang sama. Inilah wajah kontradiktif dalam gerakan sosial.

Literatur gerakan sosial cenderung fokus pada tipe-tipe kepemimpinan dan tahapan gerakan. Blumer (1969) misalnya mengidentifikasi hubungan tersebut dengan menyatakan bahwa kepemimpinan agitator diperlukan pada tahap keresahan atau kekacauan sosial. Pada tahap kegairahan publik, para pemimpin berubah layaknya nabi yang secara terus-menerus menyampaikan kotbah pentingnya perubahan. Pada tahap formalisasi gerakan, para pemimpin bertindak seperti negarawan dan pada tahap akhir yaitu institusionalisasi, para pemimpin berubah menjadi administrator. Model ini perlu dipertanyakan karena dua alasan, pertama gerakan sosial tidak berlangsung secara bertahap seperti dikemukakan oleh Blumer, tetapi simultan. Kenyataan bahwa pendiri yang merupakan investor besar dalam hal waktu, usaha, energi dan uang, terus diposisikan sebagai tokoh sentral, menyebabkan para penerusnya sekedar menjalankan kerja administratif. Ini menimbulkan persoalan kedua, yaitu kerja administratif menyebabkan organisasi gerakan dibelit masalah klasik organisasi yaitu oligarkisme. Sumbangan oligarkisme terhadap perpecahan gerakan sosial tidak dapat diabaikan.

Perhatian para peneliti gerakan sosial terhadap kepemimpinan seperti di atas masih sangat minim. Klandermans (2005:240) menyebutkan bahwa salah satu alasan kekurangan penelitian empiris tersebut adalah karakter organisasi gerakan sosial itu sendiri yang antara lain dicirikan oleh sifatnya yang cair (*fluidity*) sebagai sebuah asosiasi sukarela. Para buruh dengan mudah bisa meninggalkan gerakan jika mereka tidak nyaman, minimal bersikap pasif. Gerakan buruh dengan aktivitas utama konflik

(protes, pemogokan, demonstrasi, pendudukan pabrik) dan akomodasi (negosiasi, pembentukan PKB, aliansi dengan partai politik dan gerakan sosial lain), mengembangkan tipe kepemimpinan militan dan akomodatif. Sedangkan dalam rangka meningkatkan perolehan sumberdaya dan perlindungan terhadap anggota, pengelolaan organisasi yang profesional telah mendapat perhatian. Gerakan buruh demikian mengembangkan tipe kepemimpinan profesional. Beberapa tipe kepemimpinan tersebut terdapat dalam gerakan buruh yang dikaji. Pada awal kebangkitannya dan dalam melancarkan tuntutan, semua gerakan buruh yang berbasis buruh pabrik mengembangkan kepemimpinan militan dan karismatik. Pada tahap kedewasaan (*maturity*) yang lebih dominan adalah kepemimpinan profesional. Pada tahap ini gerakan buruh mengalami tarik menarik yang kuat antara gerakan sosial ekonomi dan gerakan sosial politik. Para pendukung gerakan sosial ekonomi mengalami kekalahan sebab tidak berlangsung peningkatan kualitas buruh. Konflik antara kepemimpinan profesional dan karismatik atau antara dua jenis gerakan tersebut mengemuka, sehingga berlangsung fragmentasi. Proses ini menggambarkan konflik dan akomodasi dalam gerakan buruh. Konflik dan akomodasi juga menunjukkan ide-ide yang ditawarkan, sumberdaya yang dimiliki, aliansi yang dilakukan dan interaksinya dengan kekuasaan. Gerakan buruh yang diteliti menunjukkan empat tipe kepemimpinan, yaitu karismatik, militan, akomodatif dan profesional.

1. Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan karismatik dimiliki oleh para tokoh buruh yang memimpin gerakan buruh sejak masa Soeharto. Mereka mengorbankan harta benda, waktu, energi dan menghadapi siksaan fisik oleh aparaturnegara. Mereka menempuh resiko dengan membangun serikat buruh di tengah kebijakan monoloyalitas buruh terhadap SPSI. Kerja keras mereka dengan meyakinkan pentingnya para buruh bergabung dalam gerakan yang mereka rintis, pemikiran yang mereka tawarkan mengenai masa depan buruh, membuahkan hasil dengan semakin meningkatnya jumlah anggota gerakan. Selain itu juga semakin banyak pengakuan dari gerakan buruh di Negara lain atau lembaga tripartite internasional. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya sumberdaya yang diraih oleh gerakan tersebut. Penghargaan yang mereka terima baik dari lembaga nasional maupun internasional, memperkuat karisma mereka di kalangan buruh. Tokoh karismatik seperti ini diterima oleh semua gerakan buruh yang berbasis industri atau lapangan kerja. Sebaliknya bagi gerakan buruh berbasis agama, tokoh seperti ini kurang mendapat tempat bahkan dipandang sebagai ancaman. Pemikiran mereka tentang relasi negara dan buruh, dipandang sebagai agenda tersembunyi komunisme. Tidak jarang mereka dituduh sebagai “kebangkitan anak-anak komunis” atau komunis gaya baru⁸¹. Namun, mereka mendapat simpati dan tempat di hati para buruh, pikiran-pikirannya terlepas setuju atau tidak, diketahui para buruh.

Ada empat faktor yang mendorong mereka tumbuh sebagai pimpinan karismatik. Pertama, keberanian mereka menempuh resiko melawan kekuasaan,

⁸¹ Wawancara dengan Suhardiman Ketua Dewan Penaschat SOKSI, juga pendapat Eggi Sudjana dan Komando Anti Komunis tentang Muchtar Pakpahan dan Dita Indah Sari.

terlebih-lebih kekuasaan Soeharto yang ditopang sangat disiplin oleh tentara dan birokrasi. Soeharto dikenal tanpa ampun dalam menjinakkan lawan-lawannya. Dalam kasus perburuhan, sejumlah tokoh gagal meyakinkan para buruh, seperti H.J. Princen, Saut Aritonang dan Susanto Martoprasono. Rintisan gerakan mereka kandas di tengah jalan, seiring dengan penangkapan mereka. Namun Muchtar Pakpahan dan Dita Indah Sari adalah kekecualian. Kedua tokoh ini mengambil resiko untuk menyatakan gagasan dan mewujudkannya dalam gerakan buruh. Mereka juga ditangkap, disiksa dan dipenjara, tetapi tidak menyurutkan langkah. Keduanya maju terus, masing-masing dengan SBSI dan PPBI kemudian FNPBI. Inilah pengorbanan yang harus diapresiasi, tanpa hal itu tidak akan lahir gerakan sosial buruh. Faktor keberanian ini juga menjelaskan bahwa teori gerakan sosial tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh pendekatan pilihan rasional model olsonian. Teori ini hanya menjelaskan partisipasi buruh dalam gerakan yang berarti memandang gerakan buruh sebagai sesuatu yang telah ada (*given*).

Kedua, pengorbanan waktu, tenaga dan harta benda. Karisma seseorang tidak lahir dalam waktu yang singkat. Karisma tokoh adalah hasil dari investasi waktu, tenaga dan uang. Orang rela mengorbankan waktu dan harta benda untuk memperjuangkan pemikiran yang mereka yakini benar. Pada akhirnya faktor ini akan menimbulkan simpati dan dukungan dari para buruh. Kegigihan para pemimpin ini meyakinkan para buruh bahwa ada alternatif lain mencapai kesejahteraan selain yang dipromosikan oleh pemegang kekuasaan, menempatkannya sebagai pejuang dan pelopor gerakan buruh. Mereka bukan sekedar pemimpin, melainkan nabi menurut konsep Blumer karena secara gigih menyampaikan “kabar baru”, “masa depan baru yang lebih baik”, bagi umatnya. Peran demikian dilakukan dari awal termasuk

dengan cara-cara klandestin. Jadi bukan seperti yang digagas oleh Blumer. Dalam konteks hilangnya struktur peluang politik, peran pemimpin sebagai nabi dilakukan sejak perintisan bukan hanya dalam tahap kegairahan publik dan terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota dan memobilisasi anggota dalam aksi-aksi kolektif.

Muchtar Pakpahan secara aktif terlibat dalam masalah perburuhan sejak akhir tahun 1980-an, yaitu sebagai pengacara kasus-kasus PHK baik ketika tinggal di Medan maupun Jakarta. Kegigihannya membela buruh, menyebabkan ia dipecat dari Universitas Nommensen karena Rektor mendapat tekanan dari Pangdam dan Kapolda Sumatra Utara. Di Jakarta ia bersama teman-temannya mendirikan Forum Adil Sejahtera (FAS) sebuah lembaga yang dimaksudkan untuk melakukan kajian dan pemberdayaan kelompok berpendapatan rendah. Tahun 1992 setelah gagal ikut dalam SBMS, ia mendirikan SBSI dan menghadapi resiko di mana kantornya diacak-acak "preman", para pengurusnya ditangkap dan disiksa serta keluarganya mendapat teror. Ia mengeluarkan biaya tidak kecil dalam mengoperasikan SBSI, harta bendanya ia jual untuk mempertahankan eksistensi gerakan. Selama 5 tahun ia mendekam dalam penjara, di mana secara terus menerus mendapat siksaan. Namun ia tidak menyurutkan langkah. Beberapa temannya, seperti Sunarti dan Raswan mengoperasikan gerakan seperti menghubungi cabang-cabang dan lembaga internasional. Waktu dan tenaga yang ia miliki seakan untuk gerakan buruh, sebab ia yakin benar bahwa kesejahteraan buruh hanya dapat diperjuangkan oleh para buruh itu sendiri. Ia menerima penghargaan internasional antara lain *George Meany AFL CIO-USA* tahun 1997, *Rule of Law Award ABA – USA* 1997, *Labor Defender Right Award – Canada* 1998, *Labor Right Award- CNV* Nederland 1999 dan sebagainya.

Demikian pula Dita Indah Sari. Lahir di Medan Sumatra Utara pada akhir Desember 1972. Tahun 1992 ia bergabung dengan Forum Belajar Bebas, sebuah kelompok studi mahasiswa progresif yang membahas masalah demokrasi dan keadilan sosial. Persentuhannya dengan masyarakat akar rumput meningkatkan kepeduliannya kepada perjuangan buruh. Pada tahun 1994, ia mendirikan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI). Agenda gerakan ini sangat politis yaitu mengganti Soeharto dengan orang yang lebih pro rakyat, menuntut kenaikan upah buruh dan memperjuangkan keadilan sosial di semua bidang. Ia mengabaikan studinya demi pembelaan buruh. Keyakinannya akan pentingnya keadilan sosial yang harus diperjuangkan antara kaum buruh, tani dan kelompok berpendapatan rendah lainnya dengan kaum intelektual, tidak menyurutkan langkahnya untuk terus menggalang kekuatan-kekuatan tersebut. Dalam aksinya di Surabaya tahun 1996, Dita ditangkap dan diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan PPBI dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena perjuangannya menggunakan cara-cara komunis. Dari dalam penjara melalui Dominggus dan Nurhazanah, ia mengorganisasi gerakan buruh yang lebih besar dengan mempersatukan Pusat Perjuangan Buruh daerah ke dalam FNPBI. Sama seperti Muchtar Pakpahan, ia menginvestasikan waktu, energi dan harta benda untuk perjuangan buruh. Pada September 2001, Dita menerima penghargaan *Ramon Magsaysay Award* dan pada Februari 2002 Dita mendapat penghargaan *Reebok Human Rights Award*.

Ketiga adalah kepribadian pemimpin. Betapa beraniya seseorang dan banyaknya waktu serta harta benda yang diinvestasikan, tetapi mereka memiliki kepribadian yang buruk (seperti berbohong, korupsi, hidup boros/foya-foya dan tidak

memegang komitmen yang kuat), maka akan ditinggalkan oleh para pengikut. Para buruh yang merupakan kelompok berpendapatan rendah, memerlukan bukti dan keteguhan komitmen para pejuang. Daya tarik kepribadian pemimpin lebih kuat dibanding pemikiran sang pemimpin dalam menarik para pengikut. Muchtar Pakpahan dan Dita Sari dikenal bersih oleh para koleganya. Untuk meyakinkan kawan-kawan seperjuangan, Muchtar rela bersumpah dan membuat makam untuk dirinya sendiri jika ditemukan ia tidak bersih. Dalam suatu pengadilan di mana ia dituduh menyalahgunakan uang Jamsostek, Muchtar dinyatakan bebas. Dita juga dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, tetapi memiliki perhatian besar kepada orang-orang tertindas dan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dita rela berkorban apapun termasuk kehidupan dan nyawanya untuk memperjuangkan buruh. Ia menolak suap dan bujukan uang dari para pejabat pemerintah semasa Orde Baru dan pimpinan partai politik pasca Soeharto. Kepribadian pimpinan yang tidak korup dan tidak menjadi kolaborator pengusaha dan pemerintah, menjadi salah satu kekuatan pimpinan buruh. Hal ini tentunya merujuk pada pengalaman masa Orde Baru, di mana pimpinan buruh lebih merupakan alat pengusaha dan pemerintah. Motivasi berpartisipasi para buruh dalam gerakan sebagai besar ingin mendapatkan rasa aman dari ancaman PHK setiap saat. Selain itu harapan akan pembelaan jika terjadi kasus-kasus perburuhan, seperti PHK dan pengupahan. Pada umumnya para buruh tidak berpikir jangka panjang mengenai kesejahteraan mereka, sehingga pemikiran para tokoh buruh yang diperjuangkan tidak menjadi pertimbangan utama. Para buruh mengerti mengenai pemikiran para tokoh setelah beberapa tahun bergabung dalam gerakan⁸². Hal ini merupakan konsekuensi logis atas tingginya

⁸² Bersumber dari FGD yang diikuti oleh Sunarti, Raswan, Gunawan, dan sejumlah buruh

pencari kerja. Tidak berlangsungnya pendalaman industri dan terjadinya *oversupply* tenaga kerja, menempatkan keamanan kerja sebagai alasan utama partisipasi buruh dalam gerakan.

Keempat adalah ketokohan. Ketokohan diperoleh melalui akumulasi seorang pemimpin atas investasi waktu, perjuangannya yang serius atas para buruh, kemampuannya berinteraksi dengan kekuasaan, kepribadiannya yang baik dan jaringan yang dimiliki baik nasional maupun internasional serta kemampuannya memperjuangkan hak-hak buruh. Ketokohan lebih dari kepribadian. Atau ketokohan adalah kepribadian yang diorientasikan ke luar organisasi gerakan. Sasaran dari ketokohan adalah medan multiorganisasional, baik pengusaha, pemerintah, partai-partai politik maupun gerakan sosial lain. Karisma pimpinan gerakan buruh tumbuh dari kemampuannya memobilisasi anggota, menerapkan teknik-teknik komunikasi baik persuasi maupun orator pada saat dan tempat yang tepat. Seorang pemimpin karismatik seperti Muchtar dan Dita teruji oleh waktu dan mental dengan secara teguh berpihak kepada buruh. Mereka menjadi tokoh yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya bukan hanya dukungan riil dari para buruh tetapi juga penguasaan medan multiorganisasi.

2. Kepemimpinan Militan

Berbeda dengan organisasi sosial lain, gerakan sosial memerlukan pimpinan militan. Tanpa pimpinan militan, tidak akan lahir gerakan sosial yang kuat. Seorang pemimpin militan adalah pemimpin yang memiliki semangat tinggi, pantang

lainnya di Pulo Gadung pada Nopember 2007.

menyerah dan berpegang teguh pada prinsip perjuangan. Ia percaya pada prinsip dan cita-cita perjuangan (ideologi) dan berusaha keras untuk mewujudkannya jika perlu dengan kekerasan. Militansi seorang pemimpin berpengaruh besar dalam menarik dukungan massa, simpati massa sehingga membangkitkan keputusan massa untuk bergabung dalam gerakan. Dalam gerakan agama atau tradisi, militansi membangkitkan semangat pengikutnya akan perang suci (Kartodirdjo, 1989: 89). Sedangkan Kantz (2002:86) mengkaji gerakan militant Islam tahun 2000-an berpendapat bahwa militansi gerakan merupakan respon terhadap fenomena globalisasi yang menyebabkan terjadinya dislokasi sosial dan ketidakpastian yang disebabkan oleh intensifikasi kekuatan pasar. Tetapi dalam gerakan buruh, buruhisme (unionism) menjadi kekuatan utama militansi. Sikap pengusaha, kebijakan pemerintah dan sikap gerakan sosial lain yang pro dengan pengusaha dan pemerintah, merupakan medan pertarungan dan menjadi katalisator di mana militansi bekerja.

Kepemimpinan militan ini berkembang ketika gerakan buruh sedang dalam proses pembentukan dan pertumbuhan ke arah kedewasaan. Paling menonjol kepemimpinan demikian terlihat pada waktu gerakan melancarkan tuntutan, seperti pemogokan, demonstrasi, protes dan pendudukan pabrik. Dalam situasi ini tugas pimpinan adalah meyakinkan para pengikutnya akan kebenaran ide-ide dan strategi yang ditempuh untuk mencapai ide-ide tersebut. Argumen mereka yang meyakinkan pengikutnya dalam membantah argumen lawan-lawan gerakan, sangat penting dalam mempertahankan kesetiaan dan meningkatkan militansi para pengikut. Perang mental dan adu kekuatan fisik adalah bagian terpenting dalam pembentukan militansi. Dalam demonstrasi atau pemogokan, persiapan dilakukan minimal tiga hari

sebelum hari H. Persiapan mencakup pembuatan spanduk, poster, pamflet dan selebaran. Tugas pemimpin adalah mengarahkan, mengontrol bahwa anak buah benar-benar melakukan tugasnya. Isi tuntutan yang tertulis di spanduk dan selebaran merupakan turunan dari pemikiran sang pimpinan dihubungkan dengan kondisi yang berlangsung.

Pada hari H, pimpinan mengatur susunan demonstran tentang kelompok mana yang perlu di depan dan di belakang. Umumnya, mereka yang telah terlatih dalam melancarkan demonstrasi dan mempunyai keberanian yang tinggi berada di depan. Pimpinan melakukan orasi dibantu beberapa pengurus utama gerakan. Barisan kedua mengkomando untuk meneriakkan yel-yel atau tuntutan. Barisan kedua ini juga bertugas melindungi pimpinan jika setiap saat ditarik/diambil pihak keamanan. Barisan ketiga menyiapkan konsumsi untuk dibagikan ke semua demonstran. Jika ketegangan memuncak dan kerusuhan terjadi, perintah perlawanan lazimnya muncul dari lapisan ketiga ini. Lapisan pertama dan kedua sangat solid dan saling mengenal, sehingga sukar ditembus kekuatan lain. Pihak lain (aparat) yang ingin menghancurkan gerakan, melakukannya dari lapisan ketiga ini.

Kepemimpinan Muchtar Pakpahan (SBSI), Dita Indah Sari, Dominggus Oktavianus (FNPBI), selain karismatis juga militan. Dua tipe kepemimpinan ini dimiliki oleh para tokoh buruh yang lahir ketika kekuasaan Soeharto masih sangat kuat. Para tokoh buruh lain, seperti tokoh buruh lama (Gasbiindo, KBM, Sarbumusi), para tokoh SPSI dan pemimpin buruh Islam, tidak bisa dikelompokkan dalam tipe kepemimpinan ini. Mereka lebih akomodatif dengan kekuasaan baik semasa maupun pasca Soeharto. Agus Sudono, Ali Djunaedi, Ali Ermas, Munir, Eggi Sudjana, Jumhur Hidayat, Jacob Nuwa Wea, Sjukur Sarto, adalah para pemimpin buruh yang

akomodatif dengan kekuasaan. Demikian pula para pemimpin SBSI generasi kedua seperti Rekson Silaban kehilangan militansi dan lebih dekat dengan kekuasaan.

3. Kepemimpinan Akomodatif

Tipe kepemimpinan ini berkembang ketika gerakan memasuki tahap kedewasaan dan bertujuan memelihara hubungan industrial yang kondusif terutama dengan kekuasaan dan pengusaha. Para pemimpin gerakan tidak kritis dengan kondisi perburuhan yang berlangsung. Mereka tidak lagi melihat perburuhan dari sudut pandang buruh, melainkan lebih luas yaitu kepentingan pemerintah dan pengusaha. Latar belakang sosial, intensitas relasi dengan kekuasaan, ketergantungan sumberdaya dan motivasi kekuasaan, menjadi faktor yang membentuk kepemimpinan akomodatif. Agus Sudono, Ali Djunaedi, Eggi Sudjana, Jumhur Hidayat, Jacob Nuwa Wea dan Sjukur Sarto, adalah para tokoh buruh yang dibesarkan oleh Orde Baru⁸³. Ali Ermas (SERPI), Munir (KOSBI dan Manganar Pasaribu (KBM) adalah tokoh buruh lama yang kehilangan roh gerakan buruh pada masa pasca Soeharto. Agus Sudono meskipun memulai aktivitas gerakan dari SBII yang kemudian menjadi Gasbiindo, tetapi menjadi tokoh utama FBSI, serikat buruh bentukan militer di era Orde Baru. Pengalamannya yang sarat di masa Orde Baru membentuknya menjadi tokoh buruh internasional. Namun kepemimpinannya di FBSI dinilai gagal, sebab tidak mampu memperjuangkan aspirasi buruh. Di bawah kepemimpinannya, FBSI menjadi instrument kekuasaan untuk mengendalikan buruh.

⁸³ Termasuk pula masa kepemimpinan B.J. Habibie sampai tahun 1999. B.J. Habibie adalah penerus kekuasaan Soeharto. Para tokoh buruh yang dibesarkan oleh B.J. Habibie melalui CIDES dan ICMI seperti Eggi Sudjana dan Jumhur Hidayat, tidak kritis terhadap kekuasaan Soeharto maupun BJH. Mereka kritis terhadap kekuasaan Gus Dur dan Megawati. PPMI terpecah antara pendukung SBY dan penentang.

Ketika bangkit kembali tahun 1999 dengan sedikit perubahan “Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia”, Agus Sudono sudah sangat tua dan tidak mampu memimpin gerakan. Gasbiindo pun pecah menjadi tiga organisasi. Gasbiindo pun tidak pernah terlibat dalam melancarkan tuntutan terhadap pemerintah dan pengusaha. Ini sesuai dengan pemikiran ketuanya tentang hubungan industrial Pancasila (HIP). Bahwa dalam HIP pemogokan dan demonstrasi dilarang.

Ali Djunaedi sebelum memimpin Sarbumusi adalah ketua SPSI Jawa Timur. Ia ditugaskan memimpin Sarbumusi oleh Ketua NU karena mempunyai pengalaman memimpin buruh. Ia bukan tokoh buruh yang tumbuh bersama Sarbumusi, sehingga kesulitan menarik dukungan kaum muda. Sama seperti FBSI, SPSI dan KBM, Sarbumusi lebih merupakan kebutuhan elit untuk mengendalikan buruh dan menarik buruh dalam orbit NU. Sebab itu pembentukan unit kerja atau basis dan cabang-cabang, berasal dari atas. Selama hampir 20 tahun bersama SPSI, Ali Djunaedi lebih dekat dengan kekuasaan dan modal. Program-program yang dikembangkan pun lebih banyak sosialisasi dan tidak mengkritisi kebijakan perburuhan. Di bawah kepemimpinannya, Sarbumusi tidak menunjukkan pertentangan kolektif dalam arti sebagai kekuatan tandingan dengan kekuasaan dan modal. Para buruh tidak dimobilisasi untuk membangun sebuah masa depan alternatif, tetapi disosialisasikan dengan kebijakan yang diproduksi oleh kekuatan dominan. Jika terdapat program yang berbeda hanyalah pengayaan kegiatan keagamaan.

Eggi Sudjana dan Jumhur Hidayat adalah tokoh yang dibesarkan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sejak awal pembentukannya, ICMI mewacanakan transisi kepemimpinan yang melibatkan semakin banyak tokoh muslim dalam birokrasi dan parlemen. DPR hasil Pemilu 1992 dan 1997 dikenal

sebagai “ijo royo-royo” atau didominasi oleh tokoh-tokoh Islam, terutama mereka yang pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Pasca Pemilu 1997, para tokoh ICMI aktif mencari dukungan dalam Golkar untuk mempromosikan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden, meskipun DPC dan DPD lebih mendukung Harmoko yang menjadi Ketua Umum Golkar. Semasa kepemimpinan B.J. Habibie, PPMI tidak pernah menggalang demonstrasi atau protes menentang kebijakan dan kekuasaan. Sebaliknya, PPMI meminta buruh fokus “pada pekerjaan di tengah ekonomi yang sulit”. Langkah PPMI ini berbeda dengan gerakan buruh lain yang menuntut pembayaran upah, pencabutan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan menolak PHK. Namun pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Eggi Sudjana dan Jumhur Hidayat bekerjasama melakukan demonstrasi mendesak presiden mundur. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan bahwa Eggi Sudjana mendirikan PPMI lebih sebagai media untuk memobilisasi buruh dalam menopang kekuasaan B.J. Habibie⁸⁴.

Pasca kepemimpinan B.J. Habibie, Eggi kritis terhadap kekuasaan. Sedangkan Jumhur Hidayat melalui jaringan ICMI dalam Golkar berhasil duduk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sepanjang memimpin Gaspermindo, Jumhur sangat aktif memobilisasi buruh menentang kebijakan ketenagakerjaan, baik semasa Presiden Gus Dur maupun Megawati. Fokus penolakan pada sistem kerja borongan dan PHK. Namun ketika Jumhur duduk sebagai Kepala BNP2TKI, Gaspermindo tidak lagi aktif

⁸⁴ Pada Juni 2008, PPMI pecah menjadi dua kubu, yaitu PPMI yang dipimpin oleh Eggi Sudjana yang mengecam keras kebijakan ketenagakerjaan SBY dan PPMI yang dipimpin oleh Sjahganda Nainggolan yang mendukung kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik Eggi Sudjana dapat dibaca pada bukunya berjudul *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*. Jakarta: Renaisan, 2005.

melakukan tekanan terhadap kekuasaan dan pengusaha. Di tingkat basis, para pengurus Gaspermindo bekerjasama dengan serikat buruh lain ikut dalam gerakan menolak berbagai kebijakan yang merugikan buruh, seperti menolak kerja kontrak, penentuan UMP, revisi terhadap UU No. 13 tahun 2003, Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pesangon dan PHK. Tetapi Gaspermindo tidak dalam posisi memimpin gerakan. “Kini kami lebih memfokuskan kepada pemberdayaan buruh secara konkrit, seperti bagaimana sopir taksi mempunyai taksi sendiri, para buruh tidak terancam PHK dan demonstrasi yang tidak jelas tujuannya, kami tolak”.⁸⁵ Relasi Eggi dan Jumhur yang sangat baik dengan pusat kekuasaan menyebabkannya partisan dan tidak *genuine* dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Pada akhirnya gerakan buruh yang dipimpinnya dinomorduakan dibanding motivasi kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Jumhur lebih diarahkan untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan dan bukan sebagai unionis⁸⁶.

Kepemimpinan akomodatif juga ditunjukkan oleh tokoh-tokoh buruh yang dibesarkan oleh SPSI. Sjukur Sarto adalah tokoh SPSI yang berasal dari SOKSI, sementara Jacob Nuwa Wea sebelumnya memimpin KBM. Melalui PDIP, ia berhasil memimpin SPSI dan kemudian menjadi Menteri Tenaga Kerja. Sebagai arsitek undang-undang No. 13 tahun 2003, Jacob mengandalkan KSPSI untuk mendukung konsepnya. Sementara semua serikat buruh non KSPSI menentangnya. Butir-butir yang ditentang oleh gerakan buruh non KSPSI adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), waktu kerja, perjanjian kerja untuk outsourcing, pengupahan, pemogokan dan uang pesangon. Ketentuan-ketentuan tersebut berpihak kepada pengusaha, sebab

⁸⁵ Wawancara dengan Jumhur Hidayat Januari 2008.

⁸⁶ Kepemimpinan Jumhur Hidayat di BNP2TKI terus menuai kritik dari *Migrant Care*, baik soal penempatan maupun perlindungan. *Migrant Care* sejak awal menolak duduknya Jumhur di BNP2TKI karena tidak memiliki pengalaman mengurus buruh migran.

dalam PKWT memberi peluang pengusaha untuk tidak mengangkat buruh sebagai pekerja tetap, waktu kerja 40 jam/minggu dinilai buruh terlalu panjang, *outsourcing* melemahkan posisi buruh sebab buruh takut menjadi anggota serikat buruh, dengan PKWT upah buruh hanya dibayar 80 persen dan ketentuan UMP tidak bisa diterapkan serta pentingnya pesangon bagi buruh yang terkena PHK⁸⁷. Sedangkan Sjukur Sarto mempunyai pandangan bahwa:

“Gerakan buruh yang secara nyata menentang pengusaha apalagi pemerintah bukan gerakan buruh, tetapi LSM perburuhan. Di era seperti sekarang dibutuhkan kerjasama dengan pengusaha dan pemerintah. Pengusaha menghadapi persaingan tajam dan untuk memenangkannya, para buruhnya harus membantu dengan produktivitas kerja. Presiden, gubernur dan bupati yang dipilih langsung sangat riskan mengabaikan buruh dan memihak pengusaha seperti jaman dulu”⁸⁸.

Baik Sjukur Sarto maupun Jacob selain memiliki relasi yang kuat dengan Golkar dan PDIP juga dengan kalangan pengusaha, terutama yang tergabung dalam APINDO. Pertarungan kedua kubu dalam memperebutkan kepemimpinan KSPSI tidak terlepas dari kekuatan di belakangnya. Kedua belah pihak sangat tergantung pada sumberdaya di luar buruh, terutama Jamsostek, pengusaha dan tokoh-tokoh politik di Golkar (Sjukur Sarto) dan PDIP (Jacob Nuwa Wea). Alasan bahwa Jacob merekrut orang-orang yang masih hijau dalam union, bukan persoalan prinsip, sebab dalam tubuh SPSI tidak sedikit orang-orang yang duduk sebagai pengurus dengan latar belakang militer dan PNS. Bahkan sejarah serikat pekerja ini pun tidak bisa dipisahkan dengan militer dan birokrasi. Dominasi SPSI atas buruh hanya mungkin dengan bantuan birokrasi. Usaha untuk tetap mempertahankan kepemimpinan

⁸⁷ Disarikan dari Dialog Menaker dengan Apindo dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanggal 1 September 2002 di Kantor Depnaker Jakarta.

⁸⁸ Wawancara dengan Sjukur Sarto, Januari 2008.

dominan dalam gerakan buruh dengan menyingkirkan yang satu atas yang lain, selain motivasi kekuasaan, relasi dengan pusat kekuasaan dan modal, juga ketergantungan sumberdaya khususnya dari Jamsostek⁸⁹.

Fenomena menarik terjadi dalam tubuh SBSI di bawah Rekson Silaban.

Rekson, pengganti Muchtar Pakpahan mengembangkan pemikiran bahwa:

“gerakan buruh yang mendesak ide-ide perubahan yang bermuatan sosialis, tidak akan mendapat tempat. Gerakan seperti itu hanya untuk kepentingan mahasiswa, bukan benar-benar buruh. Sebab tidak sesuai dengan kultur masyarakat yang lembut, menekankan negosiasi dan penyelesaian secara musyawarah. Jika pada masa Soeharto, SBSI radikal karena tidak diakui. Aspirasi anggota tidak bisa disalurkan karena ditindas oleh aparat keamanan”⁹⁰

Setelah diakui pemerintah, SBSI bekerja sama dengan pengusaha dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Nasib buruh lebih banyak di tangan pengusaha dan pemerintah, sebab mereka pemilik modal dan pembuat kebijakan. Jika buruh terus bergerak dengan mempertahankan militansi, maka pemodal akan lari⁹¹. Untuk merealisasikan pemikirannya, SBSI bersama Apindo menyelenggarakan Dialog Bipartit. Dalam dialog tersebut dibahas “Iklim Investasi”, di mana faktor buruh diakui turut berperan dalam menyusutnya investasi di Indonesia⁹². Para pengusaha mengeluh perilaku buruh yang radikal dan menakutkan.

⁸⁹ Menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, lembaga ini berbentuk BUMN untuk mengelola dana buruh. Para direktur ditentukan oleh Menaker dan menurut pengalaman hanya serikat buruh yang mau bekerjasama dengan Pemerintah yang mendapat bantuan dari Jamsostek. KSPSI menerima bantuan setiap tahun antara 750 juta sampai 900 juta rupiah. Motivasi utama menjadi Pengurus KSPSI adalah terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan dana ini dan pertanggung jawabannya tidak begitu ketat. Sampai sekarang, SB lain sangat sulit mendapatkan bantuan dari Jamsostek. Lihat pandangan para ketua SP/SB tentang Jamsostek dalam Direktori SP/SB oleh Kosuke Mizuno, Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati (2007).

⁹⁰ Wawancara dengan ketua KSBSI Rekson Silaban Mei 2007

⁹¹ Wawancara dengan ketua KSBSI Rekson Silaban Mei 2007.

⁹² Dialog dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2006 dan 15 Mei 2006 di Gedung Depnaker

Jakarta

Oleh para aktivis gerakan buruh, SBSI diposisikan sebagai serikat buruh yang terlalu dekat dengan pengusaha, sehingga tidak mampu melihat kondisi perburuhan secara nyata. Dalam Dialog Bipartit yang dipelopori oleh SBSI, hanya hadir serikat buruh dari SPSI dan beberapa serikat buruh kecil. Gerakan buruh yang dikenal sebagai pembentuk agenda perburuhan, seperti FNPBI, KSPI, SPSI Reformasi dan KASBI, tidak hadir⁹³. Langkah akomodatif KSBSI dengan pemerintah juga ditunjukkan dalam sikapnya terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja atau RPP Pesangon. Sementara serikat pekerja lain menolak karena menguntungkan pengusaha di mana nilainya ditetapkan 5 kali pendapatan tidak kena pajak (PTKP), KSBSI setuju dengan argumen bahwa upah buruh setiap tahun naik. Langkah KSBSI yang membingungkan partisipannya adalah mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membuka Kongres ke V Mei 2007. Pada hal Wapres beberapa kali mengecam buruh yang dituduh anarkis dan hanya mementingkan kepentingannya tanpa memperhatikan iklim usaha. Para ketua serikat buruh lain menolak hadir dalam acara itu, kecuali utusan dari Sarbumusi.

Para tokoh buruh yang mengembangkan kepemimpinan akomodatif, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pemodal dan gerakan buruh. Oleh sebab itu, mereka mencoba menghidupkan kembali konsep HIP. Konsep ini sangat ideal dalam menjaga relasi antar kekuatan tersebut, meskipun dalam prakteknya lebih merupakan alat penjinakan buruh melalui mekanisme kultural. Para pemimpin akomodatif menolak perluasan gerakan buruh di luar masalah perburuhan. Langkah seperti itu hanya akan mendorong hengkangnya para investor karena radikalisme para

⁹³ *Kompas*, 15 Mei 2006.

buruh. Relasi buruh dengan Negara, terbatas masalah-masalah perburuhan. Mereka menolak buruh yang mengkritisi kebijakan BBM, perpajakan dan sebagainya. Investasi merupakan kata kunci untuk penyerapan tenaga kerja. Sedangkan peningkatan investasi salah satunya memerlukan gerakan buruh yang akomodatif. Untuk tujuan itu para pemimpin akomodatif setuju mendisiplinkan buruh dan jika perlu dengan PHK. Tipe kepemimpinan seperti ini diperlihatkan oleh para tokoh buruh yang tengah mengalami kemapanan atau gerakan dalam kondisi kedewasaan.

4. Kepemimpinan Profesional

Tipe kepemimpinan ini menonjolkan praktek manajemen dalam organisasi. Organisasi dipandang sebagai sumberdaya yang secara terus menerus dikembangkan secara professional dengan peningkatan kualitas SDM dan kekayaan organisasi. Tugas pimpinan gerakan layaknya seorang manajer, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol. Peningkatan jumlah anggota dan peningkatan sumberdaya organisasi, seperti uang, kantor, media informasi, jaringan kerja, jumlah KKB yang berhasil dibuat dan peningkatan upah anggotanya, merupakan indikator keberhasilan pemimpin. Iuran anggota sangat penting dan secara terus menerus anggota harus didisiplinkan dalam soal yang satu ini. Sebab iuran untuk membiayai operasional gerakan termasuk menggaji pimpinan yang bekerja penuh waktu. Hal ini akan menghilangkan ketergantungan gerakan kepada para relawan dan donatur. Sebagai implikasinya, gerakan akan memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menyatakan sikap atau tuntutan.

Kepemimpinan profesional tumbuh dalam gerakan buruh yang profesional. Profesionalisasi gerakan buruh menjadi karier kepemimpinan seseorang. Gerakan buruh bukan sekedar tempat berkumpul, berdiskusi dan merencanakan protes atau demonstrasi, tetapi telah mengalami perubahan struktur dan prinsip gerakan ke arah penguatan organisasi. Para pimpinan gerakan secara sadar mengembangkan organisasi sebagai sumberdaya gerakan. Mula-mula gerakan dibangun dari swadaya dan bantuan para relawan. Dana operasional, pelatihan dan aktivitas lainnya, diperoleh dari anggota dan relawan. Namun seiring dengan pendisiplinan anggota, sumberdaya swadaya menjadi tumpuan. Sekilas gerakan ini menyerupai koperasi, di mana organisasi mengelola iuran anggota, meminjamkannya dan mengembangkannya ke sektor usaha lain. "Yang membedakan dengan koperasi adalah aktivitas partisipan dalam melancarkan protes dan demonstrasi baik kepada manajer perusahaan maupun kepada pemerintah".⁹⁴

Karena gerakan dilaksanakan oleh anggotanya, maka perubahan struktur, prinsip dan kepemimpinan juga diikuti oleh perubahan keanggotaan. Para aktivis yang menekankan desakan kepada pengusaha dan pemerintah secara perlahan-lahan berkurang, digantikan oleh para buruh, mereka yang meniti karier organisasi dan para aktivis yang menekankan praktek manajemen. Kepemimpinan profesional ini tidak berbeda dengan tipe kepemimpinan karismatik dan militan di mana identitas kolektif melekat pada para aktivis gerakan yang dipelihara melalui interaksinya dengan para aktivis dan kekuasaan. Para partisipan tidak hanya fokus pada kepentingan-kepentingannya sebagai buruh, yaitu memperoleh rasa aman dalam bekerja, kepastian pembayaran upah yang sesuai dengan UMP, pelaksanaan PKB, THR,

⁹⁴ Wawancara dengan M. Said Iqbal, April 2008.

perlindungan dari serikat buruh dan pesangon jika terjadi PHK atau *lockout*, tetapi juga mengambil sikap atas persoalan-persoalan sosial politik bangsa.

Kepemimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) merupakan contoh kepemimpinan gerakan buruh profesional. Meskipun embrio gerakan ini LEM SPSI, di bawah kepemimpinan Tamrin Mosi dan terutama di bawah Said Iqbal, berhasil dikembangkan gerakan buruh yang lebih mengandalkan kekuatan organisasi. Dengan bantuan IMF dan IMF SEA0, dirancang pembangunan serikat buruh yang kuat dengan basis buruh pabrik.

“SPMI menekankan kemandirian di mana buruh membayar iuran 1 persen dari gaji yang dibayar langsung ke rekening DPP. Pada awalnya terjadi penolakan sebab uang anggota langsung ke pusat. Diperlukan waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan pentingnya DPP bekerja di tingkat nasional dari dana buruh”⁹⁵.

Demikian pula program-program kerjanya. Terdapat 9 program kerja yang mencakup perlindungan dan pembelaan pekerja, pemberdayaan pekerja perempuan, konsolidasi dan revitalisasi organisasi, ekonomi dan kesejahteraan, konsolidasi keuangan, pengembangan kemampuan informasi dan komunikasi, pendidikan dan membangun solidaritas pekerja. Di tingkat mikro, FSPMI memfokuskan pembuatan PKB, pendidikan swadaya, mengumpulkan COS dan bipartite. Di tingkat makro (nasional), mengkritisi upah, jaminan sosial, undang-undang perburuhan dan aksi solidaritas perburuhan. FSPMI membentuk satuan khusus yang disebut Garda Metal yang berfungsi merespon persoalan sosial, ekonomi dan politik secara nasional.

⁹⁵ Wawancara dengan M. Said Iqbal, April 2008.

Garda Metal dilatih layaknya militer agar mempunyai kekuatan fisik dalam menghadapi adu mental dengan aparat dan petugas keamanan perusahaan⁹⁶.

FSPMI memiliki kurikulum pendidikan yang berjenjang dengan fokus pada pemahaman mengenai organisasi sebagai gerakan sosial ekonomi. Hak-hak buruh dan ketrampilan mengelola organisasi, serta pentingnya organisasi sebagai wahana perjuangan merupakan materi pokok pendidikan dan pelatihan. Pola ini menarik para buruh untuk masuk FSPMI. Pada tahun 2005 jumlah anggota 105.985 orang dengan iuran yang berhasil dikumpulkan 1,43 milyar rupiah dan pada tahun 2007 telah menjadi 122.882 orang dengan iuran 2,5 milyar rupiah. Kekayaan SPMI antara lain kantor yang megah berdiri di atas tanah 500 meter persegi dengan nilai 1 milyar rupiah, lima bangunan kantor cabang, gedung pendidikan dan pelatihan seluas 2100 meter persegi di Bogor, tiga mobil operasional dan alat-alat teknologi informasi⁹⁷.

Dengan kondisi keuangan seperti itu SPMI merupakan serikat pekerja terkaya. Kondisi keuangan organisasi dilaporkan secara berkala dalam liflet dan surat kabar yang terbit setiap bulan. Tidak mengherankan jika hampir dua bulan SPMI berhasil melumpuhkan PT Fumira di Bekasi Jawa Barat. PT Fumira memproduksi seng berlapis baja untuk atap pabrik.

“Perusahaan ini melakukan PHK terhadap 45 pekerja yang sebagian besar aktivis SPMI, dengan alasan produksi merosot, pada hal ini taktik untuk mencari pekerja baru tingkat operator. Namun SPMI berhasil menggalang solidaritas dan pemogokan, hingga tidak satu pun pekerja yang masuk bersedia bekerja. Pemogokan itu berhasil memaksa manajemen mencabut keputusannya, hingga semua pekerja yang di-PHK bekerja kembali. Dana pemogokan ditanggung oleh SPMI termasuk upah buruh yang tidak dibayar selama dua bulan. Demikian pula pemogokan di PT Buanatama Metalindo di

⁹⁶ Informasi ini diperoleh peneliti melalui partisipasi langsung selama 3 hari di Sekretariat FPMSI Pusat Jalan Pondok Gede Jakarta Timur.

⁹⁷ Data dan informasi dari Sekretariat DPP FSPMI Pusat tanggal 8 April 2008.

Tangerang yang berlangsung selama 6 bulan. FSPMI berhasil mendesak manajemen untuk mempekerjakan kembali 247 buruh yang telah di PHK.⁹⁸

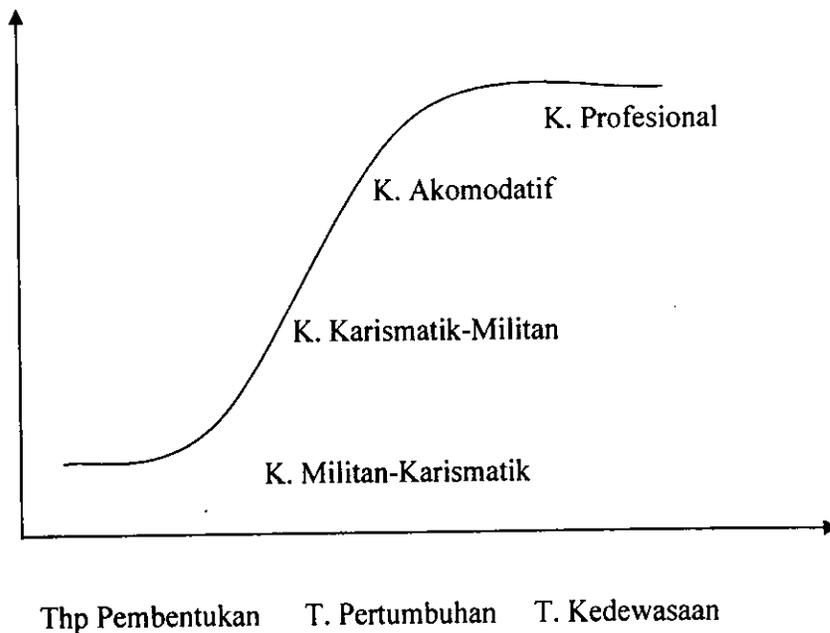
Tipe-tipe kepemimpinan yang dideskripsikan di atas tidak berlangsung secara tegas mengikuti tahapan gerakan. Pada tahap pembentukan, tipe kepemimpinan militan-karismatik paling dominan. Demikian pula pada tahap kedewasaan, tipe kepemimpinan profesional yang dominan. Tipe-tipe lain tetap muncul sepanjang tahap perkembangan gerakan, utamanya pada momen-momen khusus. Pada waktu demonstrasi, mogok dan pendudukan pabrik, tipe kepemimpinan karismatik-militan sangat menonjol. Sedangkan pada saat negosiasi, tipe kepemimpinan akomodatif lah yang mengemuka.

Berbeda dengan temuan McCarthy dan Zald (1973) di mana gerakan yang dikelola secara profesional (kepemimpinan profesional) kontrol para pendukung terhadap kepemimpinan organisasi menjadi berkurang, keanggotaannya semakin lama berubah menjadi sekedar anggota yang diwajibkan menyetor iuran dan menerima perlindungan. FSPMI tidak mengalami gejala tersebut. Dengan Garda Metal, pendidikan, kaderisasi dan solidaritas pekerja, interaksi dengan partisipan berhasil dipelihara. Demikian pula interaksi dengan kekuasaan, seperti ditunjukkan pada kasus PT Fumira dan PT Buanatama Metalindo di atas. Dalam risetnya mengenai *Pro-Choice Movement* (Gerakan Pro Aborsi) di Amerika Serikat, Suzanne Staggenborg (1988) juga menemukan gejala seperti yang ditunjukkan oleh McCarthy dan Zald. Medan organisasional menjadi semakin menyempit karena gerakan lebih *inward looking*. Kepemimpinan demikian itu dilakukan bukan para pioneer

⁹⁸ Wawancara dengan Said Iqbal Presiden FSPMI pada April 2008. Kronologi peristiwa dapat dibaca *Koran Perdjoangan* edisi April 2007 h. 3

gerakan, tetapi penerus dengan taktik yang lebih menekankan aspek-aspek formal organisasi. Akibatnya gerakan sosial terjebak dalam oligarkisme.

Pertumbuhan Gerakan dan Kepemimpinan Gerakan



Oligarkisme adalah konsep yang dikemukakan oleh Robert Michels (1984) untuk menunjukkan bahwa dalam tubuh partai politik maupun gerakan buruh terdapat kecenderungan oligarkis ketika pemimpin partai semakin konservatif, melayani dirinya sendiri dan bukan anggota atau konstituennya serta berorientasi kepada stabilitas bukan pada pembaharuan dan perubahan. Kerja pimpinan menjadi lebih pada administrasi dan manajemen, mengandalkan prosedur birokrasi, bukan pada ide-ide perubahan. Ketua DPP akan lebih mendengar pendapat para pengurus pusat lainnya dan ketua-ketua DPD. Sedangkan para ketua DPD akan mendengar para ketua DPC, sehingga terjadi manipulasi kepentingan di mana organisasi gerakan

memperhatikan kepentingan kelompok inti organisasi itu sendiri. Gejala ini menimbulkan suasana tidak nyaman bagi para partisipan progresif dan didukung oleh para pioneer gerakan baik mereka yang dahulu memegang kepemimpinan maupun tidak, berusaha untuk mengubah orientasi gerakan yang lebih progresif. Konflik antara gerakan buruh berorientasi sosial ekonomi yang lebih mengandalkan prinsip-prinsip manajemen dengan gerakan berorientasi sosial politik terus berlangsung sepanjang tahapan pertumbuhan gerakan. Baik gerakan buruh sebagai onderbouw partai, LSM perburuhan, gerakan buruh yang lahir dari bawah maupun gerakan buruh bentukan dari atas, konflik seperti itu tidak bisa dihindarkan. Kelompok yang didukung oleh sumberdaya yang kuat akan memenangkan konflik tersebut.

D. Gerakan Buruh Dualitas

Bagian ini hendak menunjukkan bahwa gerakan buruh di Indonesia merupakan gerakan dualitas. Penggunaan konsep dualitas merujuk pada Giddens (2003) yang menolak ketegangan pelaku dan struktur dalam menjelaskan teori strukturasinya. Dalam teori strukturasi, Giddens menempatkan *structure* dan *action* berada dalam suatu kontinum yang disebutnya *structuration* (strukturasi). Bagi Giddens, pelaku tidak dilawankan dengan struktur, melainkan suatu relasi yang dualitas /timbal balik (*duality*) bukan *dualism* (dualisme). Pelaku adalah orang-orang yang konkret, dapat dikenali dan nyata adanya. Sedangkan struktur bukan kerangka keterkaitan bagian-bagian seperti penjelasan teori fungsionalisme Parsons atau institusi yang mengekang model Durkheimian, melainkan aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik

sosial. Selanjutnya, praktik sosial yang berulang tidak berlangsung dalam ruang yang kosong, melainkan dalam lintas ruang dan waktu. Memandang ruang dan waktu sebagai ruang yang kosong berarti menjadikannya sebagai sebuah panggung atau arena yang akan diisi dengan berbagai perilaku manusia, seperti dijelaskan dengan tepat oleh teori dramaturgi.

Model penjelasan yang memandang tindakan sosial sebagai suatu kontinum, digunakan di sini dengan sedikit modifikasi. Intinya adalah bahwa gerakan buruh di Indonesia tidak mengikuti pola Eropa Timur yang bertujuan melakukan gerakan politik baik melalui aliansi dengan partai politik atau membentuk partai politik untuk merebut kekuasaan, juga bukan mengikuti pola Amerika Serikat yang mengejar tujuan-tujuan ekonomi, tetapi mengejar tujuan politik dan ekonomi sekaligus atau antara tujuan ekonomi dan tujuan politik merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Dengan demikian gerakan buruh dualitas berbeda dengan teori gerakan buruh dualisme (*dualism labor movement*) dari Salomon B. Levine (1963) atau H.W Singer (1970). Menurut Levine gerakan buruh di Jepang pasca Perang Dunia Kedua bersifat dualisme, gerakan buruh nasional terutama diarahkan kepada tujuan politik yaitu mempengaruhi kebijakan publik melalui saluran-saluran politik, sedangkan serikat buruh lokal cenderung mengejar tujuan ekonomi pekerja yang lebih pragmatis dan berjangka pendek dalam lingkungan perusahaan. Konsep ini memisahkan gerakan nasional dan gerakan lokal yang berbeda orientasi dan filosofinya. Sebagai federasi atau konfederasi, gerakan buruh di level nasional berjuang mendapatkan perlindungan melalui perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Seringkali dilakukan bekerjasama dengan partai-partai politik. Sedangkan menurut Singer

(1970) gerakan buruh di negara berkembang merupakan gerakan dualistik karena ekonominya juga dualistik. Ia setuju dengan J.H. Booke tentang berlangsungnya sistem ganda di negara berkembang di mana sektor modern ditandai dengan padat modal, berlangsung di kota-kota dan diorientasikan untuk ekspor, sektor tradisional ditandai dengan padat karya, berada di pedesaan dan untuk konsumsi dalam negeri. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa di sektor modern gerakan buruh cenderung menekankan tawar-menawar kolektif dan memperbaiki kesejahteraannya. Sebaliknya di sektor tradisional gerakan buruhnya menggunakan saluran politik termasuk mobilisasi massa dalam mengejar tujuannya⁹⁹.

Gerakan buruh dualitas terbentuk melalui gabungan sejumlah faktor seperti konteks sejarah kelahiran gerakan buruh, kecenderungan gerakan buruh untuk menjadi partai politik, ideologi yang menjadi identitas kolektif dan diperjuangkan, perkembangan kapitalisme yang secara serius menyingkirkan dan menindas buruh, konstitusi yang menempatkan negara mempunyai peran keadilan sosial dan pertumbuhan jumlah buruh yang sangat pesat namun tidak disertai pendalaman industri sehingga isu-isu perburuhan yang berkembang sangat umum. Argumen *pertama*, bahwa gerakan buruh lahir dari konteks perjuangan nasional menantang kolonialisme dan kapitalisme. Seperti dikemukakan di bagian terdahulu, warisan demikian sangat kuat sebab menjadi ciri gerakan buruh di negeri ini. Seakan tidak pernah sepi dari dorongan atau tarikan kekuatan politik, gerakan buruh senantiasa berada pada kontinum gerakan ekonomi dan gerakan politik. *Push factor* dan *pull factor* sama kuatnya. Dengan demikian gerakan buruh pada masa kolonial memiliki watak politik yang kuat.

⁹⁹ Temuan Singer ini juga berbeda dengan Scott (2000).

Kedua, watak ini tidak menghilang, tetapi justru dipertegas dengan transformasi gerakan buruh ke Partai Buruh Indonesia pasca Proklamasi 1945. PBI yang kurang radikal mendorong buruh radikal untuk mendirikan SOBSI. Karakter ideologis SOBSI benar-benar merupakan idealisme para buruh, sehingga SOBSI sangat kuat. Ketika SOBSI mengindikasikan pada PKI, partai lain ramai-ramai membuat serikat buruh sebagai *onderbouw* partai politik. Pola seperti itu oleh penguasa baru yang berhasil menumpas PKI dipandang membahayakan koalisi dan strategi pembangunan yang dirancangnya, sehingga dihancurkan. Dibentuklah serikat buruh baru dengan memaksakan penyatuan serikat buruh-serikat buruh yang masih eksis. Di bawah FBSI penindasan buruh tidak berhasil dicegah, sebaliknya FBSI justru menjadi alat untuk mengendalikan buruh.

Ketika Orde Baru jatuh, tumbuh serikat-serikat buruh dengan orientasi gerakan yang berusaha menghidupkan kembali gerakan buruh politik tahun 1960-an. Pergerakan demikian dibangun mengingat partai-partai politik yang berdiri juga mengikuti pola tahun 1960-an. Gerakan ini tidak memiliki aktivitas nyata di bidang perburuhan, kecuali Sarbumusi meskipun sangat minim. Namun mempunyai agenda politik seperti mendekati calon-calon kepala daerah, calon presiden, calon anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menawarkan dukungan. Gerakan buruh sebagai alat memobilisasi buruh dimanfaatkan oleh para oportunis politik di era transisi yang sedang mencari bentuk. Di sisi lain gerakan buruh yang dipelopori oleh para aktivis non buruh utamanya mereka yang tergabung dalam LSM juga semakin menguat dan mempertegas identitas kolektifnya. Watak politik dari gerakan buruh LSM tidak kalah kuat dibanding gerakan lainnya. Oleh karena dari awal watak gerakan ini menentang format politik perburuhan yang diterapkan Orde Baru. Setelah Orde Baru

jatuh, orientasi gerakannya lebih luas yaitu menentang agenda neoliberalisme dan berbagai kebijakan yang tidak pro buruh. SBSI justru lebih jelas lagi dengan membentuk Partai Buruh Nasional yang kemudian berubah menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat untuk mempertegas ideologi yang diperjuangkannya yaitu sosialis demokrasi. Ini merupakan pola baru di mana serikat buruh membentuk partai yang akan digunakan sebagai alat memperjuangkan kepentingan politik anggotanya.

Kecenderungan ke gerakan politik juga tidak bisa dihindari dari serikat buruh bentukan Orde Baru. Pasca Soeharto, FSPSI segera terpecah dengan orientasi politik yang berbeda-beda. FSPSI yang ditinggalkan oleh sebagian pengurusnya ragu dengan eksistensi Golkar, sehingga membentuk Partai Kongres Pekerja Indonesia (PKPI). Di bawah Jacob Nuwa Wea usaha untuk membawa KSPSI ke PDIP sangat jelas antara lain ditunjukkan oleh duduknya orang-orang dekat Jacob dalam kepengurusan KSPSI. Sedangkan FSPSI Reformasi lebih pro kepada Partai Persatuan Pembangunan di mana ketua umumnya menjadi wakil rakyat dari partai tersebut. Sedangkan KSPI yang merupakan pecahan dari FSPSI Reformasi sejak awal mendukung Partai Keadilan (Sejahtera) dan sejak tahun 2006 kedua belah pihak menandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)*. MOU ini berisi janji kedua belah pihak, di mana KSPI berjanji untuk memobilisasi anggotanya memenangkan calon yang diusung PKS, sebaliknya PKS berjanji untuk menetapkan kebijakan yang pro buruh terutama mengenai pengupahan. Dalam mendukung Adang Darajatun dan Dani Anwar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2007, KSPI dijanjikan upah buruh di Jakarta minimum 1,7 juta rupiah per bulan¹⁰⁰. Sementara

¹⁰⁰ Wawancara dengan Said Iqbal Presiden FSPMI April 2008.

itu, KSBSI mendukung pasangan Fauzi Bowo-Priyanto yang akhirnya memenangkan Pilkada tanpa janji khusus kepada buruh.

Serikat buruh lain seperti PPMI dibentuk hanya sebagai alat memobilisasi massa untuk mendukung kekuasaan B.J. Habibie dan pasca Habibie, agenda perburuhannya semakin menghilang digantikan oleh aliansi dengan ormas islam lain untuk mengancam beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan umat Islam. Demikian pula Gaspermindo, serikat buruh ini menjadi kekuatan utama Partai Daulat Rakyat (PDR) yang didirikan Adi Sasono dan Jumhur Hidayat, aktivis ICMI lainnya. Tidak berbeda dengan PPMI, Gaspermindo melalui PDR berusaha memobilisasi buruh untuk mendukung kepemimpinan B.J.Habibie. Sedangkan para aktivis FNPBI duduk sebagai pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dita Sari ketua FNPBI sejak 2006 memimpin PRD dan berganti nama menjadi Partai Perjuangan Rakyat Nasional (Papernas)¹⁰¹. Di tengah orientasi politik seperti itu, selalu muncul tokoh-tokoh baik dari lapisan pertama (para pendiri) maupun lapisan kedua (generasi penerus) untuk membawa orientasi gerakan ke arah lainnya, baik ekonomi maupun politik. Tidak tertutup pula tarikan dari partai-partai politik, sehingga terjadi perpecahan dalam gerakan buruh.

Argumen *ketiga* dapat ditemukan pada ideologi gerakan buruh. Akar dari gerakan sosial di negeri ini seperti ditunjukkan oleh Shiraishi (1997), Mintz (2002) dan Ingleson (2004) dan kajian dalam studi ini adalah Islam, sosialisme dan sosial demokrat. Kedua sistem pemikiran ini selalu ditolak, diinterpretasi ulang dan dipeluk kembali. Upaya untuk menumpas ideologi ini yang dilakukan dengan pembunuhan

¹⁰¹ Partai ini tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2009, kemudian Dita Indah Sari menjadi calon anggota legislatif melalui Partai Bintang Reformasi (pecahan PPP) dan pada bulan Nopember 2008 membentuk Persatuan Buruh Reformasi (PBR).

karakter sejak akhir tahun 1960-an (Leclerc, 1978) dilanjutkan dengan pendisorganisasian dan represi pada tahun 1970-an sampai jatuhnya Soeharto (Hadiz, 2005), stigmatisasi ekstrim kanan dan ekstrim kiri (Max Lane, 2007), tidak berhasil. Ketika gerakan buruh bangkit kembali tahun 1998, dua ideologi inilah yang menjadi cita-cita perjuangan. Terlepas dari oportunistik dan ambivalennya para tokoh gerakan dalam mengusung Islam dan sosialisme (karena keduanya juga terus-menerus mengalami perpecahan), dalam derajat tertentu mampu menjadi tali pengikat para anggota.

Selain egoisme para pimpinan gerakan, perpindahan serikat buruh juga dipicu oleh kecenderungan untuk mengambil jalan pintas mobilitas vertikal di perusahaan atau melalui organisasi gerakan. Merupakan rahasia umum bahwa jabatan struktural dalam perusahaan merupakan incaran para karyawan. Paling menarik adalah jabatan manager personalia atau *human resources*, manager pembelian, manager pergudangan dan manager produksi. Selain itu, seorang pimpinan cabang gerakan buruh mempunyai peluang yang lebih baik untuk duduk di dewan pengupahan daerah dan mewakili organisasinya dalam pertemuan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Interaksi demikian merupakan sesuatu yang langka dan meningkatkan prestise. Terbuka pula peluang untuk duduk sebagai aktivis partai atau menjadi anggota tim sukses calon kepala daerah. Pada posisi ini "label baru gerakan" merupakan pembeda dan bukan keyakinan kolektif yang secara historis diperjuangkan melalui penambahan sumberdaya guna mencapai posisi dominan dalam masyarakat.

Namun demikian betapun egois dan oportunistiknya para pimpinan gerakan buruh, mereka memiliki pemikiran yang tidak jauh dari sosialisme. Yang paling

menonjol adalah Dita Sari yang mengajukan unionisme politik sepanjang garis Leninis, di mana: “peran serikat buruh adalah untuk mendukung partai revolusioner (PRD) dalam mencapai diktator proletariat”.¹⁰² Karena sosialisme terlebih dulu memasuki pikiran masyarakat Indonesia dan meskipun eklektik, gagasan mengenai sosialisme paralel dengan nilai-nilai masyarakat seperti gotong royong, pemilikan tanah komunal, hak ulayat dan struktur kelas masyarakat Indonesia pasca kolonial yang dipertegas dalam struktur kaum buruh di era kapitalisme negara. Tradisi musyawarah dan ajaran islam juga signifikan, sehingga gerakan buruh yang mengusung agama dapat menjadi pelindung dari tuduhan “komunisme” sebab sebagian besar buruh tidak bisa membedakan antara komunisme dan sosialisme. Menggunakan mantel ideologis agama dengan demikian lebih ditujukan untuk mengamankan gerakan dari phobia sosialisme dan komunisme masyarakat Indonesia.

Baik sosialisme maupun Islam dapat menjadi anti tesis kapitalisme dan lebih mudah menarik para buruh untuk bergabung di dalamnya. Memang, gairah buruh akar rumput untuk membangun gerakan sosial ekonomi sempat menguat pasca Pemilu 1999. Mereka yang kecewa dengan PDIP dan Partai Buruh Nasional, semakin frustrasi ketika mendapati rendahnya upah dan tingginya PHK akibat krisis ekonomi yang belum pulih. Serikat buruh telah menyimpang dari tujuan pokoknya meningkatkan kesejahteraan buruh karena partai-partai politik telah mesia-siakan kesempatan untuk melakukan perubahan besar tahun 1999. Kondisi ini yang membuat sikap apatis sebagian buruh dalam gerakan buruh tahun 2000 hingga muncul ancaman baru rejim *outsourcing* dan pekerja kontrak akhir tahun 2002. Neoliberalisme, globalisasi, *outsourcing* dan pekerja kontrak, menjadi musuh

¹⁰² Wawancara dengan Dita Indah Sari Juni 2007.

bersama yang mempersatukan buruh. Dalam situasi demikian untuk secara lantang meneriakkan “sosialisme”, para buruh masih takut. Tidak mengherankan jika demonstrasi buruh kemudian mengecam partai-partai politik, kolusi, korupsi dan privatisasi.

Dualitas gerakan buruh di Indonesia berlangsung di semua level mulai dari tingkat perusahaan sampai nasional. Di tingkat perusahaan, gerakan buruh mengontrol dipatuhinya keputusan-keputusan pemerintah dalam hal upah dan jaminan sosial. Mencegah pemutusan hubungan kerja, memastikan dibayarnya THR dan pesangon serta mengontrol iuran ke serikat buruh. Jika dalam suatu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat buruh, gerakan berperan menegosiasi untuk dibuatnya kesepakatan kerja bersama (KKB). Fragmentasi gerakan buruh telah dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menunda pembentukan KKB dengan alasan “dengan serikat buruh yang mana KKB akan dibuat?”, mengingat dalam UU No. 13/2003 dalam satu perusahaan hanya dibenarkan satu KKB. Selain itu, serikat buruh juga menegosiasi agar anggotanya diijinkan mengikuti pelatihan, pendidikan bahkan melakukan pemogokan dan demonstrasi. Di tingkat perusahaan ini keberadaan lebih dari satu serikat buruh lebih menguntungkan pengusaha, selain persoalan KKB di atas juga satu sama lain dapat diadu untuk saling melemahkan posisinya. Dalam mengisi jabatan managerial misalnya, pengusaha cenderung memilih mereka yang tidak tergabung dalam serikat buruh, minimal memilih orang yang lebih akomodatif.

Pimpinan serikat buruh perusahaan mempunyai tanggung jawab memobilisasi anggotanya untuk kepentingan pembelaan kolega jika menghadapi masalah atau bahkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Cabang. Sebuah gerakan akan melibatkan federasi bahkan konfederasi jika isu-isunya

strategis dan berskala nasional. Di tingkat Cabang dan Daerah, gerakan buruh memastikan ditinjaunya ketentuan upah minimum., ditetapkannya upah minimum sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota/Provinsi dan mengontrol kepastian implementasi. Selain itu melakukan pembelaan anggota jika menghadapi ancaman PHK dan dipatuhinya pembayaran pesangon oleh majikan jika terjadi PHK. Cabang dan Daerah juga melakukan aliansi dengan partai-partai politik tertentu sesuai dengan persetujuan Pusat dalam memobilisasi anggotanya untuk mendukung calon dalam pemilihan Bupati/Walikota atau Gubernur, meskipun diragukan efektivitasnya. Isu-isu strategis mengenai korupsi, kolusi, nepotisme, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik dikelola baik di Daerah maupun Pusat. Sedangkan dalam menyikapi isu di tingkat nasional, Pusat akan meminta Cabang/Daerah dan plan level untuk mengerahkan anggotanya. Misalnya tuntutan mengenai pencabutan Peraturan Menteri, amandemen UU, rencana pemerintah untuk menjual sejumlah perusahaan milik Negara dan isu-isu lain yang dirumuskan menjelang peringatan Satu Mei setiap tahunnya.

Keempat, hampir seluruh gerakan buruh ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar memberikan perlindungan kepada buruh. Negara dituntut keberpihakannya kepada buruh dengan berbagai cara, seperti membangun partai untuk menguasai parlemen, membangun aliansi dengan partai politik dan melakukan demonstrasi untuk memaksa pemerintah mengambil keputusan yang tidak merugikan buruh. Dengan demikian negara merupakan sintesa universal dari berbagai kepentingan partikular yang saling bertentangan dalam masyarakat. Ini jelas terlihat dalam konsepsi tentang relasi negara dan *civil society*. Dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) misalnya, antara buruh dan pengusaha merupakan partner

yang saling bekerjasama, membagi keuntungan dan menikmati kemajuan bersama. Hal tersebut dicapai melalui kontrol negara terhadap pengusaha dan buruh. Seperti halnya negara Hegelian, negara Pancasila diposisikan jauh lebih penting dibanding *civil society* (Bourchier, 1996). Tafsir resmi Pancasila yang diurai menjadi 36 butir dan kemudian berubah menjadi 41 butir secara jelas menunjukkan posisi tersebut.

Mengapa kelas buruh terus menerus mengosiasi negara untuk mendapatkan perlindungan? Atau mengapa kedudukan negara demikian kokoh sehingga kelompok-kelompok sosial mudah ditundukkan dan dikendalikan? Terdapat beberapa penjelasan mengenai perilaku negara Indonesia, seperti politik birokratik (Karl D. Jackson, 1978), patrimonialisme (Harold Crouch, 1979), negara bagi dirinya sendiri/*state qua state* (Anderson, 1983), kapitalisme negara (Richard Robison, 1986), otoriterisme birokratik dan korporatisme negara (Mas'ood, 1989), kapitalisme rente (Tornquist, 1990), korporatisme eksklusiver (Hadiz, 1997) dan kapitalisme predatoris (Hadiz, 2005). Meskipun teori-teori tersebut memiliki perbedaan penting dari sudut pandang, unit analisis dan model analisis, tetapi memiliki kesimpulan yang sama bahwa negara Indonesia sejak berdirinya tahun 1945 hingga pasca Soeharto adalah negara yang memiliki otonomi yang cukup besar. Negara menguasai sumberdaya yang sangat besar melalui beberapa perusahaan milik negara dan mengendalikan kekayaan alam, sehingga mampu menjamin homogenitas elit dan menjaga ketenangan dengan cara mendistribusikan sumberdaya kepada sejumlah pendukungnya. Kelompok-kelompok bawah disingkirkan atau dijinakkan jika perlu dengan kekerasan agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Para pejabat negara bekerjasama dengan modal nasional dan internasional, sehingga hanya kelompok inilah yang secara nyata menikmati pembangunan. Partisipasi masyarakat

dibatasi, oposisi dikontrol dengan cara represif, sedang perwakilan politik dikendalikan melalui korporatisme negara untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat.

Suatu fakta yang sulit diingkari adalah bahwa pembangunan ekonomi telah membawa Indonesia sebagai negara kapitalis baru. Setelah menghancurkan *civil society* tahun 1965-1969, Pemerintah yang didominasi militer segera menciptakan kondisi dalam negeri untuk menarik investor sebesar mungkin. Dikemukakan oleh Liddle (1990, 1998) bahwa kerjasama tiga kekuatan militer-teknokrat dan birokrasi, bukan hanya menyingkirkan kelompok-kelompok sosial yang pernah sangat aktif tahun 1950-1960-an, tetapi juga mampu mencapai otonomi relatif negara. Akibatnya, relasi modal dan negara sangat kokoh yang oleh Hadiz (2005) disebut predatoris. Relasi seperti itu bukan hanya tidak memerlukan partisipasi buruh, yang lebih penting adalah menindas dan menyingkirkannya.

Meskipun demikian, senantiasa terdapat suatu asumsi dalam wacana politik Indonesia bahwa negara adalah pelindung kepentingan umum masyarakat. Ideologi perjuangan menyingkirkan kaum kolonial sekaligus kapitalis mewarisi nilai-nilai tersebut. Jika Sjahrir pernah mengatakan bahwa “kita semua orang-orang sosialis Indonesia atau setidaknya cenderung sosialis” dan Robison yang mempelajari perkembangan kapitalisme Indonesia juga menyatakan bahwa “betapa pun hipokrit dan oportunistiknya para pemimpin Indonesia, tetapi memiliki jiwa nasionalisme yang kuat”, maka desakan agar negara mempunyai peran ekonomi dan membatasi peran pasar demi tujuan sosial, bukan tanpa dasar. Pada tingkat ideologi, nasionalisme dan keadilan sosial merupakan warisan yang kuat dan telah terbukti dalam sejarah perkembangan bangsa ini. Pandangan bahwa negara mempunyai peran

ekonomi yang sah dan mempunyai otoritas untuk mendistribusikan sumberdaya secara adil, dianut secara teguh oleh para pemimpin gerakan buruh.

Kelima, pertumbuhan pekerja di Indonesia sangat pesat selama masa industrialisasi, khususnya setelah kebijakan deregulasi tahun 1986. Pada akhir tahun 2007, jumlah pekerja formal mencapai 28.520.000 orang¹⁰³. Dari jumlah ini 83 persen bekerja di industri ringan. Jumlah buruh yang demikian besar bekerja pada klasifikasi industri yang sama, isu-isu yang berkembang di kalangan buruh hanyalah soal upah, lembur, pekerja kontrak, THR, potongan, cuti dan jaminan sosial. Isu-isu seperti ini sangat ringan dan tidak mencerdaskan buruh. Idealnya isu-isu buruh berhubungan dengan pekerjaan, perkembangan teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia. Isu demikian itu tidak muncul karena industrialisasi tidak disertai dengan pendalaman yang menunjukkan terus meningkatnya penggunaan teknologi dan produksi. Di industri ringan, upah buruh senior dan junior tidak berbeda jauh. Perbedaan hanya disebabkan oleh masa kerja dan tanggungan keluarga. Itu pun semua buruh perempuan dihitung lajang. Akibatnya upah menjadi isu utama dan realisasinya memerlukan tekanan buruh kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Totalitas gerakan buruh bersumber dari pemikiran Karl Marx. Sebagai kekuatan perubahan yang akan menggantikan sistem ekonomi kapitalis, gerakan buruh harus berorientasi kekuasaan untuk mewujudkan masyarakat komunis. Dalam pemikiran Marx, gerakan buruh adalah gerakan politik sekaligus gerakan ekonomi. Sampai pada titik ini gerakan buruh pasca Soeharto sepakat dengan Marx. Kecuali Dita Sari dengan FNPBI dan PRD, semua gerakan buruh menolak cita-cita Marx

¹⁰³ Publikasi ILO Jakarta 1 Mei 2008. Dikutip dari *Kompas* 2 Mei 2008.

untuk membangun masyarakat sosialis dan terlebih-lebih komunis. Sosialisme yang dicita-citakan adalah sosialisme demokratik atau sosialisme religius. Oleh sebab itu tidak lahir dan berkembang gagasan untuk menggantikan dasar negara Pancasila. Strategi perjuangan revolusioner juga ditolak oleh sebagian besar gerakan buruh (kecuali FNPBI), sebab strategi demikian tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia (KSBSI, KSPI, KSPSI) dan tidak sesuai dengan ajaran Islam (Gasbiindo, Sarbumusi, Gasbumi dan PPMI). Strategi yang tepat menurut mereka adalah memperkuat organisasi gerakan dengan mendisiplinkan anggota dalam membayar iuran dan mengikuti pelatihan-pelatihan, bekerjasama dengan gerakan sosial lain dan partai politik untuk merebut jabatan-jabatan politik dan mempengaruhi pemerintah agar keputusan-keputusannya tidak merugikan buruh. Posisi pemerintah sangat sentral dan supaya pemerintah tidak lagi terlalu berpihak kepada buruh, maka gerakan buruh harus kuat dengan menempatkan kadernya di legislatif, jika memungkinkan merebut jabatan Menteri Tenaga Kerja¹⁰⁴.

Di negara-negara kapitalis di mana kapitalisme secara terus menerus memodifikasi diri, konflik kelas buruh dan pemodal semakin mereda. Batas-batas kelas sosial antar keduanya juga semakin menipis ketika modal diperdagangkan di pasar modal. Demikian pula dengan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di mana penganggur dan penduduk miskin memperoleh tunjangan khusus. Pada akhirnya buruh tidak tertarik untuk melakukan perubahan radikal. Perjuangan serikat buruh di negara-negara kapitalis bukan hanya untuk mendapatkan keamanan kerja (*job security*), tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan

¹⁰⁴ Keinginan menjadi Menteri Tenaga Kerja (Mughtar Pakpahan lebih senang dengan istilah Menteri Perburuhan) merupakan cita-cita semua ketua serikat buruh. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan penulis.

upah yang diperhitungkan dengan produktivitas kerja. Oleh sebab itu majikan dan buruh bersatu memenangkan persaingan yang bukan hanya lokal tetapi juga global. Dalam perspektif demikian, kemerosotan produksi di negara kapitalis akan mengancam majikan dan buruh secara bersama. Sebab itu keduanya berkepentingan untuk menjamin produksi secara terus menerus dan memperluas pasar khususnya ke negara berkembang. Fenomena yang kemudian populer dengan sebutan globalisasi ini tidak bisa diabaikan dalam mengkaji gerakan buruh di negara berkembang.

Watak politik dari gerakan buruh di Indonesia ternyata bukan monopoli gerakan buruh kerah biru, tetapi juga para guru, dan buruh dengan ketrampilan menengah seperti para teknisi, ahli elektronika yang tergabung dalam SPMI. Garda Metal, sebuah pilar gerakan yang menopang FSPMI merupakan alat perjuangan organisasi untuk melakukan penggalangan massa dan aksi-aksi demonstrasi dalam memperjuangkan isu buruh, isu kebangsaan dan solidaritas internasional. Anggotanya dipilih dan dilatih secara khusus untuk melakukan penggalangan massa, memimpin demonstrasi, menghindari situasi *chaos* dan teknik-teknik membangkitkan semangat. FSPMI juga secara kelembagaan bekerjasama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden FSPMI adalah salah satu pengurus PKS. Para aktivis Garda Metal bekerja di lapangan secara gigih memenangkan Adang Darajatun dan Dani Setiawan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 serta Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang diusung PKS dan PAN dalam Pilkada 2008.

Kuatnya keyakinan para aktivis gerakan buruh bahwa kesejahteraan para buruh hanya mungkin dicapai melalui perjuangan para buruh, merupakan alasan lainnya, mengapa gerakan buruh tidak bisa memisahkan diri dari gerakan politik.

Sejak awal kelahirannya, gerakan buruh mempunyai cita-cita untuk memimpin perubahan sosial. Seperti yang dapat ditemukan pada pemikiran Semaoen, Sosrokardono di masa kolonial dan Muchtar Pakpahan dan Dita Sari pasca Soeharto. Namun mereka juga kurang introspeksi untuk melihat kekuatan gerakan dan melakukan penambahan kekuatan baik melalui peningkatan jumlah anggota, pendisiplinan maupun aliansi dengan gerakan sosial lain. Ciri egotisme dan oportunisme pimpinan serikat buruh telah mengandaskan cita-cita tersebut.

Di negara-negara yang menganut ekonomi dualistik, gerakan buruh di sektor industri modern cenderung menekankan fungsi tawar menawar kolektif sedangkan gerakan buruh di sektor perekonomian tradisional seperti buruh tani, buruh di perusahaan kecil, mempergunakan saluran politik dalam mengejar tujuannya (Singer, 1970: 69). Dualisme gerakan buruh merupakan konsekuensi dari dualisme sistem perekonomian. Tetapi gerakan buruh di Indonesia tidak menunjukkan pola seperti itu. Meskipun dualisme ekonomi juga berlangsung di Indonesia, gerakan buruhnya menunjukkan pola khas yaitu baik di sektor tradisional maupun modern sangat kuat kandungan ideologis politisnya. Kaum tani seperti yang dapat disimak dari pemberontakan petani tahun 1926/1927 di Banten dan gerakan Barisan Tani Indonesia sebelum 1965 menempuh perlawanan terorganisasi. Demikian pula gerakan kaum profesional seperti para guru, wartawan dan pekerja industri gula, sudah aktif berpolitik. Salah satu faktor yang mendorongnya adalah posisinya sebagai kelas menengah yang mempunyai tanggung jawab memimpin perubahan.

Aktivitas kongkrit serikat buruh adalah mengorganisasi para buruh dalam suatu industri atau suatu tempat kerja dalam tindakan bersama untuk memperbaiki gaji dan kondisi kerja serta menyelesaikan keluhan-keluhan dengan para majikan.

Aktivitas tersebut merupakan tindakan politik yang menantang kekuasaan dan pemilik kapital. Di era kolonial gerakan buruh dengan agenda seperti itu merupakan bagian penting gerakan politik yang lebih luas. Ingleson (2004:242) menemukan bahwa selama tiga puluh tahun terakhir kekuasaan kolonial terdapat banyak anggota finansial serikat-serikat buruh dari pada partai-partai politik. Serikat buruh merupakan sumber kepemimpinan yang sangat penting dan kekuatan yang paling berhasil dalam membangkitkan kesadaran politik. Meskipun gagal membangkitkan kesadaran kelas seperti yang dimaksud oleh E.P. Thompson (1968: 9)¹⁰⁵, namun melalui kegiatan kolektif berhasil dibangun kesadaran kolektif. Gerakan buruh juga merupakan agen terdepan dalam mengembangkan kesadaran politik para buruh baik sektor modern maupun pertanian dan menjaga cita-cita politik sosial ekonomi gerakan nasionalis yang lebih luas.

Pada periode selanjutnya di mana para pemimpin pergerakan menjadi elit baru negara pasca kolonial, hubungan historis dengan akar massa masih sangat kuat. Ketika sistem politik demokrasi parlementer mempertarungkan partai-partai, konflik ideologi partai menjalar sampai ke serikat-serikat buruh. Gerakan buruh menegaskan dirinya sebagai gerakan politik yang menjadi bagian integral partai-partai politik. Meskipun demikian, ideologi sosialisme tetap menjadi sumber inspirasi dan pemikiran para tokoh buruh sampai pasca Soeharto. Secara ideologis ada sedikit perbedaan dalam serikat-serikat buruh yang bangkit pasca Soeharto. Warisan SPSI mewarisi ideologi resmi Orde Baru dengan HIP. SBSI di awal berdirinya menyatakan bahwa tujuan utama serikat buruh adalah mencapai perubahan sosial

¹⁰⁵ Menurut Thompson kesadaran kelas terbentuk jika ada pengalaman yang sama, diwariskan atau pun tidak yang diartikulasikan sebagai identitas kepentingan di antara sejumlah orang sebagai lawan dari kepentingan-kepentingan lain.

ekonomi demi anggotanya. Ini paling baik dicapai melalui perjuangan non afiliasi dengan partai politik. Tetapi pada akhir tahun 1998, Muchtar Pakpahan bertekad mendirikan PBN setelah gagal melakukan tawar-menawar dengan PDIP. Pada hal anak buah Pakpahan paling gigih dalam mempertahankan kantor DPP PDI ketika diserbu aparat Juli 1996. Pasca pemilu 2004, SBSI merupakan serikat buruh yang paling dekat dengan pengusaha bersama KSPSI, meskipun demikian cita-cita SBSI adalah mewujudkan negara kesejahteraan dengan motor utama kaum buruh. Sementara berbagai gerakan buruh yang lahir dan dibidani para aktivis LSM seperti FNPBI secara terbuka mengusung gerakan revolusioner model lenin. Cita-cita FNPBI adalah mendukung PRD (Papernas) sebagai partai revolusioner dalam mencapai kediktatoran proletariat. Sayap kritis SPSI yang kemudian menjadi KSPI, mengusung ideologi sosial demokrat dengan berbagai variasinya. Pengikat massa dan cita-cita bersama yang diyakini para buruh untuk diperjuangkan, meskipun belum sepenuhnya menjadi identitas kolektif, mampu mempersatukan anggota dalam sebuah gerakan.

Serikat buruh Islam seperti Sarbumusi, Gasbiindo dan PPMI tidak mempunyai satu cita-cita. Sarbumusi merupakan perpanjangan NU dan melaksanakan keputusan-keputusan NU di bidang perburuhan. Gasbiindo di sisi lain menolak keterlibatan buruh dalam politik secara formal. Perjuangan serikat buruh dalam jangka pendek adalah perjuangan sosial ekonomi dan formula yang tepat untuk itu adalah HIP. Sedangkan PPMI jauh lebih radikal dengan mengusung diterapkannya syariat islam di Indonesia. Untuk itu PPMI bekerjasama dengan gerakan lain seperti Front Pembela Islam, Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia. PPMI yakin hanya dengan menerapkan syariat Islam, nasib buruh akan

lebih baik. Persoalan-persoalan perburuhan yang mengemuka seperti *outsourcing*, upah murah, buruh kontrak, fleksibilitas pasar, hengkangnya para investor tanpa memperhatikan nasib buruhnya serta lemahnya perlindungan buruh migran yang oleh para pimpinan gerakan diyakini sebagai agenda neoliberalisme, menempatkan sosial demokrt, sebuah ideologi yang bersemi di Jerman melalui Partai Kristen Demokrat, sebagai alternatif yang lebih baik.

Sementara para penganut teori modernisasi mengancam identitas etnik dan agama dalam gerakan buruh sebagai sisa-sisa masa lalu, gerakan buruh Islam senantiasa muncul dalam sejarah gerakan sosial baik yang menawarkan fungsi sosial ekonomi maupun sosial politik. Proyek FBSI/SPSI untuk memisahkan peran sosial ekonomi dari politik selama 25 tahun gagal. Pembentukan identitas gerakan tidak sepenuhnya mengacu kepada nilai-nilai sekunder seperti sosialisme, komunisme atau pengelompokan berdasarkan pekerjaan, tetapi masih tetap kuat mengusung identitas primer seperti wilayah, agama dan etnik. Terlepas kecaman dari teori modernisasi, munculnya gerakan buruh Islam menyumbang terbentuknya solidaritas buruh. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa keyakinan terhadap agama mendasari pemeluknya untuk memperjuangkan keyakinannya. Fungsi agama sebagai kekuatan pemersatu tidak kalah efektif jika pelanggaran hak-hak buruh berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, seperti membayar upah rendah, larangan menunaikan shalat dan kebutuhan tempat ibadah di pabrik. Bagi para elit yang kebutuhan utamanya dukungan massa, penggunaan agama dalam gerakan buruh tak dapat dipisahkan dari kemampuan agama itu sendiri sebagai sentimen yang mudah dimobilisasi. Banyaknya gerakan semacam ini dan kecilnya dampak bagi anggotanya, merupakan bukti bahwa sentimen agama dalam gerakan buruh lebih

merupakan kepentingan elit. Oleh sebab itu gerakan buruh dengan mengusung agama memainkan peran yang ambivalen dari masa ke masa.

Kuatnya keyakinan para aktivis terhadap gerakan buruh dualitas selain secara esensial gerakan dimaksudkan untuk mengejar kebutuhan ekonomi dan beberapa tarikan dan dorongan ke politik yang telah dikemukakan di atas, yang tidak kalah menarik pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Soeharto adalah peran politis penting gerakan buruh dalam membuka katub terciptanya peluang politik. Melalui pemogokan buruh yang massif sepanjang tahun 1990-an dengan menuntut hak-hak normatif, gerakan buruh mampu menciptakan terbukanya peluang politik yang lebih luas yang kemudian diambil alih mahasiswa pada tahun 1997-1998. Jauh sebelum jatuh korban dari kalangan mahasiswa, para aktivis buruh seperti Marsinah, Rusli dan Suharti telah menjadi tumbal gerakan sosial menentang represi Pemerintah. Pengorbanan mereka mempersatukan berbagai elemen buruh untuk fokus pada perubahan, yaitu mengubah kebijakan perburuhan yang lebih pro buruh. Seperti dihimpun oleh Uhlin (1998:120-121) ide-ide gerakan buruh lebih banyak muatan politik dibanding untuk kesejahteraan buruh itu sendiri. Dengan memperhatikan pertumbuhan kelas buruh, Uhlin (2000:51) menyimpulkan bahwa kelas pekerja mungkin lebih terpenggil ke arah demokratisasi. "Jika dapat dibentuk aliansi kelas yang menampung unsur-unsur progresif dari kelas menengah yang sedang tumbuh dan buruh yang terorganisir, aliansi itu akan menjadi sebuah kekuatan yang kuat secara potensial bagi demokrasi". Kesimpulan ini perlu dipertanyakan, sebab buruh bukan kekuatan terdepan dalam menjatuhkan Soeharto dan gerakan buruh tidak mampu mengawal agenda reformasi perburuhan. Selain secara internal mengalami perpecahan serius, lingkungan politik pasca Soeharto masih tidak menguntungkan

bagi perkembangan gerakan buruh yang kuat dan efektif. Gerakan buruh militan, *genuine* dan efektif akan secara resmi disamakan dengan ancaman munculnya kembali komunisme¹⁰⁶.

Kebangkitan gerakan buruh yang dipelopori oleh LSM perburuhan pada awal tahun 1990-an juga menegaskan kembalinya gerakan buruh politik. LSM yang merupakan wadah intelektual muda, berdedikasi dan mempunyai pandangan politik yang berseberangan dengan birokrasi dan militer, menjadi kekuatan terdepan dalam mengkritik pelanggaran HAM termasuk di kalangan buruh. Agenda utama gerakan ini adalah memperjuangkan dihormatinya HAM di semua bidang kehidupan. Pengalamannya bersentuhan dengan para korban PHK, membawa gerakan ini ke praksis, yaitu membela, memberdayakan dan menyadarkan hak-hak buruh. Kebutuhan dari para aktivis LSM untuk memelihara pertentangannya dengan kekuasaan, memprioritaskan gerakannya di aras nasional. Tidak sampai satu dekade, pertumbuhan LSM perburuhan demikian cepat dan melakukan penajaman penggarapan, sehingga basis gerakan juga semakin kompleks. Misalnya buruh perempuan, buruh migran, buruh anak-anak dan sebagainya.

Fakta bahwa LSM perburuhan menjadi motor bangkitnya gerakan buruh, menjelaskan mengapa gerakan buruh tidak berada di barisan depan dalam menjatuhkan Soeharto. Berbeda dengan gerakan mahasiswa yang lebih *genuine*, LSM perburuhan memiliki sedikit anggota yang benar-benar sebagai buruh. Akibat krisis keuangan sejak akhir 1996, buruh merupakan kelompok dalam masyarakat yang paling terpukul. Berita krisis ekonomi dan rencana beberapa perusahaan yang

¹⁰⁶ Keluhan para aktivis buruh yang mencoba membangun gerakan buruh yang efektif dan fokus pada perjuangan sosial ekonomi yang mengemuka dalam diskusi bertema "Kembalinya Gerakan Buruh Politik" di YTKI Jakarta diselenggarakan oleh Trade Union Right Center (TURC) 4 April 2008.

akan melakukan PHK, menahan para buruh untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan perusahaan. Belum terbukanya struktur peluang politik dan penindasan para aktivis buruh sejak tahun 1992 sampai 1996, menyebabkan buruh kehilangan kepemimpinan gerakan. Sejumlah pemimpin buruh berada di penjara. Namun sejak akhir Mei 1998, buruh merupakan massa yang paling siap dimobilisasi oleh karena pengalamannya melakukan pemogokan dan tinggal di komunitas pabrik yang mudah dihubungi. Oleh sebab itu keterlibatan buruh dalam demonstrasi bersama mahasiswa pada tahun 1999 dan tahun 2000, sangat tinggi.

Kondisi tersebut memperkuat dualitas gerakan buruh di Indonesia pasca Soeharto. Terlebih-lebih dengan gerakan politik, buruh telah berhasil memenangkan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah dan pengusaha. *Pertama*, gerakan buruh yang dilakukan dengan demonstrasi berhasil menggagalkan diundangkannya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan. Undang-undang ini disiapkan oleh Menaker Abdul Latif yang menunggalkan semua aturan ketenagakerjaan. Pemerintah dan DPR telah sepakat isi rancangan undang-undang bahkan Presiden telah menandatangani. UU ini menimbulkan kecaman dan tantangan dari para aktivis buruh karena pemogokan hanya diijinkan dalam areal perusahaan, setelah mendapat ijin dari pemerintah dan majikan. Selain itu para buruh yang terlibat pemogokan tidak berhak mendapat upah. Tuntutan para aktivis buruh untuk memberikan kebebasan berserikat, tidak diakomodasi dalam UU tersebut. Penolakan mulai dilancarkan para buruh ketika kekuasaan Soeharto telah melemah dengan berlangsungnya pertarungan elit. Tetapi krisis ekonomi dan mudahnya ketentuan PHK, menakutkan para buruh untuk bergerak menolak UU tersebut. Aksi penolakan mendorong Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2000

344

tentang Perubahan atas UU No. 1/1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25/1997. Perpu tersebut menetapkan berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 mulai 1 Oktober 2002¹⁰⁷.

Kedua, keberhasilan para buruh memaksa pemerintah membekukan SK Menaker 06/Men/1998 tentang Upah Minimum. Upah minimum di Jakarta berdasarkan SK tersebut sebesar Rp 198.500 setara dengan US\$ 14,10. KUM (Ketentuan Upah Minimum) tersebut ditolak para buruh melalui demonstrasi besar-besaran yang melumpuhkan Jakarta, Tangerang dan Bekasi pada 1 Juli 1998 yang untuk pertama kalinya diperingari Hari Buruh setelah tahun 1965. Para buruh mendapat KUM baru naik 15 persen dari yang lama di bawah Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Namun tuntutan para buruh terus meningkat karena KUM baru hanya mencapai 95 persen Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Pada hal KFM masih menempatkan buruh di bawah garis kemiskinan. Di bawah kepemimpinan SBSI dan PPBI, gerakan buruh menuntut kenaikan upah sebesar Rp 500.000 per bulan. Jakarta dan kota-kota industri lainnya hampir lumpuh oleh demonstrasi para buruh yang berlangsung hampir setiap hari. Secara mengejutkan Presiden Habibie membebaskan semua tahanan politik dan Menaker mengeluarkan Surat Keputusan No. 5 tahun 1998 mengenai Pendaftaran Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang memberi kebebasan berserikat bagi buruh. Kebijakan ini disambut antusias para aktivis buruh dan dianggap sebagai keberhasilan dalam menekan pemerintahan B.J. Habibie.

¹⁰⁷ Undang-Undang ini akhirnya tidak pernah diberlakukan, sebab para buruh melalui SP dan SB menolak dengan keras. Penolakan dipelopori oleh PPBI dan SBSI. Sejak awal tahun 2001 pemerintah menerima usulan serikat-serikat buruh dalam menyusun RUU yang baru. Apalagi terbongkar skandal Jamsostek di mana uang para buruh itu digunakan untuk membiayai penyusunan UU No. 25 tahun 1997.

Ketiga, dicabutnya Kepmenaker No. 78/2001 yang semula dimaksudkan untuk menggantikan Kepmenaker No. 150/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Kepmenaker tahun 150/2000 mewajibkan pengusaha memberikan pesangon dan penghargaan bagi pekerja yang mengundurkan diri, termasuk pekerja yang melanggar peraturan. Ketentuan ini ditolak oleh pengusaha sebab sangat memberatkan (*Kompas*, 8/8/02). Sementara para aktivis buruh berusaha membentengi ketentuan tersebut dengan memasukkannya dalam RUU Ketenagakerjaan. Para investor menilai bahwa ketidakpastian peraturan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor utama mereka berinvestasi di Indonesia. Osamu Watanabe Chairman and CEO JETRO mengeluhkan dua persoalan penting investasi yaitu perijinan dan ketidakpastian aturan ketenagakerjaan (*Kompas*, 24/10/2005). Berbagai lobi dilakukan oleh para pengurus APINDO dan KADIN untuk kembali ke Kepmenaker 78/2001, tetapi kalah oleh demonstrasi buruh yang mengepung kota-kota industri pada Juni-Juli tahun 2001.

Keempat, penyusunan RUU oleh Serikat Buruh. Setelah UU No. 25/1997 dinyatakan ditunda pemberlakuannya, Pemerintah mengundang kembali UU No. 22/1957 dan UU No. 12/1964 untuk mengisi kekosongan hukum. Namun perlunya reformasi hukum ketenagakerjaan mendorong serikat-serikat buruh menyusun RUU Ketenagakerjaan dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Sebanyak 22 serikat buruh yang tergabung dalam Komite Anti Penindasan Buruh (KAPB) membuat draf RUU dan menolak draf yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR sebab menilai bahwa RUU Pemerintah berpihak ke pengusaha. Ketentuan mengenai *outsourcing*, perjanjian kerja waktu tertentu, pengupahan, uang pesangon dan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam draf pemerintah,

butir-butir tersebut sengaja melemahkan buruh dengan maksud menarik investasi sebanyak mungkin. Sebaliknya dalam draf yang disusun serikat buruh, posisi pekerja diperkuat dalam butir-butir tersebut, sehingga pengusaha sangat sulit melakukan PHK. Draft yang diajukan serikat buruh menunjukkan bahwa keamanan kerja, kepastian pengupahan, perlindungan buruh yang menjadi anggota serikat pekerja dan kebebasan pekerja menyuarakan kepentingannya, lebih diutamakan.

Kelima, keberhasilan gerakan buruh menggagalkan amandemen undang-undang No. 13 tahun 2003. Undang-undang ini sejak pemnyusunannya tahun 2002 terus menerus diprotes para buruh. Komite Anti Penindasn Buruh (KPAB) yang beranggotakan 22 serikat buruh tingkat nasional antara lain FNPBI, KASBI dan SBJ menolak RUU Ketenagakerjaan karena RUU tersebut semakin memproteksi hak mogok kerja, melegalkan pekerja *outsourcing* dan mengizinkan penerapakan kontrak kerja waktu tertentu (KKWT) (*Kompas*, 8 Pebruari 2003). RUU Ketenagakerjaan dinilai oleh para pengamat hukum perburuhan berpihak ke investor. Rita Olivia dan Surja Tjandra dari LBH Jakarta menyatakan bahwa terdapat 56 pasal yang kontroversal dan melemahkan buruh, seperti pembatasan mogok, penutupan perusahaan (*lock out*), pengaturan pemborongan pekerjaan (*outsourcing*), kerja lembur, perjanjian kerja waktu tertentu dan upah selama mogok kerja (*Tabloid Kontan*, 2 September 2002). RUU tersebut akhirnya disetujui DPR dan diundangkan menjadi UU No. 13 Tahun 2003, meskipun ribuan buruh berdemonstrasi selama 2 hari di Jakarta dan menduduki gedung DPR dan Kantor Depnakertrans. Masalahnya, Menaker mendapat dukungan dari 4 serikat buruh besar yaitu KSPSI, KSBSI, SPSI Reformasi dan KSPI. Menaker Jacob Nuwa Wea justru menyebut para demonstnan

sebagai “itu bukan buruh, tetapi orang-orang di pinggir jalan yang diupah untuk berdemonstrasi” (*Tabloid Kontan*, 2 Pebruari 2002).

Pemerintah pada awal tahun 2006 berencana merevisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Revisi ini diperlukan sebab menurut Menakertrans Erman Suparno, UU tersebut sangat memberatkan pengusaha, menakutkan para investor dan tidak memberi peluang penciptaan lapangan kerja. UU hanya berpihak kepada buruh formal dan kurang memfasilitasi para pencari kerja (*Kompas*, 17 Maret 2006). Rancangan revisi yang mencakup 21 butir antara lain penghilangan perlindungan negara bagi pekerja dengan mewajibkan pemberi kerja memberi perlindungan mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan mental maupun fisik. Pekerja asing juga tidak dibatasi untuk menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan. Selain itu, outsourcing akan diijinkan untuk semua jenis pekerjaan dan masa kontraknya diperpanjang dari 2 tahun menjadi 5 tahun. Buruh dapat dipecat karena ikut mogok yang tidak disetujui pengusaha. Merespon rancangan revisi ini, serikat buruh lokal Tangerang membentuk Afiliasi Kongres Serikat Pekerja Indonesia (AKSPI) dan mengepung gedung DPR dan Kantor Menakertrans selama 3 hari penuh. Berbeda dengan tahun 2003, pada tahun 2006 ini KSPI terpecah di mana SPN dan FSPMI menolak revisi. FNBPI dengan keras menolak revisi bahkan menuntut UU tersebut dicabut dan diganti yang baru. Sementara SBSI dan KSPSI mendukung rencana pemerintah merevisi UU tersebut.

Di daerah-daerah, pemerintah mendukung buruh seperti di Batam, Surabaya, Makasar, Medan dan Bandung. Pemerintah daerah khawatir, revisi akan meminggirkan pekerja lokal yang semakin sulit mendapatkan pekerjaan (*Koran Tempo* 6/4/2006). Di Lampung dan Pangkal Pinang, para buruh sepakat memboikot

pemilihan kepala daerah jika revisi dilanjutkan (*Kompas*, 6/4/2006). Revisi dinilai oleh Dita Sari dan Dominggus sebagai desakan kapitalis internasional untuk semakin leluasa menguasai perekonomian Indonesia. Sementara Indonesia hanya berkesempatan menjadi pekerja kontrak, nyaris seperti perbudakan modern¹⁰⁸. Presiden SBY akhirnya meminta para buruh mengabaikan draf revisi dan berjanji akan mendengar aspirasi para buruh. “Tidak mungkin negara atau pemerintah membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Persepsi semacam itu keliru” (*Kompas*, 9 April 2006).

Dualitas gerakan buruh pasca Soeharto mengembalikan kepercayaan para pimpinan gerakan buruh bahwa gerakan ekonomi tidak akan berhasil tanpa disertai gerakan politik. Watak politik yang sangat melekat di berbagai level gerakan sejak masa kolonial gagal dihentikan oleh proyek “massa mengambang” dengan tujuan “rakyat akan menyibukkan dirinya dalam usaha-usaha pembangunan”. Industrialisasi, pertumbuhan ekonomi dan kelahiran kelas menengah baru, ternyata tidak berhasil menghapus ingatan terhadap sejarah pergerakan. Kerusuhan sebagai produk deorganisasi dan depolitisasi, merupakan gerakan jenis lain yang tetap bernuansa politis. Kebangkitan dan perlawanan buruh terhadap otoritarian di era industrialisasi yang dipelopori kaum intelektual melalui LSM, menegaskan bahwa kelas bawah memerlukan kepemimpinan kelas menengah. Prestise para aktivis yang terdongkrak naik seiring dengan keberhasilannya menekan pemerintah, juga memperkuat keyakinan bahwa gerakan buruh di Indonesia tidak bisa membebaskan diri dari politik.

¹⁰⁸ Wawancara melalui telepon 1 Mei 2008 ketika mereka sedang mempersiapkan peringatan May Day.

Tidak berlangsungnya pendalaman industri menyebabkan tidak meningkatnya ketrampilan buruh, sehingga pengorganisasian gerakan berdasarkan jenis industri tidak berkembang. Investasi lebih banyak di sektor industri ringan, yang sedikit memerlukan teknologi. Komposisi buruh di industri manufaktur ringan mencapai lebih dari 75 persen dengan persoalan utama upah, THR, kebebasan berserikat, keamanan kerja, *outsourcing* dan PKWT. Tidak lahir gerakan buruh yang mempersoalkan alih teknologi (*transfer of technology*) untuk memperkuat basis industri dan dengan demikian juga meningkatkan ketrampilan buruh. Kondisi ini membawa fragmentasi gerakan tidak mengikuti deferensiasi industri, melainkan agama, *onderbouw* partai dan aliran pemikiran. Akibat lebih lanjut adalah kuatnya kandungan ideologis politis gerakan buruh untuk secara terus menerus mempersoalkan kebijakan publik dan pemodal.

E. Kelemahan Gerakan Buruh

Bagian ingin menjelaskan lingkungan gerakan buruh pasca Soeharto yang berimplikasi pada lemahnya gerakan buruh. Argumen pokok di sini adalah bahwa sejak masa kolonial hingga pasca Soeharto lingkungan ekonomi-politik tidak kondusif bagi tumbuhnya gerakan buruh yang kuat. Terutama pada masa Soeharto dan pasca Soeharto, elit tidak memerlukan partisipasi buruh. Pasca Soeharto, negara dan modal masih sangat kuat dan menolak keterlibatan kelas bawah dalam proses politik. Selain disorganisasi *civil society*, depolitisasi dan demobilisasi massa yang merupakan warisan Soeharto masih cukup kuat, elit yang lahir juga masih didominasi oleh binaan Soeharto yang berkepentingan menguasai negara dan menjauhkannya dengan *civil society*.

Dualitas Gerakan buruh yang memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik berlangsung dalam lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuhnya gerakan buruh yang efektif. Gerakan buruh lahir dan mengalami pertumbuhan dalam kapitalisme negara, baik semasa penjajahan Belanda maupun era setelah nasionalisasi perusahaan asing. Masa interregnum Demokrasi Liberal yang singkat ditandai dengan perpecahan serius partai-partai politik dan *civil society* lainnya. Sebagian karena euforia kemerdekaan, sebagian lagi adalah pencarian identitas dan bangkitnya kekuatan-kekuatan yang terus bersaing untuk menguasai negara pasca kolonial. Kekuasaan negara yang tidak terkonsolidasi dan kekosongan kaum borjuasi nasional yang tangguh, merupakan lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya gerakan buruh yang militan, *genuine* dan terorganisasi dengan efektif.

Gerakan buruh yang berkembang subur di era Soekarno itu merupakan kelanjutan dari gerakan buruh masa kolonial. Watak radikal dari gerakan-gerakan tersebut bukan hanya ditunjukkan dalam ideologi yang anti materialisme, individualisme dan kapitalisme, tetapi juga oleh laskar-laskar dan front buruh. Sementara basis sosial gerakan sangat sempit akibat tidak berkembangnya industrialisasi, kandungan ideologis dan watak radikal (sebagian karena saling berlomba revolusioner), mewujud dalam aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Aksi ini direbut oleh militer yang kemudian berhasil membangun kepentingan mereka sendiri sebagai sumber ekonomi dan penindasan gerakan buruh yang radikal dan militan. Gagasan dan kepeloporan nasionalisasi yang semula di tangan SOBSI, diambil alih oleh militer yang membangun persekutuan dengan buruh melalui apa yang dikenal sebagai Badan Kerjasama Buruh Militer (BKS Bumil).

Berbeda dengan Soekarno yang menunjukkan sikap anti imperialisme, individualisme dan kapitalisme melalui mobilisasi massa dan pembangunan kekuatan-kekuatan revolusioner/radikal, Soeharto meskipun mewarisi nasionalisme Soekarno, tetapi anti aksi massa apalagi radikal dan revolusioner. Sebaliknya, ia mengembangkan sebuah sistem yang berakar pada pemikiran kekuasaan Jawa, di mana ketertiban dijunjung tinggi. Aksi-aksi massa dan protes sebagai perilaku aib yang mempermalukan pimpinan, sehingga perlu dideteksi dan ditindas sedini mungkin. Selama kekuasaan Soeharto, rakyat Indonesia merupakan “massa mengambang” yang memusatkan energinya pada pembangunan ekonomi. Soeharto membanting stir ke kanan dengan mengedepankan kontrol oleh aparat negara untuk memelihara ketertiban politik melalui depolitisasi dan demobilisasi massa. Penindasan gerakan sosial dilakukan sepanjang masa pemerintahannya dan tidak sedikit memakan korban jiwa.

Penghancuran gerakan massa kiri melalui pembunuhan massal tahun 1965-1967, mengawali usaha menciptakan tertib politik yang dikendalikan oleh pusat kekuasaan. Peristiwa ini merupakan peringatan paling mengerikan bagi siapapun untuk membangun gerakan menentang kekuasaan terlebih-lebih bagi kaum buruh. Mental dan psikologi gerakan dimatikan dengan menghancurkan semua elemen yang potensial menentang kekuasaan dengan stigma komunis. Pemerintah membangun sendiri model pengorganisasian masyarakat yang menjamin homogenitas elite, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan massa dan ketertiban sosial. Berbagai gerakan yang mencoba mengembangkan ide-ide alternatif di luar arus utama, dikontrol agar tidak berkembang dan membesar. Jika resiko sosial politiknya besar, gerakan dikooptasi dengan memberikan berbagai fasilitas, sebaliknya jika resikonya kecil,

dihancurkan agar tidak mengancam homogenitas elite, pertumbuhan ekonomi dan ketertiban sosial.

Setelah Soeharto dipaksa turun tahun 1998, struktur dasar kekuasaan yang dibangunnya tidak serta merta menghilang. Melalui kader-kadernya yang sangat kuat dalam birokrasi sipil dan militer serta kelas menengah usahawan yang telah dibinanya selama puluhan tahun, bangun politik Orde Baru masih sangat kokoh. Golkar dengan sedikit modifikasi masih terus bertahan dan kekuatan reformis masih memberi waktu 6 tahun “Dwi Fungsi ABRI”. Ini membuktikan betapa kekuatan reformis sangat lemah dan tidak padu dalam mengisi kekuasaan yang ditinggalkan Soeharto. Ketakutan terhadap represi militer yang sewaktu-waktu terjadi dalam menghadapi mobilisasi massa dan persaingan tidak sehat antara kelompok-kelompok oposisi, menyebabkan lambatnya agenda reformasi dijalankan. Selain itu kekuatan reformis terbatas pada kaum urban kelas menengah yang sempit dan enggan mengajak kekuatan bawah seperti buruh. Ini membuktikan bahwa warisan “massa mengambang” masih demikian kuat. Ketika buruh menggabungkan diri dengan mahasiswa radikal, gerakan mahasiswa segera terpecah ke dalam beberapa elemen. Elemen dominan, seperti Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) dan Forum Salemba, menolak kerja sama dengan buruh. Gerakan mahasiswa radikal seperti Forum Kota yang mampu mengajak kekuatan buruh, ditolak oleh Kelompok Ciganjur.

Berbeda dengan gerakan mahasiswa di Korea Selatan dan Thailand yang membangun aliansi dengan kekuatan agama, buruh, petani dan kaum miskin kota, gerakan mahasiswa di Indonesia mengesampingkan aliansi dengan kelas bawah dan kekuatan agama. Dengan demikian kaum buruh tidak punya pilihan lain kecuali

membangun gerakan di luar arus utama (gerakan reformasi). Hal ini tentu menyulitkan atau minimal memperlambat keberhasilan gerakan buruh di Indonesia. Crain Brinton (1960) ketika menggagas energi intelektual sebagai pelang jalan gerakan buruh tidak membayangkan persoalan ini. Gerakan mahasiswa terdepan menolak keterlibatan kaum buruh dalam aksi-aksi mereka karena mudah digebuk oleh tentara yang waktu itu masih sangat kuat. Sebab gerakan buruh di negeri ini identik dengan kebangkitan kekuatan kiri¹⁰⁹. Jika buruh tampil ke depan, maka tentara akan memukulnya untuk “menyelamatkan Pancasila dari ancaman komunis”. Hal ini mudah mendapatkan dukungan kelas menengah yang telah menikmati pembangunan ekonomi. Kuatnya pandangan semacam itu juga keengganan kelompok Ciganjur menunjukkan betapa usaha keras Soeharto untuk mendisorganisasi *civil society* sangat berhasil.

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian depan tulisan ini, terdapat kontinuitas kekuatan Orde Baru pasca Soeharto. Kerangka politik Orde Baru masih sangat kuat yang dapat dilihat dari birokrasi, militer dan modal yang masih menentukan arah perubahan sosial. Naiknya *strategic elite* ke *ruling elite*, mengikuti metode sirkulasi elit dari Suzane Keller (1984), mempertontonkan perebutan sumberdaya yang semula dikuasai oleh militer dan birokrasi. Modal secara perlahan-lahan mulai dibawa lari ke luar negeri, khususnya Cina, Singapura dan Swis. Keluarga-keluarga bisnis yang lahir dari rahim negara telah demikian *mobile* berkat kemampuan finansialnya dan menjadi pemain internasional. Sementara beberapa aset

¹⁰⁹ Pernyataan Ray Rangkuti dan Sarbini tokoh-tokoh FSMJ dalam diskusi “Refleksi Gerakan Mahasiswa Indonesia” diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi Universitas Nasional 26 Juli 2003.

yang ditinggalkan dan dikelola oleh BPPN (Badan Penyelenggara Perbankan Nasional), menjadi rebutan partai politik dan anggota DPR yang menjadi penjarah baru.

Selain lebih sedikit nasionalis, populis dan permainan politik uang (*money politic*) yang transparan, elit politik dan ekonomi yang lahir pasca Orde Baru tidak ada bedanya dengan yang digantikannya. Negara masih tetap dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan politik birokratis dan bisnis. Semua partai politik besar yang memenangkan pemilihan umum 1999 adalah partai-partai Orde Baru. Para pengurus PDIP, PAN, PKB dan PPP dengan sedikit pengecualian adalah anggota jaringan patronase Soeharto, seperti pensiunan jenderal, “kutu loncat” dari Golkar, pebisnis yang dibesarkan negara, ulama dan tuan tanah pedesaan dan aktivis Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sebuah organisasi kelas menengah islam yang didirikan oleh B.J. Habibie dan mendukung Soeharto pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya. Kelompok-kelompok kelas menengah baru tersebut memiliki “dendam sejarah” dengan gerakan buruh, sehingga tidak mungkin melibatkan buruh dalam gerbong yang mereka tarik. Sebaliknya, mereka justru memiliki kepentingan yang sama untuk mengamankan posisi mereka sebagai anggota elit ekonomi dan politik baru dengan lebih leluasa menyingkirkan barisan akar rumput.

Dalam lingkungan ekonomi politik seperti itu lah gerakan buruh pasca Soeharto berkembang. Dapat dipahami jika gerakan buruh yang berkembang sangat lemah. Secara lebih rinci identifikasi kelemahan buruh dapat dikemukakan di bawah ini yang mencakup aspek historis, internal gerakan, relasi antar gerakan, pergerakan modal dan rejim-rejim yang muncul pasca Soeharto.

Pertama, stigmatisasi komunis. Gerakan buruh di Indonesia tumbuh kuat dalam ideologi politik komunisme. Baik kelahirannya tahun 1908 (VSTP) maupun

perkembangannya (dalam SOBSI) gerakan buruh tidak bisa dipisahkan dengan komunisme. Akhirnya pembantaian massal tahun 1965-1967 oleh militer, Pemuda NU dan Pemuda Muhammadiyah yang menewaskan lebih dari 500 ribu dan penangkapan sekitar 2 juta orang yang dicurigai ada hubungannya dengan komunisme, mengakhiri gerakan sosial berorientasi kiri. Keluarganya dan sanak saudara yang dicurigai ada hubungannya dengan PKI dan organisasi *onderbouwnya*, dipastikan mengalami kesulitan sosial ekonomi. Sepanjang sejarah Orde Baru proyek penting untuk mengawasi kelompok kiri terus dilakukan, seperti Kewaspadaan Nasional, Bersih Diri dan Bersih Lingkungan, dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Keterlibatan intensif NU dan Muhammadiyah dalam pembantaian massal, mendorong dua organisasi islam yang sangat besar ini bertindak defensif dan seringkali ofensif terhadap kekuatan kiri. Dalam bidang hukum, terdapat 21 produk hukum yang melarang ajaran kiri dan mencegah partisipasi dalam bidang politik, pendidikan, hukum dan persuratkabaran. Pasca Soeharto stigma komunis terhadap gerakan buruh masih sangat kuat. Usaha untuk membangun identitas kolektif kemudian menjadi problem tersendiri dalam gerakan buruh. Terdapat gerakan yang secara tegas mengusung sosialis demokratik, islam, Pancasila (HIP) dan revolusioner kerakyatan.

Tidak kalah peliknya adalah munculnya paramiliter yang melakukan kekerasan terhadap buruh. Para militer yang umumnya tergabung dalam Front Pembela Islam (metamorfosis dari Pam Swakarsa), Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Keluarga Betawi, *Jawara* dan beberapa nama lokal lainnya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan militer karena desakan reformasi. Pam Swakarsa sendiri tidak bisa dipisahkan dari militer pada tahun 1998 ketika mengusir mahasiswa

dari gedung DPR/MPR. Gejala ini menggemakan kembali tesis Wertheim (1964, 1993, 2008) bahwa kesulitan utama terbangunnya kesadaran kelas di Indonesia adalah persoalan kultural seperti agama, ras, etnik dan jaringan patronase. Bahkan belum sampai terbentuk kesadaran kelas, usaha untuk membangun solidaritas antar kelas bawah sudah dihadang oleh persoalan kultural tersebut¹¹⁰. Para militer yang tampil dengan selubung kultural, sangat menyulitkan pertumbuhan gerakan buruh. Di Tangerang tidak sedikit pemukulan dan pembubaran pemogokan buruh oleh *Jawara*. Demikian pula yang dilakukan oleh FBR dan FORKABI di pinggiran Jakarta. Cukup ironis sebab organisasi lokal dan keagamaan ini meneriakan kecaman terhadap kebangkitan komunis dan komunis gaya baru. Seringkali beberapa anggota FPI juga bergerak menentang demonstrasi buruh dengan selubung Komando Anti Komunis (KAK).

Worker Right Concoortium (WRC) yang berpusat di Washington melakukan pengecekan terhadap laporan buruh PT Dae Joo Leports (Indonesia) yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda Jakarta Utara atas penganiayaan sejumlah buruh oleh preman dalam aksi mogok menuntut kenaikan upah Juli 2002. Kesimpulannya adalah bahwa laporan sejumlah buruh benar-benar terbukti. Pimpinan perusahaan menggunakan sejumlah preman yang dipimpin oleh seorang pensiunan Angkatan Darat untuk menghentikan pemogokan. Pemimpin pemogokan dari FNPBI dikeroyok dan dianiaya serta ditahan polisi. Sementara tidak satu pun dari preman tersebut yang ditahan polisi¹¹¹. Para preman menggunakan jaket

¹¹⁰ Pada Juni 2006 masyarakat miskin kota Jakarta yang diorganisasi *Urban Poor Consortium (UPC)* menolak pengusuran pedagang kaki lima dan rumah-rumah liar di bawah jalan tol. Ketika mengadu ke Komnas HAM, diserbu oleh FBR. 2 orang luka parah dan 3 orang luka ringan. Belakangan diketahui bahwa ada keterlibatan Wakil Gubernur Jakarta dalam FBR.

¹¹¹ www.workersrights.org diunduh tanggal 8 Juni 2004.

bertuliskan "The Forum". Sejumlah perusahaan di Bekasi juga menggunakan preman untuk menjaga pabrik agar para buruh tidak masuk. Pabrik tersebut dinyatakan bangkrut dan sedang dalam proses penjualan (Tempo Interaktif, 3 Mei 2003).

Kedua, sumberdaya gerakan. Persoalan internal gerakan buruh adalah lemahnya sumberdaya dan kesadaran berorganisasi. Kecuali anggota FSPMI, rata-rata buruh tidak membayar iuran. Untuk anggota KSPSI pembayaran iuran melalui *check off*, tetapi maksimal 50 persen dan KSBSI hanya 60 persen. Serikat buruh lain partisipasinya di bawah 30 persen. Pada hal iuran merupakan urat nadi organisasi. Kondisi ini menyebabkan gerakan buruh tidak mampu menjalankan program-programnya. Ketergantungan terhadap serikat buruh internasional cukup besar. Sumberdaya manusia juga lemah. Rata-rata anggota yang berpendidikan tinggi enggan menjadi pengurus serikat buruh. Meskipun untuk tingkat Pusat, pengurus inti rata-rata berpendidikan sarjana, tetapi di daerah, cabang dan plan level, masih didominasi sekolah menengah (atas dan pertama). Pada hal rata-rata mereka bukan pimpinan di perusahaannya, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar dibanding manajer. Keberanian, kepedulian dan solidaritas dengan kolega yang menempatkan mereka sebagai pimpinan gerakan. Akibatnya ketrampilan berorganisasi dan bernegosiasi juga lemah.

Partisipasi buruh dalam gerakan juga rendah. Dari 28,5 juta pekerja formal di Indonesia akhir tahun 2007, hanya sekitar 10 juta buruh atau 35 persen yang menjadi anggota serikat buruh. Penyebabnya adalah sistem kerja kontrak dan kriminalisasi¹¹². Sejak berlakunya UU No. 13 tahun 2003 yang melegalkan kerja kontrak (prakteknya diterapkan di semua jenis pekerjaan), jumlah anggota serikat pekerja terus menurun.

¹¹² Wawancara dengan Said Iqbal (FSPMI) dan Rekson Silaban (KSBSI)

Jumlah anggota KSBSI misalnya pada tahun 2000 sekitar 2 juta orang dan pada akhir tahun 2007 tinggal 1.750.000 buruh. Para buruh takut menjadi anggota serikat buruh sebab peluangnya semakin kecil untuk diangkat sebagai buruh tetap. Selain itu jika diketahui manager, maka kontrak kerjanya tidak diperpanjang pada tahun berikutnya. Masalah lain adalah tingginya kriminalisasi. Para buruh tidak banyak yang berani mengambil resiko berhadapan dengan preman. Tidak jarang rapat buruh dibubarkan dan para buruh dianiaya dengan alasan yang tidak jelas. Modus lain adalah mengadakan aktivis buruh perusahaan ke polisi dengan tuduhan melakukan perkelahian di pabrik. Pengusaha membayar preman untuk memancing keributan dengan pimpinan serikat pekerja dan melaporkannya ke polisi. Anehnya, polisi memproses laporan tersebut dan menahan pimpinan serikat buruh¹¹³.

Ketiga, industrialisasi yang luas tanpa pendalaman. Industri padat karya tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi. Pada akhirnya upah buruh ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Di beberapa wilayah industri terbentuk komunitas-komunitas buruh dengan isu yang dangkal. Pendidikan buruh yang semakin meningkat tidak relevan dengan pekerjaannya, sehingga menjadi buruh bukan pekerjaan yang mencerdaskan dan berprospek cerah. Kerja manusia seperti mesin terlebih-lebih dalam pekerjaan yang terpecah-pecah, setelah sekian lama bekerja seorang buruh tidak mengalami peningkatan ketrampilan (Babage, 1984:87). Lingkungan kerja seperti ini merupakan proses pembodohan dan eksploitasi buruh karena tidak muncul isu-isu pekerjaan, karir dan pengembangan kualitas SDM. Mobilitas vertikal hanya dimungkinkan melalui dua cara, yaitu ketaatan kepada pengusaha atau ikut dalam gerakan yang dapat memperkuat posisi tawarnya.

¹¹³ www.workersrights.org diunduh tanggal 8 Juni 2004

Perkembangan gerakan buruh tidak dibimbing oleh perkembangan teknologi dalam industri. Akibatnya yang muncul adalah dualitas gerakan buruh yang seringkali lebih kuat kandungan ideologis politiknya. Menyimak perkembangan di negara industri baru seperti Korea Selatan, terdapat perubahan secara bertahap dari *general union* ke *industrial union* seiring dengan berlangsungnya pendalaman industri (Hyun Seog Yu, 1993:273). Dalam *industrial union*, gerakan buruh lebih dibimbing oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan akan aplikasinya sehari-hari. Upah buruh berhubungan dengan produktivitas dan resiko pekerjaan. Jika hal ini berlangsung di Indonesia, fragmentasi gerakan buruh akan lebih mengikuti jenis-jenis industri dan memperkuat gerakan buruh. Meskipun demikian dualitas gerakan buruh masih akan bertahan dalam waktu yang cukup lama, tetapi dengan pergeseran ke ekonomi secara berarti.

Keempat, lemahnya aliansi antar gerakan buruh dan dengan kelas menengah. Penguatan gerakan buruh tidak bisa dilakukan oleh buruh itu sendiri. Dalam usaha secara terus menerus melakukan penambahan sumberdaya gerakan, sebuah gerakan harus membangun aliansi dengan gerakan lain terutama kelas menengah (Hans Dieter Evers, 1990:16). Di antara kekuatan-kekuatan sosial, buruh merupakan kekuatan yang paling sulit terintegrasi dalam aliansi baik masa Soeharto maupun sesudahnya. Pada masa Soeharto, jelas bahwa buruh merupakan musuh utama dengan stigma komunis. Kelas menengah¹¹⁴ menolak kerjasama dengan buruh, sebab kelas menengah tidak memerlukan perubahan. Meskipun terdapat

¹¹⁴ Kelas menengah diartikan secara luas seperti yang dikemukakan oleh Robison (1993:140) "istilah ini biasanya diartikan sebagai suatu kelas yang mencakup kelompok-kelompok sosial yang berkembang yang dianggap berada di antara buruh dan petani atau "kelas bawah" di satu pihak dan "kelas yang berkuasa" apakah itu feodal atau kapitalis. Kelas menengah dalam pandangan ini memiliki ketrampilan, relatif kaya dan memiliki nilai-nilai individualisme, materialisme, sekulerisme dan rasionalisme.

sebagian anggota kelas menengah yang kritis terhadap kekuasaan dan modal, sebagian besar dari mereka yang terdiri dari pejabat, manager, kalangan profesional dan intelektual yang merupakan fungsionaris ideologi, sosial, ekonomi dan politik dari kapitalisme yang merupakan produk unik sistem kapitalisme Indonesia, mereka lebih bergantung pada pelestarian kapitalisme di Indonesia (Robison, 1993:147; 1998:108).

Sementara antar sesama gerakan buruh berlangsung fragmentasi yang mempersulit pembentukan agenda perubahan dari gerakan ini, hubungan dengan kekuatan-kekuatan utama reformasi dan pasca reformasi tidak membaik. Bagaimanapun kaum borjuasi dan birokrat sipil dan militer yang kemudian memasuki partai-partai dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah mereka yang dibesarkan oleh negara dan menikmati fasilitas negara. Dari mereka tidak lahir agenda perubahan yang menggandeng buruh. Bahkan persaingan tajam antar kekuatan reformis setelah tahun 1999, menunjukkan tidak padunya kekuatan pendukung perubahan. Ini semua sekali lagi membuktikan keberhasilan Soeharto dalam melakukan depolitisasi dan disorganisasi.

Kelima, lingkungan bisnis yang dicirikan oleh pergerakan modal yang semakin mudah. Mengikuti Winters (1999:282-283), modal semakin cair dan *mobile* mencari tempat yang lebih kondusif bagi pertumbuhan. Buruh dan serikat buruh berada pada posisi paling lemah berhadapan dengan modal yang memiliki kemampuan bergerak lintas negara. Kekokohan serikat buruh, kepemimpinan yang baik dan persatuan internal merupakan tanda bagi serikat buruh yang kuat. Tetapi dalam ekonomi global, kekuatan gerakan buruh akan membawa bencana sendiri karena para kapitalis diam-diam menyiapkan relokasi bahkan ketika perundingan

sedang dilakukan. Dalam hal ini pelajaran berharga bagi gerakan buruh yang kuat adalah persiapan untuk menjadi pengangguran. Dalam sebuah diskusi dengan para aktivis buruh di Jakarta April 2007, mereka menyatakan bahwa lingkungan politik pasca Soeharto memberi kesempatan yang terbuka bagi gerakan buruh, tetapi dalam situasi krisis dan tingginya pengangguran, bisa mempertahankan pekerjaan saja sudah bagus¹¹⁵.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah pengangguran yang cukup tinggi. Data yang dikeluarkan BAPPENAS menunjukkan bahwa jumlah penganggur terbuka terus meningkat. Jika pada tahun 2003 terdapat 10,13 juta, maka pada tahun 2005 menjadi 10,83 juta dan 11,19 juta pada tahun 2007. Meskipun persentase penganggur didominasi pendidikan rendah (SD dan SMP), tetapi daya serap tenaga kerja juga paling tinggi untuk kategori pendidikan ini. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal yang lebih diminati oleh pencari kerja berpendidikan SLA dan perguruan tinggi mengalami penurunan. Sektor formal selama 2001-2007 mengalami penurunan yang serius disertai perbedaan upah dengan sektor informal yang cukup tinggi. Usaha untuk mengurangi pengangguran antara lain dilakukan melalui peningkatan investasi, pengiriman TKI ke luar negeri dan mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja melalui kebijakan perkreditan¹¹⁶. Sedangkan identifikasi Bappenas terhadap hambatan dalam penciptaan lapangan kerja menemukan 8 masalah, yaitu biaya tinggi dalam melakukan kegiatan ekonomi (termasuk biaya tenaga kerja), biaya tinggi

¹¹⁵ Pernyataan Suparto dan Rina Sihombing tokoh buruh Bekasi dalam Diskusi bertema "Kembalinya Gerakan Buruh Politik" di YTKI Jakarta diselenggarakan oleh Trade Union Right Center (TURC) 4 April 2008.

¹¹⁶ www.depnakertrans.go.id diunduh tanggal 5 September 2007.

pendirian usaha, biaya tinggi perdagangan ekspor/impor, administrasi perpajakan, lambatnya reformasi dalam bidang hukum, *property right*, sarana dan prasarana serta regulasi di tingkat daerah.

Lemahnya gerakan buruh berhubungan dengan lingkungan ekonomi politik dan sumberdaya gerakan. Pasca Soeharto, tumbuhnya partai-partai buruh juga tidak mendapat dukungan buruh secara berarti. Dari 4 partai buruh peserta Pemilu 1999, tidak satupun yang mendapat kursi di DPR, bahkan Partai Buruh Nasional yang paling besar hanya mendapat 0,08 persen suara. Untuk tahun 2004, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) hanya mendapat suara 0,27 persen, jauh di bawah ambang batas (*electoral threshold*). Partai buruh belum merupakan pilihan para buruh, selain kurangnya sosialisasi, kader yang kurang dikenal, ketakutan para buruh akan kekerasan dari militer dan preman serta tuduhan bahwa partai buruh akan mengembalikan komunisme¹¹⁷.

¹¹⁷ Hasil evaluasi PBSD atas kegagalan dalam Pemilu 2004 sebagaimana disampaikan oleh Muchtar Pakpahan dalam diskusi “Kembalinya Gerakan Buruh Politik” di YTKI Jakarta diselenggarakan oleh Trade Union Right Center (TURC) 4 April 2008.

BAB IX

PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian pada bab-bab terdahulu menunjukkan fragmentasi gerakan buruh dan kelemahan-kelemahannya di Indonesia dengan memperhatikan konteks sosial ekonomi dan politik. Dari uraian panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa fragmentasi gerakan buruh tidak mengikuti jenis-jenis industri yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini terjadi karena industrialisasi tidak disertai pendalaman, sehingga juga tidak terbangun struktur industri. Sekitar 80 persen buruh bekerja di industri ringan yang hanya memerlukan ketrampilan rendah. Industri tekstil, produk tekstil, makanan, minuman dan makanan, produk kayu, kulit dan produk kertas adalah industri yang tidak memerlukan ketrampilan tinggi. Pendidikan para buruh yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, tidak relevan dengan pekerjaan yang mereka geluti sehari-hari. Akibatnya, tidak ada perbedaan dalam hal upah dan fasilitas kerja antara buruh tamatan SD, SMP dan SLA. Tidak tersedianya tangga industri ini mendorong perjuangan buruh hanya terbatas kenaikan upah dan jaminan sosial. Perkembangan teknologi, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, tidak menjadi isu utama gerakan buruh.

Dengan lingkungan seperti itu, fragmentasi gerakan buruh mengambil bentuk sosial politik, seperti ideologis-politis dan agama. Selain gerakan politik telah menjadi watak gerakan buruh Indonesia yang disemaikan pada Jaman Pergerakan, menguatnya kembali gerakan buruh politik ini juga disebabkan oleh pola kepartaian yang berkembang pasca Orde Baru. Baik oleh tarikan dari partai-partai politik maupun motivasi pimpinan gerakan untuk memobilisasi anggotanya bagi kepentingan politik, (mengubah gerakan

buruh menjadi partai politik, menjadi calon anggota legislatif, menawarkan dukungan kepada calon kepala daerah, calon presiden, calon anggota DPR dan calon anggota DPD dalam pemilihan umum), menjanjikan peningkatan kesejahteraan buruh. Sedangkan kesejahteraan sebatas dipahami sebagai peningkatan upah minimum provinsi. Dengan mengedepankan isu elementer ini, gerakan buruh pasca Orde Baru tidak berkembang ke arah gerakan buruh yang *genuine* dan *militant* yang sungguh-sungguh meningkatkan kesejahteraan dan ketrampilan buruh.

Kuatnya gerakan politik ini tidak dapat dipisahkan dari warisan sejarah, kepentingan para pimpinan gerakan, ideologi atau identitas kolektif yang diusungnya, perkembangan kapitalisme, peranan negara menurut konstitusi, dibidani oleh LSM, kepemimpinan yang didominasi non buruh dan prestasi gerakan buruh dalam menekan pemerintah. Dengan terus mengedepankan tuntutan kesejahteraan buruh dan mengembangkan pendekatan menekan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang menguntungkan buruh, gerakan-gerakan buruh di Indonesia lebih tepat disebut gerakan buruh dualitas. Dengan peran seperti ini, gerakan buruh memelihara pertentangannya dengan kekuasaan dan pemilik modal. Pasca Orde Baru, gerakan buruh kembali diperhitungkan pemerintah dan pemodal. Hampir semua kebijakan perburuhan memperhitungkan reaksi buruh. Kondisi ini berbeda dengan masa Orde Baru. Inilah makna gerakan sosial buruh sebagaimana dipahami oleh para aktivis buruh pasca Orba.

Meskipun demikian, gerakan buruh ini masih lemah dan belum mampu melindungi anggotanya secara optimal terlebih-lebih berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kondisi internal gerakan dan lingkungan ekonomi politik mempengaruhi kelemahan tersebut, seperti lemahnya sumberdaya gerakan,

kepemimpinan yang didominasi non buruh, stigma komunis, kekerasan oleh militer dan paramiliter, lemahnya aliansi dengan kelas menengah dan antar gerakan sosial, globalisasi ekonomi yang disertai dengan mobilitas modal, industrialisasi tanpa pendalaman, terjadinya *oversupply* tenaga kerja, watak rejim yang tidak memerlukan partisipasi buruh dan kebijakan ketenagakerjaan khususnya *outsourcing*, kerja kontrak dan PHK.

Dengan argumen tersebut maka disertasi ini menunjukkan beberapa temuan penting. *Pertama*, gerakan buruh memperlihatkan tantangan-tantangan kolektif dengan kekuasaan dan pemodal sepanjang masa. Meskipun pimpinan gerakan memiliki ambisi pribadi, selubung ideologis yang disemaikannya mampu menjadi pengikat bersama baik itu sosialis, sosialis demokrat, Pancasila, leninis maupun agama. Dengan membangun identitas kolektif seperti itu, interaksi secara terus menerus dengan kekuatan dominan, kekuasaan dan pemodal dapat dipelihara. Pimpinan gerakan memegang peranan penting dalam membangkitkan individu-individu yang anonim, menyatukan ke dalam identitas yang sama serta meyakinkan bahwa perjuangan kolektif akan memberi dampak positif bagi masa depan mereka. Pemimpin mengubah energi potensial menjadi energi gerak yang nyata dengan cara menghimpun orang-orang yang memiliki pemikiran dan cita-cita yang sama. Mereka yang bergabung dan rela berkorban diberi insentif selektif, seperti bantuan jika terkena PHK, jaminan keamanan kerja, pelatihan dan karir dalam gerakan.

Kedua, gerakan buruh bukan sebatas reaksi atas ketidakpuasan, protes dan pemogokan. Meskipun tindakan seperti itu yang paling menonjol sepanjang sejarah, tidak kalah penting di sini adalah pemikiran dan tindakan kolektif di luar arus dominan yang ditunjukkan oleh FNPBI bahwa gerakan buruh harus menjadi gerakan revolusioner

seperti yang pernah digagas oleh Lenin. Bergabungnya sejumlah intelektual dimaksudkan untuk memelihara watak revolusioner gerakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa identitas kolektif, struktur peluang politik, pimpinan gerakan, ketidakpuasan kolektif dan dukungan terhadap ideologi merupakan syarat kelahiran dan berkembangnya gerakan buruh.

Ketiga, organisasi gerakan memiliki peranan penting. Melalui organisasi gerakan, interaksi yang penuh pertentangan berkelanjutan terus dipelihara. Organisasi gerakan juga bukan terbatas pada organisasi formal, tetapi jaringan antar organisasi di mana gerakan buruh terbentuk dari berbagai jaringan gerakan dan membentuk jaringan lain seperti Komite Anti Penindasan Buruh, Afiliasi Kongres Buruh Indonesia dan Aliansi Buruh Menggugat. Melalui organisasi aksi kolektif lawan didefinisikan secara tegas dan para buruh akar rumput dapat dimobilisasi. Dengan demikian, makna organisasi gerakan sangat signifikan dalam mencapai tujuan gerakan dan memberi insentif selektif.

Keempat, fragmentasi di satu sisi memperlemah gerakan buruh secara menyeluruh. Tetapi juga menyediakan insentif selektif, seperti kenaikan posisi tawar para aktivisnya berhadapan dengan pemerintah, partai-partai politik dan para politisi yang akan memperebutkan jabatan publik. Dengan fragmentasi, penerima manfaat lebih banyak para pimpinan gerakan dan para aktivisnya.

Kelima, kelemahan gerakan buruh bukan hanya persoalan internal gerakan, seperti kaburnya identitas kolektif, kurangnya partisipasi buruh, lemahnya sumberdaya dan kepemimpinan, tetapi yang tidak kalah penting adalah lingkungan sosial ekonomi politik. Adanya struktur peluang politik belum memungkinkan tumbuhnya gerakan buruh

yang kuat. Demikian pula genuinitas dan militansi gerakan. Penolakan kelas menengah untuk membangun aliansi dengan gerakan buruh juga merupakan faktor kunci lemahnya gerakan buruh.

B. Implikasi Teoritik

Pionir teori gerakan buruh adalah Karl Marx. Menurut Marx, dalam masyarakat industri terdapat dua kelas yaitu pemilik alat produksi dan mereka yang tidak memiliki alat produksi. Oleh eksploitasi pemilik alat produksi, kelas buruh akan melakukan perlawanan setelah terbentuk kesadaran kelas. Kelas menengah yang jumlahnya kecil dan kaum intelektual akan berpihak kepada kaum proletar, sehingga menyuntikkan sumberdaya radikal. Revolusi yang dipimpin oleh kaum proletar tidak dapat dielakkan lagi dan redistribusi alat-alat produksi dan kekuasaan akan berlangsung.

Teori konflik kelas Marx disusun kembali oleh Dahrendorf (1986) dengan memperhatikan perkembangan kapitalisme abad XX. Terdapat tiga perubahan penting dalam kapitalisme abad XX ini yaitu berlangsungnya dekomposisi modal, dekomposisi buruh dan timbulnya kelas menengah baru. Menurut Dahrendorf, yang tidak dilihat oleh Marx adalah pemisahan antara pemilikan dan pengendalian sarana produksi. Para pemilik alat produksi dalam rangka akumulasi kapital membayar para eksekutif perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Jadi muncul pemisahan antara pemilik alat produksi dengan manajemen perusahaan. Sedangkan di kalangan buruh juga berlangsung dekomposisi dengan lahirnya pekerja trampil, semi trampil dan kurang trampil. Komposisi buruh abad XX berbeda dengan buruh abad XVIII yang lebih homogen. Selain tidak memiliki

kepentingan yang sama, komposisi buruh abad XX juga membangun gerakan yang didasarkan kepada jenis industri dan skill yang semakin mempertegas perbedaan.

Berlangsungnya dekomposisi modal dan dekomposisi buruh tersebut menyebabkan terjadinya pembengkakan kelas menengah, sebuah kekuatan dalam masyarakat kapitalis yang tidak diduga oleh Marx. Demikian pula dengan lahirnya serikat-serikat buruh yang didasarkan pada jenis-jenis industri. Oleh karena tuntutan ketrampilan dan perkembangan teknologi antar sektor berbeda, maka isu-isu antar sektor juga berbeda. Serikat buruh mempunyai fungsi sebagai mobilitas sosial para buruh. Di negara industri, gerakan buruh dipimpin oleh tokoh-tokoh buruh dari industri berat yang padat teknologi. Industri kimia, elektronika, mesin, perkapalan dan rekayasa berat, mempunyai peranan besar dalam perekonomian nasional negara industri. Oleh sebab itu mengabaikan tuntutan para buruh, berarti mengancam perekonomian nasional.

Pusat perhatian Dahrendorf adalah struktur otoritas pada perusahaan industri bukan pemilikan alat produksi seperti Marx. Struktur otoritas selalu ada dalam setiap asosiasi yang dikoordinasi secara memaksa (*imperatively coordinated associations/ICAs*), seperti dalam organisasi sosial. Baik organisasi birokrasi perusahaan, serikat buruh maupun organisasi lain mengandung struktur otoritas antara mereka yang memerintah dan diperintah, antara yang mempertahankan otoritas dan yang berusaha merebut atau meningkatkan otoritas. Organisasi semacam itu juga menyediakan tangga mobilitas sosial anggotanya. Konflik yang berlangsung bukanlah untuk memperebutkan pemilikan alat produksi, tetapi untuk memperebutkan otoritas yang mengontrol struktur otoritas. Inilah alasan teoritik utama mengapa revolusi proletar tidak berlangsung di

masyarakat kapitalis. Pertentangan kelas yang oleh Marx digambarkan semakin menajam, kenyataannya justru sebaliknya berkat berlangsungnya institusionalisasi.

Proses pelembagaan konflik antara buruh dan manajemen dimungkinkan dalam kondisi serikat buruh yang kuat, industrialisasi yang terstruktur di mana perkembangan teknologi, produksi dan ketrampilan memimpin perubahan sosial serta rendahnya pengangguran. Sebaliknya di negara-negara di mana tidak berlangsung pendalaman industri dan tingginya angka pengangguran, serikat buruh lemah. Pelembagaan konflik industrial seperti yang dijelaskan oleh Dahrendorf tidak terjadi. Sebaliknya konflik terus berlangsung yang hanya berhubungan dengan isu-isu primer seperti upah, jaminan kerja dan PHK. Gerakan buruh yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tidak mampu melakukan aktivitas secara nyata karena terus dihadapkan kepada dilema mempertahankan pekerjaan bagi anggotanya. Berlangsungnya perluasan industri yang didominasi oleh industri ringan di tengah tenaga kerja yang *over supply*, mempermudah para pengusaha mencari pengganti tenaga kerja. Sebab dalam industri ringan tidak memerlukan ketrampilan tinggi. Pengalaman kerja bukan investasi berharga bagi perusahaan. Justru dengan kebijakan upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah, buruh senior akan memberatkan pengusaha sebab upahnya tidak sebanding dengan produktivitasnya.

Kondisi seperti ini mendorong pengusaha memilih sistem *outsourcing* atau buruh kontrak, sebab lebih rendah biaya tenaganya (*labor cost*). Apalagi industri ringan yang digeluti para pengusaha juga bukan jenis industri yang mengakar (*footloose*). Jenis industri seperti ini tidak memiliki ketergantungan bahan baku di mana ia berada. Satu-satunya yang menarik bagi jenis industri ini adalah melimpahnya tenaga kerja sehingga

bersedia dibayar murah. Oleh sebab itu jika berlangsung gejolak ketenagakerjaan, para pengusaha dengan mudah melakukan relokasi ke negara yang ramah terhadap akumulasi kapital.

Struktur industri semacam ini turut membentuk gerakan buruh di Indonesia. Oleh sebab itu para perintis gerakan buruh yang berangkat dari ketidakpuasan terhadap sistem perburuhan yang dikembangkan pemerintah Orde Baru dan menggagas serta memperjuangkan sistem perburuhan yang lebih berpihak kepada buruh seperti SBSI, pada akhirnya dihadapkan kepada persoalan klasik, yaitu mempertahankan pekerjaan bagi anggotanya. Dalam usaha mempertahankan pekerjaan dan mendapatkan upah yang lebih baik, serikat buruh tidak mampu membebaskan diri dari persoalan politik. Baik meminta perlindungan negara, bekerjasama dengan partai politik maupun ingin mengubah diri menjadi partai politik, gerakan buruh senantiasa menempuh jalur politik untuk melindungi dirinya dan dalam usaha mencapai tujuannya. Kondisi seperti ini berbeda dengan teori-teori gerakan buruh yang lahir di Eropa Barat yang mengejar tujuan politik dan teori gerakan buruh yang lahir di Amerika Serikat yang mengejar tujuan ekonomi.

Memperhatikan temuan di atas, konsep gerakan sosial Tarrow (1996) yang kurang memperhatikan peranan pimpinan gerakan, perlu disempurnakan menjadi tantangan-tantangan kolektif (*collective challenges*) oleh orang-orang dengan tujuan bersama dan solidaritas yang digerakkan oleh pimpinan baik dilakukan karena ketidakpuasan kolektif maupun usaha untuk memperjuangkan suatu jenis perubahan tertentu yang berinteraksi secara terus menerus dengan lawan dan penguasa.

Dengan konsep tersebut gerakan buruh mulai kelahirannya, perpecahan dan penggabungannya dapat dijelaskan. Dalam studi ini kondisi tersebut disebut fragmentasi di mana perpecahannya tidak memiliki pola yang jelas, tetapi *fragmented* yang berarti terpecah-pecah tanpa pola yang jelas apalagi teratur. Untuk memahami gejala seperti ini akan bermanfaat merujuk pada teori dekomposisi buruh (*decomposition of labor*) dari Ralf Dahrendorf (1986), gerakan buruh dualisme dari Levine (1963) dan gerakan buruh dualistik dari Singer (1970).

Berlangsungnya fragmentasi gerakan buruh di negara industri dijelaskan oleh Dahrendorf (1986:60-61) mengikuti klasifikasi industri dan lapangan kerja. Hubungan struktur industri dengan gerakan buruh adalah pengorganisasian buruh berdasarkan lapangan kerja (*industrial union*). Gerakan buruh yang didasarkan kepada lapangan kerja lebih kuat dan lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan. Isu-isu pekerjaan seperti perubahan teknologi, keamanan kerja, fasilitas kerja, peningkatan dan pengurangan produksi barang, akan berpengaruh terhadap upah, kesejahteraan dan karir buruh. Studi Hyun-Seong Yu (1993) di Korea Selatan juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Setelah terjadi perubahan kebijakan dari industri substitusi impor (ISI) ke industri orientasi ekspor (IOE), FKTI yang dibentuk pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya serikat buruh di Korea. Sejalan dengan perubahan struktur industri, peranan industri berat dan rekayasa berat sangat besar dalam perekonomian. Industri yang padat teknologi menyerap lebih banyak tenaga kerja terdidik, sehingga isu-isu perkembangan teknologi sangat dominan. Struktur industri diikuti oleh struktur gerakan buruh yang kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat besar, sehingga menghancurkan gerakan buruh berarti menghancurkan perekonomian nasional.

Sebaliknya di negara yang terlambat melakukan industrialisasi, berlangsung perluasan industri guna membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus meningkat. Terdapatnya struktur peluang politik dan kepemimpinan, melahirkan gerakan-gerakan buruh guna memobilisasi buruh yang terus meningkat. Gerakan buruh yang kemudian dibangun bukan mengikuti jenis-jenis industri tetapi aliran pemikiran (ideologi) dan agama. Warisan sejarah, sistem kepartaian, keberhasilan gerakan politik dan motivasi politik para pimpinan gerakan turut memperkuat gerakan buruh politik. Melalui studi ini ditunjukkan bahwa fragmentasi gerakan buruh di Indonesia mengikuti garis ideologi/politik dan agama dari pada struktur industri. Oleh sebab itu menggunakan cara pandang Eropa (di mana gerakan buruh mengejar tujuan politik) dan menggunakan cara pandang Amerika Serikat (di mana gerakan buruh mengejar tujuan ekonomi), tidak sepenuhnya benar.

Gerakan buruh di Indonesia mengejar tujuan ekonomi dan politik sekaligus. Tetapi berbeda dengan teori Salomon B. Levine (1963) maupun H.W. Singer (1970). Melalui studinya di Jepang, Levine mengembangkan teori gerakan buruh dualisme. Gerakan buruh dualisme membagi gerakan dalam dua lapis, yaitu gerakan di pusat dan di daerah. Di Pusat yang merupakan federasi dan konfederasi dari berbagai serikat buruh lapangan pekerjaan (*industrial union*) aktif melancarkan tuntutan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam hubungan industrial. Sebaliknya gerakan di tingkat daerah yang lebih dekat dengan perusahaan, bertindak lebih pragmatis dengan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui negosiasi dengan manajemen perusahaan. Upah buruh, tunjangan dan fasilitas kerja antar perusahaan berbeda-beda tergantung kepada kekuatan serikat buruh dan kemajuan perusahaan. Di Indonesia pasca

Orde Baru ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sangat luas di mana Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menetapkan standar peburuhan. Tetapi gerakan buruh baik *enterprise union* maupun *general union*, baik di Pusat maupun di Daerah mengejar tujuannya yang sering kali berbeda-beda.

Di sisi lain studi H.W. Singer (1970) di negara-negara yang menganut ekonomi dualistik, gerakan buruh di sektor industri modern cenderung menekankan fungsi tawar menawar kolektif sedangkan gerakan buruh di sektor perekonomian tradisional seperti buruh tani, buruh di perusahaan kecil, mempergunakan saluran politik dalam mengejar tujuannya. Pada negara yang berlangsung perekonomian dualistik, gerakan buruh merupakan konsekuensi dari sistem perekonomian. Di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh J. H. Booke (1956), Mubyarto (1989), juga dicirikan dengan perekonomian dualistik. Tetapi gerakan buruh di Indonesia sarat dengan aksi-aksi politik untuk mengejar tujuan ekonomi dan tujuan politik. Aksi-aksi ini berlangsung baik di Pusat maupun di daerah. Gerakan buruh aktif menjalin hubungan dengan partai politik, sebaliknya partai politik juga menjadikan gerakan buruh sebagai *onderbouw*. Tekanan kepada pemerintah pusat maupun daerah juga dilancarkan oleh gerakan buruh meskipun isinya masih terbatas pada upah dan jaminan kerja. Gerakan demikian bukanlah gerakan dualisme maupun dualistik, melainkan gerakan dualitas.

Konsep dualitas mengikuti Antony Giddens (2003) dalam menyelesaikan ketegangan antara struktur dan agensi. Gerakan buruh di Indonesia sejak kelahirannya memiliki wajah ganda, di mana tujuan ekonomi dan politik dicapai secara bersama-sama. Langkah ini diambil oleh gerakan yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Diwarisi dari semangat nasionalisme mengusir kolonialisme, gerakan buruh dari awal memiliki tujuan

politik, yaitu menjadikan rakyat Indonesia khususnya buruh sebagai pelaku aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Jika buruh berada di luar pemerintahan melakukan tekanan kepada Pemerintah agar mengambil keputusan yang tidak merugikan buruh. Semua langkah itu diambil untuk melindungi buruh dari pengusaha maupun pemerintah. Dengan penjelasan tersebut, studi ini menunjukkan bahwa gerakan buruh di Indonesia bukan gerakan dualisme dari Levine (1963) dan gerakan dualistik model Singer (1970), tetapi gerakan dualitas.

Fragmentasi kekuatan sosial di Indonesia bukan hanya berlangsung dalam gerakan buruh. Partai-partai politik dan gerakan sosial lain juga mengalami hal yang sama. Konsensus seakan sulit dibangun dalam masyarakat Indonesia di mana ideologi, identitas kolektif, kultur solidaritas, keyakinan kolektif dan mobilisasi konsensus kurang berperan sebagai pengikat yang kuat. Lazimnya keyakinan kolektif membimbing gerakan dan mempersatukan orang-orang dalam gerakan. Adanya tujuan untuk membangun masa depan masyarakat yang lebih bermakna, mencegah para aktivis meninggalkan gerakan. Keyakinan kolektif semacam ini juga memberikan insentif selektif bagi para aktivis, yaitu meningkatnya posisi sosial yang bersangkutan di masyarakat berkat kemampuannya melakukan penambahan sumberdaya yang terus menerus. Gerakan menjadi semakin kuat dan kedudukannya semakin strategis, sehingga menghantarkan para aktivisnya ke tangga sosial yang lebih tinggi mungkin sebagai elit strategis.

Kesulitan membangun ideologi gerakan juga dipengaruhi oleh kemajemukan kultural. Selalu muncul kecenderungan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mengedepankan identitas primer, baik itu agama, suku (etnik), ikatan daerah maupun bahasa. Masyarakat metropolis seperti Chicago dan Paris juga tidak mampu

mengubur identitas primer dan menggantinya dengan identitas sekunder sebagai bangsa. Kenyataan ini seakan membantah teori modernisasi bahwa dalam proses deferensiasi ikatan-ikatan lama akan ditinggalkan digantikan dengan ikatan baru yang didasarkan kepada lapangan pekerjaan atau bidang-bidang pekerjaan. Tetap kuatnya identitas primer sebagai ikatan sosial dalam gerakan buruh, tidak pernah dipikirkan oleh Marx.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Athreya, Bama. 1998. "Economic Development and Political Change in a Workers' Community in Jakarta, Indonesia". Unpublished Ph.D Disertation University of Michigan.
- Batubara, Cosmas. 2002. *Hubungan Industrial di Indonesia Aspek Politik dari Perubahan Aturan di Tempat Kerja Dekade 1990-an dan Awal 2000-an*. Disertasi Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Berger, Peter L. 1990. *Revolusi Kapitalis*. Jakarta: LP3ES.
- Block, Fred. 1977. "The Ruling Class Does Not Rule", *Socialist Revolution*, Vol. 7 No. 3
- Blumer, Herbert. 1969. *Social Movement*. New York: The Free Press.
- Boeke, J.H. 1963. *Economics and Economic Policy in Dual Society: As Exemplified by Indonesia*. New York: Institute of Pasific Relations.
- , 1984. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bourchier, David. 1994. "Solidarity: The New Order's First Free Trade Union" in *Indonesia's Emerging Proletariat: Workers and Their Struggles*, Edited by David Bourchier. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- BPS. 1999. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Mawana Patamaro.
- BPS. 1999. *Keadaan Pekerja/Karyawan di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Mawana Patamaro.
- BPS. 2000. *Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran di Indonesia 1997-1999*. Jakarta: CV Dua Putra Sarko.
- BPS. 2003. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: CV Rioma.
- BPS. 2003. *Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia*. Jakarta: CV Rioma.
- BPS. 2003. *Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran di Indonesia 2000-2002*. Jakarta: CV Rioma.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: Grafiti.
- Burke, Peter. 2000. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Campbell, E.W. 2004. *Meretas Jalan Pembebasan, Lahirnya Gerakan Buruh Dunia Abad XIX*, Malang: Kijaru.
- Capizzi, Elaine. 1974. "Trade Union Under the New Order", *Repression and Exploitation in Indonesia*. The British Indonesia Commitee Books.
- Caraway, Teri. 2002. *Engendering Industrialization: The Feminization of Factory Labor in Indonesia*". Unpublished Ph.D Thesis, Nortwestern University.
- Cavalaro, Dani. 2004. *Critical and Cultural Theory (Teori Kritis dan Teori Budaya)*. Yogyakarta: Niagara.
- Chalid, Pheni. 1997. *Industrialization and the Labor Movement A Study of Labor Unrest in the Export Processing Zone of Jakarta*. Disertasi Doktor Fakultas Sosiologi Universitas Bielefield.
- Cohen, Jean L. 1985. "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements" *Social Research* , 52: 663-716.

- Collier, Ruth B. dan David Collier. 1991. *Shaping the Political Arena*. Princeton: Princeton University Press.
- Compton, Boyd R. 1993. *Kemelut Demokrasi Liberal*. Jakarta: LP3ES.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Creswell, John. W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: SAGE Publication.
- Creutzberg, Pieter. 1987. "Hasil Bumi Hindia Belanda untuk Ekspor" dalam Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (Peny.) *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Crouch, Harold. 1983. *Modernisasi dan Perkembangan Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- , 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Depihar SOKSI. 1965. *SOKSI Manunggal dengan Doktrin Tri Ubaya Cakti*. Jakarta: Depihar SOKSI.
- Deyo, Frederick. 1986. "Industrialization and the Structure of Asian Labor Movement: The Gang of Four," in Michael Hanagen and Charles Stephenson (Editors). *Confrontation, Class Consciousness and the Labor Process: Studies in Proletarian Class Formation*. New York: Greenwood Press.
- , 1988. "State and Labor: Mode of Political Exclusion in East Asian Development", dalam Frederic C. Deyo (ed.), *The Political Economy of the New Asian Industrialism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Dick, H.W. 2000. "Industrialisasi Abad ke-19 Sebuah Kesempatan yang Hilang" dalam Thomas J. Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Djilas, Milovan. 1964. *Kelas Baru*. Jakarta: Pustaka
- Duverger, Maurice. 1959. *Political Parties: Their Organization and Activity in Modern State*. London: Methuen and Co.
- , 1983. *Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 1988. "Asal Mula Partai Politik" dalam Ichlasul Amal (ed.). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Jogjakarta: Tiara Wacana
- Eisenstadt, SN. 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Evers, Hans-Dieter dan Tilman Schiel. 1990. *Kelompok-Kelompok Strategis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fantasia, Rick. 1988. *Cultural of Solidarity, Consciousness, Action and Contemporary American Workers*. Berkeley: University of California Press.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- dan Lance Castles (ed). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- 1999a. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- 1999b. *Demokrasi Terpimpin: Soekarno, TNI-AD dan PKI*. Jakarta: Grafiti.
- Ford, Michele T. 2003. "NGO As Outside Intellectual, A History of Non-Governmental Organisations' Role in The Indonesian Labour Movement". Ph.D Dissertation School of History and Politics University of Wollongong.

- Gamson, William A. 1992. *Talking Politics*. Cambridge: University of Cambridge Press.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara.
- . 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. Jakarta: UI Press
- . 1993. *New Rules of Sociological Methode*. Cambridge: Polity Press.
- . 2003. *Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Golden, Mariam. 1988. *Labor Divided: Austerity and Working-Class Politics in Contemporary Italy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection From the Prison Notebooks*. Ed. Q. Hoare dan G. Nowell-Smith. London: Lawrence & Wishart.
- Gurr, Ted Robert. 1971. *Why Men Rebel?* Princeton, N.J: Princeton University Press.
- Hadiz, Vedi R. 1997. *Workers and the State in New Order Indonesia*. London: Routledge.
- . 2000. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- . 2004. "Hubungan Negara-Buruh yang Berubah di Indonesia dan Malaysia serta Krisis 1997" dalam Ariel Haryanto dan Sumit K. Mandal (ed.). *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harvey, Barbara Silars. 1983. *PRRI/Permesta, Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti.
- Hill, Hal. 1990a. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hindley, Donald. 1966. *The Communist Party of Indonesia 1951 – 1963*. Berkeley and Los Angeles: Cornell University Press.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1992. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Ingleson, John. 1983. *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927 – 1934*. Jakarta: LP3ES.
- , 2004. *Tangan dan Kaki Terikat Dinamika Buruh, Sarekat Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- IN, Subagijo. 1980. *Jusuf Wibisono Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jackson, Karl. D. 1978. "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communications in Indonesia" dalam Jackson and Lucian W Pye (Ed.), *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- . 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Grafiti.
- Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Kammen, Douglas. 1998. "A Time to Strike: Industrial Strikes and Changing Class Relation in New Order Indonesia". Unpublished PhD Thesis Cornell University.
- Kartodirdjo, Sartono. 1989. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Klandermans, Bert. 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kunio, Yoshihara. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo, 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- , 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- Kusyuniyati, Sri. 1998. "Strike in 1990-1996: An Evaluation of the Dynamics of the Indonesian Labour Movement". Unpublished Ph.D Thesis Swinburne University of Technology.
- La Botz, Dan. 2001. *Made In Indonesia: Indonesian Workers Since the Fall of Suharto*. Cambridge, Massachusetts: South End Press.
- Le Bon, Gustav. 1960. *The Crowd: A Study of Popular Mind*. New York: The Viking Press.
- Lenner, Daniel. 1983. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lev, Daniel S. 1966. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- Levine, Solomon B. 1963. "Japanese Trade Unionism As a Model in Economic Development", dalam E.M. Kassalow, *National Labor Movement in the Postwar World*. Northwestern University Press.
- Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik, Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta: Grafiti.
- Lindblad, Thomas J. 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Lindstrom, Lars. 1990. *The South Korean Labor Movement and Democratization*. Working Paper 18 Center for Pacific Asia Studies University of Stockholm.
- Lofland, John. 2003. *Protes, Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Macridis, Roy C. 1988. "Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-Partai" dalam Ichlasul Amal (ed.). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Magnis-Suseno, Frans. 2000. *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Maheu, Louis (ed.). 1995. *Social Movement and Social Classes The Future of Collective Action*. London: SAGE Publication.
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik*. Jakarta: LP3ES.
- , 1994. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mann, Michael. 1995. *Consciousness and Action Among the Western Working Class*. New York: MacMillan.
- Matsuda, N. 1980. *Stratification Analysis of Labor Migration Toward Urban Centers in Indonesia*. Unpublished Dissertation University of Maryland USA.
- McAdam, Doug. 1982. *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: University of Chicago Press.
- McVey, Ruth T. 1965. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*.

- Jakarta: Rajawali.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mintz, Jeanne S. 2002. *Muhammad, Marx, Marhaen Akar Sosialisme Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moertopo, Ali. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- , 1975. *Buruh dan Tani Dalam Pembangunan*. Jakarta: CSIS
- , 1981. *Modernisasi dan Akselerasi Pembangunan*. Jakarta: CSIS
- Mortimer, Rex. 1974. *Indonesian Communist Under Sukarno Ideology and Politics 1959 – 1965*. Ithaca: Cornell University Press.
- Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 -1980*. Jakarta: LP3ES
- Nasikun. 1986. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali,
- Nasution, A.H. 1967. *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*. Jakarta: Seruling Massa.
- , 1971. *Kekerjaan ABRI*. Jakarta: Seruling Massa
- Natsir, Muhammad. 1951a. *Islam Sebagai Ideologi*. Jakarta: Penyiaran Ilmu.
- , 1957. *Capita Selecta*. Jakarta: Pustaka Pendis.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- , 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: Mizan.
- Olson, Mancur. 1969. *The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pakpahan, Muchtar. 1997. *Lima Tahun Memimpin SBSI Pilihan atau Panggilan*. Jakarta: Forum Adil Sejahtera.
- , 2002. *Rakyat Menggugat I Sebuah Pledoi*. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Pengurus Besar Perti. 1956. *Pedoman Pergerakan dan Organisasi Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)*. Jakarta: Pengurus Besar Perti.
- Perlman, Selig, 1949. *A Theory of the Labor Movement*. New York
- , 1963. *Teori Gerakan Buruh*. Jakarta
- Pelzer, Karl J. 1991. *Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Poulanzas, Nicos. 1978. *State, Power and Socialism*. London: New Left Books.
- Rachbini, Didik J. 1995. *Resiko Pembangunan yang Dibimbing Utang*. Jakarta: Grasindo.
- , 2001. *Ekonomi Politik Utang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramadhan KH dan Sugiarta Sriwibawa (ed). 1999. *Pengabdian Agus Sudono*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Razif. 1998. *Sejarah Pemikiran Serikat Buruh Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Reeve, David. 1985. *Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party System*. Singapore: Oxford University Press.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Robison, Richard. 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen and Unwin.
- , 1998. "Pengembangan Industri dan Perkembangan Ekonomi Politik Modal: Kasus Indonesia" dalam Ruth Mc Vey (Ed), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rothman., Jack. 1974. *Planning and Organizing for Social Change*. New York:

- Colombia University Press.
- Rubery, Jill. 1987. "Pasar Kerja Terstruktur, Organisasi Pekerja dan Upah Rendah" dalam Anthony Giddens dan David Held. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Jakarta: Rajawali.
- Saidi, Zaim. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari: Tarik Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980*. Bandung: Mizan.
- Sandra. 1961. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakyat.
- Saptari, Ratna. 1995. *Rural Women to the Factories: Continuity and Change in East Java's Kretek Cigarette Industry*. Unpublished Ph.D Thesis, Universiteit van Amsterdam.
- Schwartz, Michael. 1976. *Radical Protest and Social Structure*. New York: Academy Press.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah, Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Semaoen. 2000. *Penuntun Kaum Buruh*. Yogyakarta: Jendela.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti.
- Skocpol, Theda. 1991. *Negara dan Revolusi Sosial Suatu Analisis Komparatif Tentang Perancis, Rusia dan Cina*. Jakarta: Erlangga.
- Smelser, Neil J. 1976. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Splillane, James. 2003. "Industri Ringan Kaki: Neoliberalisme dan Investasi Global", dalam I. Wibowo dan Francis Wahono. 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soewarsono, 2000. *Berbareng Bergerak, Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen*. Yogyakarta: LKiS
- Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1987-1979*. Yogyakarta: Karsa.
- Sudjana, Eggi. 2005. *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*. Jakarta: Renaisan.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945 - 1967 Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Staggenborg, Suzanne. 1988. "The Consequences of Professionalization and Formalization in The Pro-Choice Movement". *American Sociological Review* Vol. 53 Agustus.
- Sungsuk Yoon. 2001. "Exclusionary Labor Regimes in Brasil and South Korea: A Historical Analysis". *Korea Observer*, Vol. 32, No. 1
- Symth, Ines dan Mies Grijns. 1999. "Unjuk Rasa atau Protes Sadar? Strategi-Strategi Perlawanan Buruh Perempuan Indonesia". Dalam *Wacana* Vol. 1
- Touraine, Alain 1985. "An Introduction to the Study of New Social Movements" *Social Reseach* 52, No. 4: 749-787.
- Sweezy, Paul M. 1987. "Kapitalisme Modern" dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, Tulus. 2005. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarrow, Sydney. 1996. *Power in Movement, Social Movement, Collective Action and Mass Politics in the Modern State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tedjasukmana, Iskandar. 1959. *The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

- Thompson, E.P. 1963. *The Making of the English Working Class*. New York: Vintage.
- Tjoa Sek Ien. 1949. *Pergerakan Kaum Buruh*. Kementrian Penerangan RI.
- Trimurti, S.K. 1975. *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Touraine, Alain. 1978. *The Self-Production of Society*. London: Wildwoodhouse.
- Turner, Victor. 1969. *The Ritual Process*. London: The Free Press.
- Van der Kroef, Justus M. 1965. *The Communist Party of Indonesia*. Vancouver: University of British Colombia.
- Van Niel, Robert. 1988. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Ward, Kenneth E. 1970. *The Foundation of Partai Muslimin Indonesia*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- Warsito, Tulus. 2007. *Noşajeong Rahasia Kebangkitan dan Percepatan Demokrasi Korea*. Jogyakarta: Pilar Media.
- Wertheim, W.F. 1993. *Comparative Essays on Asia and the West*. Amsterdam: VU University Press.
- , 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*. Jogyakarta: Tiara Wacana.
- , 2000. *Gelombang Pasang Emansipasi*. Jakarta Garba Budaya.
- , 2008. *Jalan Sosialisme Dunia Ketiga*. Jakarta: ISAI, PDAT, de Wertheim Stichting.
- Wie, Thee Kian. 1994. *Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES
- Williams, Michael C. 2003. *Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Jogyakarta: Syarikat
- Williams, Raymond. 1983. *Keyword*. London: Fontana.
- Wolford, Wendi. 2005. "Memproduksi Komunitas: MST dan Pemukiman-Pemukiman Land Reform di Brasil". Dalam Noer Fauzi (Penyunting). *Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Resist Book.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yoga, K. 1990. *Maju Terus Pantang Mundur: Sejarah Kelahiran dan Perjuangan SOKSI*. Jakarta: DPN SOKSI.
- Yusuf, Verdy. 1991. *Pembentukan Angkatan Kerja Industri Garmen untuk Ekspor: Pengalaman dari Bandung Jawa Barat*, dalam Working Paper Series No. B -13.
- dan John D. McCarthy. 1987. *The Dynamics of Social Movements, Resource Mobilization, Social Control and Tactics*. Cambridge: Winthrop.

Jurnal

- Crouch, Harold. 1979. "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia", *World Politics*, Vol. 31.
- Cohen, Jean L. 1985. "Strategy of Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements". *Social Research*, 52: 663-716
- Ford, Michele T. 2002. "Manfaat Pendekatan Sejarah dalam Studi Hubungan

- Industrial dan Gerakan Buruh Kontemporer” dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 7 No. 1 Pebruari.
- Forsyth, Timothy. 2001. “Environmental Social Movements in Thailand: How Impotent is Class?” *Asian Journal of Social Science*, Vol. 29 No. 1: 35-51
- Hill, Hal. 1990b. “Indonesia’s Industrial Transformation”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, August.
- Hyun-Seong Yu. 1993. “Industrial Structure and Labor Movement: Comparative Study of South Korea and Taiwan”, *Korea Observer*, Vol. XXIV No. 2: 265-290.
- Jaya, Tamar. 1957. “In Memorium Haji Samanhudi (1869 – 1956)”, *Majalah Daulah Islamiyah* No. 1 Januari.
- Kantz, Mark N. 2002. “Osama bin Laden as Transnational Revolutionary Leader”, *Current History*, February.
- Kessler, Clive S. 1998. “State and Civil Society: Global Context, Southeast Asian Prospect”, *SOJOURN* Vol. 13 No. 1.
- Leclerc, Jacques. 1978. “An Ideological Problem of Indonesian Trade Unionism in the Sixties: “Karyawan” versus “Buruh”. *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 6, No. 1.
- Mas’oed, Mohtar, 1989. “Restrukturisasi Masyarakat oleh Pemerintah Orde Baru di Indonesia”. *Prisma* No. 7
- McCarthy, John D. dan Mayer Zald. 1976. “Resources Mobilization and Social Movement: A Partial Theory”. *American Journal of Sociology*, 82. p. 1212-1241.
- Melucci, Alberto. 1985. “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements” *Social Research* 52: 789 – 816.
- Natsir, Muhammad. 1951b. “Perjuangan Nasib Buruh”, *Mingguan Hikmah*, Nopember
- Njoto, “Kembangkan Kesatuan-Kesatuan Aksi yang Semakin Meluas”, *Bendera Buruh-Majalah SOBSI* No. 4 Tahun 3 Oktober 1952.
- Nugroho, Hari. 2003. “Masalah Upah dan Gelombang Pemogokan Buruh” dalam *Masyarakat Jurnal Sosiologi* No. 12,
- Robison, Richard. 1982. “Struktur Kapitalisme Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”, *Prisma* No. 1 Tahun XI.
- Rochadi, Sigit. 1996. “Kebijakan Pengupahan Buruh di Indonesia”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada* No. 1 Mei.
- , 2002. “Globalisasi dan Migrasi Kerja Internasional, Suatu Studi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* No. 7 Tahun II Agustus.
- Rochijat, Pipit. 1985. “Am I PKI or Non-PKI?” *Indonesia* No. 40 Ontober.
- Rudiono, Danu. 1992. “Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak” *Prisma*, no. 1
- Saleh, Bujung. 1952. “Menyambut Konstitusi Baru SOBSI” *Warta Sarbupri* No. 10 Desember.
- Sandra 1955. “Perkembangan Gerakan Buruh di Berbagai Lapangan Industri” dalam *Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan* No. 3, VII, Juli.
- Sari, Dita Indah. 1995. “Buruh Indonesia Selalu Terus Melawan” *Prisma* 27 No. 7
- Scipes, Kim. 1992. *Social Movement Unionism and the Kilusang Mayo Uno*. Third World Studies Center, University of Philippines, Vol. 7 No. 2-3: 121-162.
- Singer, H.W. 1970. “Dualism Revisited: A New Approach to The Problem of The Dual Society in Developing Counties”, dalam *Journal of Development Studies*,

- Young Rae Kim. 1992. "Korean Labor Movement and Political Participation" *Korea Observer*, Vol. XXIII No. 1: 1-19
- Zeitlin, Jonathan. 1987. "From Labour History to the History of Industrial Relation". *Economic History Review* 40.
- Zald, Mayer N. dan Roberta Ash Garner. 1966. "Social Movement Organizations: Growth, Decay and Change". *Journal of Social Force*, 44: 327-341.

Website/Internet

- DeFay, Jason Bradley. 2006. *The Sociology of Social Movements*, <http://www.socialsciences.ucsd.edu/~jdefay/sm.html>. download Tanggal 7 Mei 2006.
- Detik Online 2 Mei 2007
- Diani, Mario. 2000. "Networks and Social Movements: From Metaphor to Theory?" Paper yang disampaikan dalam Workshop, *Social Movement Analysis: The Network Perspective*. <http://www.nd.edu/dmyers/lomond/passy-pdf>. download tanggal 8 Agustus 2004.
- Gatra. Com 7 Agustus 2007
- Mamay, Sargay. 2005. "Theories of Social Movement and Their Current Development in Soviet Society" www.lucy.ukc.ac.uk download tanggal 6 Desember 2006.
- Oliver, Pamela. 2003. Network, Diffusion, and Cycles of Collective Action, Paper yang disampaikan dalam Workshop, *Social Movement Analysis: The Network Perspective*. <http://www.nd.edu/dmyers/lomond/passy-pdf>. download tanggal 8 Agustus 2004.
- Pichardo, Nelson. 1997. "New Social Movement: A Critical Review". *Annual Review Sociology* 1997, No. 23. P. 411-430. <http://www.annurev.org>. Download tanggal 18 Juni 2003.
- Rohiat, Pipit. 2001. "Tentang Pembunuhan Massal 1965" <http://arus.kerjabudaya.org.htm/1965>.
- Rough, Gerry. 2006. Introduction: The Rise of Modern Conspiracy Theory Movement. www.floodlight.org/democracy/rise.html. download 27 Pebruari 2002.

Majalah/ Surat Kabar

- Bendera Buruh*, No. 11 Tahun 1956
- Berita Masyumi*, 29 Juni 1951
- Berita Masyumi*, 3 Januari 1952
- Berita Masyumi*, 30 Mei 1952
- Berita Masyumi*, 24 Maret 1955
- Bintang Merah*, Mei 1953
- Bintang Merah*, Oktober 1959

Kompas, 12 April 2001
Kompas, 8 Agustus 2002
Kompas, 8 Pebruari 2003
Kompas, 24 Oktober 2005
Kompas, 17 Maret 2006
Kompas, 6 April 2006
Kompas, 9 April 2006
Kompas, 9 Mei 2006
Kompas, 15 Mei 2006
Kompas, 2 Mei 2008
Koran Perdjoengan, April 2007
Koran Tempo, 6 April 2006
Suara Masyumi, 10 Juli 1956
Tabloid Kontan, 2 Pebruari 2002
Tabloid Kontan, 2 September 2002
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, Mei 1955
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, Mei 1956
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, Desember 1956
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, Mei 1958
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, Juni 1960
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, Juni 1961
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, Maret 1962
Tinjauan Masalah-Masalah Perburuhan, September 1958
Sinar Harapan, 26 Januari 1982
Sinar Harapan, September 1982

Wawancara

Agus Sudono (Gasbiindo) September 2006 dan Oktober 2007
 Ali Ermas (SERPI) Nopember 2007
 Dita Indah Sari (FNPBI, PRD, Papernas) Juni 2007 Oktober 2007
 Djunaedi Ali (Sarbumusi) Oktober 2007, Nopember 2007
 Dominggus Oktavianus (FNPBI) Oktober 2007
 Eggi Sudjana (PPMI) Nopember 2007
 Gunawan (SBSI, SBSI 1992) Nopember 2007
 H.M. Rodja (FSPSI Reformasi) Mei 2007
 Hikayat Atika Karwa (KSPSI) Januari 2008
 Jumhur Hidayat (YKPI, Gaspermindo, PDR, BNP2TKI) Januari 2008
 M. Yahya (GOBSI) Oktober 2007
 Manganar Pasaribu (KBM) Oktober 2007
 Muchtar Pakpahan (SBSI, Partai Buruh Sosial Demokrat) Mei 2007
 Munir (KOSBI) Nopember 2007
 Nurhasanah Munaf (KOBAR, FNPBI, SBIP) Januari 2008
 Raswan (SBSI, SBSI 1992) Nopember 2007
 Razak Yahya (SBSI, Gaspemindo, Gasbumi) Nopember 2007
 Rekson Silaban (KSBSI) Mei 2007
 Said Iqbal (FSPMI) April 2008
 Siti Musdalifah (SBSI, SBSI 1992) Nopember 2007
 Suhardiman (SOKSI) Januari 2006